



**PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 10 TAHUN 2013**

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2013 - 2017**

**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2013**



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2013 - 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan daerah sesuai semangat desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- b. bahwa konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan sinergitas pembangunan antar daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan perlu dilakukan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2017:
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

dan

WALIKOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013 - 2017.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Instansi/ Badan/ Dinas/ Unit Kerja.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah SKPD yang menyelenggarakan tugas pokok di bidang perencanaan pembangunan daerah.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
8. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan untuk semua unsur masyarakat Kota Singkawang dalam rangka mencapai visi dan misi daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

## **BAB II RPJMD**

### Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
- (2) RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan keuangan daerah dan rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

### Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan:
  - a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD;
  - b. Pedoman bagi BAPPEDA dalam menyusun RKPDP;
  - c. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD; dan
  - d. Bahan evaluasi pencapaian kinerja RPJPD Tahun 2005– 2025.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) SKPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan melalui Renstra SKPD dan Renja SKPD.
- (2) SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda dalam menyusun Renstra SKPD dan Renja SKPD.

Pasal 5

Walikota wajib melaksanakan RPJMD dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan dalam Renstra SKPD.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
Pada tanggal 21 Nopember 2013

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

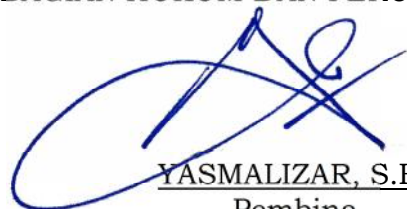
Diundangkan di Singkawang  
Pada tanggal 21 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SYECH BANDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

  
YASMALIZAR, S.H.

Pembina

Nip. 19681016 199803 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 10 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2013 - 2017

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang berdasarkan desentralisasi, Pemerintah menyerahkan sebagian wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Sedemikian besarnya wewenang dan tugas Pemerintah Daerah sehingga memerlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan, dengan demikian diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang efektif dan efisien.

Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah wajib adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program pembangunan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RPJMD Tahun 2013 - 2017 meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

3. Prinsip-prinsip

Prinsip RPJMD Tahun 2013 - 2017 meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

4. Pendekatan

RPJMD Tahun 2013 - 2017 menggunakan pendekatan:

- a. *Teknokratik*, yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- b. *Partisipatif*, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesetaraan antara pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki dokumen perencanaan serta terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan;

- c. *Politis*, yaitu program kebijakan umum yang ditawarkan masing-masing calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada saat kampanye disusun ke dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - d. *Bottom up – top down*, yaitu penyesuaian melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
5. Tahapan  
Tahapan penyusunan RPJMD Tahun 2013 - 2017 terdiri dari:
- a. persiapan penyusunan;
  - b. penyusunan rancangan awal dan rancangan yang akan disempurnakan;
  - c. pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
  - d. pelaksanaan Musrenbang;
  - e. penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Singkawang dengan DPRD Kota Singkawang;
  - f. perumusan rancangan akhir dan konsultasi kepada Gubernur Kalimantan Barat;
  - g. penetapan Peraturan Daerah dan klarifikasi Gubernur Kalimantan Barat.
6. Muatan  
Muatan RPJMD terdiri dari:
- a. visi, misi dan program daerah;
  - b. arah kebijakan keuangan daerah;
  - c. strategi pembangunan daerah;
  - d. kebijakan umum;
  - e. program SKPD;
  - f. program lintas SKPD;
  - g. program kewilayahan;
  - h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif;
  - i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas





LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH  
KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 10 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2013 - 2017

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2013 - 2017**



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	ix
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	I-2
1.2.1. Maksud.....	I-2
1.2.2. Tujuan .....	I-3
1.3. Landasan Hukum .....	I-4
1.4. Keterkaitan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	I-6
1.4.1. RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013 - 2017 dan RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005 - 2025 .....	I-6
1.4.2. RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013 - 2017 dan RTRW Kota Singkawang Tahun 2012 - 2032 .....	I-7
1.4.3. RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013 - 2017 dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2013 - 2017 .....	I-8
1.4.4. RPJMD Tahun 2013 - 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan .....	I-8
1.4.5. RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017 dan RPJMN Tahun 2010 - 2014 serta RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2018 .....	I-8
1.5. Sistematika Penulisan .....	I-9
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	<b>II-1</b>
2.1. Aspek Geografi dan Demografi .....	II-I
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....	II-1
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi ...	II-1
2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis .....	II-4
2.1.1.3. Topografi .....	II-5
2.1.1.4. Geologi .....	II-5
2.1.1.5. Hidrologi .....	II-9
2.1.1.6. Demografi .....	II-9
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ....	II-12
<b>BAB III    GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b> .....	<b>III-1</b>
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD .....	III-1
3.1.2. Neraca Keuangan Daerah .....	III-6
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .....	III-11
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran .....	III-11
3.2.2. Analisis Pembiayaan .....	III-12
3.3. Kerangka Pendanaan .....	III-16
3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama .....	III-16
3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu .....	III-24
<b>BAB IV    ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS</b> .....	<b>IV-1</b>
4.1. Analisis Lingkungan Eksternal .....	IV-1
4.1.1. Analisis Peluang .....	IV-1
4.1.2. Analisis Ancaman Kota Singkawang .....	IV-2

4.2.	Analisis Lingkungan Internal .....	IV-4
4.2.1.	Analisis Kekuatan Kota Singkawang .....	IV-4
4.2.2.	Analisis Kelemahan Kota Singkawang .....	IV-5
4.3.	Permasalahan Pembangunan Daerah .....	IV-5
4.4.	Isu Strategis .....	IV-8
<b>BAB V</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN .....</b>	<b>V-1</b>
5.1.	Visi .....	V-1
5.2.	Misi .....	V-3
5.3.	Tujuan dan Sasaran .....	V-8
5.3.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Singkawang Mewujudkan Misi Kesatu .....	V-8
5.3.2.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Singkawang Mewujudkan Misi Kedua .....	V-9
5.3.3.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Singkawang Mewujudkan Misi Ketiga .....	V-19
5.3.4.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Singkawang Mewujudkan Misi Keempat .....	V-21
5.3.5.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Singkawang Mewujudkan Misi Kelima .....	V-32
5.3.6.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Singkawang Mewujudkan Misi Keenam .....	V-38
5.3.7.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Singkawang Mewujudkan Misi Ketujuh .....	V-41
5.3.8.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Singkawang Mewujudkan Misi Kedelapan .....	V-43
5.3.9.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Singkawang Mewujudkan Misi Kesembilan .....	V-48
<b>BAB VI.</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>VI-1</b>
6.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2013 – 2017 .....	VI-1
6.1.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesatu .....	VI-1
6.1.2.	Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua .....	VI-2
6.1.3.	Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Ketiga .....	VI-9
6.1.4.	Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Keempat .....	VI-11
6.1.5.	Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kelima .....	VI-17
6.1.6.	Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Keenam .....	VI-19
6.1.7.	Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Ketujuh .....	VI-20
6.1.8.	Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kedelapan .....	VI-21
6.1.9.	Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesembilan .....	VI-24
6.2.	Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota .....	VI-29
6.3.	Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota .....	VI-30

<b>BAB VII</b>	<b>KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM</b>	
	<b>PEMBANGUNAN KOTA</b>	<b>VII-1</b>
7.1.	Kebijakan Umum Pembangunan Kota	
	Mewujudkan Misi	VII-1
7.1.1.	Kebijakan Umum Mewujudkan Misi Kesatu	VII-1
7.1.2.	Kebijakan Umum Mewujudkan Misi Kedua	VII-1
7.1.3.	Kebijakan Umum Mewujudkan Misi Ketiga	VII-1
7.1.4.	Kebijakan Umum Mewujudkan Misi Keempat	VII-2
7.1.5.	Kebijakan Umum Mewujudkan Misi Kelima	VII-2
7.1.6.	Kebijakan Umum Mewujudkan Misi Keenam	VII-3
7.1.7.	Kebijakan Umum Mewujudkan Misi Ketujuh	VII-3
7.1.8.	Kebijakan Umum Mewujudkan Misi Kedelapan	VII-3
7.1.9.	Kebijakan Umum Mewujudkan Misi Kesembilan	VII-3
7.2.	Program Pembangunan Kota	VII-4
7.2.1.	Program Pembangunan Kota Mewujudkan Misi Kesatu	VII-4
7.2.2.	Program Pembangunan Kota Mewujudkan Misi Kedua	VII-4
7.2.3.	Program Pembangunan Kota Mewujudkan Misi Ketiga	VII-6
7.2.4.	Program Pembangunan Kota Mewujudkan Misi Keempat	VII-6
7.2.5.	Program Pembangunan Kota Mewujudkan Misi Kelima	VII-7
7.2.6.	Program Pembangunan Kota Mewujudkan Misi Keenam	VII-8
7.2.7.	Program Pembangunan Kota Mewujudkan Misi Ketujuh	VII-9
7.2.8.	Program Pembangunan Kota Mewujudkan Misi Kedelapan	VII-9
7.2.9.	Program Pembangunan Kota Mewujudkan Misi Kesembilan	VII-10
7.3.	Kebijakan Umum Mewujudkan Prioritas Pembangunan Daerah	VII-12
7.3.1.	Kebijakan Umum Mewujudkan Prioritas Air Bersih	VII-14
7.3.2.	Kebijakan Umum Mewujudkan Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	VII-15
7.3.3.	Kebijakan Umum Mewujudkan Prioritas Indeks Pembangunan Manusia	VII-15
7.3.4.	Kebijakan Umum Mewujudkan Prioritas Infrastruktur dan Sarana Perkotaan	VII-15
7.3.5.	Kebijakan Umum Mewujudkan Prioritas Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumberdaya Alam	VII-16
7.3.6.	Kebijakan Umum Mewujudkan Prioritas Inovasi dan Kreativitas Daerah bagi Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Saing Daerah	VII-16

7.4.	Program Pembangunan Mewujudkan Prioritas Pembangunan Daerah .....	VII-17
7.4.1.	Program Pembangunan Mewujudkan Prioritas Air Bersih .....	VII-17
7.4.2.	Program Pembangunan Mewujudkan Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola .....	VII-17
7.4.3.	Program Pembangunan Mewujudkan Prioritas Indeks Pembangunan Manusia .....	VII-18
7.4.4.	Program Pembangunan Mewujudkan Prioritas Infrastruktur dan Sarana Perkotaan .....	VII-18
7.4.5.	Program Pembangunan Mewujudkan Prioritas Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumberdaya Alam .....	VII-19
7.4.6.	Program Pembangunan Mewujudkan Prioritas Inovasi dan Kreativitas Daerah Bagi Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Saing Daerah .....	VII-19
<b>BAB VIII</b>	<b>INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>VIII-1</b>
8.1.	Indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Kesatu .....	VIII-2
8.2.	Indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Kedua .....	VIII-6
8.3.	Indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Ketiga .....	VIII-34
8.4.	Indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Keempat .....	VIII-43
8.5.	Indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Kelima .....	VIII-77
8.6.	Indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Keenam .....	VIII-98
8.7.	Indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Ketujuh .....	VIII-108
8.8.	Indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Kedelapan .....	VIII-115
8.9.	Indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Kesembilan .....	VIII-132
<b>BAB IX</b>	<b>PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH .....</b>	<b>IX-1</b>
9.1.	Pentahapan Pembangunan Kota .....	IX-1
9.1.1.	Tahap Membangun Komitmen : Rekonsolidasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Tahun 2013 .....	IX-1
9.1.2.	Tahap Implementasi : Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Sarana Pelayanan Dasar Masyarakat Tahun 2014 .....	IX-2
9.1.3.	Tahap Konservasi : Penataan Lingkungan Perkotaan Berkelanjutan Tahun 2015 .....	IX-3
9.1.4.	Tahap Akselerasi : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2016 .....	IX-3
9.1.5.	Tahap Perwujudan : Kota Singkawang Aman, Nyaman, Maju dan Sejahtera Berbasis Jasa, Perdagangan dan Agroindustri .....	IX-4
9.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah .....	IX-5
9.2.1.	Indikator Makro Daerah .....	IX-5
9.2.2.	Target Capaian Kinerja .....	IX-13

<b>BAB X</b>	<b>PEDOMAN TRANSISI DAN KAJDAH PELAKSANAAN .....</b>	<b>X-1</b>
	10.1. Pedoman Transisi .....	X-1
	10.2. Kaidah Pelaksanaan .....	X-2
<b>BAB XI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>XI-1</b>



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Singkawang .....	II-3
------------	---	------

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2012 .....	II-4
Tabel 2.2	Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah Tahun 2012 .....	II-7
Tabel 2.3	Penggunaan Lahan Kota Singkawang Tahun 2012 .....	II-8
Tabel 2.4	Komposisi Penduduk Menurut Persebaran Tahun 2008 - 2012 .....	II-10
Tabel 2.5	Proporsi Sumberdaya Manusia Tahun 2008 - 2012 .....	II-10
Tabel 2.6	Laju Pertumbuhan Dan Kepadatan Penduduk Tahun 2008 - 2012 .....	II-11
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	II-12
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008 - 2012 .....	III-3
Tabel 3.2	Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2008 - 2012 .....	III-5
Tabel 3.3	Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2008 - 2012 .....	III-7
Tabel 3.4	Rasio Likuiditas Tahun 2008 - 2012 .....	III-10
Tabel 3.5	Rasio Solvabilitas Tahun 2008 - 2012 .....	III-11
Tabel 3.6	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2008 - 2012 .....	III-12
Tabel 3.7	Pengelolaan Pembiayaan Daerah Tahun 2008 - 2012 .....	III-13
Tabel 3.8	Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2008 - 2012 .....	III-15
Tabel 3.9	Realisasi Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Singkawang Tahun 2010 - 2012 .....	III-17
Tabel 3.10	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2010 - 2012 .....	III-20
Tabel 3.11	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2008 - 2012 .....	III-22
Tabel 3.12	Proyeksi Struktur APBD Tahun 2013 - 2017 .....	III-25
Tabel 3.13	Proyeksi Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Tahun 2013 - 2017 .....	III-28
Tabel 3.14	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2013 - 2017 .....	III-30
Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesatu .....	VI-1
Tabel 6.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua .....	VI-4
Tabel 6.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Ketiga .....	VI-10
Tabel 6.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Keempat .....	VI-14
Tabel 6.5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kelima .....	VI-18
Tabel 6.6	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Keenam .....	VI-20
Tabel 6.7	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Ketujuh .....	VI-21
Tabel 6.8	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kedelapan .....	VI-22
Tabel 6.9	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesembilan .....	VI-26
Tabel 7.1	Sinkronisasi Prioritas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Singkawang .....	VII-13
Tabel 7.2	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Pembangunan Misi Kesatu : Memfasilitasi aktifitas ibadah masyarakat Yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa .....	VII-21

Tabel 7.3	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Pembangunan Misi Kedua : Memelihara, membangun dan menata fasilitas umum yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat .....	VII-25
Tabel 7.4	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Pembangunan Misi Ketiga : Meningkatkan kemudahan usaha masyarakat berpenghasilan rendah .....	VII-51
Tabel 7.5	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Pembangunan Misi Keempat : Melaksanakan pendistribusian pemerataan dan penguatan ekonomi kewilayahan .....	VII-58
Tabel 7.6	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Pembangunan Misi Kelima : Melanjutkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam agar dapat bermanfaat bagi masyarakat kota .....	VII-90
Tabel 7.7	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Pembangunan Misi Keenam : Melanjutkan pemeliharaan, pembangunan dan penataan infrastruktur transportasi .....	VII-103
Tabel 7.8	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Pembangunan Misi Ketujuh : Menjamin ketentraman, ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kota .....	VII-113
Tabel 7.9	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Pembangunan Misi Kedelapan : Memfasilitasi masyarakat dalam bidang kebudayaan, pariwisata dan olahraga serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat .....	VII-119
Tabel 7.10	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Pembangunan Misi Kesembilan : Reformasi birokrasi dan tatalaksana pemerintahan .....	VII-133
Tabel 9.1	Indikator Makro Pembangunan Kota Singkawang .....	IX-5
Tabel 9.2	Target Indikator Ekonomi Makro Kota Singkawang Tahun 2013 - 2017 .....	IX-7
Tabel 9.3	Target Capaian Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2013 - 2017 .....	IX-14

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 3.1	Perkembangan Proporsi Pendapatan Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 - 2012 .....	III-2
Grafik 3.2	Perkembangan Proporsi Belanja Daerah Tahun 2008 - 2012 .....	III-24



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 dengan maksud mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan agar lebih efektif dan efisien, serta memperluas jangkauan dan mutu pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas dan nyata, sehingga memungkinkan Pemerintah Kota Singkawang untuk mencapai tujuan otonomi dimaksud melalui pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya agar mampu menjawab tantangan globalisasi dalam memberikan ruang gerak bagi tumbuh kembangnya produktivitas, kreativitas dan daya saing daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut tata kelola pemerintahan Kota Singkawang yang lebih maju dan demokratis dalam mewujudkan pelayanan publik yang makin bermutu, cepat, mudah, adil, dan tanpa diskriminasi bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Berbagai perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya di Kota Singkawang telah mendorong pertumbuhan dan kemajuan Kota Singkawang menjadi salah satu pusat layanan dan pusat pertumbuhan di Provinsi Kalimantan Barat.

Tantangan pembangunan Kota Singkawang untuk lima tahun mendatang adalah mendorong percepatan pembangunan dengan mengoptimalkan sumberdaya pengelolaan jasa, sumberdaya pertanian dalam arti luas, perdagangan, dan keunggulan komparatif sektor pariwisata sebagai destinasi unggulan di Kalimantan Barat. Pengelolaan sumberdaya dimaksud secara efektif diharapkan dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran, memperkecil kesenjangan antara pusat kota dan wilayah pinggiran, memperbaiki kinerja birokrasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan meningkatkan aksesibilitas serta kualitas infrastruktur. Harapan tersebut dapat diwujudkan melalui strategi, arah kebijakan dan pendekatan pembangunan yang terpadu, terukur, terarah, terencana dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan prioritas.

Sejalan dengan azas tertib penyelenggaraan negara, pergantian kepala daerah Kota Singkawang merupakan sebuah proses perubahan secara teratur yang dapat menjamin suatu pemerintahan daerah agar dapat bekerja optimal dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat kemajuan daerah.

Dalam kerangka perubahan tersebut dan upaya menjawab tantangan dalam lima tahun mendatang, maka visi pembangunan Kota Singkawang Tahun 2013-2017, adalah:

**“Singkawang Aman, Nyaman, Maju dan Sejahtera  
Berbasis Jasa, Perdagangan dan Agroindustri”**

Visi tersebut akan diwujudkan melalui 9 (Sembilan) misi Kota Singkawang Tahun 2013-2017. Kesembilan misi tersebut adalah :

- 1) Memfasilitasi aktifitas ibadah masyarakat terutama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Memelihara, membangun dan menata fasilitas umum yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat (fasilitas pendidikan, kesehatan, pasar dan air bersih);
- 3) Meningkatkan kemudahan usaha masyarakat berpenghasilan rendah;
- 4) Melaksanakan pendistribusian, pemerataan dan penguatan ekonomi kewilayahan;
- 5) Melanjutkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam agar dapat bermanfaat bagi masyarakat kota;
- 6) Melanjutkan pemeliharaan, pembangunan dan penataan infrastruktur;
- 7) Menjamin ketentraman, ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kota;
- 8) Memfasilitasi masyarakat dalam bidang kebudayaan, pariwisata dan olah raga serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat;
- 9) Reformasi birokrasi dan tatalaksana pemerintahan;

RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017 merupakan pelaksanaan tahap kedua RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan tercapainya visi Kota Singkawang pada Tahun 2017, dengan tetap memperhatikan berbagai prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2010-2014, dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1. Maksud**

Penyusunan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017 dimaksudkan untuk mengimplementasikan capaian visi dan misi sehingga menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan kebijakan umum yang terarah, efektif, efisien dan terpadu dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan RPJPD Kota

Singkawang Tahun 2005-2025, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kota Singkawang.

RPJMD Kota Singkawang juga dimaksudkan sebagai pedoman resmi dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja dan Anggaran-SKPD, sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah secara berjenjang dan selanjutnya digunakan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahunan.

### **1.2.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

- (1). Mendukung terwujudnya visi dan misi RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025 dalam mempercepat pembangunan Kota Singkawang yang berfokus pada pementapan kelembagaan dan pengelolaan sumberdaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan proses percepatan pembangunan;
- (2). Menjabarkan visi-misi Walikota/Wakil Walikota Singkawang ke dalam bentuk arah kebijakan dan kebijakan umum yang rinci, terarah, terukur untuk dilaksanakan dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017;
- (3). Menyediakan acuan resmi bagi seluruh SKPD Kota Singkawang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kota Singkawang, APBN dan sumber dana lainnya;
- (4). Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan, baik antar SKPD, antara Pemerintah Kota Singkawang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, antara Pemerintah Kota Singkawang dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta antara Pemerintah Kota Singkawang dengan Pemerintah Pusat;
- (5). Sebagai tolok ukur dan evaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- (6). Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, amanah, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
- (7). Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kota Singkawang, swasta dan masyarakat.



### **1.3. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan RPJMD Kota Singkawang mengacu pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 19) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

- 20) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 21) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 23) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M. PAN/ 05/ 2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57);
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
- 26) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
- 27) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2012-2032.

#### **1.4. Keterkaitan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya**

RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017 mempunyai keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu sebagai berikut:

##### **1.4.1. RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013 - 2017 dan RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005 - 2025.**

RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013 - 2017 merupakan rencana pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Walikota Tahun 2013 - 2017, harus

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang Tahun 2005 – 2025.

Dalam RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005 - 2025, dengan visi **SINGKAWANG MAJU, SEJAHTERA BERBASIS JASA, PERDAGANGAN, DAN AGROINDUSTRI**, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu : (1) Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. (2) Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, inovatif berbudaya dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila. (3) Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). (4) Mewujudkan perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan investasi, yang berbasis pada peningkatan kegiatan jasa, perdagangan, dan agroindustri. (5) Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat miskin. (6) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan dengan mempehatikan keseimbangan ekosistem. (7) Mewujudkan infrastruktur yang memadai, penataan ruang dan pertanahan untuk meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa sekaligus mengembangkan kepariwisataan. (8) Mewujudkan budaya politik yang demokratis, serta keamanan dan ketertiban masyarakat berbasis supremasi hukum.

Pada tahap kedua RPJMD Kota Singkawang yang dimuat di dalam RPJPD Kota Singkawang, fokus pembangunan di arahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Ketiga fokus pembangunan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan dan memperkuat identitas pembangunan Kota Singkawang yang konsisten menuju terwujudnya visi dan misi pembangunan Kota Singkawang Tahun 2005 - 2025.

#### **1.4.2. RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013 – 2017 dan RTRW Kota Singkawang Tahun 2012 – 2032.**

Berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Singkawang Tahun 2012 – 2032 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi kebijakan umum yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota Singkawang. Dalam menyeimbangkan kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan

perencanaan dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

#### **1.4.3. RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013 – 2017 dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2013 – 2017.**

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap SKPD dan ditetapkan oleh Walikota setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda Kota Singkawang. agar kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

#### **1.4.4. RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013 – 2017 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan**

Pelaksanaan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013 – 2017 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Singkawang yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Singkawang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota hingga provinsi.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### **1.4.5. RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013–2017 dan RPJMN Tahun 2010 – 2014 serta RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025. RPJMN Tahun 2010 – 2014 menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan. Visi RPJMN Tahun 2010 – 2014 adalah **Terwujudnya Indonesia**

**yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan.** Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 3 Misi, yaitu : (1) Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, (2) Memperkuat pilar-pilar demokrasi, (3) Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Visi, misi dan program yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2010 – 2014 menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Singkawang dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013 - 2017 dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III	Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB IV	Analisis Isu-Isu Strategis
BAB V	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
BAB VI	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VII	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota
BAB VIII	Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan
BAB IX	Pentahapan Pembangunan dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah
BAB X	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
BAB XI	Penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab II menyajikan secara sistematis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Aspek-aspek tersebut akan dilengkapi dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah yang akan digunakan untuk mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi dan misi pembangunan, kebutuhan perumusan strategis, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

Kondisi umum daerah Kota Singkawang menguraikan deskripsi tentang karakteristik dan potensi dari berbagai sumberdaya daerah yang berhubungan atau terkait dengan pembangunan di Kota Singkawang. Sumberdaya daerah tersebut meliputi kondisi kependudukan dan sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, perekonomian, sarana dan prasarana, pengembangan wilayah dan penataan ruang, politik, ketentraman dan ketertiban masyarakat, hukum, aparatur, serta sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Seiring dengan semakin kompleksnya persoalan pembangunan serta semakin tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik maka pemerintah Kota Singkawang dituntut untuk meningkatkan capaian hasil pembangunan. Upaya untukantisipasi berbagai permasalahan, tantangan serta perkembangan di masa kini dan masa depan memerlukan konsep rencana berdimensi jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan kondisi saat ini dan proyeksi sesuai analisis di berbagai bidang.

Kondisi yang diharapkan dimasa mendatang dilaksanakan dengan menganalisis kondisi saat ini. Kondisi saat ini merupakan modal dasar atau bahan untuk perencanaan yang akan menentukan keberhasilan di masa mendatang. Adapun kondisi gambaran umum Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

#### **2.1. Aspek Geografi dan Demografi**

##### **2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

###### **2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Kota Singkawang berjarak ± 145 Km ke arah utara dari Kota Pontianak dengan luas wilayah 504 Km<sup>2</sup>. Secara administratif. Pemerintahan Kota Singkawang terbagi atas 5 (lima) kecamatan dan 26 kelurahan, dengan klasifikasi daerah perkotaan (*urban*) sebanyak 11 kelurahan dan selebihnya masih merupakan daerah perdesaan (*rural*). Kesebelas kelurahan tersebut adalah

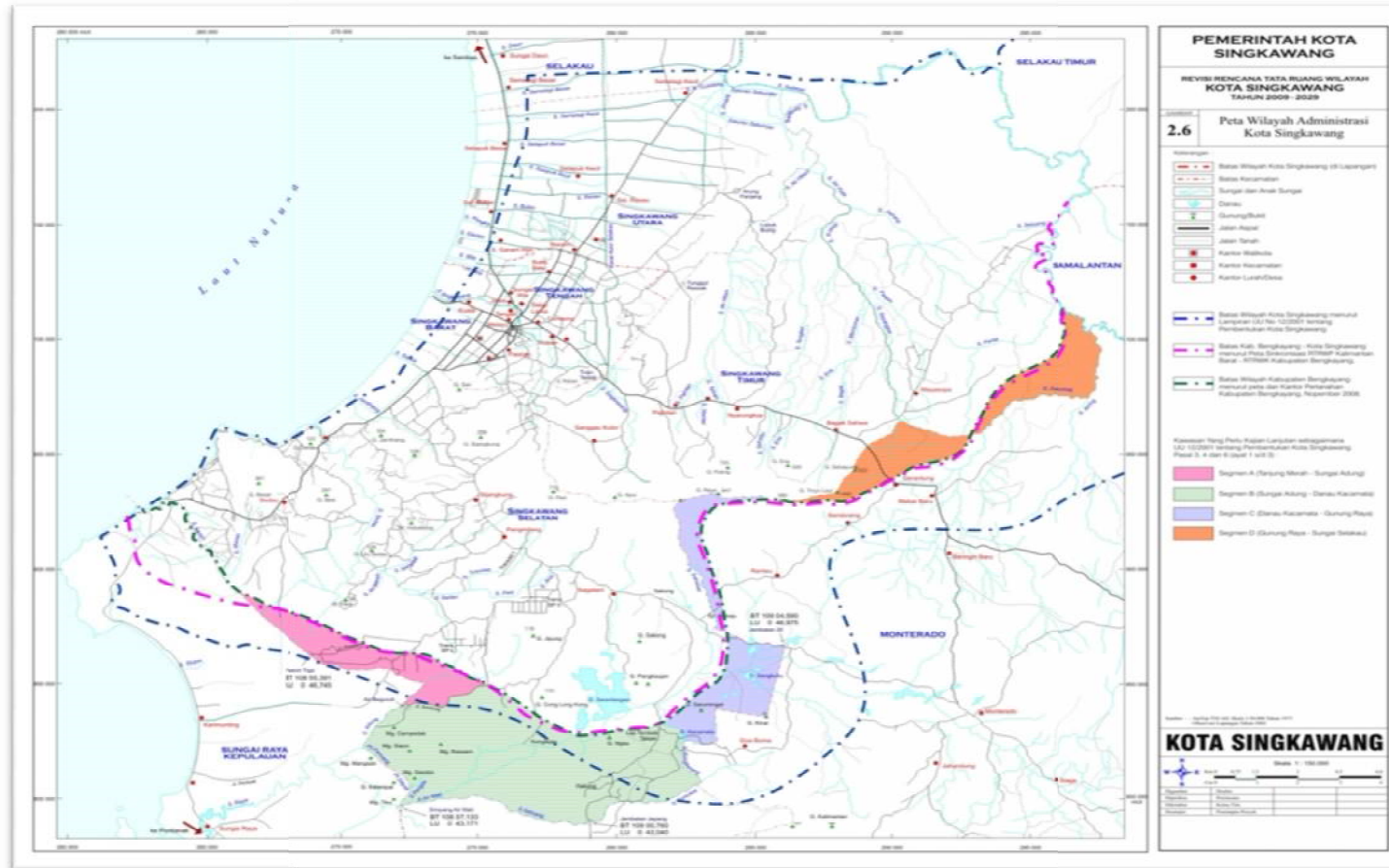
1 kelurahan di Kecamatan Singkawang Selatan, 4 kelurahan di Kecamatan Singkawang Barat, dan 6 kelurahan di Kecamatan Singkawang Tengah.

Perbandingan antar kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Singkawang Selatan merupakan kecamatan terluas yaitu 224,48 Km<sup>2</sup> atau 44,54 % dari luas kota, kemudian secara berturut-turut Kecamatan Singkawang Timur sebesar 166,26 Km<sup>2</sup> atau 32,99 %, Kecamatan Singkawang Utara 66,65 Km<sup>2</sup> atau sebesar 13,22 %, Kecamatan Singkawang Tengah sebesar 31,57 Km<sup>2</sup> atau 6,29 % dari luas kota dan Kecamatan Singkawang Barat dengan luas 15,04 km<sup>2</sup> atau hanya sebesar 2,98 % luas kota. Kecamatan Singkawang Barat memiliki luas wilayah paling kecil. Batas-batas wilayah administratif Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Kabupaten Sambas
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Bengkayang
Sebelah Barat	:	Laut Natuna
Sebelah Timur	:	Kabupaten Bengkayang



**Gambar 2.1**  
**PETA ADMINISTRASI KOTA SINGKAWANG**



Sumber : RTRW Kota Singkawang Tahun 2012-2032, 2012

**Tabel 2.1**  
**LUAS DAERAH DAN KEPADATAN PENDUDUK TAHUN 2012**

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Penduduk		Kepadatan	
			*BPS	Dukcapil	*BPS	Dukcapil
1	Singkawang Timur	166,26	20.204	23.020	122	138
2	Singkawang Tengah	31,57	59.684	69.272	1.891	2.194
3	Singkawang Barat	15,04	49.184	66.179	3.270	4.400
4	Singkawang Utara	66,65	23.052	26.726	346	401
5	Singkawang Selatan	224,48	43.460	55.459	194	247
<b>Jumlah</b>		<b>504</b>	<b>195.584</b>	<b>240.656</b>	<b>388</b>	<b>477</b>

*Sumber : BPS Kota Singkawang - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah oleh Bappeda, 2013*

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk menurut BPS sebesar 195.584 jiwa sedangkan menurut Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah 240.656 jiwa di Tahun 2012 dan memiliki wilayah seluas 504 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Singkawang Barat menempati urutan teratas sebagai kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi yakni sebanyak 4.400 jiwa per Km<sup>2</sup> sedangkan Kecamatan Singkawang Timur merupakan wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang paling rendah yakni hanya sebanyak 138 jiwa per Km<sup>2</sup> dikarenakan memiliki luas wilayah sangat signifikan dengan jumlah penduduk yang sedikit.

#### **2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis**

Kota Singkawang terletak pada 00 44' 55, 85" - 010 01'21, 51" Lintang Utara dan 108 51'47,6" - 109 10' 19" Bujur Timur. Terletak di antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, dengan luas wilayah ± 504 Km<sup>2</sup> atau sekitar 0,34 % dari luas wilayah Kalimantan Barat.

##### **1) Posisi Geostrategis**

Kota Singkawang sebagai salah satu daerah yang posisinya sangat strategis terletak pada jalur transit Sambas-Pontianak dan Bengkayang-Pontianak. Dalam perspektif penataan ruang, Kota Singkawang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yakni kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota di kawasan utara Kalimantan Barat. Kota Singkawang akan memainkan peran penting dan strategis guna memacu pertumbuhan kawasan Singkawang,

Bengkayang, Sambas (Singbebas) dan sekitarnya terutama sebagai pusat perdagangan dan jasa, termasuk destinasi utama pariwisata di Kalimantan Barat.

## **2) Kondisi Kawasan**

Empat kecamatan yang ada di Kota Singkawang, yaitu Selatan, Barat, Tengah dan Utara merupakan wilayah pesisir dan daratan, sedangkan Singkawang Timur merupakan wilayah daratan. Aspek strategis lainnya adalah peran wilayah Kota Singkawang sebagai penyangga kawasan perbatasan antara wilayah RI - Sarawak Malaysia.

### **2.1.1.3. Topografi**

Kondisi topografi wilayah Kota Singkawang sebagian besar merupakan wilayah dataran, selebihnya berupa bukit dan gunung. Wilayah dataran mencapai 31.904 Ha tersebar di 5 kecamatan, sedangkan bukit dan gunung seluas 18.496 Ha sebagian besar terdapat di wilayah Singkawang Timur dan Singkawang Selatan, serta sedikit di wilayah Singkawang Barat dan Singkawang Tengah. Kemiringan lahan di Kota Singkawang diklasifikasikan ke dalam 4 kelas yaitu datar (0% – 2%) dengan luas area 37.236 Ha, landai dan bergelombang (2% – 15%) dengan luas area 9.602 Ha, berbukit/ curam (15% – 40%) dengan area 2.750 Ha, dan sangat curam (>40%) dengan luas area 812 Ha.

### **2.1.1.4. Geologi**

#### **1) Struktur dan Karakteristik**

Potensi sumberdaya wilayah Kota Singkawang dilengkapi pula dengan kawasan pesisir yang bergaris pantai sepanjang 27,6 Km. Hal ini menggambarkan adanya peluang yang besar dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan. Selain pemanfaatan kawasan perairan untuk budidaya perikanan dan tangkap, sumberdaya pesisir ini juga dimanfaatkan bagi pengembangan sektor pariwisata yang saling terintegrasi lintas sektoral (*integrated coastal*) dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama kehidupan nelayan. Arahkan kewilayahan dalam pengembangan kawasan pesisir berikut sumberdayanya mengacu pada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Singkawang.

#### **2) Jenis Tanah**

1. Beberapa kawasan datar di Singkawang Utara dan Timur terhampar dataran tanah yang didominasi oleh organosol/gley humus dengan kedalaman maksimal 2 meter. Di beberapa bagian tanah ini telah berasosiasi dengan tanah aluvial dan pasir. Luas hamparan tanah organosol (termasuk yang telah berasosiasi dengan aluvial) ini sekitar 8.433 Ha atau sekitar 16,73 % dari luas kota. Sebagian kawasan ini

merupakan kawasan berawa-rawa yang berfungsi untuk mengatur aliran air permukaan. Pada saat hujan kawasan ini menampung air limpasan dan setelah hujan secara perlahan-lahan melepaskan air ke sungai-sungai atau parit-parit di sekitarnya. Tanah organosol merupakan golongan tanah yang tersusun dari bahan organik atau campuran bahan mineral dan bahan organik setebal paling sedikit 50 cm mengandung paling sedikit 30% bahan organik (bila liat), atau 20 % (bila berpasir). Jenis tanah ini sesuai untuk pengembangan pertanian palawija, hortikultura (rambutan, nanas, lidah buaya, dll) dan karet.

2. Sedangkan pada wilayah Singkawang Timur dan Selatan merupakan kawasan dengan jenis tanah podsol. Luas keseluruhan jenis tanah ini diperkirakan 6,973 Ha atau sekitar 13,84 % dari luas kota. Tanah jenis ini merupakan tanah bermineral yang telah mempunyai perkembangan profil, dengan tekstur pasir kuarsa, sangat masam dan sangat kurus, dimana kemampuan pertukaran kationnya rendah. Tanah disekitarnya umumnya bergambut dengan keasaman tinggi. Penambahan pupuk dan teknologi pengolahan tanah saat ini, jenis tanah ini dapat dikembangkan sebagai pertanian lahan kering (palawija) dan hortikultura (sayur-sayuran). Tanah latosol juga banyak tersebar di kaki-kaki bukit/gunung di antara sebaran tanah podsol dan podsolik merah kuning. Jenis tanah ini banyak terdapat di wilayah Kecamatan Singkawang Timur dan Singkawang Selatan, dengan luas mencapai  $\pm$  5.686 Ha atau sekitar 11,28 % dari luas kota.
3. Sebagian besar daratan Kota Singkawang terdiri dari tanah aluvial yang tersebar di semua kecamatan terutama pada daerah tepian sungai dan pinggiran pantai. Luas tanah aluvial ini sekitar 17.458 Ha atau sekitar 34,64 % dari seluruh luas kota (10% diantaranya merupakan aluvial berpasir). Tanah ini kadang-kadang mengandung bahan organik. Lahan dengan jenis tanah ini sangat sesuai untuk pengembangan pertanian sawah (padi), jagung, jeruk, kelapa dan sayur-sayuran non musim.

Di kawasan berbukit dan bergunung di Kecamatan Singkawang Selatan dan Timur, jenis tanahnya tergolong podsolik merah kuning yang berasosiasi dengan tanah litosol. Luas hamparan tanah ini diperkirakan  $\pm$  6.609 Ha atau sekitar 13,11 % dari luas kota. Tanah jenis ini sangat sesuai untuk pengembangan pertanian lahan kering (perkebunan) dan tanaman buah-buahan tropis. Sebaran jenis tanah di Kota Singkawang disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2**  
**LUAS WILAYAH MENURUT JENIS TANAH TAHUN 2012**

NO	Kecamatan	Luas Area (Ha)	Jenis Tanah (Ha)						
			Aluvial	Aluvial Berpasir	Asosiasi Aluvial dan Organosol	Organosol	Podsol	Latasol	Podsolik Merah Kuning
1.	Singkawang Selatan	22.448	8.203	532	-	-	3.908	4.665	5.140
2.	Singkawang Timur	16.626	4.127	120	3.546	4.464	2.021	1.021	1.327
3.	Singkawang Utara	6.665	1.885	3.397	423	-	960	-	-
4.	Singkawang Barat	1.806	1.694	-	-	-	84	-	28
5.	Singkawang Tengah	2.855	1.549	1.192	-	-	-	-	114
Jumlah		<b>50.400</b>	<b>17.458</b>	<b>5.241</b>	<b>3.969</b>	<b>4.464</b>	<b>6.973</b>	<b>5.686</b>	<b>6.609</b>
(%)		<b>100,00</b>	<b>34,64</b>	<b>10,40</b>	<b>7,88</b>	<b>8,86</b>	<b>13,84</b>	<b>11,28</b>	<b>13,11</b>

*Sumber: RTRW Tahun 2012-2032, 2012*

### 3) Penggunaan Lahan

Distribusi penggunaan lahan Kota Singkawang secara umum terdiri dari penggunaan lahan untuk tapak (permukiman, industri, perdagangan dan fasilitas-fasilitas kegiatan lainnya) dan penggunaan lahan non tapak (perkebunan, sawah, hutan dan lain-lain). Areal terbesar kawasan terbangun Kota Singkawang adalah areal Perkebunan yaitu sekitar 20.159,20 Ha atau sekitar 40% dari luas kota. Penggunaan lahan terdiri dari areal pertanian kebun campuran, kebun karet, kebun kelapa, dan lain-lain. Sekitar 12,33% dari luas kota atau sekitar 6.217,50 Ha kawasan masih berupa hutan lebat dan hutan cemara yang tersebar di beberapa areal seperti Gunung Raya, Gunung Pasi, Gunung Sari, Gunung Poteng dan lain-lain. Hutan mangrove atau bakau tersebar di sepanjang pantai Laut Natuna yang luasnya mencapai ± 726,30 Ha atau sekitar 1,44 % dari luas kota. Vegetasi ini sangat bermanfaat untuk menahan gempuran abrasi pantai.

Areal kawasan terbangun lainnya di Kota Singkawang adalah areal permukiman (perumahan dan berbagai fasilitas sosial-budayanya) yang luasnya sekitar 1.390 Ha atau sekitar 2,76 % luas kota, kawasan fasilitas perdagangan dan jasa komersial, pemerintahan dan pelayanan umum, terminal, pelabuhan dan industri mencakup 250,70 Ha atau sekitar 0,50 % dari luas kota. Selengkapnya disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3**  
**PENGGUNAAN LAHAN KOTA SINGKAWANG TAHUN 2012**

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>Luas Area (Ha)</b>	<b>Struktur/ Komposisi (%)</b>
<b>1</b>	Pemukiman	1.390,00	2,76
<b>2</b>	Perdagangan dan Jasa Komersial	105,50	0,21
<b>3</b>	Pemerintahan dan Fasilitas Umum	130,80	0,26
<b>4</b>	Terminal/ Pelabuhan/ Dermaga	4,30	0,01
<b>5</b>	Industri	10,10	0,02
<b>6</b>	Lapangan Olahraga/ Taman/ Ruang Terbuka	64,50	0,13
<b>7</b>	Sawah	5.610,70	11,13
<b>8</b>	Perkebunan	20.159,20	40,00
<b>9</b>	Hutan Belantara	6.150,00	12,20
<b>10</b>	Hutan Cemara	67,50	0,13
<b>11</b>	Bakau/ Mangrove	726,30	1,44

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>Luas Area (Ha)</b>	<b>Struktur/ Komposisi (%)</b>
<b>12</b>	Hutan Belukar	6.651,20	13,20
<b>13</b>	Alang-alang/ Semak Belukar	5.779,60	11,47
<b>14</b>	Rawa-rawa	3.028,90	6,01
<b>15</b>	Danau/ Sungai	521,40	1,03
		<b>50.400,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: RTRW Tahun 2012-2032 , 2012*

#### **2.1.1.5.Hidrologi**

Kondisi hidrologi Kota Singkawang sangat dipengaruhi oleh topografi kota yang sangat datar dibagian utara dan barat, serta bergelombang hingga pegunungan dibagian timur dan selatan. Puluhan sungai yang mengalir di Kota Singkawang semuanya berhulu pada gugusan pegunungan dibagian selatan kota. Sebagian sungai mengalir ke utara dan bermuara di Sungai Selakau, sebagian lagi mengalir ke barat dan bermuara di laut Natuna serta melewati pusat kota. Sungai Kota Singkawang ini berhulu di Gunung Roban, sebagian laginya berasal dari Gunung Poteng.

Sungai Sedau dan Sungai Merah mengalir ke Laut Natuna dan umumnya berhulu di beberapa kawasan pegunungan seperti Gunung Jintan, Gunung Sijangkung, Gunung Pasi dan Gunung Besar. Banyaknya aliran sungai yang melintasi wilayah Kota Singkawang merupakan sumberdaya air yang potensial untuk dikelola.

#### **2.1.1.6.Demografi**

Penduduk merupakan faktor yang sangat penting dalam mekanisme perencanaan pembangunan, karena penduduk tidak saja menjadi sasaran pembangunan, tetapi juga berperan sebagai pelaksana pembangunan.

Pada Tahun 2012, penduduk Kota Singkawang menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berjumlah 240.565 jiwa yang terdiri dari 123.057 jiwa laki-laki dan 117.599 jiwa perempuan, dengan laju pertumbuhan rata-rata 3,925 %. Penyebaran penduduk berdasarkan wilayah kecamatan pada Tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT PERSEBARAN**  
**TAHUN 2008– 2012**

No	Kecamatan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Singkawang Selatan	41.486	44.136	48.704	53.265	55.459
2	Singkawang Timur	19.141	20.373	21.572	22.231	23.020
3	Singkawang Utara	21.406	22.992	24.198	25.798	26.726
4	Singkawang Barat	58.926	61.720	64.642	65.095	66.179
5	Singkawang Tengah	54.995	58.601	63.705	67.547	69.272
<b>Total</b>		<b>195.954</b>	<b>207.822</b>	<b>222.821</b>	<b>233.936</b>	<b>240.656</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2013

Berdasarkan tabel diatas, persentase komposisi penduduk yang tertinggi pada Tahun 2012 adalah di Kecamatan Singkawang Tengah sebesar 28,78 % dengan jumlah penduduk sebanyak 69.272 jiwa sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Singkawang Timur sebesar 9,57 % dan sebanyak 23.020 jiwa.

Sumberdaya manusia (SDM) mempunyai peran yang paling strategis dalam pembangunan, seperti pembangunan bidang sosial budaya yang bertujuan untuk menciptakan SDM yang terdidik, memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, berperan aktif, berketerampilan, mencintai lingkungannya, serta sehat jasmani dan rohani.

**Tabel 2.5**  
**PROPORSI SUMBERDAYA MANUSIA TAHUN 2008-2012**

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Penduduk	195.954	207.822	222.821	233.936	240.656
2	Usia Produktif					
	Jumlah (jiwa)	152.206	159.074	164.364	166.701	167.659
	Persentase (%)	77,67	76,54	73,77	71,26	69,67
3	Usia Tidak Produktif					
	Jumlah (jiwa)	43.748	48.748	58.419	67.111	72.997
	Persentase (%)	22,33	23,46	26,22	28,69	30,33
4	Rasio ketergantungan	28,74	30,64	35,54	40,26	43,54

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2013



Kota Singkawang merupakan salah satu daerah berpenduduk multi etnis dengan keragaman corak budayanya. Kemajemukan penduduk ini berdampak pada terjadinya pembauran (asimilasi) budaya dan sosial. Asimilasi terjadi diantaranya melalui perkawinan, hubungan kerja, dan interaksi hubungan bertetangga yang kemudian melahirkan model kehidupan berkeluarga dan sosial. Jumlah, laju pertumbuhan, dan kepadatan penduduk di Kota Singkawang Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**LAJU PERTUMBUHAN DAN KEPADATAN PENDUDUK**  
**TAHUN 2008-2012**

<b>Uraian</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Jumlah Penduduk</b>	195.954	207.822	222.821	233.936	240.656
<b>Laki-laki (Jiwa)</b>	100.972	106.838	114.224	119.644	123.057
<b>Perempuan (Jiwa)</b>	94.982	100.984	108.597	114.292	117.599
<b>Laju Pertumbuhan (%)</b>	3,258	3,565	3,925	4,021	3,925
<b>Kepadatan (jiwa/km<sup>2</sup>)</b>	389	412	442	464	477

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2013*

## 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>							
<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>							
<b>1.</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>						
1.1.	Pertumbuhan PDRB	%	4,9	4,88	5,54	6,46	6,16
1.2.	Laju inflasi	%	12,66	1,15	7,1	6,72	4,21
1.3.	PDRB per kapita	Rp	11.249.369,67	12.183.081,77	13.510.301,56	14.859.742,87	16.042.172,53
1.4.	Angka kemiskinan	%	7,89	6,2	6,12	5,83	5,32
1.5.	Indeks Pembangunan Manusia	%	68	68,47	68,86	69,20	69,77
<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>							
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>						
1.1.	Angka melek huruf	%	89,60	89,65	89,66	89,66	89,69
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	%	7,30	7,34	7,40	7,40	7,59
1.3.	Angka Partisipasi Kasar (APK)						
1.3.1.	APK SD/MI	%	124,77	105,53	118,46	116,41	113,29
1.3.2.	APK SMP/MTs	%	84,60	78,18	82,04	86,88	91,09
1.3.3.	APK SMA/SMK/MA	%	69,48	65,64	73,12	82,83	79,77

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.	Angka Pendidikan yang di Tamatkan (APT)						
1.4.1.	< SD	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	17,5	17,06
1.4.2.	SD / Sederajat	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	29	28,58
1.4.3.	SLTP / Sederajat	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	14,5	14,09
1.4.4.	SLTA / Sederajat	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	17	17,89
1.4.5.	D1 /D2 / D3	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	1	1,35
1.4.6.	≥ S1	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	2	2,44
1.5.	Angka Partisipasi Murni (APM)						
1.5.1.	APM SD/MI	%	94.42	83.95	94.10	94,69	91,76
1.5.2.	APM SMP/MTs	%	56.75	55.08	55.68	58,87	58,09
1.5.3.	APM SMA/SMK/MA	%	34.01	42.71	49.58	55,84	59,52
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>						
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB)	%	3,78	8,14	5,63	5,58	3,81
2.2.	Angka usia harapan hidup	%	67,00	67,08	67,21	67,34	67,46
2.3.	Persentase balita gizi buruk	%	0,04	0,09	0,06	0,02	0,03
2.4.	Proporsi balita kurang gizi	%	2,44	3,55	3,24	3,57	2,88
2.5.	Angka Kematian Ibu (AKI)	%	0,89	0,84	0,47	0,80	1,78

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3.</b>	<b>Pertanahan</b>						
3.1.	Persentase penduduk yang memiliki lahan bersertifikat	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
<b>4.</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>						
4.1.	Rasio penduduk yang bekerja	%	93,27	90,29	91,95	94,65	94,25
<b>Fokus Seni Budaya dan Olahraga</b>							
<b>1.</b>	<b>Kebudayaan</b>						
1.1.	Jumlah gedung kesenian per 10000 penduduk	Grup	Belum tersedia data	1	1	1	1
1.2.	Jumlah gedung kesenian	Gedung	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Pemuda dan Olahraga</b>						
2.1.	Jumlah klub olahraga per 10000 penduduk	Klub	Belum tersedia data	6	5	5	5
2.2.	Jumlah gedung olahraga per 10000 penduduk	Gedung	Belum tersedia data	0	0	0	0
2.3.	Jumlah gelanggang remaja	Unit	0	0	0	0	0
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>							
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib</b>							
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>						
1.1.	Angka Partisipasi Sekolah						
1.1.1.	SD/MI	%	104,67	103,95	103,43	103,97	103,92

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	SMP/MTs	%	85,49	83,78	89,14	92,05	91,9
1.1.3.	SMA/MA	%	25,03	31,87	35,65	63,76	63,59
1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah						
1.2.1.	SD/MI	%	-	39,39	4,03	3,6	4,09
1.2.2.	SMP/MTs	%	-	0,00	3,68	3,66	3,63
1.2.3.	SMA/MA	%	-	36,48	2,73	3,07	2,98
1.3.	Rasio guru terhadap murid						
1.3.1.	SD/MI	%	17	17	18	19	18
1.3.2.	SMP/MTs	%	12	13	15	14	14
1.3.3.	SMA/MA	%	14	10	11	11	11
1.4.	Rasio murid per kelas rata-rata						
1.4.1.	SD/MI	%	-	-	27	26	26
1.4.2.	SMP/MTs	%	-	-	22	25	24
1.4.3.	SMA/MA	%	-	-	27	26	28
1.5.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)		100	99,76	94,74	98,17	100
1.6.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):						
1.6.1.	Angka partisipasi kasar (APK)	%	-	-	12,08	12,52	13,8
1.7.	Angka Putus Sekolah (APTs)						
1.7.1.	SD/MI	%	0,98	0,73	0,78	0,7	0,56
1.7.2.	SMP/MTs	%	0,99	1,72	1,68	1,57	1,02
1.7.3.	SMA/MA	%	0,94	1,36	1,4	0,9	1,19

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.	Angka Kelulusan (AL):						
1.8.1.	SD/MI	%	98,54	98,26	99,97	99,79	99,79
1.8.2.	SMP/MTs	%	62,23	62,82	95,32	93,25	96,74
1.8.3.	SMA/SMK/MA	%	55,83	82,45	94,56	98,64	99,53
1.9.	Angka Melanjutkan						
1.9.1.	SMP/MTs	%	106,7	104,36	94,31	96,26	98,35
1.9.2.	SMA/SMK/MA	%	53,87	94,56	96,57	97,87	96,93
1.10.	Kualitas Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV						
1.10.1.	SD/MI	%	-	-	-	27,94	30,22
1.10.2.	SMP/MTs	%	-	-	-	58,84	59,33
1.10.3.	SMA/MA/SMK	%	-	-	-	78,74	80,30
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>						
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	%	5,68	7,16	6,27	6,70	6,55
2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk	%	0,18	0,20	0,18	0,18	0,19
2.3.	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk	%	0,031	0,029	0,027	0,026	0,025
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	%	57	68	84	95	96
2.5.	Rasio paramedis per satuan penduduk	%	2,50	2,83	2,55	3,16	3,07
2.6.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.	%	79,49	91,06	96,52	82,1	86,72

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.	%	36,47	45,73	59,35	45,9	50,3
2.8.	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.	%	82,09	90,27	97,59	82,41	82,83
2.9.	Cakupan pelayanan Ibu Nifas	%	75,84	80,92	54,19	56,94	74,89
2.10.	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	%	88,07	24,47	80,43	12,04	22,21
2.11.	Cakupan kunjungan bayi.	%	91,35	76,79	36,84	76,98	80,65
2.12.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).	%	80,77	69,23	77	77	69,23
2.13.	Cakupan pelayanan anak balita.	%	Belum tersedia data	21,56	28,36	28,38	53,67
2.14.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.	%	Belum tersedia data	26,89	100	0	0
2.15.	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	%	0,04	0,09	0,06	0,02	0,03
2.16.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	Belum tersedia data	67,28	16,33	98,91	89,99
2.17.	Cakupan peserta KB Aktif	%	75,75	79,24	73,25	77,77	71,11
2.18.	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit	%	14,11	12,96	15,34	6,89	5,81
2.19.	Penemuan Penderita Pneumonia Balita	%	14,11	12,96	15,34	6,89	5,81
2.20.	Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	%	43,01	45,31	53,7	93,1	66,43
2.21.	Penderita DBD yang Ditangani	%	100	100	100	100	85
2.22.	Penemuan Penderita Diare	%	33,45	79,35	10,55	73,88	99,24
2.23.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	41,49	74,99	96,03	112,08	123,35

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
2.24.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.	%	4,23	3,63	6,08	5,81	6,04
2.25.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.	%	Belum tersedia data	100	81,82	82	100
2.26.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	%	0	100	0	0	0
2.27.	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	%	5	25	1	1	2
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>						
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	30,73	33,62	34,12	40,29	40,88
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	%	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	0,28	0,29	0,31	0,30	0,30
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	76,182	76,734	76,623	77,994	77,994
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 1.000 jumlah penduduk)	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
3.6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	2,66	2,55	2,37	2,29	2,39
3.7.	Rasio rumah layak huni	%	21,83	21,40	21,01	20,53	20,28
3.8.	Rasio permukiman layak huni	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data



NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
3.9.	Panjang jalan dilalui Roda 4 (Jalan Nasional, Provinsi dan kota)	%	0,24	0,23	0,22	0,21	0,21
3.10.	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
3.11.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 Km/Jam )	%	33,39	36,51	36,97	43,62	44,23
3.12.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
3.13.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
3.15.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
3.16.	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
3.17.	Persentase air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	2
3.18.	Persentase air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	20
3.19.	Persentase jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	23
3.20.	Persentase jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	23
3.21.	Persentase jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	15

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
3.22.	Persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	15
3.23.	Persentase jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan dengan kecepatan rencana	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	18
<b>4.</b>	<b>Perumahan</b>						
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	%	31,82	30,01	27,89	26,52	26,04
4.2.	Rumah tangga pengguna listrik	%	90,47	92,34	94,14	95,57	97,31
4.3.	Rumah tangga bersanitasi	%	90,09	89,12	87,45	87,25	85,89
4.4.	Lingkungan pemukiman kumuh	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
4.5.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	59,71	60,38	61,49
4.6.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	67,87	70,43	75,27
4.7.	Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	50	53,85	57,69
<b>5.</b>	<b>Penataan Ruang</b>						
5.1.	Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah (RTH)	%	111,43	103,02	96,99	96,07	89,68
5.2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
<b>6.</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>						
6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2.	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3.	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>7.</b>	<b>Perhubungan</b>						
7.1.	Rasio ijin trayek	%	Belum tersedia data	0,0013	0,0012	0,0010	0,0010
7.2.	Jumlah uji kir angkutan umum	%	Belum tersedia data	3,902	4,015	4,207	4207
7.3.	Angkutan darat	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
7.4.	Kepemilikan KIR angkutan umum umum (KIR)	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
7.5.	Pemasangan Rambu-rambu	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
7.6.	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	45

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
7.7.	Persentase halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	50
7.8.	Persentase terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	26
7.9.	Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	30
7.10.	Persentase unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	30
7.11.	Standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	50
<b>8.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>						
8.1.	Persentase penanganan sampah	%	96,93	89,75	90,91	90,91	90,91
8.2.	Persentase Luas pemukiman yang tertata	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
8.3.	Pencemaran status mutu air	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
8.4.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
8.5.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
8.6.	Penegakan hukum lingkungan	%	2,66	2,55	2,37	2,29	2,39
8.7.	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	0	0	0	0	20
8.8.	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	%	0	0	0	0	0
8.9.	Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	%	0	0	0	0	0
8.10.	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	100
<b>9.</b>	<b>Pertanahan</b>						
9.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	%	9,67	10,08	9,79	9,59	9,73
9.2.	Jumlah penyelesaian sengketa pertanahan	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
9.3.	Persentase penyelesaian ijin lokasi	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>							
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib</b>							
<b>10.</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>						
10.1.	Kepemilikan KTP	%	Belum tersedia data	8,25	32,3	54,9	60,5
10.2.	Kepemilikan KK	%	Belum tersedia data	22,7	64,3	77,7	83,8
10.3.	Cakupan penerbitan KTP elektronik	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	21,19
10.4.	Cakupan penerbitan KK elektronik	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	23,39
10.5.	Rasio bayi berakte kelahiran	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	39,4	48,6	53,1
10.6.	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk	%	55,16	64,05	78,85	91,19	96,01
10.7.	Cakupan penerbitan akta kematian	%	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>						
11.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
11.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
11.3.	Ratio KDRT	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
11.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
11.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
11.6.	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
<b>12.</b>	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>						
12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	3
12.2.	Rasio akseptor KB	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	81,6	89,95	74,43
12.3.	Cakupan peserta KB aktif	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	80,41	72,82	72,02
12.4.	Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	%	Belum tersedia data	32,01	29,01	35,60	27,83
12.5.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	57,7	38,46	38,46
<b>13.</b>	<b>Sosial</b>						
13.1.	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	20,03
13.2.	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	7,68

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
13.3.	Presentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	83,3
13.4.	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	7,69
13.5.	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	33,16
13.6.	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	26,98
13.7.	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	53,84
<b>14</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>						
14.1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	62,23	65,57	66,61	67,17	65,34
14.2.	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,73	6,36	5,36	3,59	3,75
14.3.	Keselamatan dan perlindungan kerja	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
14.4.	Rasio daya serap tenaga kerja	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data



NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
14.5.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
14.6.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
14.7.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
14.8.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
14.9.	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
14.10.	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
14.11.	Besaran pemeriksaan perusahaan	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
14.12.	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
<b>15.</b>	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>						
15.1.	Persentase koperasi aktif	%	34,56	36,43	38,19	39,46	40,79
15.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Unit	3,643	3,643	3,643	3,701	3,721
15.3.	Jumlah BPR/LKM	Unit	6	6	8	8	8
15.4.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	3.036	3.225	3.468	3.815	4.382
<b>16.</b>	<b>Penanaman Modal</b>						
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	-	101	777	1.110	1.047
16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Juta Rp	90.820	156.100	435.082	2.154.205	3.481.619

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>17.</b>	<b>Kebudayaan</b>						
17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	4	12	4	3	6
17.2.	Cakupan kajian seni	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
17.3.	Cakupan fasilitasi seni	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
17.4.	Cakupan gelar seni	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
17.5.	Misi kesenian	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
17.6.	Cakupan sumberdaya manusia kesenian	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
17.7.	Cakupan tempat	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
17.8.	Cakupan organisasi	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
<b>18.</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>						
18.1.	Jumlah organisasi pemuda	Organisasi	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
18.2.	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
18.3.	Gelanggang / balai remaja per 1000 penduduk	Unit	0	0	0	0	0
18.4.	Lapangan olahraga per 1000 penduduk	Unit	0	0	0	0	0

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>19</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>						
19.1.	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
19.2.	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
19.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
19.4.	Tingkat waktu tanggap ( <i>Response Time Rate</i> )	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
19.5.	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
19.6.	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK ( Wilayah Manajemen Kebakaran)	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
<b>20.</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>						
20.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 1000 penduduk	Pol PP	5,36	5,05	4,71	4,49	4,36
20.2.	Jumlah Linmas per jumlah 10000 penduduk	Linmas	72,21	68,09	63,51	60,52	58,80
20.3.	Rasio pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Poskam-ling	Belum tersedia data	1	1	1	1
<b>21.</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>						
21.1.	Ketersediaan pangan utama	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>22.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>						
22.1.	Rata-rata jumlah binaan PKK	%	5	5	5	5	5
22.2.	PKK aktif	%	32	32	32	32	32
22.3.	Posyandu aktif	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	9,70	12,59
<b>23.</b>	<b>Statistik</b>						
23.1.	Buku "Kota Dalam Angka"	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23.2.	Buku "PDRB Kota"	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>24.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>						
24.1.	Rasio wartel/warnet per 1000 penduduk	Unit	1	1	1	1	1
24.2.	Website milikpemerintah daerah pemerintah daerah	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>25.</b>	<b>Perpustakaan</b>						
25.1.	Jumlah perpustakaan	Unit	0	1	1	6	19
25.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	4.582	5.050	7.964	12.286	19.939
<b>Fokus Layanan Urusan Pilihan</b>							
<b>1.</b>	<b>Pertanian</b>						
1.1.	Produktivitas padi	Kw/Ha	35	33,9	34,1	34,6	33,2

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	13,5	13,27	12,5	12,18	11,89
1.3.	Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB	%	3,28	3,13	2,89	2,77	2,69
1.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	2,44	2,51	2,31	2,23	2,23
<b>2.</b>	<b>Kehutanan</b>						
2.1.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	1,39	1,55	1,4	1,39	1,12
<b>3.</b>	<b>Pariwisata</b>						
3.1.	Kunjungan wisata	Orang	Belum tersedia data	438.921	428.961	630.871	445.709
3.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,62	0,64	0,73	0,71	0,71
<b>4.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>						
4.1.	Produksi perikanan	Ton	1.082,70	1.150,48	1.393,06	1.410,79	1.601,54
4.2.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	4	4	4	4	4
4.3.	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	926,20	967,60	1.128,7	942,00	1.024,4
<b>5.</b>	<b>Perdagangan</b>						
5.1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	39,03	39	39,21	39,41	38,46

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DAYA SAING DAERAH</b>							
<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>							
1.	Produktivitas total daerah	%	26,13	29,9	32,16	34,55	38,56
<b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>							
<b>1.</b>	<b>Perhubungan</b>						
1.1.	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan	%	11,09	11,37	11,39	11,00	10,96
1.2.	Jumlah barang melalui dermaga per tahun	Ton	13.244	13.402	14.501	10.158	10.158
<b>2.</b>	<b>Penataan Ruang</b>						
2.1.	Rasio luas wilayah industri	%	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2.2.	Rasio luas wilayah banjir	%	12,75	13,65	13,65	8,28	8,66
2.3.	Rasio luas wilayah kekeringan	%	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data	Belum tersedia data
2.4.	Rasio luas wilayah perkotaan	%	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23
2.5.	Luas wilayah budidaya	Ha	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
<b>3.</b>	<b>Fasilitas bank dan non bank</b>						
3.1.	Jumlah bank dan cabang	Unit	13	16	17	18	23
3.2.	Jumlah perusahaan asuransi dan cabang	Unit	7	7	7	7	7
3.3.	Jumlah penginapan/ hotel	Unit	21	21	22	23	24

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>							
1.	Angka kriminalitas	%	61,90	58,32	43,32	44,27	35,65
2.	Angka kriminalitas tertangani	%	33,32	31,23	21,23	22,50	18,70
3.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	jenis	21	21	21	21	21
4.	Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha	perda	2	3	6	9	0
<b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>							
1.	Rasio ketergantungan	%	28,74	30,64	35,54	40,26	43,54

## **BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

#### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang terintegrasi dengan pengelolaan keuangan negara, sehingga prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan Undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Ketiga Undang-Undang ini menjadi dasar dari munculnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahan yang terakhir dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga memperhatikan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan memberikan gambaran atas koneksi pengelolaan terhadap pendapatan, belanja, pembiayaan daerah dan gambaran atas kebijakan pengelolaan daerah yang diterapkan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Perencanaan APBD setiap tahunnya mewajibkan mencantumkan perhitungan target pendapatan daerah yang merupakan capaian yang harus diperoleh, sedangkan pada akhir tahun anggaran, diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah yang telah ditetapkan pada RAPBD tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Singkawang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Berdasarkan data pada Tahun 2012, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Singkawang dalam realisasinya mampu menyumbangkan

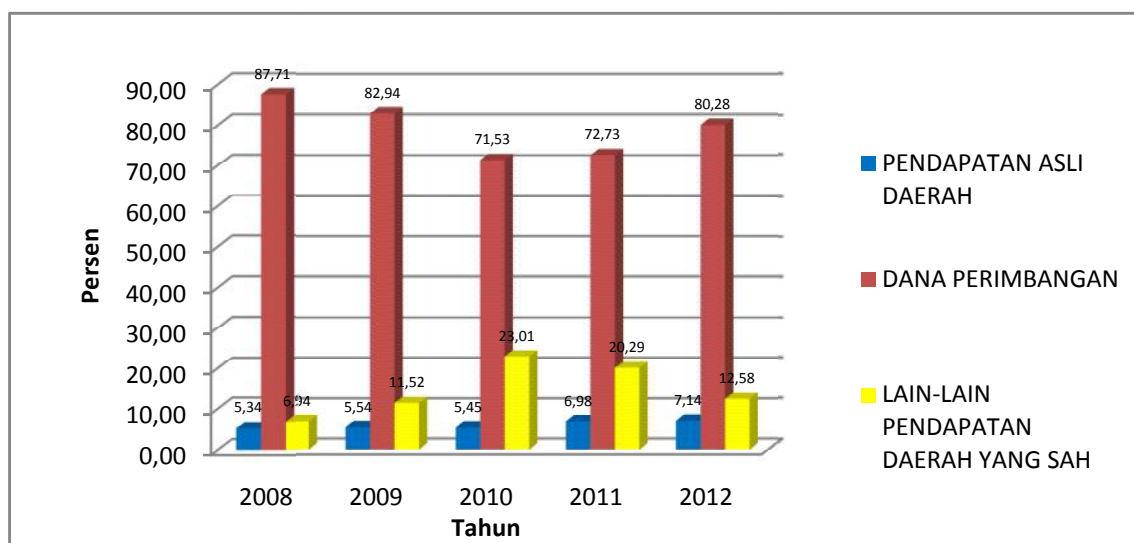


sebesar 7,14% dari total realisasi pendapatan daerah. Rerata pertumbuhan PAD pada kurun waktu yang sama adalah 15,93%. Pada tahun yang sama, pajak daerah memberikan kontribusi terbesar yaitu Rp 15.221.211.681,00, sedangkan retribusi daerah tertinggi yaitu Rp 20.401.923.280,68 terjadi pada Tahun 2011. Rerata pertumbuhan pajak daerah pada Tahun 2008 – 2012 adalah 41,10 % dan rerata pertumbuhan retribusi pada kurun waktu yang sama adalah 9,74%. Penurunan 8,94% retribusi daerah terjadi pada Tahun 2012 yaitu sebesar Rp 1.824.146.559,51.

Kontribusi Pendapatan Daerah yang terbesar justru berasal dari Dana Perimbangan yaitu 80,28% dari total Pendapatan Daerah, sedangkan sisanya berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 12,58%. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang berasal dari transfer dana dari APBN atau Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, pada Tahun 2010 diperoleh data penurunan kontribusi Dana Perimbangan yaitu sebesar 6,69% akibat adanya penurunan kontribusi DAK sebesar 56,37%.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah justru mengalami rerata pertumbuhanyang cukup signifikan yaitu 83,41%. Pergeseran persentase tersebut diakibatkan oleh terjadinya peningkatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terkait dengan dana transfer tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan untuk guru PNSD sebesar 468,94%. Alokasi terbesar kategori dana ini adalah pada Tahun 2011 yaitu Rp 77.218.113.840,00. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Kota Singkawang terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

**Grafik 3.1**  
**PERKEMBANGAN PROPORSI PENDAPATAN DAERAH**  
**TAHUN 2008-2012**



Sumber data :Hasil Analisis Bappeda, 2013

**Tabel 3.1**  
**REALISASI PENDAPATAN DAERAH**  
**TAHUN 2008–2012**

URAIAN	REALISASI (Rp)				
	2008	2009	2010	2011	2012
<b>PENDAPATAN</b>	<b>371.114.694.291,51</b>	<b>412.287.074.474,22</b>	<b>446.101.980.306,06</b>	<b>506.727.648.512,89</b>	<b>543.603.040.228,28</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>19.830.157.948,51</b>	<b>22.836.913.984,49</b>	<b>24.330.714.255,33</b>	<b>35.346.798.485,44</b>	<b>38.826.568.142,84</b>
%	<b>5,34</b>	<b>5,54</b>	<b>5,45</b>	<b>6,98</b>	<b>7,14</b>
Pendapatan Pajak Daerah	3.313.109.486,44	4.091.567.875,00	4.587.494.214,00	10.151.938.826,00	15.221.211.681,00
%	16,71	17,92	18,85	28,72	39,20
Hasil Retribusi Daerah	11.399.630.535,48	13.167.869.102,23	15.882.749.799,81	20.401.923.280,68	18.577.776.721,17
%	57,49	57,66	65,28	57,72	47,85
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	338.451.184,16	515.877.025,60	754.358.306,37	1.070.825.770,23	1.312.224.556,18
%	1,71	2,26	3,10	3,03	3,38
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.778.966.742,43	5.061.599.981,66	3.106.111.935,15	3.722.110.608,53	3.715.355.184,49
%	24,10	22,16	12,77	10,53	9,57
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>325.522.034.622,00</b>	<b>341.970.573.158,00</b>	<b>319.104.398.982,00</b>	<b>368.558.783.740,00</b>	<b>436.385.253.668,00</b>
%	<b>87,71</b>	<b>82,94</b>	<b>71,53</b>	<b>72,73</b>	<b>80,28</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23.170.526.622,00	22.505.269.158,00	24.657.092.982,00	23.201.221.740,00	28.663.080.668,00
%	7,12	6,58	7,73	6,30	6,57
Dana Alokasi Umum	254.513.508.000,00	262.349.304.000,00	269.526.606.000,00	309.175.562.000,00	373.908.313.000,00
%	78,19	76,72	84,46	83,89	85,68
Dana Alokasi Khusus	47.838.000.000,00	57.116.000.000,00	24.920.700.000,00	36.182.000.000,00	33.813.860.000,00
%	14,70	16,70	7,81	9,82	7,75

URAIAN	REALISASI (Rp)				
	2008	2009	2010	2011	2012
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>25.762.501.721,00</b>	<b>47.479.587.331,73</b>	<b>102.666.867.068,73</b>	<b>102.822.066.287,45</b>	<b>68.391.218.417,44</b>
%	<b>6,94</b>	<b>11,52</b>	<b>23,01</b>	<b>20,29</b>	<b>12,58</b>
Pendapatan Hibah	8.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	12.330.970.721,00	9.557.263.831,73	16.816.821.490,23	15.531.075.614,45	25.580.932.417,44
%	47,86	20,13	16,38	15,10	37,40
Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	1.181.531.000,00	27.436.323.500,00	75.953.591.932,00	77.218.113.840,00	34.055.986.000,00
%	4,59	57,79	73,98	75,10	49,80
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.250.000.000,00	10.486.000.000,00	9.896.453.646,50	10.072.876.833,00	8.754.300.000,00
%	16,50	22,09	9,64	9,80	12,80

Sumber data : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang, diolah oleh Bappeda, 2013

**Tabel 3.2**  
**PERTUMBUHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2008- 2012**

NO	URAIAN	REALISASI (%)					RERATA PERTUMBUHAN (%)
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>15,84</b>	<b>11,09</b>	<b>8,20</b>	<b>13,59</b>	<b>7,28</b>	<b>11,20</b>
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2,84</b>	<b>15,16</b>	<b>6,54</b>	<b>45,28</b>	<b>9,84</b>	<b>15,93</b>
	Pendapatan Pajak Daerah	(1,34)	23,50	12,12	121,30	49,93	41,10
	Hasil Retribusi Daerah	(6,93)	15,51	20,62	28,45	(8,94)	9,74
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	103,28	52,42	46,23	41,95	22,54	53,28
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36,17	5,91	(38,63)	19,83	(0,18)	4,62
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>10,82</b>	<b>5,05</b>	<b>(6,69)</b>	<b>15,50</b>	<b>18,40</b>	<b>8,62</b>
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22,76	(2,87)	9,56	(5,90)	23,54	9,42
	Dana Alokasi Umum	6,98	3,08	2,74	14,71	20,94	9,69
	Dana Alokasi Khusus	29,46	19,39	(56,37)	45,19	(6,55)	6,23
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>249,83</b>	<b>84,30</b>	<b>116,23</b>	<b>0,15</b>	<b>(33,49)</b>	<b>83,41</b>
	Pendapatan Hibah	0,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	(20,00)
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	141,82	(22,49)	75,96	(7,65)	64,71	50,47
	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	0,00	2.222,10	176,84	1,66	(55,90)	468,94
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	87,64	146,73	(5,62)	1,78	(13,09)	43,49

Sumber data :Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang, diolah oleh Bappeda, 2013

### **3.1.2. Neraca Keuangan Daerah**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Apabila suatu entitas memiliki aset/ barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/ barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset non lancar). Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut: (1) kas dan setara kas; (2) investasi jangka pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4) persediaan; (5) investasi jangka panjang; (6) aset tetap; (7) kewajiban jangka pendek; (8) kewajiban jangka panjang; dan (9) ekuitas.

Rata-rata pertumbuhan ekuitas Pemerintah Kota Singkawang dari Tahun 2008 hingga 2012 adalah 56,95%, angka ini cukup menggembirakan walaupun Pemerintah Kota Singkawang masih menanggung kewajiban yang masih mengikat yaitu kewajiban pembayaran utang PDAM Gn. Poteng kepada Kementerian Keuangan yang cukup besar yaitu Rp 5.996.415.255,22 pada Tahun 2012. Aset yang dimiliki Pemerintah Kota Singkawang pada Tahun 2012 berkisar Rp 1.408 Triliun dengan rata-rata pertumbuhan 14,39% sejak Tahun 2008 hingga Tahun 2012. Penambahan nilai aset tergolong signifikan pada kategori aset jalan, irigasi, dan jaringan kemudian aset gedung dan bangunan pemerintah. Sayangnya aset tanah dan aset tagihan penjualan angsuran mengalami penurunan masing-masing 15,01% dan 34,44% pada periode yang sama.

**Tabel 3.3**  
**PERTUMBUHAN NERACA DAERAH TAHUN 2008 - 2012**

No	U R A I A N	REALISASI (Rp)					RERATA PERTUMBUHAN (%)
		Per 31 Desember 2008	Per 31 Desember 2009	Per 31 Desember 2010	Per 31 Desember 2011	Per 31 Desember 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>A S E T</b>						
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>41.167.035.500,20</b>	<b>7.040.989.063,58</b>	<b>20.225.851.082,57</b>	<b>24.387.652.522,63</b>	<b>52.555.178.476,22</b>	<b>60,11</b>
	Kas di Kas Daerah	36.629.363.221,80	3.107.694.206,58	13.298.328.224,57	19.381.039.377,83	42.851.704.614,79	100,81
	Kas di Bendahara Pengeluaran	128.561.476,00	329.544.265,00	145.812.858,00	350.055.356,00	7.422.904,00	35,69
	Kas di Bendahara Penerimaan	129.956.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)
	Piutang Pajak	365.682.707,00	320.839.411,00	71.629.048,00	86.909.216,00	40.360.376,00	(30,54)
	Piutang Retribusi	0,00	0,00	348.389.341,00	872.822.055,00	3.759.206.103,43	240,61
	Piutang Lainnya	0,00	0,00	3.087.042.512,00	0,00	0,00	(100,00)
	Persediaan	3.913.471.359,00	3.282.911.181,00	3.274.649.099,00	3.696.826.517,80	5.896.484.478,00	14,01
<b>1.2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>8.428.017.185,00</b>	<b>8.834.669.185,00</b>	<b>9.584.379.185,00</b>	<b>10.266.016.857,57</b>	<b>12.457.701.589,89</b>	<b>10,44</b>
	Investasi Non Permanen						
	Investasi dalam Modal Bergulir	3.033.472.185,00	2.740.124.185,00	2.739.834.185,00	2.621.471.857,57	2.896.871.589,89	(0,87)
	Investasi non permanen lainnya	3.039.545.000,00	3.039.545.000,00	3.039.545.000,00	3.039.545.000,00	2.955.830.000,00	(0,69)
	Investasi Permanen						
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.355.000.000,00	3.055.000.000,00	3.805.000.000,00	4.605.000.000,00	6.605.000.000,00	29,68
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>772.427.141.702,40</b>	<b>944.664.036.407,40</b>	<b>1.093.519.704.285,00</b>	<b>1.225.365.311.978,87</b>	<b>1.343.400.902.318,02</b>	<b>14,94</b>
	Tanah	164.023.541.700,00	165.658.645.700,00	194.605.091.675,00	194.826.479.592,50	41.663.261.722,22	(15,01)
	Peralatan dan Mesin	87.010.991.022,00	111.261.189.972,00	132.529.118.990,00	154.043.099.676,00	185.437.977.710,00	20,90
	Gedung dan Bangunan	232.597.569.712,40	289.925.784.693,40	311.310.468.818,00	353.747.484.173,35	395.240.077.708,35	14,35
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	279.399.481.508,00	355.094.442.338,00	429.628.270.898,00	508.440.939.211,02	704.775.308.551,45	26,26
	Aset Tetap Lainnya	1.741.442.104,00	2.082.723.704,00	4.482.783.904,00	9.559.648.826,00	13.147.296.626,00	71,40
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.654.115.656,00	20.641.250.000,00	20.963.970.000,00	4.747.660.500,00	3.136.980.000,00	14,99

No	U R A I A N	REALISASI (Rp)					RERATA PERTUMBUHAN (%)
		Per 31 Desember 2008	Per 31 Desember 2009	Per 31 Desember 2010	Per 31 Desember 2011	Per 31 Desember 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>1.435.004.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.727.200,00</b>	<b>173.827.200,00</b>	<b>(12,97)</b>
	Tagihan Penjualan Angsuran			0,00	37.600.000,00	11.700.000,00	(34,44)
	Aset lain-lain	1.435.004.935,00	0,00	0,00	162.127.200,00	162.127.200,00	(50,00)
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>823.457.199.322,60</b>	<b>960.539.694.655,98</b>	<b>1.123.329.934.552,57</b>	<b>1.260.218.708.559,07</b>	<b>1.408.587.609.584,13</b>	<b>14,39</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>						
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500.000.000,00</b>	<b>30.004.074.159,00</b>	<b>1.067.932.866,91</b>	<b>5.996.415.255,22</b>	<b>206,02</b>
	Utang Pada PT Bank Kalbar	0,00	8.500.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	0,00	76,47
	Utang Pada Pihak Ketiga		0,00	4.074.159,00	0,00	0,00	(100,00)
	Utang Pada Kementrian Keuangan (PDAM)			0,00	1.067.932.866,91	5.996.415.255,22	461,50
<b>2.2</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.161.863.345,97</b>	<b>447.547.378,34</b>	<b>(95,60)</b>
	Utang Pada PT Bank Kalbar	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utang Pada Kementrian Keuangan (PDAM)	-	-	0,00	10.161.863.345,97	447.547.378,34	(95,60)
<b>3</b>	<b>EKUITAS DANA</b>						
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>41.167.035.500,20</b>	<b>(1.459.010.936,42)</b>	<b>(9.778.223.076,43)</b>	<b>23.319.719.655,72</b>	<b>46.558.763.221,00</b>	<b>56,95</b>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	36.757.924.697,80	3.437.238.471,58	13.440.066.923,57	19.731.094.733,83	42.859.127.518,79	91,10
	Pendapatan yang Ditangguhkan	129.956.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)
	Cadangan Piutang	365.682.707,00	320.839.411,00	3.507.060.901,00	959.731.271,00	3.799.566.479,43	301,02
	Cadangan Persediaan	3.913.471.359,00	3.282.911.181,00	3.274.649.099,00	3.696.826.517,80	5.896.484.478,00	14,01

No	U R A I A N	R E A L I S A S I (Rp)					RERATA PERTUMBUHAN (%)
		Per 31 Desember 2008	Per 31 Desember 2009	Per 31 Desember 2010	Per 31 Desember 2011	Per 31 Desember 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dana yang harus disediakan untuk bayar Utang Jangka Pendek	0,00	(8.500.000.000,00)	(30.000.000.000,00)	(1.067.932.866,91)	(5.996.415.255,22)	206,00
<b>3.2</b>	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>782.290.163.822,40</b>	<b>953.498.705.592,40</b>	<b>1.103.104.083.470,00</b>	<b>1.225.669.192.690,47</b>	<b>1.355.584.883.729,57</b>	<b>14,82</b>
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	8.428.017.185,00	8.834.669.185,00	9.584.379.185,00	10.266.016.857,57	12.457.701.589,89	10,44
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	772.427.141.702,40	944.664.036.407,40	1.093.519.704.285,00	1.225.365.311.978,87	1.343.400.902.318,02	14,94
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	1.435.004.935,00	0,00	0,00	199.727.200,00	173.827.200,00	(12,97)
	Dana yang harus disediakan untuk bayar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	(10.161.863.345,97)	(447.547.378,34)	(95,60)
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>823.457.199.322,60</b>	<b>960.539.694.655,98</b>	<b>1.123.329.934.552,57</b>	<b>1.260.218.708.559,07</b>	<b>1.408.587.609.584,13</b>	<b>14,39</b>

Sumber data : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang, 2013



Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau diartikan pula sebagai kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Likuiditas adalah masalah yang berhubungan dengan kemampuan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi.

Pemerintah daerah yang mempunyai alat-alat likuid sedemikian besarnya sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus terpenuhi, dikatakan bahwa pemerintah daerah tersebut likuid, dan sebaliknya apabila suatu pemerintah daerah tidak mempunyai alat-alat likuid yang cukup untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus terpenuhi dikatakan pemerintah daerah tersebut *insolvable*. Rasio likuiditas yang digunakan oleh Pemerintah Kota Singkawang adalah rasio lancar (*current ratio*) dan *quick ratio*.

**Tabel 3.4**  
**RASIO LIKUIDITAS TAHUN 2008 – 2012**

No	Rasio Likuiditas	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Rasio Lancar	0	0,83	0,67	22,84	8,91
2	Quick Ratio	0	0,44	0,56	19,37	7,78

*Sumber data : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang, diolah oleh Bappeda, 2013*

Rasio lancar (*Current Ratio*) digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota Singkawang dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar pembayaran hutang jangka pendeknya. Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar neraca keuangan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2012 sebesar 8,91%. Angka ini mengindikasikan bahwa pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya dalam rangka melunasi hutang jangka pendek.

Rasio cepat (*Quick Ratio*) merupakan kemampuan aset lancar dalam melunasi hutang jangka pendeknya setelah dikurangi persediaan. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2012 sebesar 7,78%.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas.

**Tabel 3.5**  
**RASIO SOLVABILITAS TAHUN 2008-2012**

<b>No</b>	<b>Rasio Solvabilitas</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Rasio Kewajiban Terhadap Aset	0	0,00884919	0,02670994	0,00891099	0,00891099
2	Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas	0	0,0089282	0,02744294	0,00899111	0,00899111

*Sumber data : Hasil Analisis Bappeda Kota Singkawang, 2013*

Rasio kewajiban terhadap aset pada Tahun 2012 sebesar 0,00891099. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Singkawang cukup kuat untuk membayar kewajibannya. Rasio kewajiban terhadap ekuitas berdasarkan perhitungan pada Tahun 2012 diperoleh angka sebesar 0,00899111. Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin baik karena menunjukkan kemampuan pemerintah untuk membayar kewajibannya.

### **3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

#### **3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran**

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Singkawang selama kurun waktu Tahun 2008-2012 ditinjau dari pengeluaran untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan pengeluaran pembiayaan yaitu yang terdiri dari belanja ditambah pembiayaan pengeluaran. Tabel 3.6 menunjukkan bahwa ada kecenderungan kenaikan porsi alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur. Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada Tahun 2008 sebesar Rp 164.261 M atau 44,96% menjadi 56,62% atau Rp 294.817 M. Namun pada Tahun 2009, terjadi sedikit penurunan alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 2,89% dari tahun sebelumnya.

Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur yang lebih besar menunjukkan bahwa sebagian besar belanja daerah banyak diperuntukkan bagi pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Pada tahun tersebut dilaksanakan pengangkatan pejabat-pejabat struktural baru yang otomatis alokasi tunjangan jabatan struktural pun bertambah. Kondisi ini dapat menimbulkan asumsi bahwa keberpihakan pengalokasian APBD Kota Singkawang belum sepenuhnya optimal untuk peningkatan pelayanan bagi publik karena sebagian besar APBD digunakan untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur.

**Tabel 3.6**  
**PROPORSI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR**  
**TAHUN 2008 – 2012**

No.	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase Belanja Aparatur
		( Rp )	( Rp )	
1	Tahun Anggaran 2008	164,261,139,664.00	365,346,813,726.40	44,96
2	Tahun Anggaran 2009	193,490,268,877.00	458,902,844,663.53	42,16
3	Tahun Anggaran 2010	235,389,234,166.58	466,453,085,463.65	50,46
4	Tahun Anggaran 2011	265,102,718,912.00	500,927,117,779.12	52,92
5	Tahun Anggaran 2012	294,817,322,215.00	520,675,797,711.00	56,62

*Sumber data : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang, diolah oleh Bappeda, 2013*

### **3.2.2. Analisis Pembiayaan**

Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh jumlah pendapatan daerah yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah. Pembiayaan daerah pada prinsipnya terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Kota Singkawang merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan terbesar diperoleh dari SiLPA, sedangkan pengeluaran terbesar pada pembayaran pokok hutang.

Penerimaan pembiayaan terbesar terjadi pada tahun 2009, yaitu Rp 45.257 M dan hal ini dikarenakan pada tahun tersebut terdapat SiLPA tertinggi yaitu Rp 36.757 M dan penerimaan piutang daerah tertinggi pula sebesar Rp 4.795 M sedangkan pengeluaran pembiayaan berkisar Rp 4.783 M. Sedangkan penerimaan terendah terjadi pada Tahun 2012 yaitu Rp 19.731 M dengan pengeluaran pembiayaan yang lumayan tinggi sebesar Rp 5.074 M karena terdapat penyertaan modal sebesar Rp 2 M. Gambaran utuh realisasi pengelolaan pembiayaan daerah Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.7**  
**PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH**  
**TAHUN 2008 – 2012**

URAIAN	REALISASI(Rp)					RERATA PERTUMBUHAN (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>30.990.044.132,69</b>	<b>50.053.008.660,89</b>	<b>33.791.376.267,58</b>	<b>13.930.564.000,06</b>	<b>19.931.885.001,51</b>	<b>(2,28)</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	28.051.333.732,88	36.757.924.697,80	3.437.238.471,58	13.440.066.923,57	19.731.094.733,83	60,20
%	90,52	73,44	10,17	96,48	98,99	
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	8.500.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	0,00	30,59
%	0,00	16,98	88,78	0,00	0,00	
Penerimaan Piutang Daerah	2.938.710.399,81	4.795.083.963,09	354.137.796,00	490.497.076,49	200.790.267,68	(10,65)
%	9,48	9,58	1,05	3,52	1,01	
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>2.155.902.227,00</b>	<b>4.783.327.396,00</b>	<b>10.835.088.089,26</b>	<b>31.751.081.450,43</b>	<b>5.074.308.606,00</b>	<b>73,15</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.000.000,00	700.000.000,00	750.000.000,00	800.000.000,00	2.000.000.000,00	37,71
%	23,19	14,63	6,92	2,52	39,41	
Pembayaran Pokok Utang	1.655.902.227,00	4.083.327.396,00	10.085.088.089,26	30.951.081.450,43	3.074.308.606,00	85,75
%	76,81	85,37	93,08	97,48	60,59	
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>28.834.141.905,69</b>	<b>45.269.681.264,89</b>	<b>22.956.288.178,32</b>	<b>(17.820.517.450,37)</b>	<b>14.857.576.395,51</b>	<b>(75,94)</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>36.757.924.697,80</b>	<b>3.437.238.471,58</b>	<b>13.440.271.109,99</b>	<b>19.731.094.733,83</b>	<b>42.859.127.518,79</b>	<b>92,88</b>

*Sumber data : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang, diolah oleh Bappeda, 2013*

Historis penutup defisit riil anggaran daerah selama Tahun 2008 - 2012 sebagaimana Tabel 3.8 menunjukkan bahwa Kota Singkawang mengalami dua kali defisit riil anggaran dan tiga kali surplus anggaran walaupun realisasi pendapatan cenderung meningkat 11,20% setiap tahunnya. Namun secara keseluruhan menunjukkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan cenderung menurun 65,10%.

Pengeluaran pembiayaan daerah cukup besar pertumbuhannya yaitu 73,15% dari Tahun 2008 - 2012, dan pengeluaran pembiayaan terbesar terjadi pada Tahun 2011 yaitu sejumlah Rp 31.751.081.450,43. *Trend* pengeluaran pembiayaan inilah yang menjadi faktor penentu terjadi surplus ataupun defisitnya anggaran Kota Singkawang.

Defisit anggaran terjadi pada Tahun 2009 dan 2010. Besaran defisit masing-masing Rp 46.615 M dan Rp 20.351 M. Defisit anggaran yang terjadi pada Tahun 2009 dan Tahun 2010 didorong akibat jumlah belanja gaji pegawai yang meningkat. Defisit anggaran ini juga terjadi akibat kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat namun pendapatan daerah yang diperoleh tidak mampu menutupi besarnya belanja tersebut.

Kota Singkawang juga ternyata pernah mengalami surplus anggaran masing-masing sebesar Rp 5.767 M, Rp 5.800 M dan Rp 22.927 M yaitu pada Tahun 2008, 2011 dan 2012. Surplus anggaran yang terjadi pada tiga tahun anggaran sebenarnya juga bukan didorong dari penerimaan daerah yang meningkat secara signifikan tetapi lebih karena berbagai faktor yang menyebabkan penyerapan terhadap belanja daerah belum maksimal sebagaimana deskripsi yang ditampilkan pada Tabel 3.8.

Pinjaman daerah terbesar pada Tahun 2010 yaitu Rp 30 M. Sedangkan penerimaan piutang pada tahun tersebut hanya Rp 354.137.796,00. Secara umum, penerimaan piutang daerah ternyata mengalami rerata penurunan yang lumayan setiap tahunnya yaitu berkisar 10,65%. Penerimaan pembayaran piutang terbesar terjadi hanya pada Tahun 2009 yaitu sejumlah Rp 4.795.083.963,09 dan yang terendah pada Tahun 2012 yaitu Rp 200.790.267,68. Kondisi ini tentu saja belum sepenuhnya ideal dalam konsep pengelolaan keuangan daerah yang terpadu, konsisten dan menerapkan perencanaan anggaran berbasis kinerja dan belum sepenuhnya menunjukkan keberpihakan kepada pelayanan publik.

**Tabel 3.8**  
**PENUTUP DEFISIT RIIL ANGGARAN**  
**TAHUN 2008-2012**

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)					RERATA PERTUMBUHAN (%)
		2008	2009	2010	2011	2012	
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	371.114.694.291,51	412.287.074.474,22	446.101.980.306,06	506.727.648.512,89	543.603.040.228,28	11,20
2.	Belanja Daerah	363.190.911.499,40	454.119.517.267,53	455.617.997.374,39	469.176.036.328,69	515.601.489.105,00	7,85
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.155.902.227,00	4.783.327.396,00	10.835.088.089,26	31.751.081.450,43	5.074.308.606,00	73,15
<b>A</b>	<b>Surplus/(Defisit) riil</b>	<b>5.767.880.565,11</b>	<b>(46.615.770.189,31)</b>	<b>(20.351.309.344,01)</b>	<b>5.800.530.733,77</b>	<b>22.927.242.517,28</b>	<b>(62,82)</b>
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	28.051.333.732,88	36.757.924.697,80	3.437.238.471,58	13.440.066.923,57	19.731.094.733,83	60,20
5.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	8.500.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					0,00	0,00
9.	Penerimaan Piutang Daerah	2.938.710.399,81	4.795.083.963,09	354.137.796,00	490.497.076,49	200.790.267,68	(10,65)
<b>B</b>	<b>Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>30.990.044.132,69</b>	<b>50.053.008.660,89</b>	<b>33.791.376.267,58</b>	<b>13.930.564.000,06</b>	<b>19.931.885.001,51</b>	<b>(2,28)</b>
<b>A-B</b>	<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan</b>	<b>36.757.924.697,80</b>	<b>3.437.238.471,58</b>	<b>13.440.066.923,57</b>	<b>19.731.094.733,83</b>	<b>42.859.127,52</b>	<b>(65,10)</b>

Sumber data : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang, diolah oleh Bappeda, 2013

### **3.3. Kerangka Pendanaan**

#### **3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama**

Kerangka pendanaan merupakan kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama lima tahun kedepan. Kapasitas riil adalah total penerimaan daerah yang dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama digunakan untuk mengetahui secara rasional kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja program-program mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Singkawang. Secara total, rerata pertumbuhan belanja periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama untuk Tahun 2010 – 2012 adalah 14,09%.

Rerata pertumbuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung memiliki proporsi yang berimbang yaitu masing-masing 15,55 % dan 14,53%. Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/ WKDH pada kurun waktu Tahun 2010 – 2012 menunjukkan pertumbuhan yang paling tinggi yaitu sebesar 52,90% dan porsi terbesar belanja ini terjadi pada Tahun 2012 senilai Rp 1.719.600.000,00. Belanja bunga juga mengalami kenaikan 51,85% dan porsi terbesar pada Tahun 2012 yaitu Rp 2.606.619.730,00.

Adapun realisasi alokasi belanja langsung untuk pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama pada Tahun 2010 – 2012 sebagaimana Tabel 3.9 menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) adalah 59,32% dan alokasi terbesar pada Tahun 2012 yaitu Rp 649,845,000.00 namun belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya) walaupun mengalami *trend* kenaikan berkisar 40,14% dan lebih kecil dari belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) tapi alokasi pengeluarannya sangat mencolok yaitu mencapai Rp 4.612.078.150,00. Hal ini menunjukkan belum adanya kebijakan khusus yang mengatur penghematan penggunaan listrik, air dan telepon serta pengaturan ketentuan sewa perlengkapan dan peralatan kantor.

**Tabel 3.9**  
**REALISASI PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA**  
**TAHUN 2010 – 2012**

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)			RERATA PERTUMBUHAN (%)
		2010	2011	2012	
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>184.718.792.301,07</b>	<b>218.931.730.043,85</b>	<b>246.466.941.938,00</b>	<b>15,55</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	182.748.180.852,00	215.491.209.290,00	242.140.722.208,00	15,14
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	740.400.000,00	1.040.400.000,00	1.719.600.000,00	52,90
3	Belanja Bunga	1.230.211.449,07	2.400.120.753,85	2.606.619.730,00	51,85
4	Belanja Bagi hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>12.097.281.495,00</b>	<b>11.956.798.446,00</b>	<b>15.569.468.317,00</b>	<b>14,53</b>
1	Belanja Honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.	7.261.253.226,00	8.404.586.966,00	9.644.305.167,00	15,25
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	588.436.000,00	273.324.000,00	202.754.000,00	49,92
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	3.651.110.769,00	2.060.395.188,00	4.612.078.150,00	40,14
4	Belanja Sewa Gedung Kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	406.693.000,00	852.598.292,00	649.845.000,00	23,66
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	189.788.500,00	365.894.000,00	460.486.000,00	59,32



NO	URAIAN	REALISASI (Rp)			RERATA PERTUMBUHAN (%)
		2010	2011	2012	
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN PENGELUARAN</b>	<b>10,835,088,089.26</b>	<b>31.751.081.450,43</b>	<b>5,074,308,606.00</b>	<b>54.51</b>
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Kota Singkawang	750.000.000,00	800.000.000,00	2.000.000.000,00	78,33
3	Pembayaran pokok utang	10.085.088.089,26	30.951.081.450,43	3.074.308.606,00	58,42
	<b>TOTAL (A+B+C)</b>	<b>207,651.161.885,33</b>	<b>262.639.609.940,28</b>	<b>267.110.718.861,00</b>	<b>14.09</b>

*Sumber data : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang, diolah oleh Bappeda, 2013*

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS justru menunjukkan kecenderungan penurunan rata-rata 39,68% dari Tahun 2010 – 2012. Sedangkan belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis menunjukkan peningkatan 15,25% dan alokasi terbesar pada Tahun 2012 yaitu Rp 9.644.305.167,00. Alokasi honorarium PNS khusus guru dan tenaga medis mengambil porsi terbesar dari belanja langsung pada kategori pengeluaran periodik wajib dan mengikat.

Pada kategori realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur sebagaimana Tabel 3.10, untuk belanja tambahan penghasilan mengalami penurunan sekitar 20,58%, sedangkan belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/ WKDH mengalami kenaikan yang paling tinggi hingga mencapai 52,90%. Sedangkan alokasi anggaran belanja tidak langsung justru terserap untuk pembayaran gaji dan tunjangan yaitu sebesar Rp 242.140.722.208,00.

Walaupun belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS mengalami kenaikan 33,35% hingga Tahun 2012, beasiswa bagi PNS justru menurun 39,68%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur dari sisi pendidikan formil belum begitu menjadi suatu kebutuhan Pemerintah Kota Singkawang dalam meningkatkan kemampuan akademis aparaturnya. Pengiriman aparatur untuk mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS menjadi solusi Pemerintah Kota Singkawang untuk meningkatkan kemampuan teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Belanja honorarium dan lembur pegawai masing-masing mengalami kenaikan berkisar 14,32% dan 9,99%. Alokasi APBD terbesar untuk belanja tersebut adalah pada Tahun 2012 yaitu Rp 16.677.251.640,00 dan Rp 5.319.475.850,00.

Belanja pakaian dinas dan atributnya serta belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu mengalami kenaikan sangat signifikan yaitu masing-masing sebesar 202,04% dan 240,01% sedangkan belanja tambahan penghasilan mengalami kecenderungan penurunan sebesar 20%. Selanjutnya untuk belanja perjalanan dinas meningkat 10,40% dan alokasi terbesar pada Tahun 2012 yaitu Rp 21.530.951.450,00.

**Tabel 3.10**  
**REALISASI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR**  
**TAHUN 2010-2012**

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)			RERATA PERTUMBUHAN (%)
		2010	2011	2012	
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>387.607.008.509,00</b>	<b>396.305.385.161,00</b>	<b>432.293.934.822,00</b>	<b>5,66</b>
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>210.856.083.195,00</b>	<b>238.172.655.451,00</b>	<b>261.376.112.479,00</b>	<b>11,35</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	182.748.180.852,00	215.491.209.290,00	242.140.722.208,00	15,14
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	26.918.754.500,00	21.116.974.000,00	16.976.203.000,00	(20,58)
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	740.400.000,00	1.040.400.000,00	1.719.600.000,00	52,90
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah**)	448.747.843,00	524.072.161,00	539.587.271,00	9,87
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>176.750.925.314,00</b>	<b>158.132.729.710,00</b>	<b>170.917.822.343,00</b>	<b>(1,22)</b>
1	Belanja Honorarium PNS**)	12.955.721.354,00	12.996.539.966,00	16.677.251.640,00	14,32
2	Belanja Uang Lembur**)	4.914.248.804,00	3.651.364.850,00	5.319.475.850,00	9,99
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	588.436.000,00	273.324.000,00	202.754.000,00	(39,68)
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	1.343.819.500,00	1.064.257.000,00	1.995.610.600,00	33,35
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	258.749.200,00	245.000.000,00	260.750.000,00	0,56
6	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai***)	7.280.203.376,00	5.022.770.803,00	7.710.198.275,00	11,25
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**)	150.188.000,00	878.179.750,00	170.035.500,00	202,04
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	110.241.000,00	593.250.000,00	841.713.000,00	240,01
9	Belanja Perjalanan Dinas**)	18.209.827.750,00	16.623.437.792,00	21.530.951.451,00	10,40
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	-
11	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-	-
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	130.939.490.330,00	116.784.605.549,00	116.209.082.027,00	(5,65)

Sumber data : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang, diolah oleh Bappeda, 2013

Belanja daerah pada struktur APBD Kota Singkawang di bagi menjadi dua kelompok yaitu Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

1. Belanja Tidak Langsung dibagi menjadi : (a). Belanja Pegawai, (b). Belanja Bunga, (c). Belanja Subsidi (d). Belanja Hibah (e). Belanja Bantuan Sosial, (f). Belanja Bagi Hasil, (g). Belanja Bantuan Keuangan, dan (h). Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung dibagi menjadi : (a). Belanja Pegawai, (b). Belanja Barang dan Jasa dan (c). Belanja Modal.

Pada Tahun 2012 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.11 menunjukkan bahwa belanja Kota Singkawang yang terealisasi mencapai Rp 515.601.489.105,00. Belanja daerah pada umumnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rerata pertumbuhan 7,85 %. Akan tetapi, proporsi belanja tidak langsung pada Tahun 2012 mengambil porsi alokasi anggaran paling besar yaitu 55,71% dibandingkan belanja langsung sebesar 44,29%.

Pengeluaran belanja pegawai yang merupakan penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya bagi pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang juga mengalami peningkatan 17,69% dan alokasi terbesar terjadi pada Tahun 2012 yaitu Rp 265.708.611.225,00.

Belanja langsung selanjutnya dalam struktur APBD merupakan pos belanja yang terkait dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Belanja langsung mengalami rerata pertumbuhan dari Tahun 2008 - 2012 sebesar 2,19%. Belanja pegawai pada kategori belanja langsung mengalami peningkatan sebesar 3,79% dan alokasi belanja pegawai terbesar terjadi pada APBD Tahun 2012 yaitu Rp 29.108.710.990,00.

Sedangkan belanja barang dan jasa mengalami rerata peningkatan paling kecil yaitu sebesar 0,13% selama lima tahun. Porsi belanja barang dan jasa tertinggi terjadi pada Tahun 2008 yaitu Rp 84.783.241.930,00 atau sekitar 40,52% dari total belanja langsung. Belanja modal mengalami rerata pertumbuhan tertinggi dari alokasi belanja langsung pada kurun waktu yang sama yaitu sebesar 4,59%. Porsi terbesar belanja modal terjadi pada APBD Tahun 2010 yaitu sebesar 182,43% dari total belanja langsung.

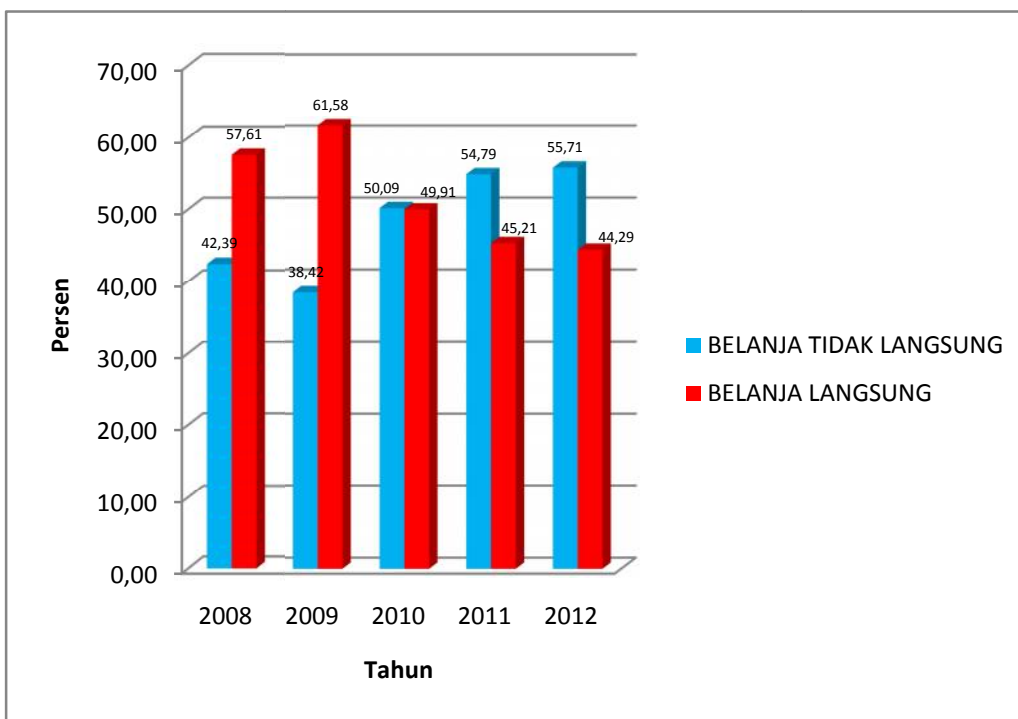
**Tabel 3.11**  
**REALISASI BELANJA DAERAH**  
**TAHUN 2008-2012**

URAIAN	REALISASI (Rp)					RERATA PERTUMBUHAN (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	
<b>BELANJA</b>	<b>363.190.911.499,40</b>	<b>454.119.517.267,53</b>	<b>455.617.997.374,39</b>	<b>469.176.036.328,69</b>	<b>515.601.489.105,00</b>	<b>7,85</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>153.960.392.914,00</b>	<b>174.482.948.801,53</b>	<b>228.229.135.095,81</b>	<b>257.072.698.669,69</b>	<b>287.241.032.449,00</b>	<b>15,78</b>
%	42,39	38,42	50,09	54,79	55,71	
Belanja Pegawai	140.640.180.164,00	165.217.294.339,00	210.713.995.695,00	238.172.655.451,00	265.708.611.225,00	17,69
%	91,35	94,69	92,33	92,65	92,50	
Belanja Bunga	0,00	148.750.000,00	1.230.211.449,07	2.400.120.753,85	2.606.619.730,00	166,15
%	0,00	0,09	0,54	0,93	0,91	
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20,00)
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Belanja Hibah	1.695.995.000,00	2.376.241.000,00	6.581.970.000,00	6.569.195.560,00	10.253.952.523,00	74,60
%	1,10	1,36	2,88	2,56	3,57	
Belanja Bantuan Sosial	10.482.647.500,00	5.172.630.700,00	6.871.921.188,00	6.554.082.768,00	6.358.100.000,00	(14,00)
%	6,81	2,96	3,01	2,55	2,21	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.066.795.250,00	1.390.038.500,00	1.905.427.350,00	1.931.159.652,00	2.266.607.971,00	20,44
%	0,69	0,80	0,83	0,75	0,79	
Belanja Tidak Terduga	74.775.000,00	177.994.262,53	925.609.413,74	1.445.484.484,84	47.141.000,00	89,48

URAIAN	REALISASI (Rp)					RERATA PERTUMBUHAN (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	
%	0,05	0,10	0,41	0,56	0,02	
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>209.230.518.585,40</b>	<b>279.636.568.466,00</b>	<b>227.388.862.278,58</b>	<b>212.103.337.659,00</b>	<b>228.360.456.656,00</b>	<b>2,19</b>
%	57,61	61,58	49,91	45,21	44,29	
Belanja Pegawai	23.620.959.500,00	28.272.974.538,00	24.675.238.471,58	26.930.063.461,00	29.108.710.990,00	3,79
%	11,29	10,11	10,85	12,70	12,75	
Belanja Barang dan Jasa	84.783.241.930,00	83.156.477.567,00	71.774.133.477,00	68.388.668.649,00	83.042.663.639,00	0,13
%	40,52	29,74	31,56	32,24	36,36	
Belanja Modal	100.826.317.155,40	168.207.116.361,00	130.939.490.330,00	116.784.605.549,00	116.209.082.027,00	4,59
%	48,19	20,23	182,43	170,77	139,94	

Sumber data : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang, diolah oleh Bappeda, 2013

**Grafik 3.2**  
**PERKEMBANGAN PROPORSI BELANJA DAERAH**  
**TAHUN 2008-2012**



Sumber data :Hasil Analisis Bappeda, 2013

### 3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu

Pada kurun waktu lima tahun mendatang kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Singkawang diharapkan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dan terjadi peningkatan efektifitas penggunaan belanja daerah. Kebijakan pengelolaan belanja daerah secara bertahap diarahkan pada penerapan penganggaran berbasis kinerja untuk pencapaian *outcome* dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Penganggaran diupayakan pula lebih proposional dan rasional untuk pelaksanaan kegiatan.

Proyeksi pengelolaan keuangan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

**Tabel 3.12**  
**PROYEKSI STRUKTUR APBD**  
**TAHUN 2013-2017**

URAIAN	TARGET CAPAIAN (Rp)					RERATA PERTUMBUHAN (%)
	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>PENDAPATAN</b>	<b>706.683.952.296,76</b>	<b>918.689.137.985,79</b>	<b>1.194.295.879.381,53</b>	<b>1.552.584.643.195,99</b>	<b>2.018.360.036.154,79</b>	<b>30,00</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>71.564.651.613,28</b>	<b>133.387.727.750,72</b>	<b>251.188.934.740,10</b>	<b>477.439.436.262,04</b>	<b>914.977.379.375,04</b>	<b>88,15</b>
Pendapatan Pajak Daerah	24.353.938.689,60	38.966.301.903,36	62.346.083.045,38	99.753.732.872,60	159.605.972.596,16	60,00
Hasil Retribusi Daerah	37.155.553.442,34	74.311.106.884,68	148.622.213.769,36	297.244.427.538,72	594.488.855.077,44	100,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.624.449.112,36	5.248.898.224,72	10.497.796.449,44	20.995.592.898,88	41.991.185.797,76	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.430.710.368,98	14.861.420.737,96	29.722.841.475,92	59.445.682.951,84	118.891.365.903,68	100,00
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>533.312.505.815,58</b>	<b>646.761.459.646,43</b>	<b>750.664.129.139,60</b>	<b>802.302.028.659,01</b>	<b>708.911.963.373,45</b>	<b>10,96</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	84.818.115.515,58	153.417.630.316,43	207.985.916.876,60	205.355.995.169,71	52.271.326.535,22	47,31
Dana Alokasi Umum	411.299.144.300,00	452.429.058.730,00	497.671.964.603,00	547.439.161.063,30	602.183.077.169,63	10,00
Dana Alokasi Khusus	37.195.246.000,00	40.914.770.600,00	45.006.247.660,00	49.506.872.426,00	54.457.559.668,60	10,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>101.806.794.867,90</b>	<b>138.539.950.588,65</b>	<b>192.442.815.501,83</b>	<b>272.843.178.274,94</b>	<b>394.470.693.406,30</b>	<b>42,04</b>
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.929.491.867,90	65.487.186.988,65	104.779.499.181,83	167.647.198.690,94	268.235.517.905,50	60,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	50.372.143.000,00	60.446.571.600,00	72.535.885.920,00	87.043.063.104,00	104.451.675.724,80	25,58
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.505.160.000,00	12.606.192.000,00	15.127.430.400,00	18.152.916.480,00	21.783.499.776,00	20,00



URAIAN	TARGET CAPAIAN (Rp)					RERATA PERTUMBUHAN (%)
	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>BELANJA</b>	<b>745.551.569.673,09</b>	<b>969.217.040.575,01</b>	<b>1.259.982.152.747,52</b>	<b>1.637.976.798.571,77</b>	<b>2.129.369.838.143,30</b>	<b>32,92</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>336.169.202.765,60</b>	<b>437.019.963.595,27</b>	<b>568.125.952.673,86</b>	<b>738.563.738.476,01</b>	<b>960.132.860.018,82</b>	<b>27,41</b>
Belanja Pegawai	317.160.558.328,00	412.308.725.826,40	536.001.343.574,32	696.801.746.646,62	905.842.270.640,60	27,87
Belanja Bunga	201.081.288,06	301.621.932,09	452.432.898,14	678.649.347,20	1.017.974.020,80	21,54
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	16.628.273.500,00	21.626.052.199,99	28.108.007.671,93	36.509.834.012,08	47.392.956.026,28	36,38
Belanja Bantuan Sosial	1.329.500.000,00	1.728.350.000,00	2.246.855.000,00	2.920.911.500,00	3.797.184.950,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	602.225.111,53	782.892.644,99	1.017.760.438,49	1.323.088.570,03	1.720.015.141,04	9,31
Belanja Tidak Terduga	247.564.538,00	272.320.991,80	299.553.090,98	329.508.400,08	362.459.240,09	93,03
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>409.382.366.907,49</b>	<b>532.197.076.979,74</b>	<b>691.856.200.073,66</b>	<b>899.413.060.095,76</b>	<b>1.169.236.978.124,49</b>	<b>39,85</b>
Belanja Pegawai	30.211.117.075,38	158.279.371.641,87	0,00	0,00	0,00	65,54
Belanja Barang dan Jasa	155.505.778.930,19	83.152.593.165,37	313.861.554.249,41	408.020.020.524,23	530.426.026.681,50	75,64
Belanja Modal	223.665.470.901,93	290.765.112.172,50	377.994.645.824,26	491.393.039.571,53	638.810.951.442,99	42,49
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(38.867.617.376,32)</b>	<b>(50.527.902.589,22)</b>	<b>(65.686.273.365,98)</b>	<b>(85.392.155.375,78)</b>	<b>(111.009.801.988,51)</b>	<b>(2,92)</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>81.906.148.361,50</b>	<b>58.102.211.195,22</b>	<b>73.260.581.971,98</b>	<b>92.966.463.981,78</b>	<b>118.584.110.594,51</b>	<b>72,48</b>

URAIAN	TARGET CAPAIAN (Rp)					RERATA PERTUMBUHAN (%)
	2013	2014	2015	2016	2017	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	42.859.127.518,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	38.867.617.376,32	50.527.902.589,22	65.686.273.365,98	85.392.155.375,78	111.009.801.988,51	44,00
Penerimaan Piutang Daerah	179.403.466,39	7.574.308.606,00	7.574.308.606,00	7.574.308.606,00	7.574.308.606,00	822,26
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>43.038.530.985,18</b>	<b>7.574.308.606,00</b>	<b>7.574.308.606,00</b>	<b>7.574.308.606,00</b>	<b>7.574.308.606,00</b>	133,15
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	37.658.800.291,30	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	338,98
Pembayaran Pokok Utang	5.379.730.693,88	3.074.308.606,00	3.074.308.606,00	3.074.308.606,00	3.074.308.606,00	6,43
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>38.867.617.376,32</b>	<b>50.527.902.589,22</b>	<b>65.686.273.365,98</b>	<b>85.392.155.375,78</b>	<b>111.009.801.988,51</b>	<b>56,32</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber data : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang, diolah oleh Bappeda, 2013

**Tabel 3.13**  
**PROYEKSI PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT SERTA**  
**PRIORITAS UTAMA TAHUN 2013-2017**

NO	URAIAN	T A R G E T (Rp)					RERATA PERTUMBUHAN (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>296.269.512.613,06</b>	<b>340.791.716.540,40</b>	<b>392.642.448.177,18</b>	<b>453.197.163.271,92</b>	<b>527.078.835.168,40</b>	<b>14,88</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	267.780.975.124,00	304.264.237.383,75	345.718.085.864,20	392.819.727.751,50	446.338.634.917,05	13,02
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	25.785.196.062,00	33.520.754.880,60	43.576.981.344,78	56.650.075.748,21	73.645.098.472,68	34,38
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1.828.000.000,00	2.010.800.000,00	2.211.880.000,00	2.433.068.000,00	2.676.374.800,00	9,26
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	674.260.139,00	774.734.859,18	890.181.796,77	1.022.832.033,33	4.177.327.588,64	75,61
5	Belanja Bunga	201.081.288,06	301.621.932,09	452.432.898,14	678.649.347,20	1.017.974.020,80	21,54
6	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>11.464.993.439,00</b>	<b>12.668.441.739,30</b>	<b>13.985.133.891,24</b>	<b>15.447.828.950,33</b>	<b>17.074.299.432,43</b>	<b>3,10</b>
1	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	667.343.600,00	834.179.500,00	1.001.015.400,00	1.201.218.480,00	1.441.462.176,00	62,83
2	Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya )	9.741.148.339,00	10.715.263.172,90	11.786.789.490,19	12.965.468.439,21	14.262.015.283,13	30,24

NO	URAIAN	T A R G E T (Rp)					RERATA PERTUMBUHAN (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
3	Belanja sewa gedung kantor( yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	503.428.000,00	591.788.645,00	633.213.850,15	677.538.819,66	724.966.537,04	3,20
4	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	553.073.500,00	527.210.421,40	564.115.150,90	603.603.211,46	645.855.436,26	7,29
5	Dst sesuai kriteria wajib mengikat	0	0	0	0	0	0,00
<b>C</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.379.730.693,88</b>	<b>3.074.308.606,00</b>	<b>3.074.308.606,00</b>	<b>3.074.308.606,00</b>	<b>3.074.308.606,00</b>	<b>6,43</b>
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0,00
2	Pembayaran pokok utang	5.379.730.693,88	3.074.308.606,00	3.074.308.606,00	3.074.308.606,00	3.074.308.606,00	6,43
	<b>TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA</b>	<b>313.114.236.745,94</b>	<b>356.614.899.400,92</b>	<b>409.909.004.401,12</b>	<b>472.126.490.436,58</b>	<b>548.004.017.837,60</b>	<b>14,26</b>

Sumber data : Hasil Analisis Bappeda, 2013

**Tabel 3.14**  
**PROYEKSI KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENDANAI PEMBANGUNAN DAERAH**  
**TAHUN 2013-2017**

NO	URAIAN	T A R G E T (Rp)					RERATA PERTUMBUHAN (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Pendapatan	706.683.952.296,76	918.689.137.985,79	1.194.295.879.381,53	1.552.584.643.195,99	2.018.360.036.154,79	14,13
2.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Sebelumnya	42.859.127.518,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total penerimaan</b>	<b>749.543.079.815,55</b>	<b>918.689.137.985,79</b>	<b>1.194.295.879.381,53</b>	<b>1.552.584.643.195,99</b>	<b>2.018.360.036.154,79</b>	<b>28,07</b>
3.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	313.114.236.745,94	356.614.899.400,92	409.909.004.401,12	472.126.490.436,58	548.004.017.837,60	14,26
4.	Kapasitas riil kemampuan keuangan	436.428.843.069,61	562.074.238.584,87	784.386.874.980,41	1.080.458.152.759,42	1.470.356.018.317,18	37,06

*Sumber data : Hasil Analisis Bappeda, 2013.*

Pemerintah Kota Singkawang akan melakukan berbagai langkah untuk melanjutkan rencana program dan kegiatan pembangunan dengan lebih mengedepankan kinerja yang baik agar dapat memacu peningkatan kesejahteraan rakyat. Program dan kegiatan yang belum optimal akan dipertajam bahkan ditunda apabila tidak menunjukkan *outcome* yang jelas dalam pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Strategi pengelolaan belanja langsung pada Tahun 2013– 2017 adalah sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran belanja langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan SKPD harus menjamin terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan di RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005 - 2025 dan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013 - 2017;
2. Setiap SKPD harus mampu menghasilkan *output* kegiatan yang bermanfaat dalam mempercepat pencapaian peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan pembangunan daerah. Langkah ini ditempuh dengan (1). menghindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperlukan, (2). perhitungan pengeluaran pembiayaan secara cermat, terukur dan terarah serta (3). pengalokasian anggaran secara proposional dan rasional dengan *output* kegiatan yang akan dihasilkan;

Usulan pendanaan program dan kegiatan SKPD setiap tahunnya harus secara jelas menunjukkan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD Tahun 2013 - 2017 dan Renja SKPD tahunan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya inefisiensi pengusulan anggaran sebagai akibat usulan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, tumpang tindih, tidak terarah dan tidak terukur pencapaiannya serta tidak menunjukkan sumbangan nyata bagi tujuan dan sasaran pencapaian kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Kebijakan belanja tidak langsung selama Tahun 2013-2017 diupayakan pada langkah-langkah sebagai berikut :

1. Belanja tidak langsung salah satunya adalah pemberian gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan bagi PNS setiap bulannya. Kebijakan pemberian tambahan penghasilan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang sejak Tahun 2013 merupakan bentuk motivasi untuk optimalisasi kinerja PNS. Kebijakan ini akan dipertegas dan diatur secara adil dan proposional dengan mempertimbangkan besaran volume pekerjaan dan *output* kinerja masing-masing PNS dengan tetap memperhatikan kedisiplinan PNS yang bersangkutan;

2. Melakukan optimalisasi pelayanan umum dan administrasi pemerintahan dengan mendorong efisiensi dan efektifitas pembagian urusan dan kewenangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD agar lebih dapat menunjukkan manfaat dari pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Menjaga konsistensi dan sinkronisasi pembagian urusan dan kewenangan masing-masing SKPD agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Kebijakan belanja langsung selama Tahun 2013 – 2017 diarahkan pada pencapaian *outcome* program yaitu :

1. Melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan sesuai dengan pembagian kewenangan dan tugas pokok serta fungsi masing-masing SKPD;
2. Menerapkan penganggaran berbasis kinerja (PBK) dan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM) secara ketat terhadap jenis belanja pada usulan RKA kegiatan SKPD Tahunan agar terhindar dari kesan pemborosan seperti pada jenis belanja yang bersifat penambahan penghasilan bagi PNS tanpa memperhatikan dengan seksama rasio beban/volume pekerjaan untuk menghasilkan suatu *output* yang bermanfaat seperti pengeluaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal;
3. Meningkatkan transparansi publik dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja pada SKPD agar memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan harapan langkah ini juga akan berpengaruh positif terhadap penilaian pengelolaan keuangan daerah yang secara signifikan menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan berpredikat WTP dari Pemerintah Pusat;
4. Mewujudkan pula transparansi publik dan akuntabilitas terhadap pengelolaan bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja hibah;
5. Melaksanakan pemberian bantuan subsidi secara efisien, adil dan proporsional agar dapat tersalurkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah yang telah direncanakan;

6. Melakukan sinergi pendanaan pembangunan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian/ Lembaga agar pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dapat berdampak positif pula terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Secara umum rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dibagi dalam 3 prioritas, yaitu :

1. Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, yaitu urusan pendidikan, rencana pencapaian 6 prioritas pembangunan Tahun 2013- 2017, dan program visi dan misi diluar urusan pendidikan yaitu urusan kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan administrasi kepegawaian;
2. Belanja untuk penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan sebagai prioritas SKPD;
3. Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama seperti hibah-BOS, bantuan sosial, belanja tidak terduga, dan penyertaan modal termasuk belanja tidak langsung dalam bentuk tambahan penghasilan.

Berdasarkan proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk masing-masing prioritas maka struktur APBD Kota Singkawang Tahun 2013 - 2017 diharapkan dapat tetap dalam bentuk APBD yang bersifat dinamis dan berimbang.





## **BAB IV**

### **ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

#### **4.1 Analisis Lingkungan Eksternal**

Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang diperkirakan akan terjadi pada lima tahun mendatang dalam tiga perspektif yang terjadi yaitu globalisasi, desentralisasi dan demokratisasi.

##### **4.1.1 Analisis Peluang**

- a. Adapun analisis peluang Kota Singkawang dalam kaca mata globalisasi adalah sebagai berikut :
  1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan membuka kemudahan dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  2. Perluasan dan peningkatan jaringan serta fasilitas transportasi lokal Singkawang akan meningkatkan arus keluar masuk barang dan jasa. Kondisi ini akan mendukung upaya untuk menjadikan Kota Singkawang sebagai pusat jasa, perdagangan, agroindustri serta pariwisata karena aksesibilitas dan kemudahan keluar masuk barang sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baik untuk masyarakat Kota Singkawang maupun masyarakat di sekitarnya;
  3. Pengembangan serta relokasi pasar tradisional sesuai peruntukan ruang dan pemenuhan kebutuhan komuter akan berpengaruh terhadap peningkatan kegiatan investasi, perdagangan dan perindustrian baik barang atau jasa terutama yang menjadi produk unggulan Kota Singkawang;
  4. Peningkatan kerjasama daerah dengan daerah *hinterland* Kota Singkawang akan mendorong percepatan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Kota Singkawang sekaligus akan pula mempengaruhi etos dan budaya kerja masyarakat untuk lebih inovatif, produktif dan efektif dalam memajukan Kota Singkawang.
- b. Sedangkan analisis peluang pemerintah Kota Singkawang untuk pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dalam perspektif demokratisasi adalah :
  1. Proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kota akan mengutamakan partisipasi masyarakat sehingga mendorong pengembangan potensi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta terciptanya suatu lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih baik, bermutu dan bermartabat;

2. Proses pengelolaan sumberdaya pembangunan kota dan aset daerah akan memperhitungkan pelaksanaan prinsip demokrasi, keadilan, kesetaraan gender, kekhususan, dan keragaman masyarakat yang bersifat plural;
  3. Proses formulasi kebijakan publik yang menyangkut kehidupan masyarakat dilakukan secara transparan, partisipatif, adil dengan mempertimbangkan pentingnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar rakyat terutama hak sipil dan politik, serta hak sosial, ekonomi dan budaya rakyat;
  4. Segala bentuk proses di atas tentunya didukung dengan hubungan koordinasi yang harmonis antara eksekutif sebagai pengemban amanah rakyat dan legislatif sebagai pengemban aspirasi masyarakat.
- c. Adapun peluang Kota Singkawang dalam perspektif desentralisasi meliputi :
1. Memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota demi terwujudnya pembangunan yang terukur, terarah, tepat manfaat dan akuntabel;
  2. Mewujudkan kemudahan akses pelayanan publik baik dasar maupun pendukung sehingga pemerintah Kota Singkawang akan mempunyai kesempatan yang lebih luas dan terbuka untuk mengelola sumberdaya secara lebih efisien, produktif dan efektif serta kreatif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah;
  3. Melakukan optimalisasi, motivasi dan apresiasi kepada jajaran aparatur baik yang bersifat administratif maupun teknis agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dan profesionalisme sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu;
  4. Meningkatkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang memperhitungkan penghormatan dan penghargaan terhadap potensi kearifan lokal daerah, nilai-nilai budaya daerah, kekhususan dan keragaman masyarakat.

#### **4.1.2 Analisis Ancaman Kota Singkawang**

Ancaman yang mungkin timbul dalam upaya merealisasikan rencana pembangunan untuk lima tahun kedepan mencakup tiga perspektif, yaitu :

- a. Perspektif globalisasi sebagai kecenderungan global pada sisi lain juga membawa dampak yang menjadi ancaman bagi Kota Singkawang, yaitu :
  1. Peningkatan investasi dan percepatan pembangunan kota akan mendorong eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan yang berdampak negatif bagi kesinambungan pembangunan kota;
  2. Arus masuk barang dari pasar luar Kota Singkawang akan cenderung mendominasi pasar lokal dan tradisional yang dapat berdampak bagi menurunnya produksi dan pendapatan para pelaku usaha lokal dan

tradisional di Kota Singkawang yang memiliki banyak kelemahan baik modal, proses pengolahan hingga teknik pemasaran;

3. Potensi krisis ekonomi dan krisis energi seperti lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) termasuk keterbatasan ketersediaan pangan yang berasal dari gejolak pasar di luar Kota Singkawang akan dapat membawa dampak bagi menurunnya investasi, melemahnya kegiatan produksi, meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, kesenjangan dan menurunnya pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Singkawang;
  4. Migrasi penduduk yang tinggi seringkali menyebabkan meningkatnya ketidakpastian pengalokasian dana untuk peningkatan pelayanan Pemerintah kepada publik seperti adanya bias misalnya untuk penghitungan alokasi JAMKESMAS, JAMPERSAL dan dukungan terhadap peningkatan pengembangan sosial budaya penduduk;
  5. Arus migrasi yang bersifat komuter dengan tingkat keterampilan dan pendidikan rendah menyebabkan munculnya permasalahan sosial ekonomi dan persaingan yang kurang sehat;
  6. Tingkat ketergantungan akan bahan baku dan barang modal dari luar daerah menyebabkan hambatan peningkatan kompetisi global produk-produk unggulan daerah;
  7. Pergeseran budaya lokal akibat arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang minim pengawasan dan kendali orangtua, guru dan masyarakat mengakibatkan anak usia remaja rentan terhadap degradasi sosial budaya masyarakat yang agamis dan berrahmat;
  8. Dominasi kepemilikan modal dan usaha produksi oleh pelaku usaha dari luar Kota Singkawang mengakibatkan keterbatasan ruang gerak pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang berdomisili di Kota Singkawang.
- b. Perspektif demokratisasi yang tidak efektif memungkinkan dapat membawa perubahan yang tidak sepenuhnya diharapkan bagi keberlanjutan pembangunan kota, yaitu :
1. Proses koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Kota Singkawang, DPRD dan masyarakat sipil kadang-kadang memerlukan waktu yang panjang, bertahap dan tidak pasti sehingga berdampak pada lambatnya pengambilan kebijakan publik;
  2. Implementasi demokrasi lokal lebih dipahami secara sempit sebagai kebebasan dalam bentuk berbagai unjuk rasa yang tidak teratur, tanpa ijin dan berbuat destruktif, sehingga ketertiban dan ketenteraman kehidupan masyarakat dapat terganggu;
  3. Kontribusi dan peran partai politik yang cenderung dominan dapat berdampak pula pada melemahnya tingkat partisipasi masyarakat dan

mengaburkan aspirasi masyarakat yang sesungguhnya sehingga menyulitkan pada saat pelaksanaan pengukuran pencapaian tujuan akhir pembangunan.

- c. Perspektif desentralisasi dan otonomi daerah dapat membawa dampak yang dapat mengganggu kelancaran pembangunan kota, yaitu :
  1. Berbagai peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya konsisten dan kurang sosialisasi sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kota;
  2. Belum seimbangnya antara pembagian urusan dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki daerah antara Pemerintah dan Pemerintah Kota Singkawang menyebabkan kurang optimalnya pelayanan publik;
  3. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dapat menumbuhkan persaingan antar daerah yang cenderung mengabaikan kepentingan yang lebih luas dan jangka panjang;
  4. Lemahnya koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan, serta lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kota secara berkelanjutan;
  5. Meningkatnya kesenjangan antar kawasan sebagai akibat perbedaan kapasitas, sumberdaya dan prasarana di masing-masing kawasan yang ada.

## **4.2 Analisis Lingkungan Internal**

Analisis lingkungan internal Kota Singkawang dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti posisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan kota dalam lima tahun mendatang .

### **4.2.1 Analisis Kekuatan Kota Singkawang**

Lingkungan strategis internal Kota Singkawang pada dasarnya memberikan kekuatan bagi Kota Singkawang sebagai berikut :

1. Kota Singkawang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi terutama perdagangan dan jasa bagi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Kota Singkawang memiliki posisi strategis dengan prasarana dan sarana transportasi yang memadai;
3. Kota Singkawang memiliki jumlah penduduk dan angkatan kerja yang cukup besar dan relatif terampil;
4. Kota Singkawang sebagai kota yang bersejarah (*city heritage*) dengan penduduknya yang multi etnis dan multi budaya;

5. Kota Singkawang memiliki ketersediaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi yang relatif lengkap;
6. Kerukunan umat beragama dan budaya masyarakat yang bersifat terbuka.

#### **4.2.2 Analisis Kelemahan Kota Singkawang**

Namun dilain sisi, Kota Singkawang juga berpotensi memunculkan kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang disebabkan belum tertatanya kelembagaan secara professional, terpadu, memadai, dan belum konsistennya manajemen pemerintahan dan pembangunan kota yang berbasis kinerja dan bertintegritas tinggi;
2. Tingginya belanja tidak langsung APBD belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kinerja aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik secara terukur dan proporsional terhadap pemberian tambahan penghasilan;
3. Kinerja ekonomi daerah dalam mengatasi pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan wilayah masih belum optimal dikarenakan masih ditemuinya ketimpangan antar sektor perekonomian daerah (*gap expectation*);
4. Perkembangan kelembagaan BUMD, UMKM, dan Koperasi belum optimal dan belum berada pada perspektif ekonomi mandiri secara seimbang sehingga masih saja mengharapkan kontribusi dana pada pemerintah;
5. Belum optimalnya Kota Singkawang sebagai tujuan investasi utama sebagai akibat belum kuatnya keunggulan inovatif, kompetitif, dan kooperatif produk-produk barang dan jasa daerah;
6. Pengelolaan infrastruktur perekonomian (jalan, listrik, telepon dan air) belum optimal menjadi satu kesatuan pembangunan infrastruktur dasar masyarakat sehingga akhirnya menghambat pengembangan usaha dan pelayanan publik;
7. Lemahnya keterkaitan sektor-sektor ekonomi baik dari sisi penggiat usaha yang ada di Kota Singkawang terhadap penyerapan tenaga kerja;
8. Belum konsistennya implementasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota sehingga menimbulkan inefisiensi penggunaan sumberdaya yang ada dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*);
9. Masih tingginya permasalahan sosial yang cukup beragam termasuk kasus gizi buruk balita.

#### **4.3 Permasalahan Pembangunan Daerah**

Rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Singkawang untuk Tahun 2013 – 2017 dibagi dalam tiga perspektif, yaitu :

1. *Perspektif Ekonomi (Economic Perspectives)*
  - a) Peran pemerintah dalam mengatasi dan mengendalikan kapitalisme, mekanisme pasar, perekonomian dan bisnis Kota Singkawang belum

optimal dan terintegrasi secara utuh dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai azas kewajaran keuntungan (*profit balancing*) sebagaimana peraturan yang berlaku dan belum pula didukung oleh suatu sistem informasi yang secara transparan mampu menjelaskan mekanisme *take and give* antara Pemerintah Kota Singkawang dan *stakeholders* untuk kemajuan Kota Singkawang;

- b) Kurang berkembangnya kemitraan pembangunan antara Pemerintah Kota Singkawang dengan *stakeholders* agar produk-produk unggulan Kota Singkawang mampu secara kompetitif bersaing tidak hanya dipasar lokal tapi juga pasar global;
- c) Belum berkembangnya produk kreatif sektor jasa, UMKM, pariwisata dan perdagangan terutama hasil kreasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mampu berdikari dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan pendekatan teknokratik dan implementasi teknologi informasi dalam menjawab tantangan pasaran global yang inovatif agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi ;
- d) Inovasi daerah dalam diversifikasi sistem maupun produktivitas sektor pertanian belum secara signifikan menunjukkan kinerja yang mendukung keberlanjutan produk pertanian sebagai unggulan daerah yang kompetitif;
- e) Belum seimbangannya antara pertumbuhan angkatan kerja yang besar dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga menyebabkan munculnya pengangguran yang massif.

## 2. *Perspektif Tata Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Sosial Budaya (Government, Community Services and Socio Culture Perspectives)*

- a) Permasalahan birokrasi yang masih jamak terjadi sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia seperti belum adanya rekrutmen yang objektif dan kompetitif, promosi jabatan yang masih tertutup, pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) sehingga tingkat remunerasi belum mampu bersinergi sebagai bentuk *reward* atas kinerja aparatur secara proporsional akibatnya birokrat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan professional, dan birokrat belum benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat (Pamong Praja), sehingga belum mencapai kinerja yang lebih baik (*better performance*), dan belum berorientasi pada hasil (*outcomes*);
- b) Cakupan pelayanan pendidikan yang masih belum secara optimal menjawab kebutuhan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan daerah pinggiran/terluar Kota Singkawang;
- c) Cakupan pelayanan kesehatan yang masih belum secara optimal meningkatkan status kesehatan, seperti angka harapan hidup, status gizi, pengendalian HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya (TB);

- d) Belum bersinerginya sistem dan mekanisme pelaksanaan urusan dan pelimpahan kewenangan antar SKPD sehingga menimbulkan disharmonisasi tanggung-jawab dan tanggung-gugat dari setiap pemangku kepentingan;
- e) Pelayanan publik belum secara nyata menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal baik pelayanan dasar dan pelayanan penunjang;
- f) Mekanisme dan sistem penilaian kinerja yang terukur dan terarah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi belum secara objektif berkorelasi dengan implementasi konsep Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam upaya profesionalisasi aparatur;
- g) Optimalisasi implementasi *e-government* (e-Gov) masih kurang dikarenakan belum adanya pemetaan kebutuhan sistem informasi berbasis teknologi yang secara efisien dan efektif dapat digunakan dalam meningkatkan kemudahan memperoleh informasi dan mewujudkan keterbukaan informasi publik secara akuntabel dan transparan;
- h) Status aset dan batas wilayah masih terkendala dalam tahap finalisasi lintas kewenangan;
- i) Belum optimalnya pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik;
- j) Relatif masih lemahnya koordinasi antar SKPD dan antar tingkatan pemerintahan untuk mendukung keserasian pembangunan kota.

3. *Perspektif Prasarana dan Sarana Perkotaan ( City Infrastructure Perspectives)*

- a) Belum optimalnya manajemen pelayanan air bersih terutama bagi masyarakat pada daerah pinggiran dan masyarakat berpenghasilan rendah serta Cakupan pelayanan air bersih belum memenuhi target 80% dan masih dijumpai keterbatasan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pelayanan air bersih;
- b) Sistem pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah belum terintegrasi dengan optimal dalam menyediakan akses publik untuk mempermudah dalam memperoleh layanan publik dalam bentuk fasilitas umum yang berkualitas;
- c) Pengembangan kewilayahan terutama di daerah pinggiran Kota Singkawang yang merupakan pintu masuk untuk daerah *hinterland* Singkawang belum memperoleh perhatian khusus sehingga beban pelayanan perkotaan masih terpusat di Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Tengah;
- d) Pasar tradisional masih mengelompok dan sebarannya belum tertata dengan baik sehingga menimbulkan ketimpangan akses pertukaran barang dan jasa pada suatu wilayah terutama wilayah pinggiran dan



pintu masuk Kota Singkawang baik dari Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas dan dari Provinsi Kalimantan Barat;

- e) Posisi wilayah Kota Singkawang yang strategis belum secara utuh dimanfaatkan untuk menjadi kota sebagai pusat jasa pendidikan dan kesehatan, kota jasa hiburan dan rekreasi, kota peristirahatan dan kuliner, serta sebagai kota pusat belanja;
- f) Perlindungan sumberdaya alam yang belum optimal berfungsi mendukung kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Kota Singkawang seperti perlindungan sumber air baku, pengendalian penggunaan lahan dan penggunaan ruang hijau kota secara terpadu dan terintegrasi;
- g) Pencemaran lingkungan dapat berdampak pada keberlanjutan pembangunan kota sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif. Permasalahan pencemaran lingkungan di Kota Singkawang diakibatkan oleh penambangan dan meningkatnya produksi sampah;
- h) Penanganan bencana banjir musiman akibat pengelolaan mitigasi banjir yang belum bersinergi dengan eksisting potensi sumberdaya alam, kondisi topografi dan penggunaan ruang yang ada;
- i) Sistem drainase kota yang belum terpadu dengan sistem jaringan infrastruktur kota serta arah penggunaan ruang kota masih menyebabkan adanya daerah genangan terutama pada daerah dataran rendah;
- j) Masih rendahnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
- k) Belum adanya keterpaduan prasarana dan sarana perkotaan yang membentuk satu kesatuan pola menghubungkan seluruh wilayah Kota Singkawang;
- l) Masih kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap kelestarian lingkungan yang menyebabkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dan menimbulkan kecenderungan penurunan daya dukung lingkungan.

#### **4.4 Isu Strategis**

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan Kota Singkawang dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah.

Analisis isu strategis daerah dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan strategis baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal yang dapat mempengaruhi upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Singkawang dalam lima tahun mendatang. Bertitik tolak dari

berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kota Singkawang pada Tahun 2008-2012, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Isu-isu strategis yang paling mendasar, mendesak dan prioritas menjadi bahan perumusan kebijakan utama pembangunan lima tahun ke depan. Isu-isu strategis tersebut sebagai berikut meliputi :

1. Relatif belum optimalnya cakupan penyediaan air bersih baik bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan dunia usaha. Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak dan lebih sehat;
2. Kesadaran birokrat akan profesionalisme, akuntabilitas kinerja dan transparansi dalam pengelolaan perencanaan, penganggaran, pengendalian internal instansi pemerintah belum secara utuh menggambarkan keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terutama dalam menciptakan optimalisasi dan keterpaduan pelayanan publik prima yang *pro poor, pro job* dan *pro environment* ;
3. Tingkat IPM Kota Singkawang masih berada pada posisi ke-3 di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Kapuas Hulu dan Kota Pontianak yang ditinjau dari tiga parameter yaitu angka harapan hidup, pencapaian pendidikan, dan paritas dayabeli;
4. Masih rendahnya keterpaduan prasarana dan sarana perkotaan dalam membentuk satu pola kewilayahan baik secara spasial dan fungsional antara pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
5. Degradasi lingkungan hidup masih tergolong tinggi akibat kurangnya kesadaran baik Pemerintah Kota Singkawang, masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan (*sustainable environment development*) agar kualitas lingkungan hidup dan penataan ruang lebih sinergis dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam Kota Singkawang;
6. Perkembangan era globalisasi dan semakin bergejolaknya dinamika pola pikir masyarakat yang semakin kritis dan terbuka memberikan dampak yang sangat luas dan menjadi daya dorong tersendiri terhadap upaya pengembangan inovasi pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik menuju pada tingkat efisiensi dan efektivitas yang optimal. Tentunya dinamika tersebut harus disambut dengan baik oleh Pemerintah Kota Singkawang serta dijadikan sebuah peluang dan tantangan serta kekuatan yang harus dikembangkan, bukan menjadi sebuah resistensi dalam pelayanan publik.

## BAB V

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SINGKAWANG

#### 5.1. Visi

Visi Kota Singkawang untuk pencapaian pembangunan pada Tahun 2017 yaitu :

#### **“SINGKAWANG AMAN, NYAMAN, MAJU DAN SEJAHTERA BERBASIS JASA, PERDAGANGAN DAN AGROINDUSTRI”**

**Aman** : mengartikan suatu keadaan yang menggambarkan perwujudan memiliki perasaan aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya, yang dilandasi supremasi hukum dan hak asasi manusia yang tinggi. Diversifikasi etnis di Kota Singkawang yang merupakan keunggulan kearifan daerah, bukanlah merupakan penghalang dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban termasuk dalam penyelenggaraan kebebasan beragama dan berbudaya.

**Nyaman** : memuat keinginan bahwa Kota Singkawang memiliki karakteristik daerah yang berbeda melalui konsep *“think global act locally”* yang mengartikan bahwa Kota Singkawang memiliki itikad untuk menjadikan Kota Singkawang tempat yang layak dan nyaman untuk hidup dan berusaha dengan mengadopsi konsep-konsep kota modern yang tertata rapi namun tetap mampu menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup secara berkesinambungan dalam setiap aspek kehidupan.

**Maju** : mengartikan bahwa adanya pergerakan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik yang tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dibarengi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan sehingga segala upaya pembangunan diarahkan dengan tetap memperhatikan keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang kuat dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan baik dengan pemerintah provinsi dan pusat maupun dalam menghadapi tantangan globalisasi tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur berbangsa dan bertanah air Indonesia. Struktur ekonomi diciptakan kokoh agar mampu mencapai produktifitas tinggi berbasis pengembangan produk unggulan lokal yang kompetitif di pasaran global melalui implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan.

**Sejahtera** : dimaksudkan bahwa terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal bermakna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang, dan papan secara merata dan berkualitas.

**Berbasis** : dimaksudkan adalah berdasar, yang artinya mengandalkan sebesar-besarnya kepada potensi lokal yang telah ada dan melakukan pengembangan potensi untuk semaksimal mungkin bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah Kota Singkawang.

**Jasa** : dimaksudkan bahwa Kota Singkawang akan menjadi pusat pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, transportasi dan komunikasi yang dibangun agar lebih maju, mandiri dan dapat memberikan kontribusi serta dominasi yang lebih besar dibandingkan daerah *hinterland* Kota Singkawang melalui peningkatan kegiatan pelayanan jasa dan penguatan perekonomian kota pada sektor andalan menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan, dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan industri kecil dan menengah.

**Perdagangan** : dimaksudkan bahwa Kota Singkawang akan memiliki kemajuan pesat dan keunggulan di bidang perdagangan yaitu industri pengolahan produk dari potensi yang dimiliki oleh Kota Singkawang maupun dari daerah kabupaten/ kota disekitarnya untuk menjadi daerah penghasil komoditas perdagangan terbesar di Provinsi Kalimantan Barat.

**Agroindustri** adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Kota Singkawang berbasis agroindustri dimaksudkan bahwa Kota Singkawang diharapkan menjadi pusat produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi sampai penggunaannya oleh konsumen mengingat agroindustri merupakan kegiatan yang saling berhubungan (interkorelasi) produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran dan distribusi produk pertanian.

## 5.2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Singkawang Tahun 2013 – 2017, dirumuskan 9 (sembilan) misi sebagai berikut :

1. Memfasilitasi aktifitas ibadah masyarakat terutama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memelihara, membangun dan menata fasilitas umum yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat (fasilitas pendidikan, kesehatan, pasar dan air bersih);
3. Meningkatkan kemudahan usaha masyarakat berpenghasilan rendah;
4. Melaksanakan pendistribusian, pemerataan dan penguatan ekonomi kewilayahan;
5. Melanjutkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam agar dapat bermanfaat bagi masyarakat kota;
6. Melanjutkan pemeliharaan, pembangunan dan penataan infrastruktur;
7. Menjamin ketentraman, ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kota;
8. Memfasilitasi masyarakat dalam bidang kebudayaan, pariwisata dan olahraga serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat;
9. Reformasi birokrasi dan tatalaksana pemerintahan.

Misi yang ditetapkan diharapkan mampu menggerakkan seluruh komponen organisasi dan dapat meningkatkan peran serta masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan positif dengan tetap berlandaskan pada 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pilar ekonomi, aparatur, lingkungan hidup dan sosial.

Adapun penjelasan misi pembangunan Kota Singkawang Tahun 2013 – 2017 adalah :

1. **Memfasilitasi aktifitas ibadah masyarakat terutama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;**

Keberagaman agama dan etnis yang ada di Kota Singkawang bukanlah penghalang dalam menjalani ibadah dan adat-istiadat masing-masing individu masyarakat Singkawang. Dukungan dan lingkungan yang kondusif dalam menjalankan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dipercaya mampu menciptakan ketentraman dan ketertiban antar umat dan antar etnis masyarakat dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur beragama dan berbudaya.

2. **Memelihara, membangun dan menata fasilitas umum yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat (fasilitas pendidikan, kesehatan, pasar dan air bersih);**

Misi ini fokus pada pembangunan yang menekankan pada pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan derajat kesehatan penduduk, yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan, sosial dasar bagi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera;

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ditempuh melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan aksesibilitas pelayanan dasar, pembangunan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta peningkatan kreativitas dan produktivitas dan inovasi masyarakat Kota Singkawang dengan tujuan agar warga Kota Singkawang memiliki daya saing serta menguasai dan mampu memanfaatkan IPTEK, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur, serta mampu untuk mandiri dengan dilandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai jati diri dan karakter bangsa.

Air bersih menjadi prioritas utama dalam menciptakan masyarakat Singkawang yang makin sehat, maju dan sejahtera. Refleksi terpenuhinya kebutuhan dasar ini ditunjukkan dari semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat partisipasi anak usia sekolah, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang jauh lebih memadai. Misi ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kota Singkawang yang memiliki kualitas hidup lebih baik dengan dicerminkan oleh kehidupan yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif dan produktif serta memiliki jiwa *entrepreneurship* yang bermoral dan berbudaya.

3. **Meningkatkan kemudahan usaha masyarakat berpenghasilan rendah;**

Penyediaan penyertaan modal pada lembaga keuangan swasta ditempuh dengan mengedepankan komitmen dan kepercayaan pengelolaan keuangan untuk semata-mata bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya ini ditempuh untuk menggiatkan setiap lini masyarakat agar mampu dan mandiri dalam mengembangkan usahanya terutama masyarakat petani, nelayan, dan UKM. Misi ini ditetapkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang lebih merata, adil, konsisten dan memiliki

keberpihakan yang nyata terhadap kelompok masyarakat miskin dan tertinggal.

4. **Melaksanakan pendistribusian, pemerataan dan penguatan ekonomi kewilayahan;**

Hakikat pelaksanaan pada misi ini adalah pelaksanaan pilar ekonomi dalam pengembangan perekonomian kota yang difokuskan pada penataan ruang ekonomi, infrastruktur ekonomi dan sistem distribusi logistik yang lebih tepat sasaran. Lingkup penataan ruang ekonomi dimaksudkan untuk memperbesar lahan untuk kawasan ekonomi perdagangan dan jasa. Adapun lingkup infrastruktur ekonomi meliputi pengembangan jalan, jembatan, angkutan umum, dan bandara. Lingkup sistem distribusi logistik meliputi pembangunan terminal, terutama terminal agro, terminal beras dan terminal bahan pokok lainnya.

5. **Melanjutkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam agar dapat bermanfaat bagi masyarakat kota;**

Banjir dan kelangkaan ketersediaan air bersih merupakan dua hal yang menjadi perhatian utama. Faktor penyebab banjir terutama akibat belum optimalnya aliran air di sungai dan saluran. Hal ini karena belum terintegrasinya perencanaan saluran dan drainase di wilayah Kota Singkawang dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghindari pembuangan sampah ke saluran air. Kelangkaan air bersih bagi pemenuhan kebutuhan air secara berkelanjutan masih juga menjadi permasalahan mendasar akibat belum optimalnya penanganan distribusi air bersih secara layak bagi masyarakat.

Pelaksanaan misi ini pada hakikatnya merupakan pelaksanaan pilar lingkungan hidup dimana pengembangan Kota Singkawang sebagai barometer perkembangan kota jasa dan perdagangan terutama bagi daerah *hinterland* seperti Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas dilaksanakan dengan memperhatikan potensi sumberdaya alam berikut ciri khas bentang alamnya, dengan tetap memperhatikan pula keberlanjutan lingkungan hidup di masa depan sebagai perwujudan penataan ruang kota yang rapi dan konsisten. Pengendalian pemanfaatan ruang kota secara lebih bijaksana dan ramah lingkungan terus ditingkatkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan pembangunan kota melalui pengembangan kawasan-kawasan strategis, infrastruktur pengendalian banjir, pengelolaan persampahan dan peningkatan kualitas perumahan rakyat.

6. **Melanjutkan pemeliharaan, pembangunan dan penataan infrastruktur;**

Misi ini diwujudkan untuk menunjang kegiatan investasi dan mempermudah aksesibilitas masyarakat serta untuk memperlancar arus barang dan jasa. Hal ini dilakukan juga untuk mendorong peningkatan kegiatan jasa, perdagangan dan agroindustri sebagai sektor unggulan Kota Singkawang. Aksesibilitas orang dan barang merupakan faktor penting bagi Kota Singkawang agar dapat menjadi pusat jasa, perdagangan dan agro industri. Prasarana dan sarana transportasi yang memadai merupakan suatu keharusan. Upaya Pemerintah Kota Singkawang untuk melanjutkan pemeliharaan, pembangunan dan penataan infrastruktur akan meningkatkan dan mengembangkan aksesibilitas pelayanan umum, yang lebih berkualitas dan memiliki daya dukung serta daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum untuk menunjang produktifitas dan mobilitas publik.

7. **Menjamin ketentraman, ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kota;**

Heterogenitas masyarakat Kota Singkawang selain menjadi potensi karakteristik Kota Singkawang, dapat pula dipandang sebagai pemicu terjadinya konflik masyarakat antar kelompok maupun antar golongan. Pemerintah Kota Singkawang menjamin penuh superioritas hukum sebagai aturan main (*fair play*) dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama dalam memelihara ketertiban dan perlindungan terhadap hak-hak warganya.

Hukum difungsikan sebagai sarana penggerak ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka hukum harus dapat ditegakkan dan untuk itu hukum harus diterima sebagai salah satu bagian dari sistem nilai kemasyarakatan yang bermanfaat bagi warga masyarakat, sehingga keberlakuan hukum benar-benar nyata pada ranah empiris tanpa paksaan.

8. **Memfasilitasi masyarakat dalam bidang kebudayaan, pariwisata dan olah raga serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat;**

Implementasi misi ke-8 adalah wujud pelaksanaan pilar sosial yang difokuskan pada peningkatan kesadaran kehidupan berbudaya, peningkatan kualitas masyarakat khususnya pemuda yang disiplin, ramah, harmonis, sportif serta peka terhadap permasalahan sosial masyarakat disekelilingnya. Pengembangan infrastruktur kebudayaan,



pariwisata dan olahraga untuk meningkatkan identitas Kota Singkawang seperti penyelenggaraan kompetisi budaya dan olahraga bertaraf nasional bahkan internasional. Masyarakat dengan masalah sosial juga diberi perhatian khusus agar mampu pula sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Singkawang dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Singkawang.

9. **Reformasi birokrasi dan tatalaksana pemerintahan;**

Selain memiliki indikator sosial ekonomi yang lebih baik, masyarakat Singkawang akan makin maju apabila telah memiliki sistem dan kelembagaan politik, terutama bila peran institusi hukum optimal dan efektif dalam melaksanakan prinsip-prinsip *New Management of Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis kinerja yang terarah, terukur dan terpadu dalam berbagai lini pengambil kebijakan dan pelaksana teknis yang memiliki integrasi kapasitas personil yang profesional dan berdedikasi tinggi dalam pelayanan publik.

Implementasi Standar Pelayanan Minimal dalam 15 (lima belas) bidang yang harus diterapkan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, akan sangat mungkin pula diterapkan dengan tetap mengedepankan kehandalan aparatur dan optimalisasi fasilitas prasarana dan sarana pendukungnya.

Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi, menjamin kepastian hukum, melindungi segenap masyarakat serta memberikan akses dan kesempatan bagi penduduk laki-laki dan perempuan agar memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan merata termasuk bagi bibit-bibit unggul generasi penerima estafet pembangunan Kota Singkawang Berkualitas.

Misi ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang lebih berkualitas, baik intelektual, *skill*, maupun moral sehingga dapat melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan penuh tanggung jawab.

Tata pemerintahan yang baik akan diwujudkan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, profesionalisme aparatur dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan manajemen dan

profesionalisme aparatur melalui penyelenggaraan rekrutmen yang tepat, pendidikan dan pelatihan aparatur, pengkajian terhadap permasalahan kelembagaan dan kinerja dalam pelayanan masyarakat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan, untuk mendorong akuntabilitas pelayanan publik yang berkualitas dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, kredibel, antisipatif dan akuntabel.

### **5.3. Tujuan dan Sasaran**

Visi dan misi pembangunan Kota Singkawang, memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

#### **5.3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Singkawang Mewujudkan Misi Kesatu**

Dalam mewujudkan Misi Kesatu: ***Memfasilitasi aktifitas ibadah masyarakat terutama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa***, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Singkawang yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas akhlak setiap individu masyarakat Kota Singkawang agar berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama dan kepercayaannya, sasaran yang akan dicapai adalah :
  - a) Terwujudnya masyarakat yang sehat mental dan spiritual. Indikator kinerja sasarannya adalah :
    1. Persentase keanekaragaman aktifitas masyarakat bernuansa agama mencapai 100% pada Tahun 2017;
    2. Persentase peningkatan penerimaan Tahunan dana umat beragama mencapai 100% pada Tahun 2017;
    3. Persentase jumlah masyarakat dengan permasalahan sosial dan kejiwaan mencapai 100% pada Tahun 2017;
    4. Persentase masyarakat yang menunaikan ibadahnya tanpa kendala mencapai 100% setiap Tahunnya hingga Tahun 2017;
    5. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan MTQ di tingkat kecamatan mencapai 100% setiap Tahunnya hingga Tahun 2017;
    6. Persentase partisipasi umat kristen dalam PESPARAWI mencapai 100% setiap Tahunnya hingga Tahun 2017;
    7. Persentase peningkatan keterlibatan umat Khong Hu Chu dalam perayaan Cap Go Meh mencapai 100% setiap Tahunnya hingga Tahun 2017;

8. Cakupan bantuan bagi penyuluh agama mencapai 50% setiap Tahunnya hingga Tahun 2017;
  9. Cakupan sarana ibadah yang diberi bantuan/ hibah mencapai 50% setiap Tahunnya hingga Tahun 2017;
  10. Persentase penurunan angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak dibawah usia 17 Tahun mencapai 80% pada Tahun 2017;
  11. Persentase peningkatan angka prestasi anak berdasarkan golongan usia mencapai 80% pada Tahun 2017;
  12. Persentase anak usia sekolah yang mengenyam pendidikan 12 Tahun mencapai 100% pada Tahun 2017;
  13. Persentase peningkatan aktivitas keagamaan pemuda mencapai 70% pada Tahun 2017;
  14. Persentase penurunan permasalahan pernikahan aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017;
  15. Persentase penurunan kasus tindakan kriminal yang dilakukan aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017.
- 2) Menciptakan kualitas kehidupan beragama dan sosial masyarakat yang lebih baik, sasaran yang akan dicapai adalah :
- 1) Menurunnya angka konflik antar agama dan antar etnis. Indikator kinerja sasarannya adalah :
    1. Persentase peningkatan jumlah forum komunikasi antar agama aktif mencapai 60% pada Tahun 2017;
    2. Persentase peningkatan jumlah forum komunikasi antar etnis aktif mencapai 60% pada Tahun 2017;
    3. Persentase konflik antar agama yang ditangani mencapai 100% setiap tahunnya hingga Tahun 2017;
    4. Persentase penurunan jumlah tempat wisata malam yang beroperasi pada bulan ramadhan mencapai 80% pada Tahun 2017;
    5. Persentase konflik antar etnis yang ditangani mencapai 100% setiap tahunnya.

### **5.3.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Singkawang Mewujudkan Misi Kedua**

Dalam mewujudkan Misi Kedua: ***Memelihara, membangun dan menata fasilitas umum yang menjadi dasar masyarakat (fasilitasi pendidikan, kesehatan, pasar dan air bersih)*** tujuan dan sasaran pembangunan Kota Singkawang yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- 1) Memastikan fasilitas infrastruktur pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang handal bagi masyarakat, sasaran yang akan dicapai adalah :

- a) Terwujudnya infrastruktur pendidikan yang berkualitas dalam meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan efisien bagi kesejahteraan hidup rakyat. Indikator kinerja sasarannya adalah :
1. Persentase gedung sekolah SD/ MI dalam kondisi baik mencapai 100% pada Tahun 2017;
  2. Persentase gedung sekolah SMP/ Mts dalam kondisi baik mencapai 100% pada Tahun 2017;
  3. Persentase ruang belajar dan kelas gedung sekolah SD/ MI dalam kondisi baik mencapai 100% pada Tahun 2017;
  4. Persentase ruang belajar dan kelas gedung sekolah SMP/ Mts dalam kondisi baik mencapai 100% pada Tahun 2017;
  5. Rasio jumlah gedung sekolah SD/ MI terhadap jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun mencapai 9 pada Tahun 2017;
  6. Rasio jumlah gedung sekolah SMP/ MTs terhadap jumlah penduduk usia 12 - 15 tahun mencapai 8 pada Tahun 2017;
  7. Rasio jumlah gedung sekolah tingkat SD/ MI berjarak 5 Km dalam 1 kecamatan mencapai 5 pada Tahun 2017;
  8. Rasio jumlah gedung sekolah tingkat SMP/ MTs berjarak 5 Km dalam 1 kecamatan mencapai 2 pada Tahun 2017;
  9. APK SD/ MI/ Paket A mencapai 100% pada Tahun 2017;
  10. APK SMP/ MI/ Paket B mencapai 100% pada Tahun 2017;
  11. APM SD/ MI/ Paket A mencapai 100% pada Tahun 2017;
  12. APM SMP/ MTs/ Paket B mencapai 67.34 pada Tahun 2017;
  13. Persentase gedung sekolah SMA/ MA/ SMK dalam kondisi baik mencapai 80% pada Tahun 2017;
  14. Rasio jumlah gedung sekolah SMA/ MA/ SMK terhadap jumlah penduduk usia 15 - 18 tahun mencapai 8 pada Tahun 2017;
  15. Rasio jumlah gedung sekolah tingkat SMA/ MA berjarak 12 Km dalam 1 kecamatan mencapai nilai 2 pada Tahun 2017;
  16. APK SMA/ SMK/ MA/ Paket C mencapai 100 pada Tahun 2017;
  17. APM SMA/ SMK/ MA/ Paket C mencapai 69 pada Tahun 2017;
  18. Persentase gedung sekolah TKLB/ SDLB/ SMPLB/ SMALB dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017;
  19. Rasio ketersediaan jumlah gedung sekolah TKLB terhadap jumlah penduduk usia 4 - 5 tahun mencapai 0.11 pada Tahun 2017;
  20. Rasio ketersediaan jumlah gedung sekolah SDLB terhadap jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun mencapai 0.46 pada Tahun 2017;
  21. Rasio ketersediaan jumlah gedung sekolah SMPLB terhadap jumlah penduduk usia 12 - 15 tahun mencapai 0.27 pada Tahun 2017;
  22. Rasio ketersediaan jumlah gedung sekolah SMALB terhadap jumlah penduduk usia 15 - 18 tahun mencapai 0.17 pada Tahun 2017;

23. Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan mencapai 100% setiap tahunnya;
24. Usia pakai prasarana dan sarana pendidikan mencapai 5 tahun;
25. Persentase kelengkapan sarana penunjang gedung PAUD dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017;
26. Persentase kelengkapan sarana penunjang gedung TK dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017;
27. Persentase kelengkapan sarana penunjang gedung SMP/ MTs dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017;
28. Persentase kelengkapan sarana penunjang gedung SMA/ MA/ SMK dalam kondisi baik mencapai 70% pada Tahun 2017;
29. Persentase kelengkapan sarana penunjang gedung SLB/ SDLB/ SMPLB/ SMALB dalam kondisi baik mencapai 30% pada Tahun 2017;
30. Usia pakai kelengkapan sarana penunjang gedung PAUD menjadi 5 tahun;
31. Usia pakai kelengkapan sarana penunjang gedung TK menjadi 5 tahun;
32. Usia pakai kelengkapan sarana penunjang gedung SD/ MI menjadi 5 tahun;
33. Usia pakai kelengkapan sarana penunjang gedung SMP/ MTs menjadi 5 tahun;
34. Usia pakai kelengkapan sarana penunjang gedung SMA/ SMK/ MA menjadi 5 tahun;
35. Usia pakai kelengkapan sarana penunjang gedung SLB/ SDLB/ SMPLB/ SMALB menjadi 5 tahun;
36. Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan mencapai 100% setiap tahunnya;
37. Persentase kesesuaian alokasi DAK Bidang Pendidikan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan mencapai 100% setiap tahunnya;
38. Persentase rencana induk/ aksi/ penelitian/ kajian/ inovasi daerah bidang infrastruktur pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan arah pencapaian visi Kota Singkawang mencapai 50% pada Tahun 2017;
39. Rata-rata persentase anggaran pendidikan dalam APBD Kota Singkawang mencapai minimal 25% setiap tahunnya;
40. Persentase alokasi anggaran bidang infrastruktur pendidikan Pemerintah Kota Singkawang per kapita per tahun mencapai 20%;

41. Persentase peningkatan jumlah bangunan lembaga pendidikan berbasis potensi Kota Singkawang mencapai 60% pada Tahun 2017;
  42. Persentase peningkatan kerjasama pembangunan infrastruktur pendidikan oleh lembaga swasta mencapai 60% pada Tahun 2017.
- b) Terwujudnya infrastruktur kesehatan yang berkualitas dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Indikator kinerja sasarnya adalah :
1. Persentase prasarana dan sarana bangunan rumah sakit daerah dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017;
  2. Usia pakai prasarana dan sarana rumah sakit daerah menjadi 5 tahun;
  3. Persentase kelengkapan prasarana dan sarana rumah sakit dalam kondisi baik mencapai 100% pada Tahun 2017;
  4. Persentase sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya dalam kondisi baik mencapai 80% pada Tahun 2017;
  5. Usia pakai prasarana dan sarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya menjadi 5 tahun;
  6. Persentase kelengkapan prasarana dan sarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya mencapai 80% pada Tahun 2017;
  7. Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan mencapai 100% setiap tahunnya;
  8. Usia pakai prasarana dan sarana kesehatan menjadi 5 tahun;
  9. Persentase jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih, air limbah dan limbah medis rumah sakit dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017;
  10. Persentase jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih, air limbah dan limbah medis puskesmas/ puskesmas pembantu dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017;
  11. Usia pakai jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih, air limbah dan limbah medis rumah sakit dalam kondisi baik menjadi 5 tahun;
  12. Usia pakai jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih, air limbah dan limbah medis puskesmas/ puskesmas pembantu dalam kondisi baik menjadi 5 tahun;
  13. Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan mencapai 100% setiap tahunnya;

14. Persentase kesesuaian alokasi DAK Bidang kesehatan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur kesehatan mencapai 100% setiap tahunnya;
  15. Persentase rencana induk/ aksi daerah/ penelitian/ kajian/ inovasi daerah bidang infrastruktur pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan arah pencapaian visi Kota Singkawang mencapai 60% pada Tahun 2017;
  16. Persentase alokasi anggaran bidang kesehatan Pemerintah Kota Singkawang per kapita per tahun mencapai 20%;
  17. Rasio rumah sakit daerah per 1000 penduduk mencapai 0.003 pada Tahun 2017;
  18. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk mencapai 0.16 pada Tahun 2017;
  19. Persentase peningkatan jumlah bangunan lembaga kesehatan berbasis potensi Kota Singkawang mencapai 40% pada Tahun 2017;
  20. Persentase peningkatan kerjasama pembangunan infrastruktur kesehatan oleh lembaga swasta mencapai 40% pada Tahun 2017;
  21. Rasio rumah sakit swasta/ non pemerintah per 1000 penduduk mencapai 0.020 pada Tahun 2017.
- 2) Mewujudkan fasilitas infrastruktur pasar yang representatif bagi aktifitas perdagangan masyarakat, sasaran yang akan dicapai adalah :
- a) Terwujudnya infrastruktur pasar yang berkualitas dalam mendukung tercapainya Kota Singkawang sebagai pusat perdagangan. Indikator kinerja sasarannya adalah :
    1. Persentase prasarana dan sarana bangunan pasar tradisional dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017;
    2. Usia pakai prasarana dan sarana pasar tradisional menjadi 5 tahun;
    3. Persentase kelengkapan prasarana dan sarana pasar tradisional dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017;
    4. Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur perdagangan mencapai 100% pada Tahun 2017;
    5. Usia pakai prasarana dan sarana perdagangan menjadi 5 tahun;
    6. Persentase kelengkapan sarana penunjang pasar tradisional dalam kondisi baik mencapai 100% pada Tahun 2017;
    7. Usia pakai kelengkapan sarana penunjang pasar tradisional dalam kondisi baik menjadi 5 tahun;
    8. Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur perdagangan mencapai 60% pada Tahun 2017;

9. Persentase kesesuaian alokasi DAK Bidang perdagangan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur perdagangan mencapai 60% pada Tahun 2017;
  10. Persentase rencana induk/ aksi daerah/ penelitian/ kajian/ inovasi daerah bidang infrastruktur pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan arah pencapaian visi Kota Singkawang mencapai 20% pada Tahun 2017;
  11. Persentase peningkatan kerjasama pembangunan infrastruktur perdagangan oleh lembaga swasta mencapai 40%.
- 3) Mewujudkan ketersediaan air bersih bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Singkawang dan dunia usaha, sasaran yang ingin dicapai adalah :
- a) Tercapainya cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Singkawang. Indikator kinerja sarasannya adalah :
    1. Persentase peningkatan cakupan pelayanan penyediaan air bersih mencapai 70% pada Tahun 2017;
    2. Persentase air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari mencapai 100% pada Tahun 2017;
    3. Persentase rumah tangga pengguna air bersih dalam satu kecamatan mencapai 80% pada Tahun 2017;
    4. Persentase rumah tangga pengguna air bersih mencapai 90% pada Tahun 2017;
    5. Persentase peningkatan cakupan rumah tangga berpenghasilan rendah yang memperoleh akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari mencapai 80% pada Tahun 2017;
    6. Persentase peningkatan cakupan pelayanan air bersih siap minum mencapai 40% pada Tahun 2017;
    7. Persentase sekolah yang memperoleh akses air bersih siap minum mencapai 20% pada Tahun 2017;
    8. Persentase puskesmas yang memperoleh akses air bersih siap minum mencapai 20% pada Tahun 2017;
    9. Persentase tempat/ taman kota yang memperoleh akses air bersih siap minum mencapai 20% pada Tahun 2017;
    10. Angka pencemaran fisik, kimiawi, bakteriologis dan radioaktif mencapai 0 atau bebas pencemaran (*Zero pollutant*) pada Tahun 2017;
    11. Debit air bersih yang disalurkan kepada masyarakat mencapai 150 liter/ org/ hari selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu pada Tahun 2017;
    12. Rasio kontinuitas air bersih yang disalurkan kepada masyarakat mencapai 24 jam per hari selama 7 hari perminggu pada Tahun 2017;



13. Persentase peningkatan kerjasama revitalisasi pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih mencapai 80% pada Tahun 2017;
  14. Konsumsi air rata – rata mencapai 22 m<sup>3</sup>/ bulan pada Tahun 2017;
  15. Tingkat kebocoran air menurun hingga mencapai 28% pada Tahun 2017;
  16. Pegawai per 1000 pelanggan mencapai 7 pada Tahun 2017;
  17. Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur penyediaan air bersih mencapai 100% setiap tahunnya;
  18. Persentase kesesuaian alokasi DAK bidang penyediaan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur revitalisasi penyediaan air bersih mencapai 100% setiap tahunnya;
  19. Persentase rencana induk/ aksi daerah/ penelitian/ kajian/ inovasi daerah bidang infrastruktur penyediaan air bersih yang sesuai dengan kebutuhan dan arah pencapaian visi Kota Singkawang mencapai 40% pada Tahun 2017.
- 4) Menciptakan sinergisitas dan integrasi pengelolaan infrastruktur daerah serta efektifitas pemanfaatannya agar memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi, sasaran yang akan dicapai adalah :
- a) Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas dalam mewujudkan Kota Singkawang sebagai pusat jasa, perdagangan, dan agroindustri. Indikator kinerja sarannya adalah :
    1. Persentase jalan dan jembatan Kota Singkawang dalam kondisi baik mencapai 100% pada Tahun 2017;
    2. Rasio panjang jalan dilalui roda 4 (jalan nasional, provinsi dan kota) mencapai 1 pada Tahun 2017;
    3. Persentase pembangunan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (minimal dilalui roda 4) mencapai 100% pada Tahun 2017;
    4. Persentase panjang jalan Kota Singkawang dalam kondisi baik ( > 40 Km/ Jam ) mencapai 65% pada Tahun 2017;
    5. Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 M) mencapai 25% pada Tahun 2017;
    6. Cakupan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan yang sesuai kebutuhan mobilitas masyarakat mencapai 100% pada Tahun 2017;
    7. Usia pakai jalan dan jembatan mencapai 5 tahun;
    8. Usia pakai jalan di lingkungan kecamatan 5 tahun;
    9. Usia pakai jembatan di lingkungan kecamatan 5 tahun;
    10. Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar menurun hingga mencapai 30% pada Tahun 2017;

11. Persentase penerangan jalan umum dalam kondisi baik mencapai 100% pada Tahun 2017;
12. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017;
13. Proporsi jembatan dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017;
14. Usia pakai prasarana dan sarana kebinamargaan mencapai 5 tahun;
15. Usia pakai alat-alat kebinamargaan mencapai 5 tahun;
16. Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan mencapai 100 % setiap tahunnya;
17. Persentase panjang jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan mencapai 100 % pada Tahun 2017;
18. Persentase jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat mencapai 100 % setiap tahunnya;
19. Persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman mencapai 100 % setiap tahunnya;
20. Persentase jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan dengan kecepatan yang aman mencapai 100 % setiap tahunnya;
21. Persentase jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dalam kondisi baik mencapai 100 % pada Tahun 2017;
22. Usia pakai jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya mencapai 5 tahun;
23. Rasio jaringan Irigasi menjadi 1 pada Tahun 2017;
24. Luas irigasi Kota Singkawang dalam kondisi baik mencapai 25% pada Tahun 2017;
25. Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat mencapai 95% pada Tahun 2017;
26. Persentase air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada mencapai 100% pada Tahun 2017;
27. Persentase penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah mencapai 100% pada Tahun 2017;
28. Persentase penyediaan prasarana dan sarana air limbah perkotaan mencapai 50% pada Tahun 2017;
29. Persentase pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah mencapai 50% pada Tahun 2017;
30. Persentase pengembangan teknik distribusi air minum mencapai 50% pada Tahun 2017;
31. Cakupan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada sistem *on site* di kecamatan untuk perbaikan kesehatan masyarakat setempat mencapai 5 kecamatan pada Tahun 2017;

32. Cakupan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada sistem *off site* di perkotaan untuk perbaikan kualitas pengelolaan air limbah masyarakat mencapai 40% dari luas wilayah perkotaan pada Tahun 2017;
  33. Persentase prasarana dan sarana permukiman dalam kondisi baik mencapai 40% pada Tahun 2017;
  34. Usia pakai prasarana dan sarana permukiman menjadi 10 tahun;
  35. Cakupan ketersediaan rumah layak huni mencapai 70% pada Tahun 2017;
  36. Rasio rumah layak huni mencapai 50% pada Tahun 2017;
  37. Rasio permukiman layak huni mencapai 25% pada Tahun 2017;
  38. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau mencapai 100% pada Tahun 2017;
  39. Persentase rumah tangga pengguna listrik mencapai 100% pada Tahun 2017;
  40. Lingkungan pemukiman kumuh menurun mencapai 5% pada Tahun 2017;
  41. Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mencapai 70% pada Tahun 2017;
  42. Persentase rumah tinggal bersanitasi mencapai 85 % pada Tahun 2017;
  43. Persentase luas lingkungan permukiman kumuh menurun mencapai 10% pada Tahun 2017;
  44. Persentase prasarana dan sarana bangunan pemerintahan dalam kondisi baik mencapai 95% setiap tahunnya;
  45. Usia pakai prasarana dan sarana bangunan pemerintahan menjadi 5 tahun;
  46. Persentase kelengkapan prasarana dan sarana penunjang bangunan pemerintahan dalam kondisi baik mencapai 80% setiap tahunnya;
  47. Persentase ketersediaan fasilitas umum milik pemerintah yang dapat dinikmati masyarakat secara leluasa dan tanpa dipungut bayaran mencapai 90% pada Tahun 2017.
- b) Terwujudnya sinergi antara perencanaan, pembiayaan dan pencapaian target pembangunan infrastruktur/ utilitas perkotaan, sasaran yang akan dicapai adalah :
1. Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan kebutuhan ruang sosial publik mencapai 100% setiap tahunnya;

2. Persentase kesesuaian alokasi DAK Bidang pekerjaan umum dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah mencapai 100% setiap tahunnya;
3. Persentase rencana induk/ aksi daerah/ penelitian/ kajian/ inovasi daerah pembangunan infrastruktur daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan arah pencapaian visi Kota Singkawang mencapai 40% pada Tahun 2017;
4. Persentase perumusan kembali kebijakan (*reformulation*) peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah untuk memenuhi kebutuhan ruang sosial publik mencapai 100%;
5. Persentase penyesuaian kebijakan (*policy adjustment*) pembangunan infrastruktur daerah mencapai 100% pada Tahun 2017;
6. Persentase kesesuaian kebijakan bidang pekerjaan umum dengan aspirasi masyarakat mencapai 100% pada Tahun 2017;
7. Cakupan penataan peraturan daerah bidang pekerjaan umum yang sesuai dengan pencapaian visi pembangunan Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017;
8. Persentase implementasi teknologi pembangunan dan pengembangan infrastruktur/ utilitas perkotaan berbasis ilmu pengetahuan inovatif mencapai 30% pada Tahun 2017;
9. Cakupan implementasi pengembangan (inovasi) infrastruktur daerah mencapai 40% pada Tahun 2017;
10. Persentase akurasi database jalan dan jembatan mencapai 100% pada Tahun 2017;
11. Tingkat akurasi pengambilan kebijakan pembangunan jalan dan jembatan mencapai 100% pada Tahun 2017;
12. Persentase akurasi database drainase dan irigasi mencapai 100% pada Tahun 2017;
13. Tingkat akurasi pengambilan kebijakan pembangunan utilitas/ fasilitas umum daerah mencapai 100% pada Tahun 2017;
14. Persentase akurasi database permukiman perkotaan mencapai 100% pada Tahun 2017;
15. Tingkat akurasi pengambilan kebijakan pembangunan permukiman mencapai 100% pada Tahun 2017;
16. Persentase implementasi integrasi informasi geo spasial dan infrastruktur/ utilitas perkotaan mencapai 100% pada Tahun 2017;
17. Persentase akurasi sistem informasi peruntukan dan pengendalian pemanfaatan ruang mencapai 100% pada Tahun 2017.

### **5.3.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Singkawang Mewujudkan Misi Ketiga**

Dalam mewujudkan Misi Ketiga: ***Meningkatkan kemudahan usaha masyarakat berpenghasilan rendah.*** Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Singkawang yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan taraf hidupnya, dengan sasaran :
  - a) Terciptanya ekosistem yang kondusif bagi pengembangan produk-produk unggulan daerah berlandaskan ekonomi kerakyatan. Indikator kinerja sasarnya adalah :
    1. Persentase perumusan kembali kebijakan (*reformulation*) revitalisasi kredit usaha rakyat (KUR) yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran mencapai 100% pada Tahun 2017;
    2. Persentase perumusan kembali kebijakan (*reformulation*) pemberian subsidi pemerintah untuk peningkatan kinerja dan pemberdayaan koperasi mencapai 100% pada Tahun 2017;
    3. Persentase penyesuaian kebijakan (*policy adjustment*) mekanisme, prosedur dan penilaian koperasi dalam penyaluran modal dan kemudahan akses ke lembaga perbankan dan keuangan bagi koperasi mencapai 100% pada Tahun 2017;
    4. Cakupan penataan peraturan perundang-undangan penumbuh-kembangan kinerja dan transparansi manajemen koperasi mencapai 50%;
    5. Persentase kepercayaan nasabah terhadap pelayanan koperasi mencapai 100% pada Tahun 2017
    6. Persentase peningkatan jumlah koperasi mandiri mencapai 40% pada Tahun 2017 ;
    7. Persentase peningkatan jumlah diversifikasi usaha koperasi mandiri mencapai 50% pada Tahun 2017;
    8. Persentase jumlah koperasi binaan pemerintah yang memiliki manajemen (neraca) keuangan yang transparan dan akuntabel meningkat 60% pada Tahun 2017;
    9. Persentase jumlah koperasi yang mengembalikan peminjaman secara tepat waktu meningkat 60% pada Tahun 2017;
    10. Persentase peningkatan jumlah koperasi yang melakukan penurunan suku bunga peminjaman dana kepada anggota dan atau masyarakat mencapai 60% pada Tahun 2017;

11. Persentase peningkatan jumlah koperasi yang menerapkan sistem informasi teknologi dalam mendukung manajemen dan pengembangan usaha koperasi mencapai 50 % pada Tahun 2017;
12. Persentase jumlah koperasi yang memperoleh *reward* atas kinerja pengelolaan keuangan dan diversifikasi usaha mencapai 50% pada Tahun 2017;
13. Persentase penurunan jumlah koperasi yang didiskualifikasi dalam penerimaan peminjaman modal mencapai 50% pada Tahun 2017;
14. Reformulasi perancangan rencana pengembangan koperasi agribisnis mencapai 100% pada Tahun 2017;
15. Tingkat keterpaduan dan sinkronisasi program pengembangan agribisnis daerah lintas SKPD mencapai 100% pada Tahun 2017;
16. Tingkat percepatan penumbuhkembangan KUR dengan peningkatan pendapatan masyarakat agribisnis mencapai 100% pada Tahun 2017;
17. Tingkat percepatan inovasi pengembangan agribisnis bagi peningkatan pendapatan masyarakat agribisnis mencapai 100% pada Tahun 2017;
18. Persentase keanggotaan kelompok tani/ nelayan mandiri mencapai 80% pada Tahun 2017;
19. ersentase peningkatan diversifikasi usaha koperasi agribisnis mencapai 100% pada Tahun 2017;
20. Persentase MoU usaha patungan kelompok tani binaan Pemerintah Kota Singkawang dengan pengusaha swasta/ BUMD mencapai 100% pada Tahun 2017;
21. Persentase kemudahan aksesibilitas permodalan koperasi agribisnis mencapai 100% pada Tahun 2017;
22. Persentase diversifikasi usaha koperasi agribisnis mencapai 80% pada Tahun 2017;
23. Persentase pelatihan kewirausahaan bagi pemuda mencapai 80% pada Tahun 2017;
24. Persentase pelatihan keterampilan bagi pemuda wirausaha mencapai 80% pada Tahun 2017;
25. Persentase peningkatan jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan ditempatkan bekerja mencapai 60% pada Tahun 2017;
26. Persentase jumlah wirausaha yang dikelola secara mandiri oleh peserta pelatihan kewirausahaan mencapai 90% pada Tahun 2017;

27. Persentase jumlah bantuan modal bagi usaha mandiri menurun hingga 20% pada Tahun 2017;
28. Cakupan kebijakan pengembangan klusterisasi UKM/ UMKM kreatif yang memastikan keterpaduan penumbuhkembangan kewirausahaan dan keberpihakan peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah mencapai 100% pada Tahun 2017;
29. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana klusterisasi UKM dan UMKM wirausaha muda binaan mencapai 100% pada Tahun 2017;
30. Persentase pembangunan pusat oleh-oleh Kota Singkawang terpadu mencapai 100% pada Tahun 2017;
31. Cakupan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan muda mencapai 80% pada Tahun 2017;
32. Persentase peningkatan *omzet* industri rumah tangga meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017;
33. Persentase peningkatan insentif untuk inovasi produk unggulan kreatif melalui peningkatan akses informasi dan pelayanan perbankan dan keuangan mencapai 100% pada Tahun 2017;
34. Persentase kerjasama bilateral (*MoU*) pemasaran produk UKM/ UMKM di pasar regional dan nasional mencapai 50% pada Tahun 2017.

#### **5.3.4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Singkawang Mewujudkan Misi Keempat**

Dalam mewujudkan Misi Keempat: **Melaksanakan pendistribusian pemerataan dan penguatan ekonomi kewilayahan.** Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Singkawang yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, dengan sasaran:
  - a) Terwujudnya akselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan tanpa mengesampingkan aspek pemerataan yang berkeadilan;
    1. Persentase pembaharuan dan pemutahiran rancangan strategi pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi wilayah mencapai 60% pada Tahun 2017;
    2. Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap kebutuhan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi wilayah mencapai 100% pada Tahun 2017;

3. Persentase rencana induk/ rencana aksi daerah pengembangan dan pembangunan wilayah ekonomi terpadu mencapai 100% pada Tahun 2017;
4. Persentase penurunan ketimpangan PDRB per kapita berdasarkan wilayah kecamatan mencapai 30% setiap tahunnya;
5. Persentase peningkatan pendapatan masyarakat per wilayah kecamatan meningkat 20% setiap tahunnya;
6. Persentase penurunan ketimpangan pendapatan per kapita berdasarkan wilayah kecamatan mencapai 30% setiap tahunnya;
7. Persentase penurunan angka pengangguran berdasarkan wilayah kecamatan mencapai 60 % pada Tahun 2017;
8. Persentase kesesuaian perencanaan peningkatan pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka pengangguran perkotaan mencapai 100% pada Tahun 2017;
9. Persentase kesesuaian perencanaan peningkatan pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan perkotaan mencapai 100% pada Tahun 2017;
10. Persentase peningkatan kesepakatan MoU pembangunan wilayah pinggiran mencapai 60% pada Tahun 2017;
11. Persentase penanganan permasalahan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi terutama di daerah pinggiran mencapai 100% pada Tahun 2017;
12. Persentase peningkatan jumlah kesepakatan yang melibatkan masyarakat per kecamatan mencapai 100% pada Tahun 2017;
13. Persentase perumusan kembali kebijakan (*reformulation*) peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi wilayah mencapai 100% pada Tahun 2017;
14. Persentase penyesuaian kebijakan (*policy adjustment*) pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh mencapai 100% pada Tahun 2017;
15. Persentase penurunan angka pelanggaran peraturan percepatan pembangunan daerah pinggiran, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar hingga mencapai 0% pada Tahun 2017;
16. Cakupan penataan peraturan perundang-undangan penumbuh-kembangan pembangunan daerah pinggiran, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar mencapai 100% pada Tahun 2017;
17. Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pada pintu-pintu masuk Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017;



18. Persentase klasterisasi wilayah strategis dan cepat tumbuh mencapai 100% pada Tahun 2017;
19. Persentase perencanaan pengembangan wilayah strategis pinggiran yang menghubungkan wilayah pesisir dan perbatasan dengan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017;
20. Persentase pengembangan wilayah berbasis sumberdaya mencapai 80% pada Tahun 2017;
21. Persentase pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan mencapai 80% pada Tahun 2017;
22. Persentase pengembangan wilayah berbasis efisiensi unggulan mencapai 80% pada Tahun 2017;
23. Persentase pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan mencapai 80% pada Tahun 2017;
24. Persentase ketersediaan prasarana dan sarana pada daerah pinggiran kota mencapai 100% pada Tahun 2017;
25. Persentase prasarana dan sarana pada daerah pinggiran kota dalam kondisi baik mencapai 100% pada Tahun 2017;
26. Persentase aksesibilitas masyarakat ke daerah pinggiran, perbatasan, terdepan, dan daerah terluar mencapai 60% pada Tahun 2017;
27. Cakupan revitalisasi pasar tradisional pada daerah pinggiran, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar mencapai 50% pada Tahun 2017;
28. Cakupan ketersediaan terminal logistik perdagangan pada daerah pinggiran, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar mencapai 50% pada Tahun 2017;
29. Cakupan moda transportasi terpadu pada daerah pinggiran, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar mencapai 50% pada Tahun 2017;
30. Persentase penurunan angka rawan kecelakaan pada daerah pinggiran, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar mencapai 50% pada Tahun 2017;
31. Persentase infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi pada daerah perbatasan pesisir dan pedalaman meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017;
32. Persentase peningkatan aksesibilitas informasi terutama bagi masyarakat pada daerah pinggiran, perbatasan, terdepan, dan daerah terluar mencapai 60% pada Tahun 2017;

33. Persentase peningkatan aksesibilitas masyarakat ke daerah pinggiran, perbatasan, terdepan, dan daerah terluar mencapai 60% pada Tahun 2017;
  34. Persentase peningkatan kelompok ekonomi masyarakat pesisir mandiri mencapai 60% pada Tahun 2017;
  35. Persentase peningkatan pendapatan masyarakat pesisir mencapai 60% pada Tahun 2017;
  36. Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada daerah pesisir yang mampu mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan mencapai 60% pada Tahun 2017;
  37. Persentase peningkatan penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat pesisir yang mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan mencapai 60% pada Tahun 2017;
- b) Terciptanya pemerataan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Indikator kinerja sasaraannya adalah :
1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik pada daerah pinggiran, perbatasan, terdepan, dan daerah terluar mencapai 100% pada Tahun 2017;
  2. Jangkauan peningkatan kinerja layanan pendidikan pada daerah pinggiran meningkat 100% pada Tahun 2017;
  3. APK pada daerah pinggiran, perbatasan, terdepan, dan daerah terluar meningkat 20% pada Tahun 2017;
  4. Angka kelulusan pendidikan dasar 9 tahun pada daerah pinggiran, perbatasan, terdepan, dan daerah terluar meningkat 20% pada Tahun 2017;
  5. Persentase peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik pada daerah pinggiran, perbatasan, terdepan, dan daerah terluar mencapai 100% pada Tahun 2017;
  6. Jangkauan peningkatan kinerja layanan kesehatan pada daerah pinggiran mencapai 100% pada Tahun 2017;
  7. Usia Harapan Hidup (UHH) pada daerah pinggiran, perbatasan, terdepan, dan daerah terluar meningkat 20% setiap tahunnya;
  8. Angka penderita penyakit menular pada daerah pinggiran, perbatasan, terdepan, dan daerah terluar menurun 20% pada Tahun 2017;
  9. Persentase perumusan kembali kebijakan (*reformulation*) pengentasan pengangguran, pemerataan kesempatan berusaha dan pengentasan kemiskinan melalui pengaturan kembali jam bekerja baik bagi usia produktif maupun ibu rumah tangga dan kaum

- perempuan mencapai 100% pada Tahun 2017;
10. Persentase penyesuaian kebijakan (*policy adjustment*) pengentasan pengangguran, pemerataan kesempatan berusaha dan pengentasan kemiskinan mencapai 100% pada Tahun 2017;
  11. Persentase peningkatan angka serapan tenaga kerja lokal yang bekerja di industri milik pengusaha di Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017;
  12. Persentase penurunan angkatan kerja dari luar Singkawang yang bekerja pada perusahaan/ industri milik swasta mencapai 40% pada Tahun 2017;
  13. Cakupan penataan peraturan perundang-undangan pengentasan pengangguran, pemerataan kesempatan berusaha dan pengentasan kemiskinan mencapai 100% pada Tahun 2017;
  14. Rasio tenaga kerja terampil dibandingkan dengan tenaga kerja tidak terampil mencapai 75% pada Tahun 2017;
  15. Persentase peningkatan tenaga kerja bersertifikat sesuai keahliannya mencapai 100% pada Tahun 2017;
  16. Diversifikasi sertifikasi tenaga kerja siap pakai mencapai 100% pada Tahun 2017;
  17. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi mencapai 80% pada Tahun 2017;
  18. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat mencapai 70% pada Tahun 2017;
  19. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja sebelum bekerja sesuai kompetensi mencapai 70% pada Tahun 2017;
  20. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan mencapai 80% pada Tahun 2017;
  21. Rasio daya serap tenaga kerja mencapai 25% pada Tahun 2017;
  22. Cakupan informasi bursa kerja tersedia yang dimutakhirkan secara berkala mencapai 100% pada Tahun 2017;
  23. Cakupan lembaga penyalur tenaga kerja yang taat peraturan ketenagakerjaan mencapai 50% pada Tahun 2017;
  24. Persentase tenaga kerja terampil bersertifikat yang memperoleh kepastian pekerjaan mencapai 100% pada Tahun 2017;
  25. Tingkat pengangguran intelektual menurun 20% pada Tahun 2017;
  26. Tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 67.79 % pada Tahun 2017;
  27. Tingkat pengangguran terbuka menurun 3.50% pada Tahun 2017;
  28. Persentase penurunan jumlah kasus penganiayaan tenaga kerja mencapai 50% setiap tahunnya;

29. Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran K3 pada perusahaan/ industri milik swasta mencapai 50% pada Tahun 2017;
  30. Cakupan penerapan perlindungan ketenagakerjaan pada perusahaan/ industri milik swasta mencapai 100% pada Tahun 2017;
  31. Persentase kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan mencapai 100% pada Tahun 2017;
  32. Persentase penurunan angka PHK secara sepihak mencapai 100% pada Tahun 2017;
  33. Persentase peningkatan upah pekerja/ buruh perusahaan/ industri milik pengusaha swasta mencapai 40% pada Tahun 2017;
  34. Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun mencapai 0 (tidak ada kasus) setiap tahunnya;
  35. Persentase keselamatan dan perlindungan kerja mencapai 85% pada Tahun 2017;
  36. Besaran peningkatan kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) mencapai 60% pada Tahun 2017;
  37. Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta Jamsostek mencapai 90% pada Tahun 2017;
  38. Besaran pemeriksaan perusahaan mencapai 60% pada Tahun 2017;
  39. Besaran pengujian peralatan di perusahaan mencapai 60% pada Tahun 2017;
  40. Persentase penurunan jumlah tenaga kerja dibawah umur mencapai 10% pada Tahun 2017;
  41. Partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat sebesar 39% pada Tahun 2017.
- 2) Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi kreatif kerakyatan berbasis jasa, perdagangan dan agroindustri, sasaran yang akan dicapai adalah :
- a) Terciptanya perbaikan struktur perekonomian daerah yang kokoh sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas (*inklusif*), berdaya saing global, dan menjadi motor penggerak perekonomian. Indikator kinerja sasarannya adalah :
    1. Pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 6.46% pada Tahun 2017;
    2. Laju inflasi menurun sebesar 2.54% pada Tahun 2017;
    3. PDRB per kapita (rupiah) meningkat sebesar Rp. 23.9283.339.33 pada Tahun 2017;
    4. Angka kemiskinan menurun sebesar 4.33% pada Tahun 2017;
    5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat sebesar 74.44 pada Tahun 2017;

6. Persentase pencapaian stabilitas harga komoditas barang/ jasa meningkat 20% pada Tahun 2017;
7. Persentase ketersediaan jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah meningkat 20% setiap tahunnya;
8. Cakupan penataan regulasi peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah meningkat 20% setiap tahunnya;
9. Persentase ketersediaan peraturan daerah/ walikota/ juklak/ juknis yang mendukung iklim usaha mencapai 20% setiap tahunnya;
10. Persentase ketersediaan peraturan daerah/ walikota/ juklak/ juknis tentang peningkatan PAD mencapai 20% pada Tahun 2017;
11. Persentase peningkatan investasi daerah melalui kemudahan sistem dan prosedur perizinan dan investasi mencapai 60% pada Tahun 2017;
12. Persentase pencapaian target jumlah pengusaha sadar pajak dan retribusi daerah meningkat 20% setiap tahunnya;
13. Persentase pertumbuhan penerimaan pajak daerah mencapai 60% setiap tahunnya;
14. Persentase pertumbuhan penerimaan retribusi daerah mencapai 100% setiap tahunnya;
15. Persentase pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 100% setiap tahunnya;
16. Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mencapai 100% setiap tahunnya;
17. Persentase pertumbuhan rasio kemandirian mencapai 6.89% pada Tahun 2017;
18. Persentase pertumbuhan rasio efektifitas mencapai 100 % pada Tahun 2017
19. Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mencapai 100% setiap tahunnya;
20. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total belanja APBD mencapai 0.430% pada Tahun 2017;
21. Persentase pertumbuhan PAD mencapai 88,15% pada Tahun 2017;
22. Persentase pembaharuan dan pemutahiran rancangan strategi pengembangan produk unggulan daerah yang kompetitif, kreatif, inovatif dan khas mencapai 40% pada Tahun 2017,
23. Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap pengembangan produk unggulan daerah yang kompetitif, kreatif, inovatif dan khas berbasis potensi wilayah mencapai 100% pada Tahun 2017;
24. Persentase rencana induk/ rencana aksi daerah pengembangan produk unggulan daerah yang kompetitif, kreatif dan khas

- mencapai 100% pada Tahun 2017;
25. Persentase peningkatan perkembangan aktivitas sektor-sektor ekonomi yang dikelola masyarakat mencapai 60% pada Tahun 2017;
  26. Persentase pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017;
  27. Persentase peningkatan produk kreatif khas per wilayah mencapai 90% pada Tahun 2017;
  28. Persentase peningkatan pemasaran produk kreatif khas per wilayah mencapai 60% pada Tahun 2017;
  29. Persentase peningkatan produksi produk-produk unggulan pertanian/ perkebunan mencapai 40% pada Tahun 2017;
  30. Persentase peningkatan produktivitas potensi unggulan pertanian/ perkebunan mencapai 40% pada Tahun 2017;
  31. Persentase peningkatan pengembangan model distribusi pangan yang efisien mencapai 50% pada Tahun 2017;
  32. Persentase pengembangan perbenihan/ perbibitan tanaman pertanian/ perkebunan unggulan mencapai 40% pada Tahun 2017;
  33. Persentase peningkatan diversifikasi produk organik atau bebas gluten (*gluten free*) hasil pertanian tanaman pangan mencapai 40% pada Tahun 2017;
  34. Persentase peningkatan diversifikasi produk pertanian/ perkebunan pasca panen mencapai 40% pada Tahun 2017;
  35. Persentase peningkatan cakupan standarisasi benih/ bibit lokal unggul mencapai 50% pada Tahun 2017;
  36. Persentase cakupan kebijakan bidang pertanian/ perkebunan yang berpihak kepada peningkatan produktivitas, standarisasi mutu produk pertanian/ perkebunan dan jejaring pemasaran mencapai 100% pada Tahun 2017;
  37. Persentase peningkatan konsumsi masyarakat terhadap produk pertanian/ perkebunan lokal mencapai 80% pada Tahun 2017;
  38. Persentase peningkatan produk pertanian/ perkebunan yang beredar di pasaran domestik mencapai 100% pada Tahun 2017;
  39. Persentase peningkatan inovasi dan diversifikasi produk pertanian/ perkebunan yang beredar di pasaran domestik mencapai 40% pada Tahun 2017;
  40. Persentase produk hasil pertanian tanaman pangan organik atau bebas gluten (*gluten free*) terjual mencapai 20% pada Tahun 2017;
  41. Persentase peningkatan jumlah produk pertanian/ perkebunan unggulan lokal yang mendominasi pasaran domestik mencapai 100%
  42. Persentase peningkatan produk pertanian/ perkebunan yang beredar di pasaran luar provinsi mencapai 50% pada Tahun 2017;

43. Persentase kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 40% pada Tahun 2017;
44. Persentase peningkatan pendapatan petani per kapita mencapai 40% pada Tahun 2017;
45. Persentase peningkatan produksi produk-produk olahan hasil peternakan mencapai 40% pada Tahun 2017;
46. Persentase peningkatan produktivitas produk olahan hasil peternakan mencapai 40% pada Tahun 2017;
47. Persentase pengembangan model distribusi produk olahan hasil peternakan yang efisien mencapai 50% pada Tahun 2017;
48. Persentase pengembangan perbenihan/ perbibitan ternak unggulan daerah mencapai 40% pada Tahun 2017;
49. Persentase peningkatan cakupan standarisasi produk olahan peternakan mencapai 50% pada Tahun 2017;
50. Persentase kelompok masyarakat pengolah hasil ternak mencapai 50% pada Tahun 2017;
51. Persentase cakupan kebijakan sektor peternakan yang berpihak kepada peningkatan produktivitas, standarisasi mutu produk hasil peternakan dan olahannya serta kepastian jejaring pemasaran mencapai 100% pada Tahun 2017;
52. Persentase peningkatan konsumsi masyarakat terhadap produk peternakan lokal mencapai 80% pada Tahun 2017;
53. Persentase peningkatan produk peternakan yang beredar di pasaran domestik mencapai 100% pada Tahun 2017;
54. Persentase inovasi dan diversifikasi produk olahan hasil peternakan yang beredar di pasaran domestik mencapai 40% pada Tahun 2017;
55. Persentase peningkatan jumlah produk olahan hasil peternakan unggulan lokal yang mendominasi pasaran domestik mencapai 100% pada Tahun 2017;
56. Persentase peningkatan produk olahan hasil peternakan yang beredar di pasaran luar provinsi mencapai 50% pada Tahun 2017;
57. Persentase peningkatan jumlah industri pengolah hasil ternak bersertifikasi halal mencapai 100% pada Tahun 2017;
58. Persentase penurunan produksi hasil olahan peternakan tidak layak konsumsi mencapai 100% pada Tahun 2017;
59. Persentase peningkatan jumlah rumah potong hewan bersertifikasi halal mencapai 100% pada Tahun 2017;
60. Persentase peningkatan produksi produk-produk unggulan budidaya perikanan mencapai 40% pada Tahun 2017;
61. Persentase peningkatan produktivitas potensi unggulan budidaya perikanan mencapai 40% pada Tahun 2017;

62. Persentase pengembangan model distribusi sektor budidaya perikanan yang efisien mencapai 50% pada Tahun 2017;
63. Persentase pengembangan perbenihan/ perbibitan budidaya perikanan unggulan mencapai 40% pada Tahun 2017;
64. Persentase diversifikasi produk hasil budidaya perikanan pasca panen meningkat sebesar 40% pada Tahun 2017;
65. Persentase peningkatan produksi produk-produk unggulan perikanan tangkap sebesar 40% pada Tahun 2017;
66. Persentase peningkatan produktivitas potensi unggulan perikanan tangkap sebesar 40% pada Tahun 2017;
67. Persentase pengembangan perbenihan/ perbibitan perikanan tangkap unggulan mencapai 40% pada Tahun 2017;
68. Persentase cakupan kebijakan sektor perikanan yang berpihak kepada peningkatan produktivitas, standarisasi mutu produk perikanan dan olahannya serta kepastian jejaring pemasaran mencapai 100% pada Tahun 2017;
69. Persentase peningkatan konsumsi masyarakat terhadap produk perikanan dan olahannya mencapai 80% pada Tahun 2017;
70. Persentase peningkatan produk perikanan dan olahannya yang beredar di pasaran domestik mencapai 100% pada Tahun 2017;
71. Persentase peningkatan inovasi dan diversifikasi produk olahan perikanan yang beredar di pasaran domestik mencapai 40% pada Tahun 2017;
72. Persentase peningkatan jumlah produk olahan perikanan unggulan lokal yang mendominasi pasaran domestik mencapai 100% pada Tahun 2017;
73. Persentase peningkatan produk olahan perikanan yang beredar di pasaran luar provinsi mencapai 50% pada Tahun 2017;
74. Persentase peningkatan jumlah industri pengolah hasil perikanan bersertifikasi halal mencapai 100% pada Tahun 2017;
75. Persentase penurunan produksi hasil olahan perikanan tidak layak konsumsi mencapai 100% pada Tahun 2017;
76. Cakupan ketersediaan kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir mencapai 100% pada Tahun 2017;
77. Cakupan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kluster industri sebesar 80% pada Tahun 2017;
78. Cakupan keterkaitan produksi industri hulu ke hilir mencapai 100% pada Tahun 2017;
79. Cakupan publikasi dan promosi produk industri hulu ke hilir mencapai 100% pada Tahun 2017;



80. Cakupan pengembangan modal ventura dan inkubator sistem produksi meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017;
81. Cakupan pengembangan sistem inovasi teknologi industri yang diterapkan mencapai 40% pada Tahun 2017;
82. Cakupan penguatan kemampuan industri berbasis teknologi meningkat sebesar 100% pada Tahun 2017;
83. Persentase cakupan kebijakan perlindungan hak cipta dan kreasi produk unggulan daerah berkualitas ekspor mencapai 100% pada Tahun 2017;
84. Persentase peningkatan kerjasama standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral dan regional mencapai 50% pada Tahun 2017;
85. Persentase peningkatan aktifitas perdagangan produk unggulan daerah pada event promosi/ *expo* sebesar 80% pada Tahun 2017;
86. Persentase peningkatan penerimaan *omzet* perdagangan produk unggulan daerah sebesar 90% pada Tahun 2017;
87. Cakupan *cluster* perdagangan produk daerah berkualitas ekspor mencapai 50% pada Tahun 2017;
88. Cakupan industri kecil dan menengah kreatif yang mampu berkembang secara mandiri mencapai 40% pada Tahun 2017;
89. Persentase kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017;
90. Angka penyerapan tenaga kerja pada usaha-usaha kreatif masyarakat meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017;
91. Persentase peningkatan *omzet* yang diterima industri kecil dan menengah yang dibina pemerintah mencapai 40% pada Tahun 2017;
92. Persentase industri pembibitan/ perbenihan meningkat sebesar 40% pada Tahun 2017;
93. Persentase industri agro-kimia meningkat sebesar 20% pada Tahun 2017;
94. Persentase industri-industri yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan meningkat sebesar 40% pada Tahun 2017;
95. Persentase peningkatan produk olahan pertanian primer yang diperdagangkan mencapai 50% pada Tahun 2017;
96. Persentase industri-industri yang mengolah hasil peternakan primer menjadi produk olahan meningkat sebesar 40% pada Tahun 2017;
97. Persentase produk olahan peternakan primer yang diperdagangkan mencapai 50% pada Tahun 2017;
98. Persentase industri-industri yang mengolah hasil peternakan primer menjadi produk olahan meningkat 40% pada Tahun 2017;
99. Persentase produk olahan peternakan primer yang diperdagangkan mencapai 50% pada Tahun 2017.

### **5.3.5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Singkawang Mewujudkan Misi Kelima**

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Singkawang dalam mewujudkan Misi Kelima: **Melanjutkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam agar dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Singkawang.** Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Singkawang yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Melestarikan keberlanjutan manfaat sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan sasaran :
  - a) Terciptanya lingkungan kota yang nyaman dan bebas polusi secara berkelanjutan. Indikator kinerja sarannya adalah :
    1. Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang aktif dalam aktifitas bernuansa lingkungan hidup yang diselenggarakan kecamatan dan tingkat kota mencapai 100% pada Tahun 2017;
    2. Persentase peningkatan luasan perkarangan rumah masyarakat di lingkungan kelurahan yang ditanami pohon terutama pohon buah-buahan sebesar 80% pada Tahun 2017;
    3. Persentase peningkatan jumlah rumah tangga di lingkungan kelurahan yang melakukan pemisahan sampah sebesar 60% pada Tahun 2017;
    4. Persentase peningkatan jumlah kelurahan hijau mencapai 60% pada Tahun 2017;
    5. Persentase peningkatan jumlah kelurahan bersih mencapai 60% pada Tahun 2017;
    6. Persentase jumlah rumah tangga di lingkungan kelurahan yang memproduksi pupuk kompos mencapai 20% pada Tahun 2017;
    7. Persentase peningkatan jumlah rumah tangga di lingkungan kelurahan yang memanfaatkan perkarangan untuk tanaman obat mencapai 60% pada Tahun 2017;
    8. Persentase peningkatan rumah masyarakat yang bersih, kering dan bebas lembab mencapai 60% pada Tahun 2017;
    9. Persentase rumah masyarakat yang memiliki sirkulasi udara yang baik meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017;
    10. Persentase rumah masyarakat yang memiliki sistem sanitasi yang baik meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017;
    11. Persentase gedung/ bangunan pemerintahan yang bersih, kering dan bebas lembab meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017;
    12. Persentase bangunan pelayanan kesehatan masyarakat yang bersih, kering dan bebas lembab meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017;

13. Persentase gedung kantor milik swasta yang bersih, kering dan bebas lembab meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017;
14. Persentase tempat usaha penjualan makanan milik masyarakat yang bersih, kering dan bebas lembab meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017;
15. Persentase gedung/ bangunan pemerintahan yang memiliki sirkulasi udara yang baik meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017;
16. Persentase bangunan pelayanan kesehatan masyarakat yang memiliki sirkulasi udara yang baik meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017;
17. Persentase gedung kantor milik swasta yang memiliki sirkulasi udara yang baik meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017;
18. Persentase peningkatan jumlah kawasan wisata yang memenuhi persyaratan lingkungan sehat mencapai 60% pada Tahun 2017;
19. Persentase gedung/ tempat usaha milik masyarakat yang memenuhi persyaratan kesehatan meningkat sebesar 70% pada Tahun 2017
20. Cakupan pengelolaan B3 dan limbah B3 mencapai 100% setiap tahunnya;
21. Persentase penurunan pencemaran akibat B3 mencapai 50%;
22. Angka pencemaran tempat wisata menurun sebesar 30% setiap tahunnya;
23. Angka pencemaran di lingkungan pasar menurun hingga 0% pada Tahun 2017;
24. Persentase penurunan jumlah pedagang yang membuang sampah ke sungai/ saluran air mencapai 20% pada Tahun 2017;
25. Angka pencemaran limbah medis tertangani sebesar 100% setiap tahunnya;
26. Tingkat polusi udara menurun 40% setiap tahunnya;
27. Tingkat polusi air Sungai Singkawang tertangani mencapai 100% setiap tahunnya;
28. Angka pencemaran air Sungai Singkawang oleh pedagang ataupun masyarakat menurun hingga 0% pada Tahun 2017;
29. Volume sampah tertangani mencapai 100% setiap tahunnya;
30. Persentase penurunan jumlah rumah yang menutup saluran pembuangan air mencapai 60% pada Tahun 2017;
31. Persentase peningkatan jumlah rumah yang menggunakan biopori mencapai 50% pada Tahun 2017;
32. Persentase peningkatan jumlah kantor/ bangunan milik swasta yang menggunakan biopori mencapai 90% pada Tahun 2017;
33. Persentase penurunan jumlah tempat usaha/ kantor/ bangunan milik swasta yang membuang sampah ke saluran air menurun hingga 0% pada Tahun 2017;

34. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) pengaduan masyarakat terhadap pencemaran yang dilakukan oleh pemilik tempat usaha/ perusahaan/ industri ditanggapi maksimal 1 hari pada Tahun 2017;
35. Pencemaran status mutu air menurun hingga 10% pada Tahun 2017;
36. Cakupan kecamatan yang menerapkan gerakan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017;
37. Persentase peningkatan jumlah sekolah yang menerapkan gerakan 3 R meningkat sebesar 90% pada Tahun 2017;
38. Persentase peningkatan jumlah kantor pemerintahan yang menerapkan gerakan 3 R sebesar 90% pada Tahun 2017;
39. Persentase kecamatan yang mengiatkan gerakan Kecamatan Hijau (*Go Green*) mencapai 50% pada Tahun 2017;
40. Persentase peningkatan jumlah sekolah yang menerapkan gerakan sekolah hijau (*Green School*) mencapai 60% pada Tahun 2017;
41. Persentase peningkatan jumlah gedung kantor/ SKPD yang menerapkan gerakan Kantor Hijau (*Offices Go Green*) mencapai 90% pada Tahun 2017;
42. Persentase peningkatan jumlah tempat usaha/ bangunan/ rumah industri milik masyarakat/ swasta yang menerapkan gerakan Kantor Hijau (*Offices Go Green*) mencapai 90% pada Tahun 2017;
43. Persentase jumlah kantor/ gedung pemerintahan yang hemat listrik dan air meningkat sebesar 60 % pada Tahun 2017;
44. Persentase jumlah kantor/ gedung pemerintahan yang hemat listrik dan air meningkat sebesar 60 % pada Tahun 2017;
45. Persentase jumlah kantor/ gedung milik swasta yang hemat listrik dan air meningkat sebesar 60 % pada Tahun 2017;
46. Persentase peningkatan jumlah rumah toko (ruko) yang menyediakan tempat sampah terpilah mencapai 60% pada Tahun 2017;
47. Persentase peningkatan jumlah rumah toko (ruko)/ tempat usaha yang berpartisipasi menanam pohon pelindung dalam pot mencapai 60% pada Tahun 2017;
48. Persentase penurunan angka pencemaran akibat usaha masyarakat baik berskala besar, menengah dan kecil sebesar 60% pada Tahun 2017;
49. Persentase dunia usaha yang terlibat aktif dalam CSR bidang lingkungan secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan mencapai 100% pada Tahun 2017;
50. Persentase jumlah tempat usaha milik masyarakat/ swasta yang memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) mencapai 100% pada Tahun 2017;

51. Persentase peningkatan jumlah tempat usaha milik masyarakat/swasta berskala besar termasuk tempat wisata yang memiliki standar pengelolaan lingkungan terintegrasi sebesar 90% pada Tahun 2017;
52. Persentase ketersediaan dokumen kajian kelayakan implementasi teknologi tepat guna mencapai 90% pada Tahun 2017;
53. Cakupan diversifikasi teknologi tepat guna berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan (*Sustainable environmental friendly technology*) mencapai 90% pada Tahun 2017;
54. Persentase implementasi pengelolaan sampah berbasis teknologi terapan mencapai 100% pada Tahun 2017;
55. Persentase rumah tangga yang menggunakan biomassa sebagai sumber energi untuk kebutuhan sehari-hari meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017;
56. Cakupan peningkatan penggunaan *solar cell panel* sebagai alternatif penerangan mencapai 60% pada Tahun 2017;
57. Persentase penggunaan angin sebagai alternatif pengganti listrik (*wind energy*) mencapai 60% pada Tahun 2017;
58. Cakupan jangkauan pelayanan air bersih melalui penerapan sistem distribusi hemat energi (*multi village system*) mencapai 60% pada Tahun 2017;
59. Persentase penggunaan energi listrik dari pengolahan air lindi mencapai 20% pada Tahun 2017;
60. Persentase peningkatan produk ramah lingkungan yang digunakan masyarakat mencapai 10% pada Tahun 2017;
61. Persentase peningkatan pengelolaan sampah terpilah sebesar 60% pada Tahun 2017;
62. Diversifikasi produk olahan limbah mencapai 40% pada Tahun 2017;
63. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk mencapai 3 pada Tahun 2017;

2) Menciptakan Kota Singkawang bebas bencana, sasaran yang akan dicapai adalah :

a) Menurunnya kemungkinan terjadinya bencana alam akibat kegagalan perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah secara tepat sasaran, terukur, terarah dan berwawasan lingkungan berkelanjutan (*Sustainable environment development*). Indikator kinerja sarasannya adalah :

1. Persentase ketersediaan rencana induk dan rencana detil peruntukkan ruang kota meningkat sebesar 50% pada Tahun 2017;

2. Cakupan perencanaan penggunaan ruang dan penatagunaan tanah yang sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup meningkat 60% pada Tahun 2017;
3. Persentase kesesuaian RDTRK, RTRK, dan RTBL terhadap pencapaian visidan misi pembangunan Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017;
4. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan mencapai 25% pada Tahun 2017;
5. Rasio luas wilayah industri mencapai 0.2 pada Tahun 2017;
6. Rasio luas wilayah kekeringan menurun sebesar 10 pada Tahun 2017;
7. Rasio luas wilayah perkotaan mencapai 12 pada Tahun 2017;
8. Luas wilayah budidaya mencapai 38,100 Ha pada Tahun 2017;
9. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 1.000 jumlah penduduk) mencapai 0,04 pada Tahun 2017;
10. Persentase penyelesaian izin lokasi meningkat sebesar 30% pada Tahun 2017;
11. Cakupan taman kota dalam kondisi bersih dan tertata mencapai 5 kecamatan pada Tahun 2017;
12. Persentase peningkatan jumlah taman pada gedung pemerintahan yang bersih, tertata dan indah mencapai 60% pada Tahun 2017;
13. Persentase volume sampah pada ruang terbuka hijau yang tertangani dengan baik mencapai 100% pada Tahun 2017;
14. Persentase taman kota/ ruang terbuka hijau yang dilengkapi dengan tempat sampah terpilah meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017;
15. Persentase peningkatan RTH pada kawasan permukiman mencapai 90% pada Tahun 2017;
16. Persentase RTH yang tertata dan indah mencapai 90% pada Tahun 2017;
17. Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah;
18. Persentase luas pemukiman yang tertata mencapai 60% pada Tahun 2017;
19. Persentase penurunan daerah kekeringan sebesar 50% pada Tahun 2017;
20. Persentase penurunan luasan kerusakan kawasan konservasi mencapai 40% pada Tahun 2017;
21. Persentase penurunan pencemaran sumber-sumber air baku mencapai 50% pada Tahun 2017;
22. Persentase penurunan eksploitasi sumberdaya alam tak terbarukan (*non renewable resources exploitation*) mencapai 50% pada Tahun 2017;

23. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal mencapai 100% pada Tahun 2017;
24. Persentase peningkatan jumlah usaha atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air mencapai 100% pada Tahun 2017;
25. Persentase jumlah usaha atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara mencapai 100% pada Tahun 2017;
26. Persentase luasan lahan atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya mencapai 100% pada Tahun 2017;
27. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air mencapai 60% pada Tahun 2017;
28. Cakupan luasan mangrove sebagai penahan abrasi pantai mencapai 60% pada Tahun 2017;
29. Rasio luas wilayah banjir menurun hingga 6 pada Tahun 2017;
30. Lama waktu tergenang menurun hingga maksimal 10 hari pada Tahun 2017;
31. Persentase penurunan daerah tergenang banjir mencapai 50% pada Tahun 2017;
32. Peningkatan prasarana sarana pengendalian banjir dan peningkatan penanganan rob serta pantai kritis di muara sungai dan pantai mencapai 80% pada Tahun 2017;
33. Persentase implementasi inovasi daerah dalam manajemen pencegahan dan pengendalian banjir mencapai 50% pada Tahun 2017;
34. Tingkat kesesuaian perencanaan pencegahan dan pengendalian banjir terhadap daya dukung lingkungan hidup mencapai 100% pada Tahun 2017;
35. Persentase reformulasi kebijakan daerah (*policy reformulation*) yang memiliki keberpihakan kepada lingkungan hidup mencapai 100% pada Tahun 2017;
36. Persentase reformulasi kebijakan daerah (*policy reformulation*) yang memiliki keberpihakan kepada lingkungan hidup mencapai 100% pada Tahun 2017;
37. Persentase peningkatan tempat usaha/ perusahaan/ bangunan milik swasta yang memberikan kompensasi jasa lingkungan (*green tax*) mencapai 100% pada Tahun 2017;
38. Persentase tempat usaha/ perusahaan/ bangunan milik swasta yang melakukan rehabilitasi atas kerusakan lingkungan yang terjadi mencapai 90% pada Tahun 2017;

39. Penegakan hukum lingkungan mencapai 85% pada Tahun 2017;
40. Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti mencapai 100% setiap Tahunnya;
41. Ruang publik yang berubah peruntukannya mencapai 0% setiap tahunnya;
42. Persentase penurunan kasus pengalihan penggunaan ruang kota mencapai 20% setiap tahunnya;
43. Persentase penurunan pelanggaran penggunaan ruang publik mencapai 20% setiap tahunnya;

### **5.3.6. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Singkawang Mewujudkan Misi Keenam**

Dalam melaksanakan Misi Keenam : **Melanjutkan pemeliharaan, pembangunan dan penataan Infrastruktur transportasi**, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kota Singkawang yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- 1) Memperkecil disparitas antar wilayah dan sektor Kota Singkawang agar setiap wilayah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperoleh pemerataan manfaat pembangunan, dengan sasaran :
  - a) Meningkatkan daya saing daerah demi percepatan ketangguhan dan ketahanan kota (*Resilient City*). Indikator kinerja sarannya adalah :
    1. Persentase ketersediaan gedung terminal angkutan darat yang dibangun mencapai 100% pada Tahun 2017;
    2. Persentase ketersediaan gedung terminal angkutan udara yang dibangun mencapai 100% pada Tahun 2017;
    3. Persentase ketersediaan gedung terminal angkutan air yang dibangun meningkat sebesar 50% pada Tahun 2017;
    4. Tingkat kesesuaian pengelolaan terminal angkutan darat mencapai 100% setiap tahunnya;
    5. Persentase pembangunan halte bus mencapai 50% pada Tahun 2017;
    6. Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan mencapai 100% pada Tahun 2017;
    7. Persentase halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek mencapai 100% pada Tahun 2017;
    8. Persentase terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek mencapai 70% pada Tahun 2017;
    9. Persentase jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota mencapai 100% pada Tahun 2017;
    10. Persentase jalan yang memudahkan masyarakat per individu dalam



- melakukan perjalanan mencapai 100% pada Tahun 2017;
11. Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan *guardrail*) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017;
  12. Cakupan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan yang dipahami masyarakat secara baik dan benar mencapai 100% pada Tahun 2017;
  13. Persentase ketersediaan fasilitas terminal angkutan darat yang nyaman, aman, dan bersih mencapai 100% pada Tahun 2017;
  14. Usia pakai prasarana dan fasilitas LLAJ mencapai 5 tahun;
  15. Usia pakai terminal mencapai 5 tahun;
  16. Usia pakai pelabuhan mencapai 5 tahun;
  17. Usia pakai halte angkutan umum dalam trayek mencapai 5 tahun;
  18. Usia pakai fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan *guardrail*) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kota Singkawang mencapai 5 tahun;
  19. Persentase jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat mencapai 100% pada Tahun 2017;
  20. Tingkat pelanggaran lalu lintas menurun hingga 0% pada Tahun 2017;
  21. Rasio ijin trayek sebesar 0.0011 pada Tahun 2017;
  22. Tingkat keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas mencapai 100% pada Tahun 2017;
  23. Persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman mencapai 100% pada Tahun 2017;
  24. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sebesar 10 pada Tahun 2017;
  25. Persentase peningkatan jumlah barang masuk ke terminal sebesar 20 setiap tahunnya;
  26. Persentase jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan dengan kecepatan rencana mencapai 100% pada Tahun 2017;
  27. Persentase peningkatan kecepatan rata-rata yang dapat ditempuh mencapai 60% pada Tahun 2017;
  28. Tingkat kelaikan sarana LLAJ mencapai 100% pada Tahun 2017;
  29. Persentase pemasangan rambu-rambu mencapai 50% pada Tahun 2017;
  30. Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan *guardrail*) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017;
  31. Persentase peningkatan ruas jalan yang aman bagi pejalan kaki mencapai 60% pada Tahun 2017;

32. Persentase peningkatan ruas jalan yang aman bagi pengendara sepeda mencapai 60% pada Tahun 2017;
33. Waktu kemacetan lalu lintas pada jam-jam sibuk menurun hingga 0% pada Tahun 2017;
34. Persentase penurunan angka kecelakaan mencapai 30% pada Tahun 2017;
35. Persentase peningkatan uji KIR mencapai 60% pada Tahun 2017;
36. Angkutan darat sebesar 10 pada Tahun 2017;
37. Kepemilikan KIR angkutan umum umum (KIR) mencapai 25% pada Tahun 2017;
38. Persentase unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kota Singkawang yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji mencapai 100% pada Tahun 2017;
39. Persentase penerapan standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kota Singkawang mencapai 100% setiap tahunnya;
40. Persentase pembaharuan dan pemutahiran rancangan strategi pengembangan transportasi perkotaan mencapai 100% pada Tahun 2015;
41. Persentase jaringan transportasi yang terintegrasi satu sama lain, khususnya pelabuhan, lapangan terbang, terminal dan jalan raya dalam sistem jaringan inter dan antar-moda mencapai 100% pada Tahun 2016;
42. Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap kebutuhan peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi mencapai 100% setiap tahunnya;
43. Persentase kesesuaian alokasi DAK bidang transportasi dalam pemenuhan kebutuhan sistem jaringan transportasi daerah yang terpadu mencapai 100% setiap tahunnya;
44. Persentase rencana induk/ rencana aksi daerah pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dan arah pencapaian visi Kota Singkawang mencapai 50% pada Tahun 2017;
45. Persentase implementasi teknologi pembangunan dan pengembangan infrastruktur sistem jaringan transportasi perkotaan terpadu berbasis ilmu pengetahuan inovatif mencapai 30% pada Tahun 2017;
46. Persentase rencana induk/ aksi daerah inovasi pengembangan sistem jaringan transportasi terpadu mencapai 50% pada Tahun 2017;

47. Persentase sistem jaringan transportasi perkotaan yang sesuai dengan RTRW mencapai 100% pada Tahun 2017;
48. Persentase akurasi *database* jaringan transportasi perkotaan mencapai 50% pada Tahun 2017;
49. Persentase akurasi *database* pelabuhan mencapai 50% pada Tahun 2017;
50. Persentase akurasi *database* bandar udara mencapai 50% pada Tahun 2017.

### **5.3.7. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Singkawang Mewujudkan Misi Ketujuh**

Dalam melaksanakan Misi Ketujuh : **Menjamin ketentraman, ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota**, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kota Singkawang yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, dengan sasaran:
  - a) Terciptanya rasa aman masyarakat dan dunia usaha. Indikator kinerja sasarnya adalah :
    1. Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat dicegah mencapai 40% tiap tahunnya;
    2. Persentase penurunan jumlah kejadian/ masalah terkait ketahanan bangsa;
    3. Rasio pos siskamling per jumlah RT minimal mencapai 1 per RT (Rukun Tetangga) berdasarkan luas wilayah;
    4. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 1.000 penduduk mencapai 6 pada Tahun 2017;
    5. Rata-rata kejadian gangguan keamanan per tahun per 1.000 penduduk mencapai 0 pada Tahun 2017;
    6. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi mencapai 80% pada Tahun 2017;
    7. Cakupan penegakan perlindungan ketentraman dan ketertiban mencapai 100% setiap tahunnya;
    8. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mencapai 100% pada Tahun 2017;
    9. Persentase kejadian/ gangguan ketentraman dan ketertiban yang tuntas ditangani mencapai 100% pada Tahun 2017;
    10. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencapai 100% pada Tahun 2017 ;
    11. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) pengaduan masyarakat mencapai 45 menit pada Tahun 2017;

12. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban meningkat 80% pada Tahun 2017;
  13. Persentase ketersediaan mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) mencapai 100% pada Tahun 2017;
  14. Angka kriminalitas tertangani melalui aktivitas pemberdayaan masyarakat setempat mencapai 40% pada Tahun 2017;
  15. Angka kriminalitas tertangani mencapai 60% pada Tahun 2017;
  16. Persentase penurunan jumlah kriminalitas yang terjadi mencapai 16.94% pada Tahun 2017;
  17. Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan mencapai 70% pada Tahun 2017;
  18. Persentase peningkatan jumlah kasus penyakit masyarakat (Pekat) yang ditangani mencapai 80% pada Tahun 2017;
  19. Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat (Pekat) menurun 20% setiap tahunnya hingga mencapai 40% pada Tahun 2017.
- b) Meningkatnya stabilitas daerah guna menunjang aktifitas perekonomian masyarakat khususnya dunia investasi dan usaha masyarakat, dengan sasaran :
1. Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang berperan aktif dalam politik dan organisasi kemasyarakatan meningkat 20% tiap tahunnya hingga mencapai 60% pada Tahun 2017;
  2. Angka partisipasi perempuan dalam legislatif meningkat mencapai 30% pada Tahun 2017;
  3. Persentase jumlah organisasi/ lembaga masyarakat yang berperan positif dalam mendukung pencapaian visi pembangunan mencapai 80% pada Tahun 2017;
  4. Persentase peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja organisasi masyarakat mencapai 100% pada Tahun 2017;
  5. Cakupan penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban daerah mencapai 100% setiap tahunnya;
  6. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mencapai 100% pada Tahun 2017;
  7. Persentase penurunan jumlah gugatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Singkawang mencapai 70% pada Tahun 2017;
  8. Persentase jumlah penyelesaian sengketa pertanahan meningkat mencapai 30% pada Tahun 2017;
  9. Persentase konflik pertanahn yang diselesaikan melalui jalur hukum menurun sebesar 5% pada Tahun 2017;

10. Cakupan informasi pertanahan milik pemerintah meningkat 60% pada Tahun 2017;
11. Persentase pendataan penduduk yang memiliki lahan bersertifikat meningkat sebesar 55% pada Tahun 2017.

#### **5.3.8. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Singkawang Mewujudkan Misi Kedelapan**

Dalam melaksanakan Misi Kedelapan : **Memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam bidang kebudayaan dan olahraga serta pengelolaan panti anak yatim piatu dan Lansia**, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kota Singkawang yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan ruang gerak bagi tumbuh kembang ekspresi dan ide kreatif budaya dan olahraga Kota Singkawang yang heterogen agar mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional, dengan sasaran :
  - a) Menjadikan Kota Singkawang sebagai daerah tujuan wisata yang inovatif, menarik dan tetap bermartabat. Indikator kinerja sasarannya adalah :
    1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 6 kali setiap tahunnya;
    2. Cakupan fasilitasi seni mencapai 100% pada Tahun 2017;
    3. Cakupan gelar seni mencapai 100% pada Tahun 2017;
    4. Misi kesenian mencapai 100% pada Tahun 2017;
    5. Persentase penyelenggaraan "Singkawang Festival" yang berdaya saing hingga tingkat nasional bahkan internasional meningkat sebesar 70% pada Tahun 2017;
    6. Persentase pagelaran seni dan budaya sekolah di pentas-pentas regional dan nasional mencapai 70% pada Tahun 2017;
    7. Cakupan publikasi promosi festival seni dan budaya Kota Singkawang hingga tingkat internasional mencapai 70% pada Tahun 2017;
    8. Persentase penyusunan model pengembangan seni dan budaya daerah terpadu dengan *Pilot Project* berlokasi di Kecamatan Singkawang Selatan, Utara dan Timur sebagai kawasan wisata terpadu yang berwawasan lingkungan dengan tatanan kehidupan budaya Cina, Dayak dan Melayu yang bermartabat mencapai 100% pada Tahun 2017;
    9. Cakupan kajian seni meningkat 100% pada Tahun 2017;
    10. Persentase implementasi inovasi pengembangan seni dan budaya mencapai 60% pada Tahun 2017;
    11. Cakupan perencanaan pengembangan olahraga terpadu mencapai 100% pada Tahun 2017;

12. Cakupan organisasi seni dan budaya mencapai 100% pada Tahun 2017;
  13. Cakupan sumberdaya manusia kesenian mencapai 100% pada Tahun 2017;
  14. Cakupan tempat pementasan gelar budaya mencapai 100% pada Tahun 2017;
  15. Cakupan upaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah mencapai 50% pada Tahun 2017;
  16. Persentase peningkatan kualitas pelestarian budaya mencapai 50% pada Tahun 2017;
  17. Persentase penatagunaan naskah dan benda kuno milik Kota Singkawang mencapai 20% pada Tahun 2017;
  18. Persentase ketersediaan kebijakan tentang perlindungan budaya lokal daerah mencapai 100% pada Tahun 2017;
  19. Persentase peningkatan pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya mencapai 100% pada Tahun 2017;
  20. Persentase publikasi potensi dan promosi budaya daerah melalui media online meningkat 20% pada Tahun 2017;
  21. Persentase penyusunan model pembelajaran seni budaya/ seni rupa yang inovatif dengan menerapkan pembelajaran seni budaya berbasis *lateral thinking* mencapai 100% pada Tahun 2017;
  22. Persentase pembelajaran seni budaya terintegrasi pendidikan karakter mencapai 100% pada Tahun 2017;
  23. Persentase peningkatan jumlah sekolah yang memiliki sanggar tari sekolah pada tingkat pendidikan 12 tahun mencapai 100% pada Tahun 2017;
  24. Persentase peningkatan jumlah sekolah yang memiliki sanggar seni dan musik yang dikelola sekolah pada tingkat pendidikan 12 tahun mencapai 100% pada Tahun 2017.
- b) Meningkatnya prestasi olahraga Kota Singkawang yang kompetitif. Indikator kinerja sarasannya adalah :
1. Persentase jumlah anak didik berbakat usia 5 - 12 tahun yang dipersiapkan menjadi atlit cabang olahraga mencapai 100% pada Tahun 2017;
  2. Persentase cabang olahraga daerah yang memperoleh penghargaan mencapai 100% pada Tahun 2017;
  3. Persentase peningkatan jumlah cabang olahraga berorientasi prestasi yang unggul di tingkat regional dan nasional mencapai 60% pada Tahun 2017;
  4. Persentase penyelenggaraan kompetisi olahraga kompetitif hingga tingkat provinsi dan nasional mencapai 100% pada Tahun 2017;

5. Persentase peningkatan kesejahteraan atlet, pelatih dan teknisi olahraga yang mengharumkan nama Kota Singkawang mencapai 40% pada Tahun 2017;
  6. Cakupan pengembangan olahraga kreasi dan olahraga khusus penyandang cacat mencapai 40% pada Tahun 2017;
  7. Persentase peningkatan kontribusi pendanaan dari pihak swasta melalui penataan manajemen CSR bidang olahraga mencapai 40% pada Tahun 2017;
  8. Persentase masyarakat yang aktif melaksanakan 1 cabang olahraga minimal 1 kali seminggu mencapai 40% pada Tahun 2017;
  9. Persentase peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan mencapai 100% pada Tahun 2017;
  10. Cakupan pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi olahragawan mencapai 60% pada Tahun 2017;
  11. Cakupan pembinaan manajemen organisasi olahraga mencapai 60% pada Tahun 2017 ;
  12. Cakupan implementasi kebijakan nasional bidang olahraga yang ditindaklanjuti mencapai 60% pada Tahun 2017;
  13. Cakupan kerjasama kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga mencapai 60% pada Tahun 2017;
  14. Persentase peningkatan jumlah sekolah yang memiliki klub olahraga prestasi sekolah pada tingkat pendidikan 12 tahun mencapai 100% pada Tahun 2017;
  15. Persentase peningkatan jumlah prestasi kompetisi olahraga sekolah mencapai 100% pada Tahun 2017;
  16. Persentase ketersediaan prasarana dan sarana olahraga dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017;
  17. Persentase pengembangan kemitraan pembangunan sarana olahraga berbasis IPTEK mencapai 50% pada Tahun 2017;
- 2) Menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Singkawang, dengan sasaran :
- a) Terwujudnya kesetiakawanan sosial dan memperkecil kesenjangan sosial. Indikator kinerja sarannya adalah :
    1. Persentase tingkat kemandirian anak terlantar mencapai 80% pada Tahun 2017;
    2. Persentase penurunan jumlah komunitas anak-anak punk mencapai 80% pada Tahun 2017,
    3. Cakupan penanganan anak terlantar tanpa identitas mencapai 80% pada Tahun 2017;

4. Persentase penurunan jumlah anak-anak gelandangan pada mencapai 80% pada Tahun 2017;
5. Persentase anak-anak gelandangan/ jalanan/ terlantar yang melanjutkan sekolah mencapai 80% pada Tahun 2017;
6. Tingkat pendidikan ditamatkan oleh anak terlantar mencapai 12% pada Tahun 2017;
7. Persentase transparansi lembaga/ yayasan dalam pengelolaan bantuan sosial penanganan anak terlantar mencapai 100% pada Tahun 2017;
8. Persentase panti sosial skala Kota Singkawang yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial mencapai 100% pada Tahun 2017;
9. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial mencapai 100% pada Tahun 2017;
10. Persentase korban bencana skala kabupaten/ kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap mencapai 100% pada Tahun 2017;
11. Persentase PMKS skala Kota Singkawang yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar mencapai 100% pada Tahun 2017;
12. Persentase korban bencana skala kabupaten/ kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat mencapai 100% pada Tahun 2017;
13. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial mencapai 100% pada Tahun 2017;
14. Persentase korban bencana skala kabupaten/ kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat mencapai 100% pada Tahun 2017;
15. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari mencapai 100% pada Tahun 2017;
16. Persentase panti asuhan/ panti jompo yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari mencapai 100% pada Tahun 2017;
17. Persentase panti asuhan/ panti jompo yang memiliki manajemen transparansi pengelolaan bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017;



18. Persentase ketersediaan prasarana dan sarana panti asuhan/ panti jompo yang memenuhi persyaratan kesehatan dan sanitasi mencapai 80% pada Tahun 2017;
19. Persentase jumlah orang pada panti asuhan/ panti jompo yang memperoleh pelayanan pemeriksaan kesehatan dasar secara berkala mencapai 80% pada Tahun 2017;
20. Persentase tingkat kemandirian bekas gelandangan, pengemis, tunasusil, korban narkoba dan penyandang permasalahan sosial lainnya mencapai 80% pada Tahun 2017;
21. Persentase penurunan jumlah gelandangan, pengemis, tunasusila dan korban narkoba, eks narapidana, PSK dan penyakit sosial lainnya mencapai 80% pada Tahun 2017;
22. Cakupan penanganan gelandangan, pengemis, tunasusila dan korban narkoba, eks narapidana, PSK dan penyakit sosial lainnya mencapai 80% pada Tahun 2017;
23. Persentase mantan penghuni penampungan sosial yang telah mampu hidup mandiri mencapai 80% pada Tahun 2017;
24. Persentase penurunan jumlah mantan penghuni penampungan sosial yang kembali mengalami permasalahan sosial mencapai 40% pada Tahun 2017;
25. Persentase PMKS skala Kota Singkawang yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya mencapai 100% pada Tahun 2017;
26. Persentase menurunnya jumlah PMKS melalui program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya mencapai 40% pada Tahun 2017;
27. Persentase peningkatan pelatihan keterampilan bagi eks PMKS mencapai 40% pada Tahun 2017;
28. Persentase peningkatan jumlah eks PMKS yang memiliki sertifikasi keahlian khusus dan keterampilan bekerja mencapai 60% pada Tahun 2017;
29. Persentase produk kreatif olahan eks PMKS mencapai 80% pada Tahun 2017;
30. Cakupan jangkauan penjualan produk kreatif olahan eks PMKS mencapai 60% pada Tahun 2017;
31. Penerimaan pendapatan penjualan produk kreatif olahan PMKS mencapai 60% pada Tahun 2017;
32. Persentase perusahaan/ tempat usaha milik swasta yang menerima eks PMKS terlatih dan terampil mencapai 20% setiap tahunnya;

33. Persentase tempat usaha kreatif yang dikelola oleh eks PMKS terlatih dan terampil mencapai 20% pada Tahun 2017.

### **5.3.9. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Singkawang Mewujudkan Misi Kesembilan**

Dalam melaksanakan Misi Kesembilan : **Reformasi birokrasi dan tatalaksana pemerintahan**, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kota Singkawang yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- 1) Membangun aparatur dan organisasi yang kredibel, akuntabel, transparan, berintegritas, berwibawa dan taat kepada hukum. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah :
  - a) Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan agar lebih profesional dan mengedepankan kinerja. Indikator sasaran adalah sebagai berikut :
    1. Reformulasi perancangan rencana pengembangan sistem penataan jumlah dan distribusi PNS mencapai 100% pada Tahun 2017;
    2. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang penataan dan distribusi PNS mencapai 100% pada Tahun 2017;
    3. Persentase ketersediaan dasar hukum mengenai pedoman, tata cara/ mekanisme dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang penataan jumlah dan distribusi PNS mencapai 100% pada Tahun 2017;
    4. Persentase kesesuaian antara jumlah pegawai yang direncanakan terhadap kebutuhan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017;
    5. Persentase kesesuaian pendistribusian aparatur berdasarkan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD mencapai 100% pada Tahun 2017;
    6. Angka pengunduran diri aparatur pada jabatan yang diemban mencapai 0% pada Tahun 2017;
    7. Reformulasi perancangan rencana pengembangan sistem seleksi CPNS dan PNS secara terbuka mencapai 100% pada Tahun 2017;
    8. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang sistem seleksi CPNS dan PNS secara terbuka mencapai 100% pada Tahun 2017;
    9. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang sistem seleksi CPNS dan PNS secara terbuka mencapai 100% pada Tahun 2017;
    10. Persentase ketersediaan dasar hukum mengenai pedoman, tata cara/ mekanisme dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang penataan jumlah dan distribusi PNS mencapai 100% pada Tahun 2017;

11. Persentase kesesuaian penerimaan PNS berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017;
12. Angka pengunduran diri CPNS mencapai 0% pada Tahun 2017;
13. Angka keluhan kebijakan seleksi CPNS dan PNS secara terbuka mencapai 0% pada Tahun 2017;
14. Persentase pengembangan sistem informasi seleksi CPNS dan PNS secara terbuka berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017;
15. Reformulasi perancangan rencana pengusulan formasi dan sistem seleksi sumberdaya aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017;
16. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang pengusulan formasi dan sistem seleksi sumberdaya aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017;
17. Persentase ketersediaan dasar hukum mengenai pedoman, tata cara/ mekanisme dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang pengusulan formasi dan sistem seleksi sumberdaya aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017;
18. Persentase kesesuaian pengusulan formasi dan sistem seleksi sumberdaya aparatur terhadap kebutuhan SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017;
19. Persentase kesesuaian pengusulan formasi dan sistem seleksi sumberdaya aparatur terhadap kebutuhan SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017;
20. Persentase pengusulan peningkatan jabatan aparatur sesuai hasil evaluasi pencapaian target kinerja (*performance*) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017;
21. Persentase pegawai yang ditempatkan pada SKPD sesuai kompetensi mencapai 100% pada Tahun 2017;
22. Reformulasi perancangan rencana pengembangan kinerja (*performance*) PNS dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mencapai 100% pada Tahun 2017;
23. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang pembinaan dan pengembangan aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017;
24. Persentase ketersediaan dasar hukum mengenai pedoman, tata cara/ mekanisme dan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) bagi SKPD tentang pembinaan dan pengembangan aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017;

25. Persentase peningkatan jumlah aparatur yang produktif dan inovatif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mencapai 80% pada Tahun 2017;
26. Persentase peningkatan jumlah aparatur yang memperoleh pengangkatan jabatan berdasarkan produk dan inovasi yang dilaksanakan aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017;
27. Cakupan publikasi produk dan inovasi aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mencapai 100% pada Tahun 2017;
28. Reformulasi perancangan rencana pendidikan kedinasan aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017;
29. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang pendidikan kedinasan aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017;
30. Persentase ketersediaan dasar hukum mengenai pedoman, tata cara/ mekanisme dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang pendidikan kedinasan aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017;
31. Persentase kesesuaian pemberian pendidikan kedinasan kepada PNS yang akan ditingkatkan kompetensinya sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mencapai 100% pada Tahun 2017;
32. Persentase diklat struktural yang diselenggarakan Pemerintah Kota Singkawang sesuai potensi dan rencana penjenjangan karir PNS terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mencapai 100% pada Tahun 2017;
33. Persentase aparatur yang dikirim mengikuti diklat struktural menurun 20% setiap tahunnya hingga mencapai 40% pada Tahun 2017;
34. Persentase jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan ujian kedinasan berjenjang sesuai peraturan yang berlaku dan kebutuhan penjenjangan karir PNS mencapai 100% pada Tahun 2017;
35. Rasio jumlah PNS yang menduduki jabatan yang telah mengikuti pendidikan jabatan terhadap jumlah jabatan yang tersedia mencapai 100% pada Tahun 2017;
36. Reformulasi perancangan rencana pengembangan profesionalisme PNS dan aparatur pemerintah Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017;
37. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang peningkatan profesionalisme PNS mencapai 100% pada Tahun 2017;

38. Persentase ketersediaan dasar hukum mengenai pedoman, tata cara/ mekanisme dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan profesionalisme aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017;
39. Persentase ketersediaan dasar hukum mengenai tata cara/ mekanisme dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang tugas belajar dan ijin belajar untuk peningkatan profesionalisme aparatur sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017;
40. Persentase diklat fungsional yang diselenggarakan Pemerintah Kota Singkawang untuk peningkatan kompetensi aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mencapai 100% pada Tahun 2017;
41. Persentase aparatur yang ditempatkan sesuai dengan diklat fungsional yang ditugaskan mencapai 100% pada Tahun 2017;
42. Persentase kesesuaian peningkatan profesionalisme PNS terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017;
43. Persentase penurunan ketidaksesuaian peningkatan profesionalisme PNS terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pada SKPD mencapai 0% pada Tahun 2017;
44. Cakupan publikasi informasi beasiswa penjenjangan pendidikan formal PNS yang didanai non APBD mencapai 100% setiap tahunnya;
45. Cakupan publikasi diklat fungsional teknis mencapai 100% setiap tahunnya;
46. Cakupan publikasi karya tulis PNS setelah mengikuti penjenjangan pendidikan formal yang didanai APBD dan non APBD meningkat hingga mencapai 50% pada Tahun 2017;
47. Cakupan publikasi karya tulis PNS setelah mengikuti diklat fungsional dan struktural yang didanai APBD dan non APBD meningkat hingga mencapai 50% pada Tahun 2017;
48. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang penguatan sistem disiplin dan etika profesi PNS mencapai 100%;
49. Persentase ketersediaan dasar hukum mengenai pedoman, tata cara/ mekanisme dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang penguatan sistem disiplin dan etika profesi PNS mencapai 100% pada Tahun 2015;
50. Persentase PNS berkinerja (*performance*) baik dan disiplin meningkat 40% tiap tahunnya hingga mencapai 80% pada Tahun 2017;

51. Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika PNS menurun 40% tiap tahunnya hingga Tahun 2017;
  52. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang peningkatan kesejahteraan pegawai negeri mencapai 100% pada Tahun 2017;
  53. Persentase ketersediaan dasar hukum mengenai pedoman, tata cara/ mekanisme dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang penilaian pengukuran dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri PNS mencapai 100% pada Tahun 2017;
  54. Persentase kesesuaian pengalokasian peningkatan kesejahteraan PNS secara proposional dan rasional berdasarkan beban kerja dan kinerja (*performance*) sesuai dengan keuangan daerah meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
- b) Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana organisasi pemerintah yang baik, benar, inovatif dan akuntabel. Indikator sasaran adalah sebagai berikut :
1. Reformulasi perancangan penataan organisasi Kota Singkawang secara efisien, efektif, dan akuntabel dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, target pelayanan publik prima dan pembagian beban kerja organisasi secara proporsional dan rasional mencapai 100% pada Tahun 2017;
  2. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang pendistribusian tugas pokok dan fungsi SKPD agar memenuhi standar dan kriteria optimal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mencapai 100% pada Tahun 2017;
  3. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang pembagian urusan dan kewenangan organisasi agar tidak tumpang tindih mencapai 100% pada Tahun 2017;
  4. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang pedoman, mekanisme/ tata cara dan tahapan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD terhadap pencapaian target penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar tepat sasaran mencapai 100% pada Tahun 2017;
  5. Persentase SKPD tepat fungsi dalam memenuhi kriteria standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik baik administrasi dan teknis mencapai 100% pada Tahun 2017;
  6. Persentase ketersediaan pedoman/ panduan/ juklak/ juknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD berbasis kinerja (*performance*) dan berorientasi *outcome/ result* mencapai 100% pada Tahun 2017;

7. Persentase jumlah SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi berbasis akuntabilitas kinerja (*performance*) dan berorientasi *outcome/result* mencapai 100% pada Tahun 2017;
8. Persentase SKPD yang tepat tugas dan fungsi berdasarkan pelimpahan pelaksanaan urusan dan kewenangan pemerintahan daerah mencapai 100%;
9. Reformulasi perancangan pengembangan kinerja (*performance*) organisasi agar memiliki pola kerja kreatif dan inovatif mencapai 100% pada Tahun 2017;
10. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang mekanisme/ tata cara dan tahapan pengembangan kinerja (*performance*) organisasi agar kreatif dan inovatif mencapai 100% pada Tahun 2017;
11. Persentase ketersediaan standar penilaian dan pengukuran pencapaian target kinerja (*performance*) organisasi meningkat hingga mencapai 80% pada Tahun 2017;
12. Persentase jumlah SKPD yang memiliki peningkatan pencapaian variabel kinerja (*performance*) berdasarkan tupoksi meningkat hingga mencapai 60% pada Tahun 2017;
13. Persentase SKPD yang memenuhi target pencapaian indikator variabel keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan pelimpahan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah mencapai 80% pada Tahun 2017;
14. Cakupan publikasi penilaian pencapaian pengembangan kinerja (*performance*) SKPD agar efektif dan efisien dalam pelaksanaan tupoksi SKPD mencapai 100% pada Tahun 2017;
15. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang penatalaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD agar efektif, efisien dan transparan dalam pelayanan baik teknis maupun administratif mencapai 100% pada Tahun 2017;
16. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang pedoman, mekanisme/ tata cara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017;
17. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pencapaian target-target SPM, SPP dan SP SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;

18. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pengukuran/ penilaian penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
19. Persentase SKPD yang memiliki juklak/ juknis/ SOP pencapaian target SPM dan SPP baik teknis dan administratif secara transparan, efisien dan efektif mencapai 100% pada Tahun 2017;
20. Persentase SKPD yang mempublikasikan SOP pelayanan baik teknis dan administratif secara elektronik mencapai 100% pada Tahun 2017;
21. Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan pelaksanaan pencapaian target-target SPM dan SPP hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
22. Cakupan publikasi transparansi, efektifitas dan efisiensi kinerja (performance) pelayanan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan SOP yang ditetapkan mencapai 100% hingga Tahun 2017;
23. Angka keluhan pelayanan SKPD berbasis IT mencapai 0% hingga Tahun 2017;
24. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang penatalaksanaan penerapan *e-Government* (*e-Gov*) dalam mendukung keterbukaan informasi publik (KIP) mencapai 100% pada Tahun 2017;
25. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang pedoman, mekanisme/ tata cara dan tahapan penerapan *e-Gov* SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi mencapai 100% pada Tahun 2017;
26. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pencapaian efisiensi dan efektifitas penerapan *e-Gov* SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
27. Persentase implementasi *e-Government* yang sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah meningkat hingga mencapai 100% hingga Tahun 2017;
28. Persentase kebijakan transparansi berbasis IT bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan mencapai 100% pada Tahun 2017;
29. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang mekanisme/ tata cara dan tahapan penerapan tatalaksana pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan mencapai 100% pada Tahun 2017;



30. Persentase sistem data perencanaan yang terintegrasi dengan SKPD mencapai 100%;
31. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang SOP implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017;
32. Persentase jumlah SKPD yang menggunakan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan secara tepat dan akurat mencapai 100% pada Tahun 2017;
33. Persentase akurasi dan transparansi pengelolaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017;
34. Persentase kebijakan transparansi berbasis IT perencanaan, pengendalian dan evaluasi penganggaran pembangunan mencapai 100% pada Tahun 2017;
35. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang mekanisme/ tata cara dan tahapan penerapan tatalaksana pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi penganggaran pembangunan mencapai 100% pada Tahun 2017;
36. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang SOP implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi penganggaran pembangunan berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017;
37. Persentase jumlah SKPD yang menggunakan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi penganggaran pembangunan secara tepat dan akurat mencapai 100% pada Tahun 2017;
38. Persentase akurasi dan transparansi pengelolaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi penganggaran pembangunan daerah berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017;
39. Persentase kebijakan transparansi berbasis IT bidang pengelolaan perbendaharaan, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017;
40. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang mekanisme/ tata cara dan tahapan penerapan tatalaksana pemanfaatan sistem informasi pengelolaan perbendaharaan, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017;
41. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang SOP implementasi pengelolaan perbendaharaan, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017;

42. Persentase jumlah SKPD yang menggunakan sistem informasi pengelolaan perbendaharaan, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara tepat dan akurat mencapai 100% pada Tahun 2017;
43. Persentase akurasi dan transparansi pengelolaan perbendaharaan, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017;
44. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) peningkatan keterlibatan stakeholders dalam peningkatan pendapatan daerah berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017;
45. Persentase kebijakan transparansi berbasis IT bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi peningkatan pendapatan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017;
46. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang mekanisme/ tata cara dan tahapan penerapan tatalaksana pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi peningkatan pendapatan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017;
47. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang SOP implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi peningkatan pendapatan daerah berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017;
48. Persentase jumlah SKPD terkait pendapatan daerah yang menggunakan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi peningkatan pendapatan daerah secara tepat dan akurat mencapai 100% pada Tahun 2017;
49. Persentase akurasi dan transparansi pengelolaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi peningkatan pendapatan daerah berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017;
50. Cakupan *stakeholders* (objek pajak dan retribusi daerah) yang terintegrasi dengan sistem informasi peningkatan pendapatan daerah secara transparan, terukur dan tepat sasaran mencapai 100% hingga Tahun 2017;
51. Persentase kebijakan transparansi berbasis IT Sistem Akuntabilitas kinerja (*performance*) Instansi Pemerintah (SAKIP) mencapai 100% pada Tahun 2017;
52. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang mekanisme/ tata cara dan tahapan penerapan SAKIP berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017;

53. Persentase sistem data pengukuran pencapaian kinerja (*performance*) SKPD yang terintegrasi dengan pencapaian kinerja (*performance*) penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Singkawang mencapai 100% hingga Tahun 2017;
54. Persentase efisiensi keterkaitan pencapaian kinerja (*performance*) Kepala SKPD yang terintegrasi dengan pencapaian kinerja (*performance*) dan pertanggungjawaban Walikota Singkawang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Singkawang mencapai 100% hingga Tahun 2017;
55. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang SOP implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja (*performance*) Instansi Pemerintah (SAKIP) berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017;
56. Persentase keterkaitan pencapaian kinerja (*performance*) SKPD yang terintegrasi dengan pencapaian kinerja (*performance*) penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Singkawang mencapai 100%;
57. Persentase akurasi dan transparansi pengelolaan Sistem Akuntabilitas kinerja (*performance*) Instansi Pemerintah (SAKIP) berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017;
58. Persentase jumlah SKPD yang menggunakan sistem informasi Sistem Akuntabilitas kinerja (*performance*) Instansi Pemerintah (SAKIP) secara tepat dan akurat mencapai 100% pada Tahun 2017;
59. Angka keluhan hasil evaluasi pengukuran pencapaian kinerja (*performance*) SKPD berbasis IT mencapai 0% hingga Tahun 2017;
60. Persentase ketersediaan dan pengelolaan arsip kartografi dan kearsitekturan mencapai 50% pada Tahun 2017;
61. Persentase ketersediaan dan pelestarian arsip daerah mencapai 100% pada Tahun 2017;
62. Persentase ketersediaan dasar hukum perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mencapai 100% pada Tahun 2017;
63. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan tingkat SKPD yang bersinergi dengan dokumen perencanaan tingkat kota mencapai 100% hingga Tahun 2017;
64. Persentase dokumen perencanaan tahunan SKPD yang akuntabel, berbasis kinerja (*performance*) dan berorientasi hasil (*result oriented*) mencapai 100% hingga Tahun 2017;
65. Persentase dokumen perencanaan yang bersinergi dengan dokumen penganggaran tahunan SKPD mencapai 100% hingga Tahun 2017;
66. Persentase program prioritas SKPD yang memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan daerah tahunan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;

67. Persentase program dan kegiatan SKPD yang diakomodir dalam dokumen perencanaan kota tahunan meningkat hingga mencapai 100%;
68. Persentase peningkatan jumlah keterlibatan masyarakat dalam proses MUSRENBANG tahunan meningkat 20% hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
69. Persentase peningkatan jumlah keterlibatan anggota legislatif dalam proses MUSRENBANG meningkat 50% hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
70. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang mekanisme/ tata cara dan tahapan pengelolaan anggaran daerah yang akuntabel berbasis kinerja (*performance*) (*accountable based performance*) dan berorientasi hasil (*result oriented*) mencapai 100% pada Tahun 2017;
71. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang mekanisme/ tata cara dan tahapan pelaksanaan penganggaran SKPD yang bersinergi dengan penganggaran daerah mencapai 100% pada Tahun 2017;
72. Persentase ketersediaan dokumen penganggaran pembangunan tingkat kota yang disusun sesuai peraturan yang berlaku dan tepat waktu mencapai 100% hingga Tahun 2017;
73. Persentase ketersediaan pedoman/ panduan/ juklak/ juknis pelaksanaan penganggaran (*costing*) program dan kegiatan SKPD agar akuntabel berbasis kinerja (*performance*) (*accountable based performance*) dan berorientasi hasil (*result oriented*) mencapai 100%;
74. Persentase ketersediaan SOP penganggaran program dan kegiatan SKPD yang bersinergi dengan rencana penganggaran pembangunan daerah tahunan meningkat hingga mencapai 100%;
75. Persentase ketersediaan regulasi tentang perencanaan, pengendalian dan evaluasi penganggaran daerah mencapai 100% pada Tahun 2017;
76. Persentase ketersediaan regulasi tentang rasionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas penganggaran pembangunan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017;
77. Persentase ketersediaan dokumen penganggaran pembangunan tingkat SKPD yang bersinergi dengan dokumen penganggaran tingkat kota mencapai 100% hingga Tahun 2017;
78. Persentase dokumen penganggaran tahunan SKPD yang akuntabel berbasis kinerja (*performance*) dan berorientasi hasil (*result oriented*) mencapai 100% hingga Tahun 2017;

79. Persentase rasionalitas dan proporsionalitas penganggaran program prioritas SKPD tahunan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
80. Persentase rasionalitas dan proporsionalitas penganggaran program dan kegiatan SKPD tahunan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
81. Persentase usulan penganggaran program dan kegiatan SKPD yang disetujui dan tertuang dalam dokumen penganggaran pembangunan daerah tahunan (APBD) meningkat hingga mencapai 100%;
82. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang mekanisme/ tata cara dan tahapan pengelolaan aset SKPD agar transparan, akuntabel dan tepat manfaat mencapai 100% pada Tahun 2017;
83. Persentase ketersediaan regulasi tentang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pengadaan aset daerah mencapai 100% pada Tahun 2017;
84. Persentase ketersediaan dokumen aset SKPD yang sesuai dengan kepemilikan aset kota sesuai dengan peraturan yang berlaku mencapai 100% hingga Tahun 2017;
85. Persentase ketersediaan pedoman/ panduan/ juklak/ juknis tata kelola dan pengadaan aset SKPD dengan mempertimbangkan keuangan daerah dan kemendesakan pengadaan aset mencapai 100% hingga Tahun 2017;
86. Persentase ketersediaan SOP penganggaran pengadaan aset yang bersinergi dengan rencana penganggaran pengadaan aset daerah tahunan meningkat hingga mencapai 100%;
87. Persentase ketersediaan regulasi tentang rasionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas perencanaan pengadaan aset tahunan SKPD mencapai 100% pada Tahun 2017;
88. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang mekanisme/ tata cara dan tahapan peningkatan dan pengembangan akuntabilitas kinerja (*performance*) dan keuangan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017;
89. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang mekanisme/ tata cara dan tahapan peningkatan dan pengembangan akuntabilitas kinerja (*performance*) dan keuangan daerah yang bersinergi dengan peningkatan dan pengembangan akuntabilitas kinerja (*performance*) SKPD mencapai 100% pada Tahun 2017;

90. Persentase ketersediaan dokumen peningkatan dan pengembangan akuntabilitas kinerja (*performance*) dan keuangan daerah tingkat kota yang disusun sesuai peraturan yang berlaku dan tepat waktu mencapai 100% hingga Tahun 2017;
91. Persentase ketersediaan pedoman/ panduan/ juklak/ juknis peningkatan dan pengembangan akuntabilitas kinerja (*performance*) dan keuangan daerah mencapai 100%;
92. Persentase ketersediaan SOP peningkatan dan pengembangan akuntabilitas kinerja (*performance*) dan keuangan daerah tahunan meningkat hingga mencapai 100%;
93. Persentase ketersediaan dokumen akuntabilitas kinerja (*performance*) dan keuangan daerah tingkat SKPD yang bersinergi dengan dokumen akuntabilitas kinerja (*performance*) dan keuangan tingkat kota mencapai 100% hingga Tahun 2017;
94. Persentase dokumen akuntabilitas kinerja (*performance*) dan keuangan tahunan SKPD yang sesuai dengan standar penilaian yang berlaku mencapai 100% hingga Tahun 2017;
95. Persentase pelaporan pengelolaan kinerja (*performance*) SKPD berdasarkan tugas pokok dan fungsi dengan predikat B meningkat 20% setiap tahunnya hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
96. Persentase pelaporan pengelolaan keuangan SKPD dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat 20% setiap tahunnya hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
97. Persentase pelaporan pengelolaan aset SKPD dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat 20% setiap tahunnya hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
98. Persentase pelaporan pengelolaan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pencapaian tugas pokok dan fungsi SKPD dengan predikat B meningkat 20% setiap tahunnya hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
99. Persentase peningkatan jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Wajar bebas dari Korupsi (WBK) meningkat 20% hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
100. Persentase pelaporan pengelolaan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pencapaian tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersinergi dengan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pemerintahan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017;
101. Persentase jumlah SKPD yang melaksanakan perencanaan, pengukuran dan penilaian kinerja (*performance*) mandiri meningkat 20% setiap tahunnya hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;

102. Cakupan publikasi capaian akuntabilitas kinerja (*performance*) dan keuangan SKPD mencapai 100% hingga Tahun 2017;
  103. Pencapaian predikat Baik (A) pada penyelenggaraan akuntabilitas kinerja (*performance*) instansi pemerintahan pada Tahun 2017;
  104. Pencapaian predikat Wajar tanpa Pengecualian (WTP) pada pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Tahun 2017;
  105. Pencapaian predikat Tinggi pada penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan (LPPD dan LKPJ) pada Tahun 2017;
  106. Pencapaian predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Tahun 2017.
- 2) Meningkatkan kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah :
- a) Terciptanya peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar dan pelayanan pendukung. Indikator sasaran adalah sebagai berikut :
    1. Reformulasi perancangan pengembangan peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan mencapai 100% pada Tahun 2017;
    2. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang mekanisme/ tata cara dan tahapan pengintegrasian peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan mencapai 100% pada Tahun 2017;
    3. Persentase pengintegrasian pencapaian target SPM dan realisasi peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017;
    4. Persentase ketersediaan SOP pencapaian target SPM bidang pendidikan mencapai 100% pada Tahun 2017;
    5. Persentase pencapaian target SPM bidang pendidikan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
    6. Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan bidang pendidikan hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
    7. Cakupan sekolah/ *stakeholders* terkait yang berintegrasi dalam pencapaian target-target SPM, SPP dan SP bidang pendidikan mencapai 100% pada Tahun 2017;
    8. Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja (*performance*) pelayanan masyarakat bidang pendidikan menurun 50% hingga Tahun 2017;
    9. Persentase penyelenggaraan pendidikan anak usia dini meningkat 20% pada Tahun 2017;

10. Persentase peningkatan jumlah guru/ tenaga pendidik yang kompeten dalam menumbuhkembangkan minat dan bakat siswa pendidikan dasar meningkat 20% pada Tahun 2017;
11. Persentase peningkatan jumlah guru/ tenaga pendidik yang kompeten dalam menumbuhkembangkan minat dan bakat siswa pendidikan menengah;
12. Persentase peningkatan jumlah guru/ tenaga pendidik yang inovatif dalam mengembangkan metode pengajaran interaktif meningkat 20% tiap tahunnya;
13. Persentase peningkatan KKG berprestasi hingga ke tingkat nasional meningkat 20% pada Tahun 2017;
14. Persentase peningkatan kompetensi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan meningkat 20% pada Tahun 2017;
15. Persentase peningkatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPP) berprestasi hingga ke tingkat nasional meningkat 20% pada Tahun 2017;
16. Persentase peningkatan kinerja komite 20% pada Tahun 2017;
17. Persentase peningkatan permasalahan pendidikan yang berhasil ditangani oleh dewan pendidikan mencapai 20% pada Tahun 2017;
18. Persentase peningkatan jumlah siswa pendidikan dasar berprestasi dalam mata pelajaran/ *sains* dan seni hingga tingkat nasional meningkat 50% hingga Tahun 2017;
19. Persentase peningkatan jumlah sekolah pendidikan dasar berprestasi hingga tingkat nasional meningkat 50% hingga Tahun 2017;
20. Persentase peningkatan jumlah siswa pendidikan menengah berprestasi dalam mata pelajaran/ *sains* dan seni hingga tingkat nasional meningkat 50% hingga Tahun 2017;
21. Persentase peningkatan jumlah sekolah pendidikan menengah berprestasi hingga tingkat nasional meningkat 50% hingga Tahun 2017;
22. Persentase peningkatan jumlah siswa pendidikan menengah kejuruan berprestasi dalam mata pelajaran/ *sains* dan seni hingga tingkat nasional meningkat 50% hingga Tahun 2017;
23. Persentase peningkatan jumlah sekolah pendidikan menengah kejuruan berprestasi hingga tingkat nasional meningkat 50% hingga Tahun 2017;
24. Persentase kebijakan, pedoman dan tata cara/ juklak penerapan pendidikan berbasis karakter pada sekolah baik pendidikan dasar, menengah maupun kejuruan mencapai 100% pada Tahun 2017;
25. Persentase peningkatan jumlah sekolah pendidikan dasar yang mengembangkan muatan lokal berbasis karakter sesuai potensi unggulan daerah Kota Singkawang mencapai 40% pada Tahun 2017;



26. Persentase peningkatan jumlah sekolah pendidikan menengah termasuk kejuruan yang mengembangkan muatan lokal berbasis karakter sesuai potensi unggulan daerah Kota Singkawang mencapai 40% pada Tahun 2017;
27. Persentase peningkatan jumlah sekolah pendidikan dasar dengan angka kelulusan 100% setiap tahunnya meningkat 50% dari tahun sebelumnya hingga 2017;
28. Persentase penurunan angka putus sekolah anak usia sekolah pendidikan dasar mencapai 100% hingga Tahun 2017;
29. Persentase peningkatan jumlah sekolah pendidikan menengah termasuk sekolah kejuruan dengan angka kelulusan 100% setiap tahunnya meningkat 50% dari tahun sebelumnya hingga 2017;
30. Persentase peningkatan jumlah sekolah pendidikan menengah kejuruan dengan angka kelulusan 100% setiap tahunnya meningkat 50% dari tahun sebelumnya hingga 2017;
31. Persentase penurunan angka putus sekolah anak usia sekolah pendidikan menengah mencapai 100% hingga Tahun 2017;
32. Persentase angka kelulusan kejar Paket A tanpa mengulang mencapai 100% hingga Tahun 2017;
33. Persentase angka kelulusan kejar Paket B tanpa mengulang mencapai 100% hingga Tahun 2017;
34. Persentase angka kelulusan kejar Paket C tanpa mengulang mencapai 100% hingga Tahun 2017;
35. Persentase peningkatan Jumlah pengunjung dan jumlah perpustakaan dimasyarakat mencapai 80% pada Tahun 2017;
36. Persentase peningkatan wawasan siswa dan masyarakat melalui prestasi di Tk. Propinsi pada lomba karya tulis ilmiah, lomba bedah buku mencapai 50% pada Tahun 2017;
37. Persentase pemanfaatan dan penerapan IT pada perpustakaan daerah dan sekolah di Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017;
38. Persentase penerapan perpustakaan hibrida (gabungan perpustakaan konvensional dan digital) di Kota Singkawang terutama pada perpustakaan daerah dan perpustakaan sekolah mencapai 50% pada Tahun 2017;
39. Reformulasi perancangan pengembangan peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan mencapai 100% pada Tahun 2017;
40. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang pedoman, mekanisme/ tata cara dan tahapan peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan melalui pendekatan pencegahan dan penyembuhan (*preventif* dan *curatif*) mencapai 100% pada Tahun 2017;

41. Persentase pengintegrasian pencapaian target SPM dan realisasi peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017;
42. Persentase ketersediaan SOP pencapaian target SPM bidang kesehatan mencapai 100% pada Tahun 2017;
43. Persentase pencapaian target SPM bidang kesehatan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
44. Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
45. Cakupan puskesmas/ pustu/ stakeholders terkait yang berintegrasi dalam pencapaian target-target SPM, SPP dan SP bidang kesehatan mencapai 100% pada Tahun 2017;
46. Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja (*performance*) pelayanan masyarakat bidang kesehatan menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017;
47. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang pelayanan rumah sakit daerah yang akuntabel, berbasis kinerja (*performance*) dan pro rakyat mencapai 100% pada Tahun 2017;
48. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang mekanisme/ tata cara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan rumah sakit daerah yang akuntabel, berbasis kinerja (*performance*) dan pro rakyat baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017;
49. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan rumah sakit daerah yang akuntabel, berbasis kinerja (*performance*) dan pro rakyat meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
50. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan rumah sakit daerah meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
51. Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja (*performance*) dan akuntabilitas pelayanan rumah sakit daerah baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017;
52. Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan rumah sakit daerah hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;

53. Cakupan publikasi pelayanan rumah sakit daerah berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
54. Angka keluhan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit daerah mencapai 0% pada Tahun 2017;
55. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang pelayanan publik bidang pekerjaan umum mencapai 100% pada Tahun 2017;
56. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang mekanisme/ tata cara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang pekerjaan umum baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017;
57. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang pekerjaan umum meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
58. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang pekerjaan umum meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
59. Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja (*performance*) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang pekerjaan umum baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017;
60. Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang pekerjaan umum hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
61. Cakupan publikasi pelayanan publik bidang pekerjaan umum berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
62. Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja (*performance*) pelayanan publik bidang pekerjaan umum menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017;
63. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang pelayanan publik bidang perumahan rakyat mencapai 100% pada Tahun 2017;
64. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang mekanisme/ tata cara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang perumahan rakyat baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017;

65. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang perumahan rakyat meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
66. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang perumahan rakyat meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
67. Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja (*performance*) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang perumahan rakyat baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017;
68. Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang perumahan rakyat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
69. Cakupan publikasi pelayanan publik bidang perumahan rakyat berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
70. Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja (*performance*) pelayanan masyarakat bidang perumahan rakyat menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017;
71. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang pelayanan publik bidang lingkungan hidup mencapai 100% pada Tahun 2017;
72. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang mekanisme/ tata cara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang lingkungan hidup baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017;
73. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang lingkungan hidup meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
74. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang lingkungan hidup meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
75. Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja (*performance*) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang lingkungan hidup baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017;
76. Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang lingkungan hidup hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;

77. Cakupan publikasi pelayanan publik bidang lingkungan hidup berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
78. Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja (*performance*) pelayanan masyarakat bidang lingkungan hidup menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017;
79. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang pelayanan publik bidang kependudukan mencapai 100% pada Tahun 2017;
80. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang mekanisme/ tata cara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang kependudukan baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017;
81. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang kependudukan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
82. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang kependudukan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
83. Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja (*performance*) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang kependudukan baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017;
84. Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
85. Cakupan publikasi pelayanan publik bidang kependudukan berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
86. Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja (*performance*) pelayanan masyarakat bidang pemerintahan dalam negeri menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017;
87. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang pelayanan publik bidang perhubungan mencapai 100% pada Tahun 2017;
88. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang mekanisme/ tata cara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang perhubungan baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017;

89. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang perhubungan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
90. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang perhubungan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
91. Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja (*performance*) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang perhubungan baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017;
92. Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang perhubungan hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
93. Cakupan publikasi pelayanan publik bidang perhubungan berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
94. Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja (*performance*) pelayanan masyarakat bidang perhubungan menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017;
95. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang pelayanan publik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mencapai 100% pada Tahun 2017;
96. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang mekanisme/ tata cara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017;
97. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
98. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
99. Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja (*performance*) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017;

100. Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
101. Cakupan publikasi pelayanan publik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
102. Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja (*performance*) pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017;
103. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang pelayanan publik bidang sosial mencapai 100% pada Tahun 2017;
104. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang mekanisme/ tata cara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang sosial baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017;
105. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang sosial meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
106. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang sosial meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
107. Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja (*performance*) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang sosial baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017;
108. Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang sosial hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
109. Cakupan publikasi pelayanan publik bidang sosial berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
110. Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja (*performance*) pelayanan masyarakat bidang sosial menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017;
111. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang pelayanan publik bidang keluarga berencana mencapai 100% pada Tahun 2017;

112. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang mekanisme/ tata cara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang keluarga berencana baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017;
113. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang keluarga berencana meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
114. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang keluarga berencana meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
115. Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja (*performance*) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang keluarga berencana baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017;
116. Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang keluarga berencana hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
117. Cakupan publikasi pelayanan publik bidang keluarga berencana berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
118. Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja (*performance*) pelayanan bidang keluarga berencana menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017;
119. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang pelayanan publik bidang ketahanan pangan mencapai 100% pada Tahun 2017;
120. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang mekanisme/ tata cara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang ketahanan pangan baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017;
121. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang ketahanan pangan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
122. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang ketahanan pangan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;



123. Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja (*performance*) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang ketahanan pangan baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017;
124. Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang ketahanan pangan hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
125. Cakupan publikasi pelayanan publik bidang ketahanan pangan berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
126. Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja (*performance*) pelayanan bidang ketahanan pangan menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017;
127. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika mencapai 100% pada Tahun 2017;
128. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang mekanisme/ tata cara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017;
129. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
130. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
131. Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja (*performance*) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017;
132. Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
133. Cakupan publikasi pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
134. Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja (*performance*) pelayanan bidang komunikasi dan informatika menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017;

135. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang pelayanan publik bidang ketenagakerjaan mencapai 100% pada Tahun 2017;
136. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang mekanisme/ tata cara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang ketenagakerjaan baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017;
137. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang ketenagakerjaan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
138. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang ketenagakerjaan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
139. Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja (*performance*) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang ketenagakerjaan baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017;
140. Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang ketenagakerjaan hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
141. Cakupan publikasi pelayanan publik bidang ketenagakerjaan berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
142. Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja (*performance*) pelayanan bidang ketenagakerjaan menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017;
143. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang pelayanan publik bidang kesenian mencapai 100% pada Tahun 2017;
144. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang mekanisme/ tata cara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang kesenian baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017;
145. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang kesenian meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;

146. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang kesenian meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
147. Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja (*performance*) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang kesenian baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017;
148. Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang kesenian hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
149. Cakupan publikasi pelayanan publik bidang kesenian berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
150. Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja (*performance*) pelayanan bidang kesenian menurun 50% setiap tahunnya;
151. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang pelayanan publik bidang penanaman modal mencapai 100% pada Tahun 2017;
152. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang mekanisme/ tata cara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang penanaman modal baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017;
153. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang penanaman modal meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
154. Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang penanaman modal meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
155. Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja (*performance*) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang penanaman modal baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017;
156. Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang penanaman modal hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;
157. Cakupan publikasi pelayanan publik bidang penanaman modal berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017;

158. Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja (*performance*) pelayanan bidang penanaman modal menurun 50% setiap tahunnya;
159. Persentase peningkatan jumlah masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah mencapai 80% pada Tahun 2017;
160. Persentase program-program pembangunan Kota Singkawang yang ditindaklanjuti oleh kecamatan mencapai 100% hingga Tahun 2017;
161. Persentase program-program pembangunan Kota Singkawang yang ditindaklanjuti oleh kelurahan mencapai 100% hingga Tahun 2017;
162. Persentase angka keluhan kelurahan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan mencapai 20% hingga 2017;
163. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang mekanisme/ tata cara dan tahapan penerapan tatalaksana perencanaan, pengendalian dan evaluasi produk hukum daerah mencapai 100% pada Tahun 2017;
164. Persentase penyesuaian kembali kebijakan (*policy reformulation*) tentang SOP perancangan produk hukum daerah mencapai 100% pada Tahun 2017;
165. Persentase penurunan kasus/ tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mencapai 50% hingga Tahun 2017;
166. Cakupan publikasi produk hukum daerah mencapai 100% hingga Tahun 2017;
167. Persentase RANPERDA inisiatif dari eksekutif yang *pro poor*, *pro growth*, dan *pro environment* meningkat 20% tiap tahunnya hingga 80% pada Tahun 2017;
168. Persentase PERWAKO dan KEPWAKO yang implementatif dan memiliki keterkaitan terhadap pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah mencapai 100%;
169. Persentase kajian, naskah akademis, dan draft RAPERDA sesuai standar peraturan perundang-undangan mencapai 100% hingga Tahun 2017;
170. Persentase penurunan jumlah regulasi daerah yang dibatalkan mencapai 100% hingga Tahun 2017;
171. Persentase RANPERDA inisiatif dari legislatif yang *pro poor*, *pro growth*, dan *pro environment* meningkat 20% tiap tahunnya hingga 80% pada Tahun 2017;
172. Persentase penurunan jumlah regulasi daerah yang dibatalkan mencapai 100% hingga Tahun 2017;

173. Persentase kepastian perlindungan hukum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan dan anak serta masyarakat kurang beruntung mencapai 100% pada Tahun 2017;
174. Persentase kepastian perlindungan hukum bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat mencapai 100% pada Tahun 2017;
175. Persentase kepastian perlindungan hukum bagi keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup bagi kesejahteraan masyarakat mencapai 100% pada Tahun 2017.



**BAB VI**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2013 – 2017**

**6.1.1. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesatu**

- a) Memberikan ruang gerak dan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing masyarakat, dengan arah kebijakan :
  - 1. Peningkatan kesadaran dan implementasi kehidupan beragama masyarakat melalui pemberian dukungan pelaksanaan ibadah dan fasilitasi pembangunan sarana prasarana ibadah masyarakat.
- b) Menumbuhkembangkan kembali ketahanan keluarga yang didasarkan pada nilai-nilai luhur agama, dengan arah kebijakan :
  - 1. Peningkatan keterlibatan orang tua, masyarakat serta pemerintah dalam menciptakan ketahanan keluarga sejahtera dan berakhlak mulia;
  - 2. Peningkatan citra aparatur Pemerintah Kota Singkawang yang agamis dan berakhlak mulia.
- c) Meningkatkan keterlibatan masyarakat beda agama dan beda etnis pada forum-forum komunikasi tingkat kota, dengan arah kebijakan :
  - 1. Pengembangan forum dialogis antar komponen agama dan etnis masyarakat

Tabel 6.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesatu  
RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan kualitas akhlak setiap individu masyarakat Kota Singkawang agar berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama dan kepercayaannya	1 Terwujudnya masyarakat yang sehat mental dan spiritual	1 Memberikan ruang gerak dan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing masyarakat	1 Peningkatan kesadaran dan implementasi kehidupan beragama masyarakat melalui pemberian dukungan pelaksanaan ibadah dan fasilitasi pembangunan sarana prasarana ibadah masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2 Menumbuhkembangkan kembali ketahanan keluarga yang didasarkan pada nilai-nilai luhur agama	1 Peningkatan keterlibatan orangtua, masyarakat serta pemerintah dalam menciptakan ketahanan keluarga sejahtera dan berakhlak mulia 2 Peningkatan citra aparaturnya Pemerintah Kota Singkawang yang agamis dan berakhlak mulia
2 Menciptakan kualitas kehidupan beragama dan sosial masyarakat yang lebih baik	2 Menurunnya angka konflik antar agama dan antaretnis	1 Meningkatkan keterlibatan masyarakat beda agama dan beda etnis pada forum-forum komunikasi tingkat kota	1 Pengembangan forum dialogis antar komponen agama dan etnis masyarakat

#### 6.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua

- a) Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana infrastruktur pendidikan, dengan arah kebijakan :
1. Pengendalian kualitas dan kuantitas infrastruktur pendidikan;
  2. Penataan jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih serta air limbah infrastruktur pendidikan secara lebih efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan;
- b) Mengintegrasikan dan mengembangkan perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur pendidikan dengan rencana pembangunan tingkat pusat, provinsi dan kota, dengan arah kebijakan :
1. Percepatan dan peningkatan keterpaduan perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur pendidikan antar pusat, provinsi, dan kota;
  2. Pengembangan kemitraan sektor swasta dalam pembangunan bidang pendidikan menuju Singkawang sebagai pusat jasa pendidikan.
- c) Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana infrastruktur kesehatan, dengan arah kebijakan :
1. Pengendalian kualitas dan kuantitas infrastruktur kesehatan;
  2. Penataan jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih serta air limbah infrastruktur kesehatan secara lebih efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan;



- d) Mensinkronisasikan perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur kesehatan dengan rencana pembangunan tingkat pusat, provinsi, dan kota, dengan arah kebijakan :
  - 1. Percepatan dan peningkatan keterpaduan perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur kesehatan antar pusat, provinsi, dan daerah;
  - 2. Pengembangan kemitraan sektor swasta dalam pembangunan bidang kesehatan menuju Kota Singkawang sebagai pusat jasa kesehatan;
- e) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pasar tradisional yang bersih tertata, aman dan nyaman, dengan arah kebijakan :
  - 1. Pengendalian kuantitas dan kualitas infrastruktur pasar tradisional yang letaknya terpisah dengan upaya relokasi dan revitalisasi sarana dan prasarana perdagangan agar lebih tertata, rapi, dan bersih;
  - 2. Penataan jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih serta air limbah infrastruktur perekonomian secara lebih efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan.
- f) Mensinkronisasikan perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur perdagangan dengan rencana pembangunan tingkat pusat, provinsi, dan kota, dengan arah kebijakan :
  - 1. Percepatan dan peningkatan keterpaduan perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur perdagangan antara pusat, provinsi dan kota;
  - 2. Pengembangan kemitraan sektor swasta dalam pembangunan bidang perdagangan menuju Kota Singkawang sebagai pusat jasa perdagangan.
- g) Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas penyediaan air bersih yang terintegrasi dan terpadu, dengan arah kebijakan :
  - 1. Percepatan perluasan cakupan penyediaan air bersih berkualitas;
  - 2. Revitalisasi kualitas, kuantitas dan kontinuitas air bersih bagi masyarakat;
  - 3. Perbaiki kinerja PDAM Kota Singkawang.
- h) Mengintegrasikan perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur perluasan akses air bersih dengan rencana penyediaan air bersih bagi masyarakat di tingkat pusat, provinsi, dan kota, dengan arah kebijakan :
  - 1. Pengintegrasian keterpaduan perencanaan dan penganggaran revitalisasi pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih;

- i) Mengembangkan sistem infrastruktur dasar perkotaan secara terintegrasi dan tidak tumpang tindih, dengan arah kebijakan :
  1. Pengendalian kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan;
  2. Pengendalian kuantitas dan kualitas jaringan drainase, irigasi dan jaringan pengairan lainnya;
  3. Peningkatan manajemen pengelolaan infrastruktur penyediaan air bersih, air minum dan air limbah;
  4. Pengendalian kuantitas dan kualitas infrastruktur permukiman;
  5. Pengendalian kuantitas dan kualitas infrastruktur bangunan milik pemerintah.
  
- j) Mengintegrasikan dan mengembangkan perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah dengan rencana pembangunan tingkat pusat, provinsi dan kota, dengan arah kebijakan :
  1. Percepatan dan peningkatan keterpaduan perencanaan dan pembiayaan pembangunan jalan dan jembatan antara pemerintah pusat, provinsi dan kota.
  
- k) Melaksanakan inovasi pengembangan pembangunan infrastruktur daerah, dengan arah kebijakan :
  1. Penguasaan informasi dan teknologi pengembangan infrastruktur/ utilitas kota.

Tabel 6.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua  
RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Memastikan fasilitas infrastruktur pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang handal bagi masyarakat	1 Terwujudnya infrastruktur pendidikan yang berkualitas dalam meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan efisien bagi kesejahteraan hidup rakyat	1 Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana infrastruktur pendidikan	1 Pengendalian kualitas dan kuantitas infrastruktur pendidikan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			2 Penataan jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih serta air limbah infrastruktur pendidikan secara lebih efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan
		2 Mengintegrasikan dan mengembangkan perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur pendidikan dengan rencana pembangunan tingkat pusat, provinsi dan kota	1 Percepatan dan peningkatan keterpaduan perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur pendidikan antar pusat, provinsi, dan kota
			2 Pengembangan kemitraan sektor swasta dalam pembangunan bidang pendidikan menuju Singkawang sebagai pusat jasa pendidikan
	2 Terwujudnya infrastruktur kesehatan yang berkualitas dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat	1 Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana infrastruktur kesehatan	1 Pengendalian kualitas dan kuantitas infrastruktur kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			2 Penataan jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih serta air limbah infrastruktur kesehatan secara lebih efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan
		2 Mensinkronisasikan perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur kesehatan dengan rencana pembangunan tingkat pusat, provinsi, dan kota	1 Percepatan dan peningkatan keterpaduan perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur kesehatan antar pusat, provinsi, dan daerah
			2 Pengembangan kemitraan sektor swasta dalam pembangunan bidang kesehatan menuju Kota Singkawang sebagai pusat jasa kesehatan
2 Mewujudkan fasilitas infrastruktur pasar yang representatif bagi aktifitas perdagangan masyarakat	1 Terwujudnya infrastruktur pasar yang berkualitas dalam mendukung tercapainya Kota Singkawang sebagai pusat perdagangan	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pasar tradisional yang bersih tertata, aman dan nyaman	1 Pengendalian kuantitas dan kualitas infrastruktur pasar tradisional yang letaknya terpisah dengan upaya relokasi dan revitalisasi sarana dan prasarana perdagangan agar lebih tertata, rapi, dan bersih

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			2 Penataan jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih serta air limbah infrastruktur perekonomian secara lebih efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan
		2 Mensinkronisasi perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur perdagangan dengan rencana pembangunan tingkat pusat, provinsi, dan kota	1 Percepatan dan peningkatan keterpaduan perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur perdagangan antara pusat, provinsi dan kota
			2 Pengembangan kemitraan sektor swasta dalam pembangunan bidang perdagangan menuju Kota Singkawang sebagai pusat jasa perdagangan
3 Mewujudkan ketersediaan air bersih bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Singkawang dan dunia usaha	1 Tercapainya cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Singkawang	1 Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas penyediaan air bersih yang terintegrasi dan terpadu	1 Percepatan perluasan cakupan penyediaan air bersih berkualitas
			2 Revitalisasi kualitas, kuantitas dan kontinuitas air bersih bagi masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3 Perbaikan kinerja PDAM Kota Singkawang
		2 Mengintegrasikan perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur perluasan akses air bersih dengan rencana penyediaan air bersih bagi masyarakat di tingkat pusat, provinsi, dan kota	1 Pengintegrasian keterpaduan perencanaan dan penganggaran revitalisasi pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih
4 Menciptakan sinergisitas dan integrasi pengelolaan infrastruktur daerah serta efektifitas pemanfaatannya agar memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi	1 Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas dalam mewujudkan Kota Singkawang sebagai pusat jasa, perdagangan, dan agroindustri	1 Mengembangkan sistem infrastruktur dasar perkotaan secara terintegrasi dan tidak tumpang tindih	1 Pengendalian kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan
			2 Pengendalian kuantitas dan kualitas jaringan drainase, irigasi dan jaringan pengairan lainnya
			3 Peningkatan manajemen pengelolaan infrastruktur penyediaan air bersih, air minum dan air limbah
			4 Pengendalian kuantitas dan kualitas infrastruktur permukiman
			5 Pengendalian kuantitas dan kualitas infrastruktur bangunan milik pemerintah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2 Terwujudnya sinergi antara perencanaan, pembiayaan dan pencapaian target pembangunan infrastruktur/ utilitas perkotaan	1 Mengintegrasikan dan mengembangkan perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah dengan rencana pembangunan tingkat pusat, provinsi dan kota	1 Percepatan dan peningkatan keterpaduan perencanaan dan pembiayaan pembangunan jalan dan jembatan antara pemerintah pusat, provinsi dan kota
		2 Melaksanakan inovasi pengembangan pembangunan infrastruktur daerah	1 Penguasaan informasi dan teknologi pengembangan infrastruktur/ utilitas kota

### 6.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Ketiga

- a) Menghidupkan kembali (*revitalisasi*) peran koperasi terutama bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berbasis kinerja, profesional dan akuntabel dengan arah kebijakan:
1. Penataan manajemen dan transparansi kinerja koperasi agar dapat berkompetisi secara sehat dan berkontribusi pada pembangunan daerah melalui dukungan penjaminan dan jangkauan kredit usaha rakyat;
  2. Pengembangan koperasi agribisnis yang ikut mengelola subsistem agribisnis hulu dan hilir melalui usaha patungan (*joint venture*) dengan pengusaha swasta atau BUMD.
- b) Mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah, dengan arah kebijakan :
1. Pemantapan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) dan penumbuhan-kembangan diversifikasi lapangan pekerjaan di kalangan pemuda dan usia produktif;
  2. Klasterisasi UKM dan UMKM untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan agar produk yang dihasilkan terus membentuk mata rantai yang utuh mulai dari penyediaan sarana dan prasarana klasterisasi, pembinaan untuk peningkatan kapasitas penggiat/ pelaksana wirausaha, peningkatan nilai jual produk wirausaha UKM

dan UMKM hingga kepastian jejaring pemasaran produk (*market networking*)

Tabel 6.3.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Ketiga  
RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan taraf hidupnya	1 Terciptanya ekosistem yang kondusif bagi pengembangan produk-produk unggulan daerah berlandaskan ekonomi kerakyatan	1 Menghidupkan kembali (revitalisasi) peran koperasi terutama bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berbasis kinerja, profesional dan akuntabel	1 Penataan manajemen dan transparansi kinerja koperasi agar dapat berkompetisi secara sehat dan berkontribusi pada pembangunan daerah melalui dukungan penjaminan dan jangkauan kredit usaha rakyat
			2 Pengembangan koperasi agribisnis yang ikut mengelola subsistem agribisnis hulu dan hilir melalui usaha patungan ( <i>joint venture</i> ) dengan pengusaha swasta atau BUMD
		2 Mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah	1 Pemantapan jiwa kewirausahaan ( <i>entrepreneurship</i> ) dan penumbuhkembangan diversifikasi lapangan pekerjaan di kalangan pemuda dan usia produktif



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			2 Klasterisasi UKM dan UMKM untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan agar produk yang dihasilkan terus membentuk mata rantai yang utuh mulai dari penyediaan sarana dan prasarana klasterisasi, pembinaan untuk peningkatan kapasitas penggiat/ pelaksana wirausaha, peningkatan nilai jual produk wirausaha UKM dan UMKM hingga kepastian jejaring pemasaran produk ( <i>market networking</i> )

#### 6.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Keempat

- a) Menciptakan keterkaitan antar wilayah melalui peningkatan kerjasama dan aktifitas perdagangan antar Kota Singkawang dengan kabupaten/kota disekitarnya untuk mendukung perekonomian domestik dan pengembangan ekonomi lokal dan daerah di wilayah strategis, dengan arah kebijakan :
1. Sinkronisasi dan sinergisitas yang harmonis antara Kota Singkawang dengan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota di sekitarnya demi keterkaitan antar sektor, antar program, antar pelaku, dan antar daerah untuk percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang;
  2. Pemihakan bagi percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar.
- b) Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat daerah pinggiran, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar dengan orientasi pada keunggulan komparatif sumberdaya lokal dan didukung oleh sektor industri, jasa dan perdagangan, dengan infrastruktur yang menunjang keterkaitan kawasan-kawasan tersebut dengan pusat-pusat pertumbuhan, dengan arah kebijakan :

1. Percepatan pembangunan wilayah pinggiran terutama disetiap pintu-pintu masuk kota berbasis potensi kewilayahan yang berorientasi ke luar (*outward looking*) berdasarkan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*);
  2. Pengutamaan pembangunan prasarana dan sarana bagi pengembangan daerah pinggiran, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar;
  3. Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri pada daerah pinggiran, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar;
  4. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi dan komunikasi untuk wilayah pesisir, pedalaman, kota, Kelurahan dan perbatasan sebagai penunjuang percepatan pertumbuhan ekonomi;
  5. Pengembangan wilayah pesisir dan pemberdayaan sumberdaya sektor pesisir
- c) Memperluas jangkauan pelayanan dasar hingga daerah pinggiran, perbatasan, kawasan terluar, dan kawasan terdepan Kota Singkawang, dengan arah kebijakan :
1. Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan;
  2. Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan;
- d) Meningkatkan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya perindustrian dan perdagangan Kota Singkawang berbasis potensi daerah sebagai pemicu pergerakan pertumbuhan ekonomi masyarakat ke kawasan-kawasan pinggir dan terluar Singkawang, dengan arah kebijakan :
1. Pemerataan kesempatan berusaha melalui reformulasi kebijakan dalam upaya pengentasan pengangguran dan kemiskinan tanpa diskriminasi;
  2. Peningkatan taraf dan kualitas pendidikan serta diklat tenaga kerja untuk mengisi pasar kerja lokal dan global;
  3. Perlindungan ketenagakerjaan dalam membangun hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan tenaga kerja dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja;
- e) Meningkatkan fokus pembangunan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi daerah, dengan arah kebijakan :
1. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi makro yang merefleksikan kualitas kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh;

2. Percepatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali dan menata setiap potensi penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan penegakan hukum berkeadilan dengan melakukan penyederhanaan prosedur, dan perbaikan sistem informasi.
- f) Mengembangkan produk unggulan yang kompetitif di pasar domestik maupun global, yang didukung sumberdaya manusia (SDM) unggul, riset dan teknologi, informasi, serta keunggulan pemasaran, dengan arah kebijakan :
1. Pengembangan sektor-sektor unggulan sesuai keanekaragaman karakteristik khas dan potensi wilayah dengan tetap melibatkan masyarakat setempat dan keterkaitan program lintas SKPD agar terbentuk suatu sistem yang terpadu dan utuh;
  2. Peningkatan daya saing sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan swasembada pangan dan ketahanan pangan daerah;
  3. Pembentukan kemitraan ekonomi global yang saling menguntungkan tanpa mengorbankan kepentingan dan kedaulatan daerah dalam menumbuhkan produk unggulan daerah yang kreatif, kompetitif dan berkualitas ekspor.

Tabel 6.4.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Keempat  
RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.	1 Terwujudnya akselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan tanpa mengesampingkan aspek pemerataan yang berkeadilan	1 Menciptakan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan kerjasama dan aktifitas perdagangan antar Kota Singkawang dengan kabupaten/kota disekitarnya untuk mendukung perekonomian domestik dan pengembangan ekonomi lokal dan daerah di wilayah strategis	1 Sinkronisasi dan sinergisitas yang harmonis antara Kota Singkawang dengan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota di sekitarnya demi keterkaitan antarsektor, antarprogram, antarpelaku, dan antardaerah untuk percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang
			2 Pemihakan bagi percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar
		2 Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat daerah pinggiran, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar dengan orientasi pada keunggulan komparatif sumberdaya lokal dan didukung oleh sektor industri, jasa dan perdagangan, dengan infrastruktur yang menunjang keterkaitan kawasan-kawasan tersebut dengan pusat-pusat pertumbuhan	1 Percepatan pembangunan wilayah pinggiran terutama disetiap pintu-pintu masuk kota berbasis potensi kewilayahan yang berorientasi ke luar ( <i>outward looking</i> ) berdasarkan pendekatan kesejahteraan ( <i>prosperity approach</i> )
			2 Pengutamaan pembangunan prasarana dan sarana bagi pengembangan daerah pinggiran, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3 Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri pada daerah pinggiran, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar
			4 Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi dan komunikasi untuk wilayah pesisir, pedalaman, kota, kelurahan dan perbatasan sebagai penunjang percepatan pertumbuhan ekonomi
			5 Pengembangan wilayah pesisir dan pemberdayaan sumberdaya sektor pesisir
	2 Terciptanya pemerataan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat	1 Memperluas jangkauan pelayanan dasar hingga daerah pinggiran, perbatasan, kawasan terluar, dan kawasan terdepan Kota Singkawang	1 Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan
			2 Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan
		2 Meningkatkan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya perindustrian dan perdagangan Kota Singkawang berbasis potensi daerah sebagai pemicu pergerakan pertumbuhan ekonomi masyarakat ke kawasan-kawasan pinggir dan terluar Singkawang	1 Pemerataan kesempatan berusaha melalui reformulasi kebijakan dalam upaya pengentasan pengangguran dan kemiskinan tanpa diskriminasi
			2 Peningkatan taraf dan kualitas pendidikan serta diklat tenaga kerja untuk mengisi pasar kerja lokal dan global

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3 Perlindungan ketenagakerjaan dalam membangun hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan tenaga kerja dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja
2 Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi kreatif kerakyatan berbasis jasa, perdagangan dan agroindustri	1 Terciptanya perbaikan struktur perekonomian daerah yang kokoh sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas ( <i>inklusif</i> ), berdaya saing global, dan menjadi motor penggerak perekonomian	1 Meningkatkan fokus pembangunan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi daerah	1 Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi makro yang merefleksikan kualitas kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh
			2 Percepatan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggali dan menata setiap potensi penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan penegakan hukum berkeadilan dengan melakukan penyederhanaan prosedur, dan perbaikan sistem informasi
		2 Mengembangkan produk unggulan yang kompetitif di pasar domestik maupun global, yang didukung sumberdaya manusia (SDM) unggul, riset dan teknologi, informasi, serta keunggulan pemasaran	1 Pengembangan sektor-sektor unggulan sesuai keanekaragaman karakteristik khas dan potensi wilayah dengan tetap melibatkan masyarakat setempat dan keterkaitan program lintas SKPD agar terbentuk suatu sistem yang terpadu dan utuh

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			2 Peningkatan daya saing sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan swasembada pangan dan ketahanan pangan daerah
			3 Pembentukan kemitraan ekonomi global yang saling menguntungkan tanpa mengorbankan kepentingan dan kedaulatan daerah dalam menumbuhkan produk unggulan daerah yang kreatif, kompetitif dan berkualitas ekspor

#### 6.1.5. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kelima :

- a) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan arah kebijakan:
  1. Peningkatan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
  2. Penerapan teknologi tepat guna dalam menggunakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagai potensi energi alternatif;
- b) Meningkatkan upaya-upaya penyiapan strategi pengurangan resiko bencana yang mandiri dan berkelanjutan pada wilayah-wilayah yang memiliki karakter berdekatan dengan gejala bencana alam dan rentan terhadap perubahan iklim global, dengan arah kebijakan :
  1. Pengendalian, penataan dan pemanfaatan penggunaan ruang kota serta penatagunaan tanah;
  2. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui peningkatan luas tutupan lahan dan sebaran RTH;
  3. Perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

- c) Menerapkan regulasi perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan :
1. Penegakan hukum perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
  2. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran PERDA RTRW.

Tabel 6.5

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kelima  
RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Melestarikan keberlanjutan manfaat sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1 Terciptanya lingkungan kota yang nyaman dan bebas polusi secara berkelanjutan	1 Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1 Peningkatan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup
			2 Penerapan teknologi tepat guna dalam menggunakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagai potensi energi alternatif
2 Menciptakan Kota Singkawang bebas bencana	1 Menurunnya kemungkinan terjadinya bencana alam akibat kegagalan perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah secara tepat sasaran, terukur, terarah dan berwawasan lingkungan berkelanjutan ( <i>Sustainable environment development</i> )	1 Meningkatkan upaya-upaya penyiapan strategi pengurangan resiko bencana yang mandiri dan berkelanjutan pada wilayah-wilayah yang memiliki karakter berdekatan dengan gejala bencana alam dan rentan terhadap perubahan iklim global	1 Pengendalian, penataan dan pemanfaatan penggunaan ruang kota serta penatagunaan tanah
			2 Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui peningkatan luas tutupan lahan dan sebaran RTH



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3 Perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
		2 Menerapkan regulasi perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	1 Penegakan hukum perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
			2 Penerapan sanksi terhadap pelanggaran PERDA RTRW

#### 6.1.6. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Keenam

- a) Menerapkan sistem transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau secara berkelanjutan (*Sustainable transportation development*), dengan arah kebijakan :
  1. Peningkatan konektivitas sistem transportasi berkualitas;
  2. Penerapan sistem transportasi yang nyaman dan aman bagi pengendara dan kendaraan.
- b) Mengintegrasikan dan mengembangkan perencanaan dan pembiayaan pembangunan jaringan transportasi dengan rencana pembangunan tingkat pusat, provinsi dan kota, dengan arah kebijakan :
  1. Percepatan dan peningkatan keterpaduan perencanaan dan pembiayaan pembangunan sistem transportasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kota;
- c) Melaksanakan inovasi pengembangan pembangunan infrastruktur sistem jaringan transportasi terpadu (*Integrated transportation system*), dengan arah kebijakan :
  1. Penguasaan informasi dan teknologi pengembangan sistem jaringan transportasi terpadu (*Integrated transportation system*).

Tabel 6.6

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Keenam  
RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Memperkecil disparitas antar wilayah dan sektor Kota Singkawang agar setiap wilayah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperoleh pemerataan manfaat pembangunan	1 Meningkatkan daya saing daerah demi percepatan ketangguhan dan ketahanan kota ( <i>Resilient City</i> )	1 Menerapkan sistem transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau secara berkelanjutan ( <i>Sustainable transportation development</i> )	1 Peningkatan konektivitas sistem transportasi berkualitas
			2 Penerapan sistem transportasi yang nyaman dan aman bagi pengendara dan kendaraan
		2 Mengintegrasikan dan mengembangkan perencanaan dan pembiayaan pembangunan jaringan transportasi dengan rencana pembangunan tingkat pusat, provinsi dan kota	1 Percepatan dan peningkatan keterpaduan perencanaan dan pembiayaan pembangunan sistem transportasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kota
		3 Melaksanakan inovasi pengembangan pembangunan infrastruktur sistem jaringan transportasi terpadu ( <i>Integrated transportation system</i> )	1 Penguasaan informasi dan teknologi pengembangan sistem jaringan transportasi terpadu ( <i>Integrated transportation system</i> )

#### 6.1.7. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Ketujuh

- a) Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan dini masyarakat, dengan arah kebijakan :
1. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban;
  2. Pengembangan sistem ketentraman dan ketertiban secara terpadu dan terintegrasi.

- b) Menciptakan forum dialogis politik dan sosial masyarakat, dengan arah kebijakan :
1. Peningkatan peranserta masyarakat dalam bidang politik dan organisasi kemasyarakatan;
  2. Penguatan kelembagaan dalam peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat.

Tabel 6.7.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Ketujuh  
RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	1 Terciptanya rasa aman masyarakat dan dunia usaha	1 Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan dini masyarakat	1 Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban
			2 Pengembangan sistem ketentraman dan ketertiban secara terpadu dan terintegrasi
	2 Meningkatnya stabilitas daerah guna menunjang aktifitas perekonomian masyarakat khususnya dunia investasi dan usaha masyarakat	1 Menciptakan forum dialogis politik dan sosial masyarakat	1 Peningkatan peranserta masyarakat dalam bidang politik dan organisasi kemasyarakatan
			2 Penguatan kelembagaan dalam peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat

**6.1.8. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kedelapan**

- a) Meningkatkan peran serta masyarakat khususnya generasi muda dalam mengekspresikan kreatifitas dan inovasi dalam seni dan budaya, dengan arah kebijakan :
1. Pementasan gelar seni dan budaya Kota Singkawang secara berkala dan bersinergi dengan *event-event* budaya di tingkat provinsi dan nasional dengan tetap menjaga karakteristik daerah yang khas;

2. Pengembangan inovasi potensi dan keragaman seni dan budaya daerah sehingga layak menjadi daya tarik kepariwisataan yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
  3. Pengembangan inovasi potensi dan keragaman seni dan budaya daerah sehingga layak menjadi daya tarik kepariwisataan yang perlu dilindungi dan dilestarikan.
- b) Mendorong peran serta orang tua, masyarakat dan sektor swasta agar lebih aktif dan antusias dalam mendukung cabang olahraga unggulan Kota Singkawang, dengan arah kebijakan :
1. Peningkatan pembinaan atlit usia dini dan pengembangan cabang olahraga;
  2. Pengembangan metode pemasyarakatan olahraga.
- c) Meningkatkan harkat dan martabat masyarakat miskin dan membantu mereka mengentaskan diri dari kemiskinan dan permasalahan sosial, dengan arah kebijakan :
1. Penyantunan dan pengentasan gelandangan, pengemis, tunasusila, anak nakal dan korban narkoba terutama melalui bimbingan sosial dan motivasi;
  2. Pembinaan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar memiliki kualitas dan daya saing dalam menghadapi tuntutan, kebutuhan, serta tantangan dan persaingan di era global dan memanfaatkan kesempatan kerja yang ada;

Tabel 6.8.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kedelapan  
RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Memberikan ruang gerak bagi tumbuh kembang ekspresi dan ide kreatif budaya dan olahraga Kota Singkawang yang heterogen agar mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional	1 Menjadikan Kota Singkawang sebagai daerah tujuan wisata yang inovatif, menarik dan tetap bermartabat	1 Meningkatkan peran serta masyarakat khususnya generasi muda dalam mengekspresikan kreatifitas dan inovasi dalam seni dan budaya	1 Pementasan gelar seni dan budaya Kota Singkawang secara berkala dan bersinergi dengan <i>event-event</i> budaya di tingkat provinsi dan nasional dengan tetap menjaga karakteristik daerah yang khas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			2 Pengembangan inovasi potensi dan keragaman seni dan budaya daerah sehingga layak menjadi daya tarik kepariwisataan yang perlu dilindungi dan dilestarikan
			3 Pembelajaran seni budaya terintegrasi pendidikan karakter
	2 Meningkatnya prestasi olahraga Kota Singkawang yang kompetitif	1 Mendorong peran serta orangtua, masyarakat dan sektor swasta agar lebih aktif dan antusias dalam mendukung cabang olahraga unggulan Kota Singkawang	1 Peningkatan pembinaan atlet usia dini dan pengembangan cabang olahraga
			2 Pengembangan metode pemasyarakatan olahraga
2 Menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Singkawang	1 Terwujudnya kesetiakawanan sosial dan memperkecil kesenjangan sosial	1 Meningkatkan harkat dan martabat masyarakat miskin dan membantu mereka mengentaskan diri dari kemiskinan dan permasalahan sosial	1 Penyantunan dan pengentasan gelandangan, pengemis, tunasusila, anak nakal dan korban narkoba terutama melalui bimbingan sosial dan motivasi
			2 Pembinaan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar memiliki kualitas dan daya saing dalam menghadapi tuntutan, kebutuhan, serta tantangan dan persaingan di era global dan memanfaatkan kesempatan kerja yang ada

#### **6.1.9. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesembilan**

- a) Menerapkan sistem pengelolaan dan budaya kerja aparatur yang berbasis kinerja secara terpadu, terintegrasi dan transparan, dengan arah kebijakan :
1. Perencanaan dan penataan kepegawaian dengan memperhatikan rasionalitas jumlah dan kualitas aparatur;
  2. Penempatan pegawai secara selektif dengan memperhatikan kapasitas dan kompetensi aparatur agar memiliki pola karir - pola kerja PNS yang jelas dan terarah melalui pengaturan jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Singkawang;
  3. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk menghasilkan PNS yang memiliki pola pikir-sikap-perilaku produktif dan inovatif;
  4. Pemberian penghargaan dan penjatuhan hukuman (*reward and punishment*) kepada PNS;
  5. Pengaturan tunjangan, gaji, dan kesejahteraan PNS secara adil, layak dan proporsional.
- b) Melaksanakan penataan kelembagaan organisasi yang tepat fungsi dalam memberikan pelayanan publik prima, dengan arah kebijakan :
1. Penyesuaian Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah (SOPD) sesuai kebutuhan dan kekuatan keuangan daerah dengan tetap memperhatikan amanat UU dan peraturan yang berlaku melalui penataan hubungan urusan dan kewenangan antar SKPD, antara SKPD dan Kecamatan, antara Kecamatan dan Kelurahan termasuk hubungan kewenangan dan urusan antara SKPD dengan lembaga
- c) Melakukan inovasi penyederhanaan ketatalaksanaan dan efisiensi organisasi melalui penguatan payung hukum dan penggunaan sistem informasi pelayanan pemerintahan agar lebih efektif, efisien dan optimal dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan public, dengan arah kebijakan :
1. Penerapan sistem, mekanisme dan prosedur, ketatalaksanaan internal dan eksternal manajemen pemerintahan yang transparan, terpadu dan tepat sasaran fungsi;
  2. Peningkatan keterbukaan informasi publik berbasis IT melalui implementasi sistem informasi yang terkoneksi dan terpadu dengan sistem kearsipan daerah sebagai rekam jejak dinamika pemerintahan dan pembangunan Kota Singkawang;

- d) Meningkatkan sistem pengendalian internal instansi pemerintahan agar setiap lini penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berada dalam koridor yang terarah, terukur, terpadu dan akuntabel dalam menciptakan pelayanan publik prima bagi masyarakat, dengan arah kebijakan :
1. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terintegrasi, akuntabel berbasis kinerja (*accountable based performance*) dan berorientasi hasil (*result oriented*);
- e) Melakukan restrukturisasi mekanisme pelayanan publik berorientasi outcome dengan mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan manfaat lingkungan hidup, dengan arah kebijakan :
1. Peningkatan kualitas layanan masyarakat dengan memperpendek jalur birokrasi agar lebih mempermudah masyarakat memperoleh akses baik pelayanan dasar maupun pelayanan pendukung secara transparan, tepat manfaat, murah (*zero cost*) dan memiliki kepastian hukum;
- f) Meningkatkan implementasi pelaksanaan fungsi perundang-undangan baik dari sisi legislatif maupun eksekutif demi pencapaian kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah yang *pro poor, pro growth*, dan *pro environment*, dengan arah kebijakan :
1. Reformulasi perancangan strategi komunikasi yang efektif antara eksekutif dan legislatif dalam memproduksi produk hukum daerah;
  2. Peningkatan penyusunan dan penetapan produk hukum daerah yang *pro poor, pro growth*, dan *pro environment*;
  3. Supremasi hukum secara terpadu demi perlindungan kepada kepentingan rakyat secara adil dan merata.

Tabel 6.9.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesembilan  
RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Membangun aparatur dan organisasi yang kredibel, akuntabel, transparan, berintegritas, berwibawa dan taat kepada hukum	1 Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan agar lebih profesional dan mengedepankan kinerja	1 Menerapkan sistem pengelolaan dan budaya kerja aparatur yang berbasis kinerja secara terpadu, terintegrasi dan transparan	1 Perencanaan dan penataan kepegawaian dengan memperhatikan rasionalitas jumlah dan kualitas aparatur
			2 Penempatan pegawai secara selektif dengan memperhatikan kapasitas dan kompetensi aparatur agar memiliki pola karir - pola kerja PNS yang jelas dan terarah melalui pengaturan jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Singkawang
			3 Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk menghasilkan PNS yang memiliki pola pikir-sikap-perilaku produktif dan inovatif
			4 Pemberian penghargaan dan penjatuhan hukuman ( <i>reward and punishment</i> ) kepada PNS
			5 Pengaturan tunjangan, gaji, dan kesejahteraan PNS secara adil, layak dan proporsional.



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2 Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana organisasi pemerintah yang baik, benar, inovatif dan akuntabel	1 Melaksanakan penataan kelembagaan organisasi yang tepat fungsi dalam memberikan pelayanan publik prima	1 Penyesuaian Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah (SOPD) sesuai kebutuhan dan kekuatan keuangan daerah dengan tetap memperhatikan amanat UU dan peraturan yang berlaku melalui penataan hubungan urusan dan kewenangan antarSKPD, antara SKPD dan Kecamatan, antara Kecamatan dan Kelurahan termasuk hubungan kewenangan dan urusan antara SKPD dengan lembaga teknis lainnya
		2 Melakukan inovasi penyederhanaan ketatalaksanaan dan efisiensi organisasi melalui penguatan payung hukum dan penggunaan sistem informasi pelayanan pemerintahan agar lebih efektif, efisien dan optimal dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik	1 Penerapan sistem, mekanisme dan prosedur, ketatalaksanaan internal dan eksternal manajemen pemerintahan yang transparan, terpadu dan tepat sasaran fungsi 2 Peningkatan keterbukaan informasi publik berbasis IT melalui implementasi sistem informasi yang terkoneksi dan terpadu dengan sistem kearsipan daerah sebagai rekam jejak dinamika pemerintahan dan pembangunan Kota Singkawang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2 Meningkatkan sistem pengendalian internal instansi pemerintahan agar setiap lini penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berada dalam koridor yang terarah, terukur, terpadu dan akuntabel dalam menciptakan pelayanan publik prima bagi masyarakat	1 Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terintegrasi, akuntabel berbasis kinerja ( <i>accountable based performance</i> ) dan berorientasi hasil ( <i>result oriented</i> )
2 Meningkatkan kepercayaan masyarakat ( <i>public trust</i> ) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	1 Terciptanya peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar dan pelayanan pendukung	1 Melakukan restrukturisasi mekanisme pelayanan publik berorientasi <i>outcome</i> dengan mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan manfaat lingkungan hidup	1 Peningkatan kualitas layanan masyarakat dengan memperpendek jalur birokrasi agar lebih mempermudah masyarakat memperoleh akses baik pelayanan dasar maupun pelayanan pendukung secara transparan, tepat manfaat, murah ( <i>zero cost</i> ) dan memiliki kepastian hukum

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3 Meningkatkan implementasi fungsi peraturan perundang-undangan demi perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat	1 Terwujudnya peraturan daerah dan peraturan pelaksana yang memenuhi azas hukum yang berlaku	1 Meningkatkan implementasi pelaksanaan fungsi perundang-undangan baik dari sisi legislatif maupun eksekutif demi pencapaian kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah yang <i>pro poor, pro growth, dan pro environment</i>	1 Reformulasi perancangan strategi komunikasi yang efektif antara eksekutif dan legislatif dalam memproduksi produk hukum daerah
			2 Peningkatan penyusunan dan penetapan produk hukum daerah yang <i>pro poor, pro growth, dan pro environment</i>
			3 Supremasi hukum secara terpadu demi perlindungan kepada kepentingan rakyat secara adil dan merata

## 6.2. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2012–2032, maka kebijakan penataan ruang wilayah kota meliputi :

- a. Pengembangan kawasan pusat kota yang mencakup kawasan pemerintahan, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai pusat kegiatan wilayah;
- b. Pengembangan sub pusat-sub pusat pelayanan kota dan pusat-pusat lingkungan yang merata dan berhierarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh kawasan permukiman;
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumberdaya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata;
- d. Perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
- f. Perlindungan kawasan-kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata;
- g. Perlindungan kawasan pertanian strategis terhadap alih fungsi lahan untuk kegiatan perkotaan;

- h. Pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan;
- i. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan
- j. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

### **6.3. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota**

Strategi pengembangan kawasan pusat kota yang mencakup kawasan pemerintahan, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai pusat kegiatan wilayah meliputi :

- a. Menetapkan kawasan pemerintahan kota dan kawasan komersial yang memiliki jangkauan pelayanan regional sebagai bagian dari kawasan strategis;
- b. Menata jaringan prasarana dan simpul transportasi darat dalam rangka menjaga kelancaran lalu lintas lokal dan regional di kawasan pusat kota;
- c. Menata kawasan terbangun khususnya kegiatan-kegiatan komersial terutama yang berada pada jalan arteri dan kolektor;
- d. Mengendalikan kawasan permukiman yang berkepadatan tinggi;
- e. Mengembangkan sistem jaringan drainase yang efektif dan efisien dalam rangka menghindari terjadinya banjir; dan
- f. Menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai sebagai unsur pengikat sosial masyarakat kota.

Strategi untuk pengembangan sub pusat-sub pusat pelayanan kota dan pusat-pusat lingkungan yang merata dan berhierarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh kawasan permukiman meliputi :

- a. Menjaga berfungsinya secara optimal pusat-pusat pelayanan yang sudah ada;
- b. Mendorong berfungsinya pusat-pusat pelayanan kegiatan yang baru;
- c. Meningkatkan keterkaitan antar-pusat pelayanan dalam wilayah kota, dan antara pusat-pusat pelayan dengan daerah layanannya yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
- d. Mengendalikan perkembangan pusat-pusat pelayanan yang agar sesuai dengan fungsi dan panduan rancang kota.

Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumberdaya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata meliputi :

- a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara, serta keterpaduan intra dan antarmoda;

- b. Membangun prasarana dan sarana transportasi baru yang diarahkan untuk menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota dengan pusat-pusat lingkungan serta jalan alternatif untuk mengantisipasi kemacetan pada ruas-ruas jalan yang sangat berpotensi mengalami kemacetan dalam masa rencana.
- c. Membangun jalan elak (*by pass*) yang menghubungkan Lirang dengan kawasan pelabuhan Sedau yang berfungsi sebagai jalan arteri ;
- d. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;
- e. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik secara optimal;
- f. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air, mempercepat konservasi sumberdaya air, serta meningkatkan pengendalian daya rusak air; dan
- g. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang meliputi drainase, air minum, persampahan, pengolahan limbah, angkutan umum, jalur pejalan kaki, kegiatan sektor informal, dan jalur evakuasi bencana.

Strategi untuk pewujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi :

- a. Menetapkan kawasan lindung;
- b. Melestarikan ekosistem kawasan cagar alam;
- c. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung selain dari kawasan cagar alam yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
- d. Mengalokasikan peruntukan ruang terbuka hijau kota dengan luas lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota dengan ruang terbuka hijau publik lebih dari 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota; dan
- e. Mengembangkan kerjasama dengan kabupaten yang berbatasan dalam meningkatkan fungsi lindung.

Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi :

- a. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan cagar alam, kawasan resapan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, RTH hutan kota, sempadan danau, sempadan sungai, dan sempadan pantai;
- b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;

- d. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- e. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- f. Mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya; dan
- g. Mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam.

Strategi untuk perlindungan kawasan-kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata meliputi :

- a. Menetapkan kawasan-kawasan yang merupakan situs cagar budaya;
- b. Melindungi dan memelihara kawasan yang merupakan situs cagar budaya dengan cara pengamanan, perawatan, dan pemugaran;
- c. Menetapkan areal objek wisata dan kawasan terkait sekitarnya sebagai bagian dari kawasan pariwisata;
- d. Pengembangan kawasan untuk bumi perkemahan di sekitar danau Sarantangan di kelurahan Sagatani, kebun botani di kelurahan Bagak Sahwa, kebun koleksi di kelurahan Nyarumkop dan Bagak Sahwa, serta konservasi di luar habitat alami (*ex situ*) di gunung besar di kelurahan Sedau dan di kaki gunung raya di kelurahan Bagak Sahwa untuk menunjang pengembangan wisata pendidikan dan budidaya tanaman hortikultura; dan
- e. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada areal pengembangan pariwisata.

Strategi perlindungan kawasan pertanian strategis terhadap alih fungsi lahan untuk kegiatan perkotaan meliputi :

- a. Menetapkan kawasan yang sudah dan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. Mewujudkan, mengembangkan, dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan;
- c. Mendayagunakan, meningkatkan, memperluas dan mempertahankan lahan pertanian terutama untuk peningkatan produksi pangan guna mendukung ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis;
- d. Mempertahankan lahan-lahan produktif dan atau beririgasi teknis dari perubahan alih fungsi dan kerusakan lahan pertanian;
- e. Mengembangkan dan memantapkan komoditas-komoditas andalan tanaman pertanian dan tanaman perkebunan;

- f. Mengoptimalkan pengelolaan pemanfaatan dan perbaikan lahan dan tata air mikro melalui pencetakan sawah, rehabilitasi dan konservasi lahan serta jalan usaha tani untuk meningkatkan kualitas fungsi kawasan pertanian;
- g. Mengembangkan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah di arahkan pada upaya untuk tetap mempertahankan luas lahan yang ada disertai dengan upaya pengembangan wilayah yang mempunyai potensi kesesuaian lahan, daya dukung dan prasarana irigasi yang memadai;
- h. Mengembangkan kawasan perikanan secara optimal dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan;
- i. Meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan pembibitan dan pasar benih;
- j. Meningkatkan produksi jenis ikan spesifik melalui peningkatan pengetahuan masyarakat lokal dan kearifan lokal;
- k. Mengembangkan peternakan berdasarkan kesesuaian ekologis lahan kesehatan lingkungan;
- l. Mengembangkan pusat-pusat pembibitan dan pemurnian ternak dengan pengembangan sarana-prasarananya;
- m. Mengembangkan produksi peternakan dengan nilai ekonomis tinggi melalui peningkatan pengetahuan masyarakat lokal dan kearifan lokal; dan
- n. Mengembangkan pembukaan akses kawasan terhadap sentra-sentra pemasaran dan produksi dengan dukungan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai.

Strategi pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan meliputi :

- a. Menetapkan kawasan industri di Kelurahan Sedau yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan dan pergudangan;
- b. Membangun kanal pengendali banjir yang menghubungkan bagian hulu dari Sungai Sedau dengan muara Sungai Jamthang untuk mengantisipasi terjadinya banjir di kawasan industri;
- c. Mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan lingkungan khusus untuk kawasan industri.
- d. Mendayagunakan secara optimal kawasan industri beserta fasilitasnya dengan memperhatikan kelestarian dan kualitas lingkungan;
- e. Mendorong pengembangan sektor industri ke arah pengembangan dan pemanfaatan sentra-sentra industri kecil dan aneka industri dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan; dan

f. Mendorong pengembangan kawasan industri yang dikelola oleh perusahaan pengelola kawasan industri.

Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya meliputi :

- a. Menetapkan kawasan budi daya dan memanfaatkan sumberdaya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
- b. Mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong perkembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
- c. Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, serta mendukung upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi :

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak di kawasan pusat kota;
- b. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan tangkapan air untuk mempertahankan ketersediaan sumber air;
- c. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; dan
- d. Melakukan penyempurnaan secara berkala terhadap ketentuan-ketentuan peraturan zonasi yang telah ditetapkan terutama dalam rangka mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan atau teknologi baru.



## **BAB VII**

### **KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA**

#### **7.1. Kebijakan Umum Mewujudkan Misi**

Kebijakan Umum dirumuskan dengan memperhatikan penjabaran tujuan dan sasaran masing-masing misi. Adapun maksud perumusan Kebijakan Umum adalah untuk mengarahkan agar setiap pilihan program-program pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Singkawang menjadi agenda yang akan dilaksanakan hingga Tahun 2017.

##### **7.1.1. Kebijakan Umum Mewujudkan Misi Kesatu** diagendakan untuk :

1. Penguatan pondasi spiritual setiap individu agar tercipta ketahanan dan stabilitas masyarakat tanpa terkecuali yang dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, sekolah, pemerintahan dan masyarakat;
2. Peningkatan toleransi beragama ditengah heterogenitas masyarakat Kota Singkawang;
3. Penciptaan kehidupan yang harmonis, saling menghormati, dan damai.

##### **7.1.2. Kebijakan Umum Mewujudkan Misi Kedua,** diagendakan untuk :

1. Peningkatan koordinasi legislatif dan eksekutif dalam perumusan prioritas tahunan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan agar tepat manfaat;
2. Optimalisasi penyelarasan program pusat, provinsi dan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam pendanaan Kebijakan Umum khususnya program-program prioritas Kota Singkawang agar lebih komprehensif, terpadu dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan nasional, provinsi dan daerah;
4. Peningkatan cakupan dan ketersediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan terutama yang berkaitan dengan pencapaian standar pelayanan minimal publik dan keterjangkauan fasilitas yang disediakan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

##### **7.1.3. Kebijakan Umum Mewujudkan Misi Ketiga,** diagendakan untuk :

1. Peningkatan peran masyarakat berpenghasilan rendah untuk mandiri dan sejahtera melalui perlindungan, pemerataan dan keberpihakan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, kapitalisme dan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkeadilan;
2. Peningkatan produktivitas dan inovasi daerah terutama yang berbahan dasar dari potensi-potensi unggulan yang ada di Kota Singkawang

dengan memberi keleluasaan dan akses permodalan bagi penumbuhkembangan *entrepreneurship* pemuda;

3. Revitalisasi fungsi dan peranan sektor keuangan termasuk perkoperasian dan UMKM dalam membangun perekonomian agar lebih sejahtera secara adil dan merata.

**7.1.4.** Kebijakan Umum Mewujudkan **Misi Keempat**, diagendakan untuk :

1. Percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan baru agar dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan daerah tertinggal, terluar dan perbatasan dengan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah;
2. Optimalisasi pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif produk unggulan daerah dan daya tarik kawasan di pasar lokal dan domestik ;
3. Pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha dan antar kawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi unggulan di kawasan sekitarnya melalui pemberdayaan masyarakat dan penciptaan tenaga kerja siap pakai;
4. Peningkatan kerjasama pembangunan antar wilayah secara fungsional, dan antar daerah yang relatif sudah berkembang dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;
5. Perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah agar tercipta *landmark* Kota Singkawang yang mencerminkan keberadaan, dinamika, dan orientasi futuristik, baik bagi wilayah maupun warga kotanya.

**7.1.5.** Kebijakan Umum Mewujudkan **Misi Kelima**, diagendakan untuk :

1. Peningkatan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pengendalian dan pemanfaatan ruang yang ada agar penggunaannya tidak menimbulkan resiko kerusakan lingkungan;
2. Peningkatan perlindungan keberlanjutan manfaat sumberdaya alam bagi kualitas kesehatan individu dan lingkungan perkotaan yang lebih bersih dan nyaman (*nice city to live in*);
3. Pengendalian penataan dan pemanfaatan ruang kota agar mampu mendukung setiap aktifitas masyarakat tanpa merusak kualitas sumberdaya dan daya dukung lingkungan;

4. Penurunan degradasi kualitas lingkungan hidup melalui pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah secara terpadu mulai dari upaya mitigasi, rehabilitasi dan konservasi.

**7.1.6.** Kebijakan Umum Mewujudkan **Misi Keenam**, diagendakan untuk :

1. Peningkatan sinergisitas dan keterpaduan sistem transportasi perkotaan yang secara efisien dan efektif mampu memenuhi kebutuhan aksesibilitas perpindahan barang dan orang secara aman dan nyaman;
2. Perluasan jangkauan perpindahan manusia dan barang dari dan ke luar Kota Singkawang agar dapat membuka akses investasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi kota.

**7.1.7.** Kebijakan Umum Mewujudkan **Misi Ketujuh**, diagendakan untuk :

1. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk pendatang agar aman dan nyaman dalam melakukan aktifitas sehari-hari;
2. Penciptaan kesadaran berorganisasi dan berpolitik secara profesional, aktif, kondusif dan bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan bermasyarakat dan mendukung pencapaian visi Kota Singkawang.

**7.1.8.** Kebijakan Umum Mewujudkan **Misi Kedelapan**, diagendakan untuk :

1. Peningkatan partisipasi pemuda sebagai *agent of change* budaya, pariwisata dan olahraga Kota Singkawang agar lebih dinamis, inovatif, kompetitif dan berkarakter;
2. Perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat yang kurang beruntung sebagai wujud pembangunan berkeadilan dan merata bagi setiap warga Kota Singkawang.

**7.1.9.** Kebijakan Umum Mewujudkan **Misi Kesembilan**, diagendakan untuk :

1. Peningkatan kompetensi, profesionalisme, etos kerja dan produktivitas birokrat Pemerintah Kota Singkawang agar lebih memiliki jiwa kepatuhan, melayani dari hati dan sepenuh hati dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan;
2. Efisiensi keterpaduan dan peningkatan hubungan antar tingkatan pemerintahan dan antar lembaga pemerintahan;
3. Peningkatan efektivitas perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel, transparan, komprehensif dan menjunjung azas *pro poor*, *pro job*, dan *pro environment*;

4. Peningkatan fungsi pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
5. Optimalisasi sumber-sumber PAD dan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Singkawang yang tidak hanya bersumber dari APBD tahunan;
6. Peningkatan kerjasama antar daerah berbagai sektor sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi kota;
7. Supremasi produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **7.2. Program Pembangunan Kota**

### **7.2.1. Program Pembangunan Kota Untuk Mewujudkan Misi Kesatu :**

- a. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
  1. Program Pengembangan Kebijakan Daerah Perlindungan Keluarga dan Anak
- b. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
  1. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- c. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
  1. Program Pembinaan dan Pengembangan Intaq Aparatur

### **7.2.2. Program Pembangunan Kota Untuk Mewujudkan Misi Kedua :**

- a. Urusan Wajib Pendidikan :
  1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
  2. Program Pendidikan Menengah;
  3. Program Pendidikan Luar Biasa;
  4. Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur Pendidikan.
- b. Urusan Wajib Kesehatan :
  1. Program Pembangunan Infrastruktur Kesehatan;
  2. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
  3. Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kesehatan;
- c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum :
  1. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku;
  2. Program Revitalisasi Penyediaan Air Bersih;
  3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
  5. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;
  6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;

7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
  8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air limbah;
  9. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
  10. Program Pembangunan Infrastruktur Bangunan Pemerintahan;
  11. Program Pengembangan Sistem Informasi/ Database Infrastruktur Daerah.
- d. Urusan Wajib Perumahan :
1. Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman;
  2. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan;
  3. Program Pengembangan Sistem Informasi/ Database Permukiman.
  4. Program Pengelolaan Limbah Perkotaan
- e. Urusan Wajib Penataan Ruang :
1. Program Pengembangan Sistem Informasi/ Database Penataan Ruang.
- f. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan :
1. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Pendidikan;
  2. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan;
  3. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Kesehatan;
  4. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan;
  5. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Perdagangan;
  6. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perdagangan;
  7. Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah Penyediaan Air Bersih;
  8. Program Perencanaan Percepatan Penyediaan Air Bersih;
  9. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  10. Program Perencanaan Bidang Pekerjaan Umum;
  11. Penguatan Sistem Inovasi Daerah Pengembangan Infrastruktur/ Utilitas Kota.
- g. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :
1. Program Pengembangan Kemitraan Bidang Pendidikan;
  2. Program Pengembangan Kemitraan Bidang Perdagangan;
  3. Program Peningkatan Kinerja Kemitraan Penyediaan Air Bersih;
  4. Program Evaluasi Kinerja Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum;
  5. Program Pengembangan Kemitraan Bidang Kesehatan.
- h. Urusan Pilihan Perdagangan :
1. Program Revitalisasi Pasar Tradisional;

2. Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan.

**7.2.3. Program Pembangunan Kota Untuk Mewujudkan Misi Ketiga :**

- a. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan :
  - 1. Program Pengembangan Agribisnis Daerah.
- b. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :
  - 1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
  - 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
  - 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
- c. Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga :
  - 1. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.
- d. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :
  - 1. Program Evaluasi Kinerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

**7.2.4. Program Pembangunan Kota Untuk Mewujudkan Misi Keempat :**

- a. Urusan Wajib Pendidikan :
  - 1. Program Peningkatan Layanan Pendidikan Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh.
- b. Urusan Wajib Kesehatan :
  - 1. Program Peningkatan Layanan Kesehatan Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh.
- c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum :
  - 1. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh.
- d. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan :
  - 1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
  - 2. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
  - 3. Program Perencanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
- e. Urusan Wajib Perhubungan :
  - 1. Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Transportasi Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh.
- f. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Anak :
  - 1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan.
- g. Urusan Wajib Tenaga Kerja :
  - 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  - 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

- h. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :
  - 1. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;
  - 2. Program Evaluasi Kinerja Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
  - 3. Program Evaluasi Kinerja Pengentasan Pengangguran dan Kemiskinan;
  - 4. Program Perlindungan Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan;
  - 5. Program Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
  - 6. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- i. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika :
  - 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
- j. Urusan Pilihan Pertanian :
  - 1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan;
  - 2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan;
  - 3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
  - 4. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
  - 5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
  - 6. Program Pengembangan Industri Agribisnis.
- k. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan :
  - 1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;
  - 2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
  - 3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
  - 4. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
- l. Urusan Pilihan Perdagangan :
  - 1. Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perdagangan Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh;
  - 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
- m. Urusan Pilihan Perindustrian :
  - 1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
  - 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

**7.2.5. Program Pembangunan Kota Untuk Mewujudkan Misi Kelima :**

- a. Urusan Wajib Kesehatan :
  - 1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
- b. Urusan Wajib Pekerjaan Umum :
  - 1. Program Pengendalian Banjir.

- c. Urusan Wajib Perumahan :
  - 1. Program Lingkungan Sehat Perumahan.
- d. Urusan Wajib Penataan Ruang :
  - 1. Program Perencanaan Tata Ruang;
  - 2. Program Pemanfaatan Ruang;
  - 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- e. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan :
  - 1. Program Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna;
  - 2. Program Inovasi Daerah Pengendalian Banjir.
- f. Urusan Wajib Lingkungan Hidup :
  - 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
  - 2. Program *Go Clean and Green City* (Kotaku Bersih dan Hijau);
  - 3. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER);
  - 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
  - 5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
  - 6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- g. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :
  - 1. Program Pengembangan Kompensasi Jasa Lingkungan Hidup.
- h. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :
  - 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
- i. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral :
  - 1. Program Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan.

**7.2.6. Program Pembangunan Kota Untuk Mewujudkan **Misi Keenam** :**

- a. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan :
  - 1. Program Perencanaan Bidang Transportasi;
  - 2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah Pengembangan Sistem Transportasi Terpadu.
- b. Urusan Wajib Perhubungan :
  - 1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
  - 2. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
  - 3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
  - 4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
  - 5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;



6. Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;
7. Program Pengembangan Sistem Informasi/Database Transportasi Terpadu.

**7.2.7. Program Pembangunan Kota Untuk Mewujudkan Misi Ketujuh :**

- a. Urusan Wajib Pertanahan :
  1. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.
- b. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri :
  1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
  2. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT);
  3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
  4. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
  5. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
  6. Program Pengembangan Pendidikan Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat'
- c. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :
  1. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum;
  2. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pemerintahan.
- d. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :
  1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan.

**7.2.8. Program Pembangunan Kota Untuk Mewujudkan Misi Kedelapan :**

- a. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan :
  1. Program Perencanaan Sosial Budaya.
- b. Urusan Wajib Sosial :
  1. Program Pembinaan Anak Terlantar;
  2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
  3. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;
  4. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
  5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
- c. Urusan Wajib Kebudayaan :
  1. Program Penyelenggaraan Festival Daerah;
  2. Program Pengembangan Nilai Budaya;
  3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

- d. Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga :
  - 1. Program Pelestarian Budaya Daerah;
  - 2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.
- e. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :
  - 1. Program Evaluasi Kinerja Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga.

**7.2.9. Program Pembangunan Kota Untuk Mewujudkan Misi Kesembilan :**

- a. Urusan Wajib Pendidikan :
  - 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - 3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
  - 4. Program Pengembangan Karakter Siswa Pendidikan Dasar;
  - 5. Program Pengembangan Karakter Siswa Pendidikan Menengah;
  - 6. Program Pendampingan Penerapan Pendidikan Karakter;
  - 7. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar;
  - 8. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah;
  - 9. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal.
  - 10. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan.
- b. Urusan Wajib Kesehatan :
  - 1. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan;
  - 2. Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Daerah.
- c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum :
  - 1. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pekerjaan Umum.
- d. Urusan Wajib Perumahan :
  - 1. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perumahan Rakyat;
- e. Urusan Wajib Lingkungan Hidup :
  - 1. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup.
- f. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan :
  - 1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
  - 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
- g. Urusan Wajib Perhubungan :
  - 1. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perhubungan.
- h. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil :
  - 1. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan.
- i. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Anak :
  - 1. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- j. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :
  - 1. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- k. Urusan Wajib Sosial :
  - 1. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Sosial.
- l. Urusan Wajib Tenaga Kerja :
  - 1. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Ketenagakerjaan.
- m. Urusan Wajib Penanaman Modal :
  - 1. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal.
- n. Urusan Wajib Kebudayaan :
  - 1. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kesenian.
- o. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :
  - 1. Program Penataan Jumlah dan Distribusi PNS;
  - 2. Program Sistem Seleksi CPNS dan PNS Secara Terbuka;
  - 3. Program Pengusulan Formasi dan Sistem Seleksi Sumberdaya Aparatur;
  - 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
  - 5. Program Pendidikan Kedinasan;
  - 6. Program Profesionalisasi Aparatur;
  - 7. Program Penguatan Sistem Disiplin dan Etika PNS;
  - 8. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur;
  - 9. Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi;
  - 10. Program Pengembangan Kinerja Organisasi;
  - 11. Program Penguatan Ketatalaksanaan Organisasi;
  - 12. Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov;
  - 13. Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penganggaran Pembangunan;
  - 14. Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah;
  - 15. Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
  - 16. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 17. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
  - 18. Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
  - 19. Program Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (*Good Governance*);
  - 20. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan;
  - 21. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Produk Hukum Daerah;

- 22. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
  - 23. Program Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Daerah.
  - 24. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
- p. Urusan Wajib Ketahanan Pangan :
- 1. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Ketahanan Pangan;
  - 2. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Komunikasi dan Informatika.
- q. Urusan Wajib Kearsipan :
- 1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah.
- r. Urusan Wajib Perpustakaan :
- 1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
  - 2. Program Pengembangan Inovasi Daerah Dalam Pelayanan Perpustakaan.

### **7.3. Kebijakan Umum Mewujudkan Prioritas Pembangunan Daerah**

Analisa lingkungan eksternal dan internal, permasalahan yang dihadapi serta isu strategis Kota Singkawang yang dikemukakan pada Bab IV menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang. Prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi langkah tindak yang paling strategis untuk memperoleh manfaat secara menyeluruh (*holistic*) mewujudkan **Singkawang Aman, Nyaman, Maju dan Sejahtera Berbasis Jasa, Perdagangan dan Agroindustri** yang mampu pula bersinergi dengan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional maupun Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 7.1.**  
**SINKRONISASI PRIORITAS PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI**  
**DAN KOTA SINGKAWANG**

Prioritas Pemerintah Pusat	Prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Prioritas Pemerintah Kota Singkawang
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	1 Pendidikan	1 Air bersih
2 Pendidikan	2 Kesehatan	2 Reformasi birokrasi dan tata kelola
3 Kesehatan	3 Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan KB	3 IPM
4 Penanggulangan Kemiskinan	4 Pekerjaan Umum	4 Infrastruktur dan sarana perkotaan
5 Ketahanan Pangan	5 Perumahan	5 Lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam
6 Infrastruktur	6 Perencanaan Pembangunan	6 Inovasi dan kreativitas daerah bagi peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha	7 Perhubungan	
8 Energi	8 Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	9 Ketenagakerjaan	
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik	10 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi	11 Penanaman Modal	
	12 Kepemudaan dan Olah Raga	
	13 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
	14 Komunikasi dan Informatika	
	15 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah	
	16 Kepegawaian dan	
	17 Persandian Sosial Kebudayaan	

Adapun hal-hal yang melatarbelakangi penetapan prioritas pembangunan untuk masing-masing prioritas adalah :

**1. Air Bersih**

Penyediaan dan perluasan jangkauan pelayanan air bersih bagi setiap lini masyarakat merupakan kewajiban pemerintah. Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia. Prioritas penyediaan air bersih dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap unsur masyarakat memperoleh haknya untuk hidup yang lebih bersih dan sehat. Diversifikasi investasi daerah dan lainnya diharapkan juga meningkat dengan adanya jaminan kepastian ketersediaan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar setiap umat manusia dalam menjalankan roda kehidupannya.

**2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**

Perbaikan manajemen pemerintahan berikut aparatur penyelenggara pemerintahan. Hal ini dimaksudkan untuk menggeser paradigma lama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar tercipta pondasi komitmen dan konsistensi yang kuat bagi implementasi dan upaya pencapaian pelayanan publik prima.

### **3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Peningkatan IPM mencakup tiga indikator penting yang sangat mendasar yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Indikator ini saling mempengaruhi untuk mengukur tingkat kemandirian masyarakat agar menjadi lebih sejahtera.

### **4. Infrastruktur dan Sarana Perkotaan**

Kuantitas infrastruktur daerah yang berkualitas menjadi prioritas dalam peningkatan akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin meluasnya infrastruktur yang handal maka diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Singkawang semakin rata.

### **5. Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumberdaya Alam**

Posisi dan kekayaan sumberdaya alam yang ada di wilayah administratif Singkawang merupakan anugerah yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Keunggulan ini tentunya menjadi prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang dengan menuangkan konsep-konsep pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan mitigasi bencana secara tepat dan akurat. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif akan berpengaruh positif dalam menciptakan iklim Singkawang yang lebih nyaman.

### **6. Inovasi dan Kreativitas Daerah Bagi Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Saing Daerah**

Dinamika tantangan globalisasi merupakan bagian yang tak terelakkan dalam mewujudkan cita-cita mensejahterakan masyarakat. Ide-ide kreatif berbasis kekayaan intelektual baik yang bersumber dari aparatur sebagai pelayan publik dan masyarakat. Kota Singkawang diharapkan akan lebih bersinergi membentuk mata rantai yang tidak pernah putus untuk menciptakan Kota Singkawang yang lebih baik.

#### 7.3.1. Kebijakan Umum Mewujudkan **Prioritas Air Bersih**, diagendakan untuk :

1. Peningkatan cakupan dan perluasan jangkauan infrastruktur penyediaan air bersih baik bagi masyarakat maupun dunia usaha;
2. Peningkatan efektivitas perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan air bersih;
3. Perbaikan kinerja dan pengawasan pelayanan penyediaan air bersih oleh PDAM agar mampu secara profesional, transparan dan akuntabel mendukung prioritas Pemerintah Kota Singkawang;

4. Peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung gerakan hemat air agar dapat menyediakan fasilitas air bersih siap minum di sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan tempat-tempat publik strategis.
- 7.3.2. Kebijakan Umum Mewujudkan **Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**, diagendakan untuk :
1. Peningkatan penerapan reformasi birokrasi melalui penguatan manajemen baru tata kelola pemerintahan yang baik (*New Management of Good Governance*) yang lebih mengedepankan *outcome/result* daripada *output* melalui perumusan kebijakan daerah yang mengatur secara terarah, terukur dan tepat manfaat hubungan antar organisasi dan lembaga berikut jajaran aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dari berbagai tingkatan agar jauh lebih efisien, efektif, tidak tumpang tindih dan komprehensif dalam mencerminkan kinerja (*performance*) penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang profesional, transparan, akuntabel dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik melalui perlindungan dan kepastian hukum yang lebih *pro poor*, *pro environment* dan *pro job*;
  3. Peningkatan perbaikan mekanisme, prosedur dan tata laksana yang lebih singkat, murah, mudah dan terjangkau kepada masyarakat;
  4. Optimalisasi kualitas dan intensitas keterbukaan publik terhadap kinerja pelayanan pemerintahan dan pembangunan dengan penerapan *integrated on-line system* agar tingkat transparansi pelayanan pemerintahan dapat dicapai secara maksimal dan akuntabel.
- 7.3.3. Kebijakan Umum Mewujudkan **Prioritas Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**, diagendakan untuk :
1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Singkawang;
  2. Peningkatan kepastian dukungan Pemerintah Kota Singkawang dalam menciptakan kebijakan yang kondusif untuk meningkatkan IPM Kota Singkawang;
  3. Peningkatan kualitas pembangunan manusia agar lebih sejahtera, lebih mandiri, lebih inovatif dan lebih kompetitif dalam menghadapi tantangan globalisasi.
- 7.3.4. Kebijakan Umum Mewujudkan Prioritas **Infrastruktur dan Sarana Perkotaan**, diagendakan untuk :
1. Peningkatan kapasitas Pemerintah Kota Singkawang untuk memberikan pelayanan jasa infrastruktur utama yang berhubungan dengan sarana ketersediaan sumberdaya air, pengelolaan sampah, pendayagunaan energi, pengelolaan transportasi, penyediaan pangan, rumah yang layak, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, rekreasi dan

olahraga, agar segala kebutuhan dasar masyarakat Kota Singkawang dapat terpenuhi;

2. Peningkatan kelengkapan ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota berkualitas secara seimbang dan harmonis mendukung terciptanya Kota Singkawang yang layak huni, aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sebagai tempat tinggal, tempat berusaha dan tempat berkarya.

7.3.5. Kebijakan Umum Mewujudkan Prioritas Kebijakan Umum Mewujudkan **Prioritas Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumberdaya Alam**, diagendakan untuk :

1. Peningkatan pola pokok distribusi peruntukan wilayah, ruang lindung dan ruang budidaya secara serasi dan seimbang untuk menghasilkan lingkungan perkotaan yang ekologis;
2. Peningkatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang konsisten dalam penerapan sistem pembangunan berkelanjutan (*sustainable environment development*);
3. Peningkatan stabilitas dan ketahanan lingkungan Kota Singkawang agar bebas bencana dan adaptif dalam menghadapi segala tantangan alam.

7.3.6 Kebijakan Umum Mewujudkan **Prioritas Inovasi dan Kreativitas Daerah Bagi Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Saing Daerah**, diagendakan untuk :

1. Peningkatan penumbuhkembangan *entrepreneurship*, kreatifitas, dan inovasi daerah berbasis potensi unggulan daerah yang mampu bersaing di pasar lokal, regional dan nasional;
2. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mendukung Kota Singkawang yang lebih berkualitas dan kondusif sebagai motor penggerak perekonomian kota dan *hinterland*-nya.
3. Peningkatan kemandirian daerah dalam mendayagunakan setiap potensi yang dimiliki dengan tetap memperhatikan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kenyamanan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Peningkatan implementasi inovasi daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pencapaian 6 prioritas pembangunan daerah.



#### **7.4. Program Pembangunan Mewujudkan Prioritas Pembangunan Daerah**

Adapun program-program yang ditetapkan untuk mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan daerah yaitu :

7.4.1. Program Pembangunan Mewujudkan **Prioritas Air Bersih** adalah sebagai berikut :

1. Program Revitalisasi Penyediaan Air Bersih;
2. Program Perencanaan Percepatan Penyediaan Air Bersih;
3. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku;
4. Program Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
5. Program Peningkatan Kinerja Kemitraan Penyediaan Air Bersih;

7.4.2. Program Pembangunan Mewujudkan **Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola** adalah sebagai berikut :

1. Program Profesionalisasi Aparatur;
2. Program Pengusulan Formasi dan Sistem Seleksi Sumberdaya Aparatur;
3. Program Penguatan Sistem Disiplin dan Etika PNS;
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
6. Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi;
7. Program Pengembangan Kinerja Organisasi;
8. Program Penguatan Ketatalaksanaan Organisasi;
9. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
10. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Produk Hukum Daerah;
11. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
12. Program Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (*Good Governance*);
13. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan;
14. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan;
15. Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Rumah sakit Daerah;
16. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pekerjaan Umum;
17. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perumahan Rakyat;
18. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perhubungan;
19. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Komunikasi dan Informatika;
20. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup;
21. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan;

22. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
23. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
24. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Sosial ;
25. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Ketenagakerjaan;
26. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal;
27. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kesenian;
28. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Ketahanan Pangan;
29. Program Evaluasi Kinerja Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum;
30. Program Evaluasi Kinerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
31. Program Evaluasi Kinerja Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
32. Program Evaluasi Kinerja Pengentasan Pengangguran dan Kemiskinan;

7.4.3. Program Pembangunan Mewujudkan **Prioritas Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan;
2. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan;
3. Program Pengembangan Karakter Siswa Pendidikan Dasar;
4. Program Pengembangan Karakter Siswa Pendidikan Menengah;
5. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar;
6. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah;
7. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal;
8. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
9. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
10. Program Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
11. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
12. Program Peningkatan Layanan Pendidikan Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh;
13. Program Peningkatan Layanan Kesehatan Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh;
14. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;

7.4.4. Program Pembangunan Mewujudkan **Prioritas Infrastruktur dan Sarana Perkotaan** adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Bidang Pekerjaan Umum;
2. Program Perencanaan Bidang Transportasi;
3. Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Transportasi Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh;

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur Pendidikan;
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur Kesehatan;
6. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh;
7. Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman;
8. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Pendidikan;
9. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Kesehatan;
10. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
11. Program Revitalisasi Pasar Tradisional;
12. Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan;
13. Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perdagangan Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh.

7.4.5. Program Pembangunan Mewujudkan **Prioritas Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumberdaya Alam** adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Banjir;
2. Program Pemanfaatan Ruang;
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
4. Program *Go Clean and Green City* (Kotaku Bersih dan Hijau);
5. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER);
6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
8. Program Pengembangan Kompetensi Jasa Lingkungan Hidup.

7.4.6. Program Pembangunan Mewujudkan **Prioritas Inovasi dan Kreativitas Daerah Bagi Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Saing Daerah** adalah sebagai berikut : :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Program Perencanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
3. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perdagangan;
4. Program Pengembangan Agribisnis Daerah;
5. Program Pengembangan Industri Agribisnis;
6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
7. Program Pengembangan Sistem Informasi/ Database Infrastruktur Daerah;

8. Program Pengembangan Sistem Informasi/ Database Permukiman;
9. Program Pengembangan Sistem Informasi/ Database Penataan Ruang;
10. Program Sistem Inovasi Daerah Penyediaan Air Bersih;
11. Program Inovasi Daerah Pengendalian Banjir;
12. Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah Pengembangan Sistem Transportasi Terpadu;
13. Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
14. Program Pengembangan Sistem Informasi Terpadu/Database Transportasi Terpadu;
15. Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Government (*e-Gov*)
16. Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penganggaran Pembangunan;
17. Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah;
18. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan;
19. Program Pengembangan Kemitraan Bidang Pendidikan;
20. Program Pengembangan Kemitraan Bidang Kesehatan ;
21. Program Pengembangan Kemitraan Bidang Perdagangan;
22. Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
23. Program Pengembangan Inovasi Daerah Dalam Pelayanan Perpustakaan;
24. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.

**Tabel 7.2.**

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Pembangunan**

Misi Kesatu : Memfasilitasi aktifitas ibadah masyarakat terutama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
1 Meningkatkan kualitas akhlak setiap individu masyarakat Kota Singkawang agar berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama dan kepercayaannya	1 Terwujudnya masyarakat yang sehat mental dan spiritual	1 Memberikan ruang gerak dan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing masyarakat	1 Peningkatan kesadaran dan implementasi kehidupan beragama masyarakat melalui pemberian dukungan pelaksanaan ibadah dan fasilitasi pembangunan sarana prasana ibadah masyarakat	1 Persentase keanekaragaman aktifitas masyarakat bernuansa agama mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	1 Hibah dan Bantuan Sosial	1 Non Urusan	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
				2 Persentase peningkatan penerimaan Tahunan dana umat beragama mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase jumlah masyarakat dengan permasalahan sosial dan kejiwaan mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				4 Persentase masyarakat yang menuaikan ibadahnya tanpa kendala mencapai 100% setiap Tahunnya hingga Tahun 2017	100	100			
				5 Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan MTQ di tingkat kecamatan mencapai 100% setiap Tahunnya hingga Tahun 2017	100	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				6 Persentase partisipasi umat kristen dalam PESPARAWI mencapai 100% setiap Tahunnya hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				7 Persentase peningkatan keterlibatan umat Khong Hu Chu dalam perayaan Cap Go Meh mencapai 100% setiap Tahunnya hingga Tahun 2017	100	100			
				8 Cakupan bantuan bagi penyuluh agama mencapai 50% setiap Tahunnya hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				9 Cakupan sarana ibadah yang diberi bantuan/hibah mencapai 50% setiap Tahunnya hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
		2 Menumbuhkan kembangkan kembali ketahanan keluarga yang didasarkan pada nilai-nilai luhur agama	1 Peningkatan keterlibatan orangtua, masyarakat serta pemerintah dalam menciptakan ketahanan keluarga sejahtera dan berakhlak mulia	1 Persentase penurunan angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak dibawah usia 17 Tahun mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80	2 Program Pengembangan Kebijakan Daerah Perlindungan Keluarga dan Anak	1 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1 SKPD Pengampu Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
				2 Persentase peningkatan angka prestasi anak berdasarkan golongan usia mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				3 Persentase anak usia sekolah yang mengenyam pendidikan 12 Tahun mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				4 Persentase peningkatan aktivitas keagamaan pemuda mencapai 70% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	70			
			2 Peningkatan citra aparaturnya Pemerintah Kota Singkawang yang agamis dan berakhlak mulia	1 Persentase penurunan permasalahan pernikahan aparaturnya mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	3 Program Pembinaan dan Pengembangan Imtaq Aparatur	1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
				2 Persentase penurunan kasus tindakan kriminal yang dilakukan aparaturnya mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
2 Menciptakan kualitas kehidupan beragama dan sosial masyarakat yang lebih baik	2 Menurunnya angka konflik antar agama dan antar etnis	1 Meningkatkan keterlibatan masyarakat beda agama dan beda etnis pada forum-forum komunikasi tingkat kota	1 Pengembangan forum dialogis antar komponen agama dan etnis masyarakat	1 Persentase peningkatan jumlah forum komunikasi antar agama aktif mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60	4 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1 SKPD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
				2 Persentase peningkatan jumlah forum komunikasi antar-etnis aktif mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				3 Persentase konflik antar agama yang ditangani mencapai 100% setiap Tahunnya hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Persentase penurunan jumlah tempat wisata malam yang beroperasi pada bulan ramadhan mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80			
				5 Persentase konflik antaretnis yang ditangani mencapai 100% setiap Tahunnya	Belum tersedia data	100			



**Tabel 7.3.**

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Pembangunan**

Misi Kedua : Memelihara, membangun dan menata fasilitas umum yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat (fasilitasi pendidikan, kesehatan, pasar dan air bersih)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
1 Memastikan fasilitas infrastruktur pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang handal bagi masyarakat	1 Terwujudnya infrastruktur pendidikan yang berkualitas dalam meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan efisien bagi kesejahteraan hidup rakyat	1 Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana infrastruktur pendidikan	1 Pengendalian kualitas dan kuantitas infrastruktur pendidikan	1 Persentase gedung sekolah SD/MI dalam kondisi baik mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1 Urusan Wajib Pendidikan	1 SKPD Pengampu Urusan Pendidikan
				2 Persentase gedung sekolah SMP/Mts dalam kondisi baik mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase ruang belajar dan kelas gedung sekolah SD/MI dalam kondisi baik mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				4 Persentase ruang belajar dan kelas gedung sekolah SMP/Mts dalam kondisi baik mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				5 Rasio jumlah gedung sekolah SD/MI terhadap jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun mencapai 9 pada Tahun 2017	4.09	9			
				6 Rasio jumlah gedung sekolah SMP/MTs terhadap jumlah penduduk usia 12 - 15 tahun mencapai 8 pada Tahun 2017	3.63	8			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				7 Rasio jumlah gedung sekolah tingkat SD/MI berjarak 5 Km dalam 1 kecamatan mencapai 5 pada Tahun 2017	Belum tersedia data	5			
				8 Rasio jumlah gedung sekolah tingkat SMP/MTs berjarak 5 Km dalam 1 kecamatan mencapai 2 pada Tahun 2017	Belum tersedia data	2			
				9 APK SD/MI/Paket A mencapai 100% pada Tahun 2017	113.3	100			
				10 APK SMP/MI/Paket B mencapai 100% pada Tahun 2017	91.09	100			
				11 APM SD/MI/Paket A mencapai 100% pada Tahun 2017	91.76	100			
				12 APM SMP/MTs/Paket B mencapai 67.34 pada Tahun 2017	58.09	67.34			
				1 Persentase gedung sekolah SMA/ MA/ SMK dalam kondisi baik mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80	2 Program Pendidikan Menengah	1 Urusan Wajib Pendidikan	1 SKPD Pengampu Urusan Pendidikan
				2 Rasio jumlah gedung sekolah SMA/ MA/ SMK terhadap jumlah penduduk usia 15 - 18 tahun mencapai 8 pada Tahun 2017	2.98	8			
				3 Rasio jumlah gedung sekolah tingkat SMA/ MA berjarak 12 Km dalam 1 kecamatan mencapai nilai 2 pada Tahun 2017	Belum tersedia data	2			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 APK SMA/ SMK/ MA/ Paket C mencapai 100 pada Tahun 2017	79.77	100			
				5 APM SMA/ SMK/ MA/Paket C mencapai 69 pada Tahun 2017	59.52	69			
				1 Persentase gedung sekolah TKLB/ SDLB/ SMPLB/ SMALB dalam kondi- si baik mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60	3 Program Pendi- kan Luar Biasa	1 Urusan Wajib Pen- didikan	1 SKPD Pe- ngampu Urusan Pen- didikan
				2 Rasio ketersediaan jumlah gedung seko- lah TKLB terhadap jumlah penduduk usia 4 - 5 tahun men- capai 0.11 pada Ta- hun 2017	0.13	0.11			
				3 Rasio ketersediaan jumlah gedung seko- lah SDLB terhadap jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun mencapai 0.46 pada Tahun 2017	0.56	0.46			
				4 Rasio ketersediaan jumlah gedung seko- lah SMPLB terhadap jumlah penduduk usia 12 - 15 tahun mencapai 0.27 pada Tahun 2017	0.33	0.27			
				5 Rasio ketersediaan jumlah gedung seko- lah SMALB terhadap jumlah penduduk usia 15 - 18 tahun mencapai 0.17 pada Tahun 2017	0.21	0.17			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				1 Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan mencapai 100% setiap tahunnya 2 Usia pakai prasarana dan sarana pendidikan mencapai 5 tahun	Belum tersedia data	100	4 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Pendidikan	1 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	1 SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan
			2 Penataan jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih serta air limbah infrastruktur pendidikan secara lebih efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan	1 Persentase kelengkapan sarana penunjang gedung PAUD dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017 2 Persentase kelengkapan sarana penunjang gedung TK dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017 3 Persentase kelengkapan sarana penunjang gedung SMP/MTs dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017 4 Persentase kelengkapan sarana penunjang gedung SMA/MA/SMK dalam kondisi baik mencapai 70% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60	5 Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur Pendidikan	1 Urusan Wajib Pendidikan	1 SKPD Pengampu Urusan Pendidikan
					Belum tersedia data	60			
					Belum tersedia data	60			
					Belum tersedia data	70			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				5 Persentase kelengkapan sarana penunjang gedung SLB/SDLB/SMPLB/SMALB dalam kondisi baik mencapai 30% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	30			
				6 Usia pakai kelengkapan sarana penunjang gedung PAUD menjadi 5 tahun	Belum tersedia data	5 Tahun			
				7 Usia pakai kelengkapan sarana penunjang gedung TK menjadi 5 tahun	Belum tersedia data	5 Tahun			
				8 Usia pakai kelengkapan sarana penunjang gedung SD/MI menjadi 5 tahun	Belum tersedia data	5 Tahun			
				9 Usia pakai kelengkapan sarana penunjang gedung SMP/MTs menjadi 5 tahun	Belum tersedia data	5 Tahun			
				10 Usia pakai kelengkapan sarana penunjang gedung SMA/SMK/ MA menjadi 5 tahun	Belum tersedia data	5 Tahun			
				11 Usia pakai kelengkapan sarana penunjang gedung SLB/SDLB/ SMPLB/SMALB menjadi 5 tahun	Belum tersedia data	5 Tahun			
		2 Mengintegrasikan dan mengembangkan perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur pendidikan dengan rencana pembangu-	1 Percepatan dan peningkatan keterpaduan perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur	1 Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan mencapai 100% setiap tahunnya	Belum tersedia data	100	6 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan	1 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	1 SKPD Penanggung Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
		nan tingkat pu- sat, provinsi dan kota	pendidikan antar pusat, provinsi, dan kota	<p>2 Persentase kese- suaian alokasi DAK Bidang Pendidikan dalam pemenuhan kebutuhan infra- struktur pendidikan mencapai 100% setiap tahunnya</p> <p>3 Persentase rencana induk/ aksi/ peneli- tian/ kajian/inovasi daerah bidang infra- struktur pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan arah pencapaian visi Kota Singkawang mencapai 50% pada Tahun 2017</p> <p>4 Rata-rata persentase anggaran pendidikan dalam APBD Kota Singkawang mencapai minimal 25% setiap tahunnya</p> <p>5 Persentase alokasi anggaran bidang in- frastruktur pendidi- kan Pemerintah Kota Singkawang per kapi- ta per tahun menca- pai 20%</p>	<p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p> <p>25</p> <p>Belum tersedia data</p>	<p>100</p> <p>50</p> <p>25</p> <p>20</p>			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
			2 Pengembangan kemitraan sektor swasta dalam pembangunan bidang pendidikan menuju Singkawang sebagai pusat jasa pendidikan	1 Persentase peningkatan jumlah bangunan lembaga pendidikan berbasis potensi Kota Singkawang mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60	7 Program Pengembangan Kemitraan Bidang Pendidikan	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
				2 Persentase peningkatan kerjasama pembangunan infrastruktur pendidikan oleh lembaga swasta mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
	2 Terwujudnya infrastruktur kesehatan yang berkualitas dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat	1 Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana infrastruktur kesehatan	1 Pengendalian kualitas dan kuantitas infrastruktur kesehatan	1 Persentase prasarana dan sarana bangunan rumahsakit daerah dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60	8 Program Pembangunan Infrastruktur Kesehatan	1 Urusan Wajib Kesehatan	1 SKPD Pengampu Urusan Kesehatan
				2 Usia pakai prasarana dan sarana rumahsakit daerah menjadi 5 tahun	Belum tersedia data	5 Tahun			
				3 Persentase kelengkapan prasarana dan sarana rumah sakit dalam kondisi baik mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				1 Persentase sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya dalam kondisi baik mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80	9 Program Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	1 Urusan Wajib Kesehatan	1 SKPD Pengampu Urusan Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				2 Usia pakai prasarana dan sarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya menjadi 5 tahun	Belum tersedia data	5 Tahun			
				3 Persentase kelengkapan prasarana dan sarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80			
				1 Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan mencapai 100% setiap tahunnya	Belum tersedia data	100	10 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Kesehatan	1 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	1 SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan
				2 Usia pakai prasarana dan sarana kesehatan menjadi 5 tahun	Belum tersedia data	5 Tahun			
			2 Penataan jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih serta air limbah infrastruktur kesehatan secara lebih efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan	1 Persentase jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih, air limbah dan limbah medis rumahsakit dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60	11 Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kesehatan	1 Urusan Wajib Kesehatan	1 SKPD Pengampu Urusan Kesehatan
				2 Persentase jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih, air limbah dan limbah medis puskesmas/ puskesmas pembantu dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				3 Usia pakai jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih, air limbah dan limbah medis rumahsakit dalam kondisi baik menjadi 5 tahun 4 Usia pakai jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih, air limbah dan limbah medis puskesmas/ puskesmas pembantu dalam kondisi baik menjadi 5 tahun	Belum tersedia data  Belum tersedia data	5 Tahun  5 Tahun			
		2 Mensinkronisasikan perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur kesehatan dengan rencana pembangunan tingkat pusat, provinsi, dan kota	1 Percepatan dan peningkatan keterpaduan perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur kesehatan antar pusat, provinsi, dan daerah	1 Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan mencapai 100% setiap tahunnya 2 Persentase kesesuaian alokasi DAK Bidang kesehatan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur kesehatan mencapai 100% setiap tahunnya 3 Persentase rencana induk/ aksi daerah/ penelitian/ kajian/ inovasi daerah bidang infrastruktur pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan arah pencapaian visi Kota Singkawang mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data  Belum tersedia data  Belum tersedia data	100  100  60	12 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan	1 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	1 SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Persentase alokasi anggaran bidang kesehatan Pemerintah Kota Singkawang per kapita per tahun mencapai 20%	Belum tersedia data	20			
				5 Rasio rumah sakit daerah per 1000 penduduk mencapai 0.003 pada Tahun 2017	0.004	0.003			
				6 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk mencapai 0.16 pada Tahun 2017	0.18	0.16			
			2 Pengembangan kemitraan sektor swasta dalam pembangunan bidang kesehatan menuju Kota Singkawang sebagai pusat jasa kesehatan	1 Persentase peningkatan jumlah bangunan lembaga kesehatan berbasis potensi Kota Singkawang mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40	13 Program Pengembangan Kemitraan Bidang Kesehatan	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
				2 Persentase peningkatan kerjasama pembangunan infrastruktur kesehatan oleh lembaga swasta mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				3 Rasio rumahsakit swasta/ Non Pemerintah per 1000 penduduk mencapai 0.020 pada Tahun 2017	0.021	0.020			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab			
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD						
2 Mewujudkan fasilitas infrastruktur pasar yang representatif bagi aktifitas perdagangan masyarakat	1 Terwujudnya infrastruktur pasar yang berkualitas dalam mendukung tercapainya Kota Singkawang sebagai pusat perdagangan	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pasar tradisional yang bersih tertata, aman dan nyaman	1 Pengendalian kuantitas dan kualitas infrastruktur pasar tradisional yang letaknya terpisah dengan upaya relokasi dan revitalisasi sarana dan prasarana perdagangan agar lebih tertata, rapi, dan bersih	1 Persentase prasarana dan sarana bangunan pasar tradisional dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017	20	60	14 Program Revitalisasi Pasar Tradisional	1 Urusan Pilihan Perdagangan	1 SKPD Pengampu Urusan Perdagangan			
				2 Usia pakai prasarana dan sarana pasar tradisional menjadi 5 tahun	Belum tersedia data	5 Tahun						
				3 Persentase kelengkapan prasarana dan sarana pasar tradisional dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60						
							1 Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur perdagangan mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	15 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Perdagangan	1 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	1 SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan
							2 Usia pakai prasarana dan sarana perdagangan menjadi 5 tahun	Belum tersedia data	5 Tahun			
							2 Penataan jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih serta air limbah infrastruktur perekonomian secara lebih efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan	1 Persentase kelengkapan sarana penunjang pasar tradisional dalam kondisi baik mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	16 Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan	1 Urusan Pilihan Perdagangan
			2 Usia pakai kelengkapan sarana penunjang pasar tradisional dalam kondisi baik menjadi 5 tahun	Belum tersedia data	5 Tahun							

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
		2 Mensinkronisasi- kan perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur perdagangan dengan rencana pembangunan tingkat pusat, provinsi, dan kota	1 Percepatan dan pening- katan keter- paduan pe- rencanaan dan pem- biayaan pem- bangunan infrastruktur perdagangan antara pusat, provinsi dan kota	1 Persentase kese- suaian perencanaan dan penganggaran terhadap kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur perda- gangan mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60	17 Program Perenca- naan Pembangu- nan Bidang Per- dagangan	1 Urusan Wajib Pe- rencanaan Pemba- ngunan	1 SKPD Pe- ngampu Urusan Pe- rencanaan Pembangu- nan
	2 Persentase kese- suaian alokasi DAK Bidang perdagangan dalam pemenuhan kebutuhan infra- struktur perdagangan mencapai 60% pada Tahun 2017			Belum tersedia data	60				
					3 Persentase rencana induk/ aksi daerah/ penelitian/ kajian/ inovasi daerah bi- dang infrastruktur pendidikan yang se- suai dengan kebutu- han dan arah penca- paian visi Kota Sing- kawang mencapai 20% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	20		
			2 Pengemban- gan kemi- traan sektor swasta dalam pembangu- nan bidang perdagangan menuju Kota Singkawang sebagai pusat jasa perda- gangan	1 Persentase peningka- tan kerjasama pem- bangunan infrastruk- tur perdagangan oleh lembaga swasta men- capai 40%	Belum tersedia data	40	18 Program Pengem- bangan Kemitraan Bidang Perdaga- ngan	1 Urusan Wajib Oto- nomi Dae- rah, Peme- rintahan Umum, Admini- strasi Keu- angan Dae- rah, Pe- rangkat Daerah, Kepega- waian dan Persandian	1 SKPD Pe- ngampu Urusan Otonomi Daerah, Pe- merintahan Umum, Ad- ministrasi Keuangan Daerah, Pe- rangkat Dae- rah, Kepega- waian dan Persandian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab		
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD					
3 Mewujudkan ketersediaan air bersih bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Singkawang dan dunia usaha	1 Tercapainya cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Singkawang	1 Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas penyediaan air bersih yang terintegrasi dan terpadu	1 Percepatan perluasan cakupan penyediaan air bersih berkualitas	1 Persentase peningkatan cakupan pelayanan penyediaan air bersih mencapai 70% pada Tahun 2017	33	70	19 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	1 Urusan Wajib Pekerjaan Umum	1 SKPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum		
				2 Persentase air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100					
				3 Persentase rumah-tangga pengguna air bersih dalam satu kecamatan mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80					
				4 Persentase rumah-tangga pengguna air bersih mencapai 90% pada Tahun 2017	26.04	90					
				5 Persentase peningkatan cakupan rumah-tangga berpenghasilan rendah yang memperoleh akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80					
				1 Persentase peningkatan cakupan pelayanan air bersih siap minum mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40	20 Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah Penyediaan Air Bersih			1 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	1 SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan
				2 Persentase sekolah yang memperoleh akses air bersih siap minum mencapai 20% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	20					

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				<p>3 Persentase puskesmas yang memperoleh akses air bersih siap minum mencapai 20% pada Tahun 2017</p> <p>4 Persentase tempat/taman kota yang memperoleh akses air bersih siap minum mencapai 20% pada Tahun 2017</p>	Belum tersedia data	20			
			2 Revitalisasi kualitas, kuantitas dan kontinuitas air bersih bagi masyarakat	<p>1 Angka pencemaran fisik, kimiawi, bakteriologis dan radioaktif mencapai 0 atau bebas pencemaran (<i>Zero pollutant</i>) pada Tahun 2017</p> <p>2 Debit air bersih yang disalurkan kepada masyarakat mencapai 150 liter/org/ hari selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu pada Tahun 2017</p> <p>3 Rasio kontinuitas air bersih yang disalurkan kepada masyarakat mencapai 24 jam per hari selama 7 hari perminggu pada Tahun 2017</p>	Belum tersedia data	Zero Pollutant	21 Program Revitalisasi Penyediaan Air Bersih	1 Urusan Wajib Pekerjaan Umum	1 SKPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum
					Belum tersedia data	150 liter/org/ hari			
					Belum tersedia data	24/7			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
			3 Perbaikan kinerja PDAM Kota Singkawang	<p>1 Persentase peningkatan kerjasama revitalisasi pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih mencapai 80% pada Tahun 2017</p> <p>2 Konsumsi Air Rata – rata mencapai 22 m<sup>3</sup>/bulan pada Tahun 2017</p> <p>3 Tingkat kebocoran air menurun hingga mencapai 28% pada Tahun 2017</p> <p>4 Pegawai per 1000 Pelanggan mencapai 7 pada Tahun 2017</p>	Belum tersedia data	80	22 Program Peningkatan Kinerja Kemitraan Penyediaan Air Bersih	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
		2 Mengintegrasikan perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur perluasan akses air bersih dengan rencana penyediaan air bersih bagi masyarakat di tingkat pusat, provinsi, dan kota	1 Pengintegrasian keterpaduan perencanaan dan penganggaran revitalisasi pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih	<p>1 Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur penyediaan air bersih mencapai 100% setiap tahunnya</p> <p>2 Persentase kesesuaian alokasi DAK Bidang penyediaan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur revitalisasi penyediaan air bersih mencapai 100% setiap tahunnya</p>	Belum tersedia data	100	23 Program Perencanaan Percepatan Penyediaan Air Bersih	1 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	1 SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				3 Persentase rencana induk/ aksi daerah/ penelitian/ kajian/ inovasi daerah bidang infrastruktur penyediaan air bersih yang sesuai dengan kebutuhan dan arah pencapaian visi Kota Singkawang mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
4 Menciptakan sinergisitas dan integrasi pengelolaan infrastruktur daerah serta efektifitas pemanfaatannya agar memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi	1 Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas dalam mewujudkan Kota Singkawang sebagai pusat jasa, perdagangan, dan agroindustri	1 Mengembangkan sistem infrastruktur dasar perkotaan secara terintegrasi dan tidak tumpang tindih	1 Pengendalian kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	<p>1 Persentase jalan dan jembatan Kota Singkawang dalam kondisi baik mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>2 Rasio panjang jalan dilalui roda 4 (jalan nasional, provinsi dan kota) mencapai 1 pada Tahun 2017</p> <p>3 Persentase pembangunan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (minimal dilalui roda 4) mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>4 Persentase panjang jalan Kota Singkawang dalam kondisi baik (&gt; 40 Km/Jam) mencapai 65% pada Tahun 2017</p>	Belum tersedia data	100	24 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1 Urusan Wajib Pekerjaan Umum	1 SKPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum
					0.21	1.00			
					23	100			
					44.23	65			



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				5 Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 M) mencapai 25% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	25			
				6 Cakupan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan yang sesuai kebutuhan mobilitas masyarakat mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				1 Usia pakai jalan dan jembatan mencapai 5 tahun	Belum tersedia data	5 Tahun	25 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1 Urusan Wajib Pekerjaan Umum	1 SKPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum
			2 Usia pakai jalan di lingkungan kecamatan 5 tahun	Belum tersedia data	5 Tahun				
			3 Usia pakai jembatan di lingkungan kecamatan 5 tahun	Belum tersedia data	5 Tahun				
				1 Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar menurun hingga mencapai 30% pada Tahun 2017	50	30	26 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	1 Urusan Wajib Pekerjaan Umum	1 SKPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum
			2 Persentase penerangan jalan umum dalam kondisi baik mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100				
			3 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017	40.88	60				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Proporsi jembatan dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017	40.88	60			
				1 Usia pakai prasarana dan sarana kebinamargaan mencapai 5 tahun	Belum tersedia data	5 Tahun	27 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebina- margaan	1 Urusan Wajib Pe- kerjaan Umum	1 SKPD Pe- ngampu Urusan Pe- kerjaan Umum
				2 Usia pakai alat-alat kebinamargaan men- capai 5 tahun	Belum tersedia data	5 Tahun			
				1 Persentase kese- suaian perencanaan dan penganggaran terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan mencapai 100 % se- tiap tahunnya	Belum tersedia data	100	28 Program Pengen- dalian dan Evalu- asi Pembangunan Jalan dan Jemba- tan	1 Urusan Wajib Pe- rencanaan Pembana- ngunan	1 SKPD Pe- ngampu Urusan Pe- rencanaan Pembangu- nan
				2 Persentase panjang jalan yang memudah- kan masyarakat per individu melakukan perjalanan mencapai 100 % pada Tahun 2017	23	100			
				3 Persentase jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat men- capai 100 % setiap tahunnya	100	100			
				4 Persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman mencapai 100 % se- tiap tahunnya	100	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				5 Persentase jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan dengan kecepatan yang aman mencapai 100 % setiap tahunnya	100	100			
			2 Pengendalian kuantitas dan kualitas jaringan drainase, irigasi dan jaringan pengairan lainnya	1 Persentase jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dalam kondisi baik mencapai 100 % pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	29 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	1 Urusan Wajib Pekerjaan Umum	1 SKPD Pengampu Urusan Wajib Pekerjaan Umum
			2 Usia pakai jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya mencapai 5 tahun	Belum tersedia data	5 Tahun				
			3 Rasio jaringan Irigasi menjadi 1 pada Tahun 2017	0.12	1				
			4 Luas irigasi Kota Singkawang dalam kondisi baik mencapai 25% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	25				
			5 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat mencapai 95% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	95				
			6 Persentase air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada mencapai 100% pada Tahun 2017	20	100				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
			3 Peningkatan manajemen pengelolaan infrastruktur penyediaan air bersih, air minum dan air limbah	<p>1 Persentase penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>2 Persentase penyediaan prasarana dan sarana air limbah perkotaan mencapai 50% pada Tahun 2017</p> <p>3 Persentase pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah mencapai 50% pada Tahun 2017</p> <p>4 Persentase pengembangan teknik distribusi air minum mencapai 50% pada Tahun 2017</p>	30	100	30 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air limbah	1 Urusan Wajib Pekerjaan Umum	1 SKPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum
				<p>1 Cakupan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada sistem on site di kecamatan untuk perbaikan kesehatan masyarakat setempat mencapai 5 kecamatan pada Tahun 2017</p> <p>2 Cakupan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada sistem off site di perkotaan untuk perbaikan kualitas pengelolaan air limbah masyarakat mencapai 40% dari luas wilayah perkotaan pada Tahun 2017</p>	Belum tersedia data	5	31 Program Pengelolaan Limbah Perkotaan	Urusan Wajib Perumahan	SKPD Pengampu Urusan Perumahan
					Belum tersedia data	40			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
			4 Pengendalian kuantitas dan kualitas infrastruktur permukiman	<p>1 Persentase prasarana dan sarana permukiman dalam kondisi baik mencapai 40% pada Tahun 2017</p> <p>2 Usia pakai prasarana dan sarana permukiman menjadi 10 tahun</p> <p>3 Cakupan ketersediaan rumah layak huni mencapai 70% pada Tahun 2017</p> <p>4 Rasio rumah layak huni mencapai 50% pada Tahun 2017</p> <p>5 Rasio permukiman layak huni mencapai 25% pada Tahun 2017</p> <p>6 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>7 Persentase rumah-tangga pengguna listrik mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>8 Lingkungan pemukiman kumuh menurun mencapai 5% pada Tahun 2017</p> <p>9 Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) mencapai 70% pada Tahun 2017</p>	<p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p> <p>61.49</p> <p>20.28</p> <p>Belum tersedia data</p> <p>75.27</p> <p>97.31</p> <p>Belum tersedia data</p> <p>57.69</p>	<p>40</p> <p>10 Tahun</p> <p>70</p> <p>50</p> <p>25</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>5</p> <p>70</p>	32 Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	1 Urusan Wajib Perumahan	1 SKPD Pengampu Urusan Perumahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				1 Persentase rumah tinggal bersanitasi mencapai 85 % pada Tahun 2017 2 Persentase luas lingkungan permukiman kumuh menurun mencapai 10% pada Tahun 2017	77.99	85	33 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	1 Urusan Wajib Perumahan	1 SKPD Pengampu Urusan Perumahan
			5 Pengendalian kuantitas dan kualitas infrastruktur bangunan milik pemerintah	1 Persentase prasarana dan sarana bangunan pemerintahan dalam kondisi baik mencapai 95% setiap tahunnya 2 Usia pakai prasarana dan sarana bangunan pemerintahan menjadi 5 tahun 3 Persentase kelengkapan prasarana dan sarana penunjang bangunan pemerintahan dalam kondisi baik mencapai 80% setiap tahunnya 4 Persentase ketersediaan fasilitas umum milik pemerintah yang dapat dinikmati masyarakat secara leluasa dan tanpa dipungut bayaran mencapai 90% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	95	34 Program Pembangunan Infrastruktur Bangunan Pemerintahan	1 Urusan Wajib Pekerjaan Umum	1 SKPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
	2 Terwujudnya sinergi antara perencanaan, pembiayaan dan pencapaian target pembangunan infrastruktur/ utilitas perkotaan	1 Mengintegrasikan dan mengembangkan perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah dengan rencana pembangunan tingkat pusat, provinsi dan kota	1 Percepatan dan peningkatan keterpaduan perencanaan dan pembiayaan pembangunan jalan dan jembatan antara pemerintah pusat, provinsi dan kota	<p>1 Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan kebutuhan ruang sosial publik mencapai 100% setiap tahunnya</p> <p>2 Persentase kesesuaian alokasi DAK Bidang pekerjaan umum dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah mencapai 100% setiap tahunnya</p> <p>3 Persentase rencana induk/ aksi daerah/ penelitian/kajian /inovasi daerah pembangunan infrastruktur daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan arah pencapaian visi Kota Singkawang mencapai 40% pada Tahun 2017</p>	<p>Belum tersedia data</p> <p>100</p> <p>Belum tersedia data</p> <p>100</p> <p>Belum tersedia data</p> <p>40</p>	35	Program Perencanaan Bidang Pekerjaan Umum	1 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	1 SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan
				1 Persentase perumusan kembali kebijakan ( <i>reformulation</i> ) peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah untuk memenuhi kebutuhan ruang sosial publik mencapai 100%	Belum tersedia data	100	36 Program Evaluasi Kinerja Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Pe-	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Pe-

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				<p>2 Persentase penyesuaian kebijakan (<i>policy adjustment</i>) pembangunan infrastruktur daerah mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>3 Persentase penyesuaian kebijakan bidang pekerjaan umum dengan aspirasi masyarakat mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>4 Cakupan penataan peraturan daerah bidang pekerjaan umum yang sesuai dengan pencapaian visi pembangunan Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017</p>	<p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>		<p>rangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</p>	<p>rangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</p>
		2 Melaksanakan inovasi pembangunan infrastruktur daerah	1 Penguasaan informasi dan teknologi pembangunan infrastruktur/ utilitas kota	<p>1 Persentase implementasi teknologi pembangunan dan pengembangan infrastruktur/ utilitas perkotaan berbasis ilmu pengetahuan inovatif mencapai 30% pada Tahun 2017</p> <p>2 Cakupan implementasi pengembangan (inovasi) infrastruktur daerah mencapai 40% pada Tahun 2017</p>	<p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p>	<p>30</p> <p>40</p>	37 Penguatan Sistem Inovasi Daerah Pengembangan Infrastruktur/ Utilitas Kota	1 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	1 SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				1 Persentase akurasi database jalan dan jembatan mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	38 Program Pengembangan Sistem Informasi/ Database Infrastruktur Daerah	1 Urusan Wajib Pekerjaan Umum	1 SKPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum
			2 Tingkat akurasi pengambilan kebijakan pembangunan jalan dan jembatan mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100				
			3 Persentase akurasi database drainase dan irigasi mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100				
			4 Tingkat akurasi pengambilan kebijakan pembangunan utilitas/fasilitas umum daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100				
				1 Persentase akurasi database permukiman perkotaan mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	39 Program Pengembangan Sistem Informasi/ Database Permukiman	1 Urusan Wajib Perumahan	1 SKPD Pengampu Urusan Perumahan
			2 Tingkat akurasi pengambilan kebijakan pembangunan permukiman mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				1 Persentase implementasi integrasi informasi geo spasial dan infrastruktur/utilitas perkotaan mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	40 Program Pengembangan Sistem Informasi/ Database Penataan Ruang	1 Urusan Wajib Penataan Ruang	1 SKPD Pengampu Urusan Penataan Ruang
				2 Persentase akurasi sistem informasi peruntukan dan pengendalian pemanfaatan ruang mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

**Tabel 7.4.**

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Pembangunan**

Misi Ketiga : Meningkatkan kemudahan usaha masyarakat berpenghasilan rendah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
1 Menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan taraf hidupnya	1 Terciptanya ekosistem yang kondusif bagi pengembangan produk-produk unggulan daerah berlandaskan ekonomi kerakyatan	1 Menghidupkan kembali (revitalisasi) peran koperasi terutama bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berbasis kinerja, profesional dan akuntabel	1 Penataan manajemen dan transparansi kinerja koperasi agar dapat berkompetisi secara sehat dan berkontribusi pada pembangunan daerah melalui dukungan penjaminan dan jangkauan kredit usaha rakyat	1 Persentase perumusan kembali kebijakan ( <i>reformulation</i> ) revitalisasi kredit usaha rakyat (KUR) yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	1 Program Evaluasi Kinerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
				2 Persentase perumusan kembali kebijakan ( <i>reformulation</i> ) pemberian subsidi pemerintah untuk peningkatan kinerja dan pemberdayaan koperasi mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase penyesuaian kebijakan ( <i>policy adjustment</i> ) mekanisme, prosedur dan penilaian koperasi dalam penyaluran modal dan kemudahan akses ke lembaga perbankan dan keuangan bagi koperasi mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Cakupan penataan peraturan perundang-undangan penumbuhan-kembangan kinerja dan transparansi manajemen koperasi mencapai 50%	Belum tersedia data	50			
				5 Persentase kepercayaan nasabah terhadap pelayanan koperasi mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				1 Persentase peningkatan jumlah koperasi mandiri mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40	2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 SKPD Pengampu Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				2 Persentase peningkatan jumlah diversifikasi usaha koperasi mandiri mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				3 Persentase jumlah koperasi binaan pemerintah yang memiliki manajemen (neraca) keuangan yang transparan dan akuntabel meningkat 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				4 Persentase jumlah koperasi yang mengembalikan peminjaman secara tepat waktu meningkat 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pambangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				<p>5 Persentase peningkatan jumlah koperasi yang melakukan penurunan suku bunga peminjaman dana kepada anggota dan atau masyarakat mencapai 60% pada Tahun 2017</p> <p>6 Persentase peningkatan jumlah koperasi yang menerapkan sistem informasi teknologi dalam mendukung manajemen dan pengembangan usaha koperasi mencapai 50 % pada Tahun 2017</p> <p>7 Persentase jumlah koperasi yang memperoleh <i>reward</i> atas kinerja pengelolaan keuangan dan diversifikasi usaha mencapai 50% pada Tahun 2017</p> <p>8 Persentase penurunan jumlah koperasi yang didiskualifikasi dalam penerimaan peminjaman modal mencapai 50% pada Tahun 2017</p>	<p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p>	<p>60</p> <p>50</p> <p>50</p> <p>50</p>			
			2 Pengembangan koperasi agribisnis yang ikut mengelola subsistem agribisnis hulu dan hilir melalui usaha patungan ( <i>joint venture</i> ) dengan pengusaha swasta atau BUMD	1 Reformulasi perancangan rencana pengembangan koperasi agribisnis mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	3 Program Pengembangan Agribisnis Daerah	1 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	1 SKPD Penanggungjawab Urusan Perencanaan Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pambangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				2 Tingkat keterpaduan dan sinkronisasi program pengembangan agribisnis daerah lintas SKPD mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Tingkat percepatan penumbuhkembangan KUR dengan peningkatan pendapatan masyarakat agribisnis mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				4 Tingkat percepatan inovasi pengembangan agribisnis bagi peningkatan pendapatan masyarakat agribisnis mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				1 Persentase keanggotaan kelompok tani/nelayan mandiri mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80	4 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 SKPD Pengampu Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				2 Persentase peningkatan diversifikasi usaha koperasi agribisnis mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase Mou usaha patungan kelompok tani binaan Pemerintah Kota Singkawang dengan pengusaha swasta/BUMD mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pambangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Persentase kemudahan aksesibilitas permodalan koperasi agribisnis mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				5 Persentase diversifikasi usaha koperasi agribisnis mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80			
		2 Mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah	1 Pemantapan jiwa kewirausahaan ( <i>entrepreneurship</i> ) dan penumbuhkembangan diversifikasi lapangan pekerjaan di kalangan pemuda dan usia produktif	1 Persentase pelatihan kewirausahaan bagi pemuda mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80	5 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	1 Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga	SKPD Pengampu Urusan Pemuda dan Olahraga
				2 Persentase pelatihan keterampilan bagi pemuda wirausaha mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80			
				3 Persentase peningkatan jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan ditempatkan bekerja mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				4 Persentase jumlah wirausaha yang dikelola secara mandiri oleh peserta pelatihan kewirausahaan mencapai 90% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	90			
				5 Persentase jumlah bantuan modal bagi usaha mandiri menurun hingga 20% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	20			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pambangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
			2 Klasterisasi UKM dan UMKM untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan agar produk yang dihasilkan terus membentuk mata rantai yang utuh mulai dari penyediaan sarana dan prasarana klasterisasi, pembinaan untuk peningkatan kapasitas penggiat/ pelaksana wirausaha, peningkatan nilai jual produk wirausaha UKM dan UMKM hingga kepastian jejaring pemasaran produk ( <i>market networking</i> )	1 Cakupan kebijakan pengembangan klasterisasi UKM/UMKM kreatif yang memastikan keterpaduan penumbuhkembangan kewirausahaan dan keberpihakan peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	6 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 SKPD Pengampu Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				2 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana klasterisasi UKM dan UMKM wirausaha muda binaan mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase pembangunan pusat oleh-oleh Kota Singkawang terpadu mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				4 Cakupan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan muda mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80			
				5 Persentase peningkatan omzet industri rumah tangga meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pambangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				<p>6 Persentase peningkatan insentif untuk inovasi produk unggulan kreatif melalui peningkatan akses informasi dan pelayanan perbankan dan keuangan mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>7 Persentase kerjasama bilateral (MoU) pemasaran produk UKM/UMKM di pasar regional dan nasional mencapai 50% pada Tahun 2017</p>	Belum tersedia data	100			
					Belum tersedia data	50			



**Tabel 7.5.**

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Pembangunan**

Misi Keempat : Melaksanakan pendistribusian pemerataan dan penguatan ekonomi kewilayahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
1 Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.	1 Terwujudnya akselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan tanpa mengesampingkan aspek pemerataan yang berkeadilan	1 Menciptakan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan kerjasama dan aktifitas perdagangan antar Kota Singkawang dengan kabupaten/kota disekitarnya untuk mendukung perekonomian domestik dan pengembangan ekonomi lokal dan daerah di wilayah strategis	1 Sinkronisasi dan sinergisitas yang harmonis antara Kota Singkawang dengan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota di sekitarnya demi keterkaitan antarsektor, antarprogram, antarpekerja, dan antardaerah untuk percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang	1 Persentase pembaharuan dan pemutakhiran rancangan strategi pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi wilayah mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60	1 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	1 SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan
				2 Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap kebutuhan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi wilayah mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase rencana induk/rencana aksi daerah pengembangan dan pembangunan wilayah ekonomi terpadu mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				4 Persentase penurunan ketimpangan PDRB per kapita berdasarkan wilayah kecamatan mencapai 30% setiap tahunnya	Belum tersedia data	30			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				5 Persentase peningkatan pendapatan masyarakat per wilayah kecamatan meningkat 20% setiap tahunnya	Belum tersedia data	20			
				6 Persentase penurunan ketimpangan pendapatan per kapita berdasarkan wilayah kecamatan mencapai 30% setiap tahunnya	Belum tersedia data	30			
				7 Persentase penurunan angka pengangguran berdasarkan wilayah kecamatan mencapai 60 % pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				8 Persentase kesesuaian perencanaan peningkatan pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka pengangguran perkotaan mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				9 Persentase kesesuaian perencanaan peningkatan pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan perkotaan mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				<p>1 Persentase peningkatan kesepakatan kesepakatan MoU pembangunan wilayah pinggiran mencapai 60% pada Tahun 2017</p> <p>2 Persentase penanganan permasalahan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi terutama di daerah pinggiran mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>3 Persentase peningkatan jumlah kesepakatan yang melibatkan masyarakat per kecamatan mencapai 100% pada Tahun 2017</p>	Belum tersedia data	60	2 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
			2 Pemihakan bagi percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar	<p>1 Persentase perumusan kembali kebijakan (<i>reformulation</i>) peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi wilayah mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>2 Persentase penyesuaian kebijakan (<i>policy adjustment</i>) pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh mencapai 100% pada Tahun 2017</p>	Belum tersedia data	100	3 Program Evaluasi Kinerja Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				3 Persentase penurunan angka pelanggaran peraturan percepatan pembangunan daerah pinggiran, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar hingga mencapai 0% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	0			
				4 Cakupan penataan peraturan perundang-undangan penumbuhkembangan pembangunan daerah pinggiran, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
		2 Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat daerah pinggiran, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar dengan orientasi pada keunggulan komparatif sumber daya lokal dan didukung oleh sektor industri, jasa dan perdagangan, dengan infrastruktur yang menunjang keterkaitan kawasan-kawasan tersebut dengan pusat-pusat pertumbuhan	1 Percepatan pembangunan wilayah pinggiran terutama disetiap pintu-pintu masuk kota berbasis potensi kewilayahan yang berorientasi ke luar ( <i>outward looking</i> ) berdasarkan pendekatan kesejahteraan ( <i>prosperity approach</i> )	1 Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pada pintu-pintu masuk Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	4 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	1 SKPD Penanggung-jawab Urusan Perencanaan Pembangunan
			2 Persentase klasterisasi wilayah strategis dan cepat tumbuh mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100				
			3 Persentase perencanaan pengembangan wilayah strategis pinggiran yang menghubungkan wilayah pesisir dan perbatasan dengan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100				
			4 Persentase pengembangan wilayah berbasis sumberdaya mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80				
			5 Persentase pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80				
			6 Persentase pengembangan wilayah berbasis efisiensi unggulan mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				7 Persentase pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80			
			2 Pengutamaan pembangunan prasarana dan sarana bagi pengembangan daerah pinggiran, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar	1 Persentase ketersediaan prasarana dan sarana pada daerah pinggiran kota mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	5 Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh	1 Urusan Wajib Pekerjaan Umum	1 SKPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum
				2 Persentase prasarana dan sarana pada daerah pinggiran kota dalam kondisi baik mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase aksesibilitas masyarakat ke daerah pinggiran, perbatasan, terdepan, dan daerah terluar mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				1 Cakupan revitalisasi pasar tradisional pada daerah pinggiran, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50	6 Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perdagangan Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh	1 Urusan Pilihan Perdagangan	1 SKPD Pengampu Urusan Pilihan Perdagangan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				2 Cakupan ketersediaan terminal logistik perdagangan pada daerah pinggiran, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
			3 Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat perdagangan dan industri pada daerah pinggiran, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar	1 Cakupan moda transportasi terpadu pada daerah pinggiran, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50	7 Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Transportasi Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh	1 Urusan Wajib Perhubungan	1 SKPD Penanggung Urusan Perhubungan
				2 Persentase penurunan angka rawan kecelakaan pada daerah pinggiran, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
			4 Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi dan komunikasi untuk wilayah pesisir, pedalaman, kota, kelurahan dan perbatasan sebagai penunjuang percepatan pertumbuhan ekonomi	<p>1 Persentase infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi pada daerah perbatasan pesisir dan pedalaman meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017</p> <p>2 Persentase peningkatan aksesibilitas informasi terutama bagi masyarakat pada daerah pinggiran, perbatasan, terdepan, dan daerah terluar mencapai 60% pada Tahun 2017</p> <p>3 Persentase peningkatan aksesibilitas masyarakat ke daerah pinggiran, perbatasan, terdepan, dan daerah terluar mencapai 60% pada Tahun 2017</p>	Belum tersedia data	60	8 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika	1 SKPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			5 Pengembangan wilayah pesisir dan pemberdayaan sumberdaya sektor pesisir	<p>1 Persentase peningkatan kelompok ekonomi masyarakat pesisir mandiri mencapai 60% pada Tahun 2017</p> <p>2 Persentase peningkatan pendapatan masyarakat pesisir mencapai 60% pada Tahun 2017</p>	Belum tersedia data	60	9 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	1 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	1 SKPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				<p>3 Persentase peningkatan kualitas sumber daya manusia pada daerah pesisir yang mampu mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan mencapai 60% pada Tahun 2017</p> <p>4 Persentase peningkatan penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat pesisir yang mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan mencapai 60% pada Tahun 2017</p>	Belum tersedia data	60			
	2 Terciptanya pemerataan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat	1 Memperluas jangkauan pelayanan dasar hingga daerah pinggiran, perbatasan, kawasan terluar, dan kawasan terdepan Kota Singkawang	1 Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan	<p>1 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik pada daerah pinggiran, perbatasan, terdepan, dan daerah terluar mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>2 Jangkauan peningkatan kinerja layanan pendidikan pada daerah pinggiran meningkat 100% pada Tahun 2017</p>	Belum tersedia data	100	10 Program Peningkatan Layanan Pendidikan Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh	1 Urusan Wajib Pendidikan	1 SKPD Penanggung Urusan Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				3 APK pada daerah pinggiran, perbatasan, terdepan, dan daerah terluar meningkat 20% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	20			
				4 Angka kelulusan pendidikan dasar 9 tahun pada daerah pinggiran, perbatasan, terdepan, dan daerah terluar meningkat 20% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	20			
			2 Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan	1 Persentase peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik pada daerah pinggiran, perbatasan, terdepan, dan daerah terluar mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	11 Program Peningkatan Layanan Kesehatan Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh	1 Urusan Wajib Kesehatan	1 SKPD Penanggungjawab Urusan Kesehatan
				2 Jangkauan peningkatan kinerja layanan kesehatan pada daerah pinggiran mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Usia Harapan Hidup (UHH) pada daerah pinggiran, perbatasan, terdepan, dan daerah terluar meningkat 20% setiap tahunnya	Belum tersedia data	20			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Angka penderita penyakit menular pada daerah pinggir, perbatasan, terdepan, dan daerah terluar menurun 20% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	20			
		2 Meningkatkan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya perindustrian dan perdagangan Kota Singkawang berbasis potensi daerah sebagai pemicu pergerakan pertumbuhan ekonomi masyarakat ke kawasan-kawasan pinggir dan terluar Singkawang	1 Pemerataan kesempatan berusaha melalui reformulasi kebijakan dalam upaya pengentasan pengangguran dan kemiskinan tanpa diskriminasi	1 Persentase perumusan kembali kebijakan ( <i>reformulation</i> ) pengentasan pengangguran, pemerataan kesempatan berusaha dan pengentasan kemiskinan melalui pengaturan kembali jam bekerja baik bagi usia produktif maupun ibu rumah-tangga dan kaum perempuan mencapai 100% pada Tahun 2017 2 Persentase penyesuaian kebijakan ( <i>policy adjustment</i> ) pengentasan pengangguran, pemerataan kesempatan berusaha dan pengentasan kemiskinan mencapai 100% pada Tahun 2017 3 Persentase peningkatan angka serapan tenaga kerja lokal yang bekerja di industri milik pengusaha di Kota Singkawang mencapai 100%	Belum tersedia data	100	12 Program Evaluasi Kinerja Pengentasan Pengangguran dan Kemiskinan	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Persentase penurunan angkatan kerja dari luar Singkawang yang bekerja pada perusahaan/ industri milik swasta mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				5 Cakupan penataan peraturan perundang-undangan pengentasan pengangguran, pemerataan kesempatan berusaha dan pengentasan kemiskinan mencapai 100 % pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
			2 Peningkatan taraf dan kualitas pendidikan serta diklat tenaga kerja untuk mengisi pasar kerja lokal dan global	1 Rasio tenaga kerja terampil dibandingkan dengan tenaga kerja tidak terampil mencapai 75% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	75	13 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Urusan Wajib Tenaga Kerja	1 SKPD Peningampu Urusan Tenaga Kerja
				2 Persentase peningkatan tenaga kerja bersertifikat sesuai kahlannya mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Diversifikasi sertifikasi tenaga kerja siap pakai mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				4 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				5 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat mencapai 70% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	70			
				6 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja sebelum bekerja sesuai kompetensi mencapai 70% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	70			
				7 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80			
			3 Perlindungan ketenagakerjaan dalam membangun hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan tenaga kerja dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja	1 Rasio daya serap tenaga kerja mencapai 25% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	25	14 Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1 Urusan Wajib Ketenagakerjaan	1 SKPD Peningampu Urusan Ketenagakerjaan
				2 Cakupan informasi bursa kerja tersedia yang dimutakhirkan secara berkala mencapai 100% pada Tahun 2017	30	100			
				3 Cakupan lembaga penyalur tenaga kerja yang taat peraturan ketenagakerjaan mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				4 Persentase tenaga kerja terampil bersertifikat yang memperoleh kepastian pekerjaan mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				5 Tingkat penganggu- ran intelektual me- nurun 20% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	20			
				6 Tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 67.79 % pada Tahun 2017	65.34	67.79			
				7 Tingkat penganggu- ran terbuka menu- run 3.50% pada Tahun 2017	3.70	3.50			
				1 Persentase penuru- nan jumlah kasus penganiayaan tena- ga kerja mencapai 50% setiap tahun- nya	Belum tersedia data	50	15 Program Perlin- dungan Hubu- ngan Industrial dan Ketenaga- kerjaan	1 Urusan Wajib Otonomi Dae- rah, Pemerin- tahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Pe- rangkat Dae- rah, Kepega- waian dan Persandian	1 SKPD Pe- ngampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerinta- han Umum, Admini- strasi Keu- angan Dae- rah, Pe- rangkat Daerah, Kepega- waian dan Persandian
				2 Persentase penuru- nan jumlah kasus pelanggaran K3 pada perusahaan/ industri milik swas- ta mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				3 Cakupan penerapan perlindungan kete- nagakerjaan pada perusahaan/ indus- tri milik swasta mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				4 Persentase kepas- tihan hukum dalam penyelesaian seng- keta ketenagaker- jaan mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				5 Persentase penuru- nan angka PHK secara sepihak mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				6 Persentase peningkatan upah pekerja/buruh perusahaan/ industri milik pengusaha swasta mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				7 Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun mencapai 0 (tidak ada kasus) setiap tahunnya	Belum tersedia data	0			
				8 Persentase keselamatan dan perlindungan kerja mencapai 85% pada Tahun 2017	5	85			
				9 Besaran peningkatan kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) mencapai 60% pada Tahun 2017	10	60			
				10 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek mencapai 90% pada Tahun 2017	10	90			
				11 Besaran pemeriksaan perusahaan mencapai 60% pada Tahun 2017	10	60			
				12 Besaran pengujian peralatan di perusahaan mencapai 60% pada Tahun 2017	10	60			
				13 Persentase penurunan jumlah tenaga kerja dibawah umur mencapai 10% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	10			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				14 Partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat sebesar 39% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	39			
2 Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi kreatif kerakyatan berbasis jasa, perdagangan dan agroindustri	1 Terciptanya perbaikan struktur perekonomian daerah yang kokoh sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas ( <i>inklusif</i> ), berdaya saing global, dan menjadi motor penggerak perekonomian	1 Meningkatkan fokus pembangunan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi daerah	1 Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi makro yang merefleksikan kualitas kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh	1 Pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 6.46% pada Tahun 2017 2 Laju inflasi menurun sebesar 2.54% pada Tahun 2017 3 PDRB per kapita (rupiah) meningkat sebesar Rp. 23.928.339,33 pada Tahun 2017 4 Angka kemiskinan menurun sebesar 4.33% pada Tahun 2017 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat sebesar 74.44 pada Tahun 2017 6 Persentase pencapaian stabilitas harga komoditas barang/jasa meningkat 20% pada Tahun 2017	6.16  4.21 16.042.172,53  5.32  69.77  Belum tersedia data	6.46  2.54 23.928.339,33  4.33  74.44  20	16 Program Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
			2 Percepatan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggali dan menata setiap potensi penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan asas kepastian, kewajaran, dan penegakan hukum berkeadilan dengan melakukan penyederhanaan prosedur, dan perbaikan sistem informasi	1 Persentase ketersediaan jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah meningkat 20% setiap tahunnya	-	20	17 Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
				2 Cakupan penataan regulasi peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah meningkat 20% setiap tahunnya	Belum tersedia data	20			
				3 Persentase ketersediaan peraturan daerah/ walikota/ juklak/juknis yang mendukung iklim usaha mencapai 20% setiap tahunnya	Belum tersedia data	20			
				4 Persentase ketersediaan peraturan daerah/ walikota/ juklak/ juknis tentang peningkatan PAD mencapai 20% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	20			
				5 Persentase peningkatan investasi daerah melalui kemudahan sistem dan prosedur perizinan dan investasi mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				6 Persentase pencapaian target jumlah pengusaha sadar pajak dan retribusi daerah meningkat 20% setiap tahunnya	Belum tersedia data	20			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				7	Persentase pertumbuhan penerimaan pajak daerah mencapai 60 % setiap tahunnya	49,48	60,00		
				8	Persentase pertumbuhan penerimaan retribusi daerah mencapai 100 % setiap tahunnya	9,74	100,00		
				9	Persentase pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 100 % setiap tahunnya	53,28	100,00		
				10	Persentase pertumbuhan penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mencapai 100 % setiap tahunnya	(83,41)	100,00		
				11	Persentase pertumbuhan rasio kemandirian mencapai 6.89% pada Tahun 2017	4.44	6.89		
				12	Persentase pertumbuhan rasio efektivitas mencapai 100 % pada Tahun 2017	0.85	100		
				13	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total belanja APBD mencapai 0.430% pada Tahun 2017	0,075	0.430		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				14 Persentase pertumbuhan PAD mencapai 88,15% pada Tahun 2017	15,93	88,15			
		2 Mengembangkan produk unggulan yang kompetitif di pasar domestik maupun global, yang didukung sumber daya manusia (SDM) unggul, riset dan teknologi, informasi, serta keunggulan pemasaran	1 Pengembangan sektor-sektor unggulan sesuai keanekaragaman karakteristik khas dan potensi wilayah dengan tetap melibatkan masyarakat setempat dan keterkaitan program lintas SKPD agar terbentuk suatu sistem yang terpadu dan utuh	1 Persentase pembaharuan dan pemutahiran rancangan strategi pengembangan produk unggulan daerah yang kompetitif, kreatif, inovatif dan khas mencapai 40% pada Tahun 2017  2 Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap pengembangan produk unggulan daerah yang kompetitif, kreatif, inovatif dan khas berbasis potensi wilayah mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40	18 Program Perencanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah	1 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	1 SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan
				3 Persentase rencana induk/rencana aksi daerah pengembangan produk unggulan daerah yang kompetitif, kreatif dan khas mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				1 Persentase peningkatan perkembangan aktivitas sektor-sektor ekonomi yang dikelola masyarakat mencapai 60% pada Tahun 2017 2 Persentase pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017 3 Persentase peningkatan produk kreatif khas per wilayah mencapai 90% pada Tahun 2017 4 Persentase peningkatan pemasaran produk kreatif khas per wilayah mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60	19 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	1 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 SKPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2 Peningkatan daya saing sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan swasembada pangan dan ketahanan pangan daerah	1 Persentase peningkatan produksi produk-produk unggulan pertanian/perkebunan mencapai 40% pada Tahun 2017 2 Persentase peningkatan produktivitas potensi unggulan pertanian/ perkebunan mencapai 40% pada Tahun 2017 3 Persentase peningkatan pengembangan model distribusi pangan yang efisien mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40	20 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	1 Urusan Pilihan Pertanian	1 SKPD Pengampu Urusan Pertanian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Persentase pengembangan perbenihan/ perbibitan tanaman pertanian/ perkebunan unggulan mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				5 Persentase peningkatan diversifikasi produk organik atau bebas gluten (gluten free) hasil pertanian tanaman pangan mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				6 Persentase peningkatan diversifikasi produk pertanian/ perkebunan pasca panen mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				7 Persentase peningkatan cakupan standarisasi benih/ bibit lokal unggul mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				1 Persentase cakupan kebijakan bidang pertanian/ perkebunan yang berpihak kepada peningkatan produktivitas, standarisasi mutu produk pertanian/ perkebunan dan jejaring pemasaran mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	21 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	1 Urusan Pilihan Pertanian	1 SKPD Pengampu Urusan Pertanian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				2 Persentase peningkatan konsumsi masyarakat terhadap produk pertanian/perkebunan lokal mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80			
				3 Persentase peningkatan produk pertanian/ perkebunan yang beredar di pasaran domestik mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				4 Persentase peningkatan inovasi dan diversifikasi produk pertanian/ perkebunan yang beredar di pasaran domestik mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				5 Persentase produk hasil pertanian tanaman pangan organik atau bebas gluten (gluten free) terjual mencapai 20% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	20			
				6 Persentase peningkatan jumlah produk pertanian/ perkebunan unggulan lokal yang mendominasi pasaran domestik mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				7 Persentase peningkatan produk pertanian/perkebunan yang beredar di pasaran luar provinsi mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				1 Persentase kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40	22 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1 Urusan Pilihan Pertanian	1 SKPD Pengampu Urusan Pertanian
				2 Persentase peningkatan pendapatan petani per kapita mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				1 Persentase peningkatan produksi produk-produk olahan hasil peternakan mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40	23 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1 Urusan Pilihan Pertanian	1 SKPD Pengampu Urusan Pertanian
				2 Persentase peningkatan produktivitas produk olahan hasil peternakan mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				3 Persentase pengembangan model distribusi produk olahan hasil peternakan yang efisien mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				4 Persentase pengembangan perbenihan/perbibitan ternak unggulan daerah mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				5 Persentase peningkatan cakupan standarisasi produk olahan peternakan mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				6 Persentase kelompok masyarakat pengolah hasil ternak mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				1 Persentase cakupan kebijakan sektor peternakan yang berpihak kepada peningkatan produktivitas, standarisasi mutu produk hasil peternakan dan olahannya serta kepastian jejaring pemasaran mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	24 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1 Urusan Pilihan Pertanian	1 SKPD Peningampu Urusan Pertanian
				2 Persentase peningkatan konsumsi masyarakat terhadap produk peternakan lokal mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80			
				3 Persentase peningkatan produk peternakan yang beredar di pasaran domestik mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Persentase inovasi dan diversifikasi produk olahan hasil peternakan yang beredar di pasaran domestik mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				5 Persentase peningkatan jumlah produk olahan hasil peternakan unggulan lokal yang mendominasi pasaran domestik mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				6 Persentase peningkatan produk olahan hasil peternakan yang beredar di pasaran luar provinsi mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				7 Persentase peningkatan jumlah industri pengolah hasil ternak bersertifikasi halal mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				8 Persentase penurunan produksi hasil olahan peternakan tidak layak konsumsi mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				9 Persentase peningkatan jumlah rumah potong hewan bersertifikasi halal mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				1 Persentase peningkatan produksi produk-produk unggulan budidaya perikanan mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40	25 Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	1 SKPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
				2 Persentase peningkatan produktivitas potensi unggulan budidaya perikanan mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				3 Persentase pengembangan model distribusi sektor budidaya perikanan yang efisien mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				4 Persentase pengembangan perbenihan/perbibitan budidaya perikanan unggulan mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				5 Persentase diversifikasi produk hasil budidaya perikanan pasca panen meningkat sebesar 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				1 Persentase peningkatan produksi produk-produk unggulan perikanan tangkap sebesar 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40	26 Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	1 SKPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				2 Peningkatan produktivitas potensi unggulan perikanan tangkap sebesar 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				3 Persentase pengembangan perbenihan/ perbibitan perikanan tangkap unggulan mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				1 Persentase cakupan kebijakan sektor perikanan yang berpihak kepada peningkatan produktivitas, standarisasi mutu produk perikanan dan olahannya serta kepastian jejaring pemasaran mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	27 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	1 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	1 SKPD Penanggung Urusan Kelautan dan Perikanan
				2 Persentase peningkatan konsumsi masyarakat terhadap produk perikanan dan olahannya mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80			
				3 Persentase peningkatan produk perikanan dan olahannya yang beredar di pasaran domestik mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Persentase peningkatan inovasi dan diversifikasi produk olahan perikanan yang beredar di pasaran domestik mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				5 Persentase peningkatan jumlah produk olahan perikanan unggulan lokal yang mendominasi pasaran domestik mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				6 Persentase peningkatan produk olahan perikanan yang beredar di pasaran luar provinsi mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				7 Persentase peningkatan jumlah industri pengolah hasil perikanan bersertifikasi halal mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				8 Persentase penurunan produksi hasil olahan perikanan tidak layak konsumsi mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				1 Cakupan ketersediaan kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	28 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	1 Urusan Pilihan Industri	1 SKPD Pengampu Urusan Industri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				2 Cakupan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana klaster industri sebesar 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80			
				3 Cakupan keterkaitan produksi industri hulu ke hilir mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				4 Cakupan publikasi dan promosi produk industri hulu ke hilir mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				5 Cakupan pengembangan modal ventura dan inkubator sistem produksi meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				6 Cakupan pengembangan sistem inovasi teknologi industri yang diterapkan mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				7 Cakupan penguatan kemampuan industri berbasis teknologi meningkat sebesar 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
			3 Pembentukan kemitraan ekonomi global yang saling menguntungkan tanpa mengorbankan kepentingan dan kedaulatan daerah dalam memunculkan produk unggulan daerah yang kreatif, kompetitif dan berkualitas ekspor	<p>1 Persentase cakupan kebijakan perlindungan hak cipta dan kreasi produk unggulan daerah berkualitas ekspor mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>2 Persentase peningkatan kerjasama standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral dan regional mencapai 50% pada Tahun 2017</p> <p>3 Persentase peningkatan aktifitas perdagangan produk unggulan daerah pada <i>event</i> promosi/ expo sebesar 80% pada Tahun 2017</p> <p>4 Persentase peningkatan penerimaan <i>omzet</i> perdagangan produk unggulan daerah sebesar 90% pada Tahun 2017</p> <p>5 Cakupan <i>cluster</i> perdagangan produk daerah berkualitas ekspor mencapai 50% pada Tahun 2017</p>	Belum tersedia data	100	29 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1 Urusan Pilihan Perdagangan	SKPD Penanggungjawab Urusan Perdagangan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				1 Cakupan industri kecil dan menengah kreatif yang mampu berkembang secara mandiri mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40	30 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1 Urusan Pilihan Industri	1 SKPD Pengampu Urusan Industri
				2 Persentase kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				3 Angka penyerapan tenaga kerja pada usaha-usaha kreatif masyarakat meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				4 Persentase peningkatan omzet yang diterima industri kecil dan menengah yang dibina pemerintah mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				1 Persentase industri pembibitan/ perbenihan meningkat sebesar 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40	31 Program Pengembangan Industri Agribisnis	1 Urusan Pilihan Pertanian	1 SKPD Pengampu Urusan Pertanian
				2 Persentase industri agro-kimia meningkat sebesar 20% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	20			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung- jawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				3 Persentase industri-industri yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan meningkat sebesar 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				4 Persentase peningkatan produk olahan pertanian primer yang diperdagangkan mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				5 Persentase industri-industri yang mengolah hasil peternakan primer menjadi produk olahan meningkat sebesar 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				6 Persentase produk olahan peternakan primer yang diperdagangkan mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				7 Persentase industri-industri yang mengolah hasil peternakan primer menjadi produk olahan meningkat 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				8 Persentase produk olahan peternakan primer yang diperdagangkan mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50			

**Tabel 7.6.**

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Pembangunan**

Misi Kelima : Melanjutkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam agar dapat bermanfaat bagi masyarakat kota

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
1 Melestarikan keberlanjutan manfaat sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1 Terciptanya lingkungan kota yang nyaman dan bebas polusi secara berkelanjutan	1 Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1 Peningkatan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup	1 Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang aktif dalam aktifitas bernuansa lingkungan hidup yang diselenggarakan kecamatan dan tingkat kota mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	1 Program Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	1 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 SKPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kecamatan)
				2 Persentase peningkatan luasan perkarangan rumah masyarakat di lingkungan kelurahan yang ditanami pohon terutama pohon buah-buahan sebesar 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80			
				3 Persentase peningkatan jumlah rumahtangga di lingkungan kelurahan yang melakukan pemisahan sampah sebesar 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				4 Persentase peningkatan jumlah kelurahan hijau mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				5 Persentase peningkatan jumlah kelurahan bersih mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				6 Persentase jumlah rumahtangga di lingkungan kelurahan yang memproduksi pupuk kompos mencapai 20% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	20			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				7 Persentase peningkatan jumlah rumahtangga di lingkungan kelurahan yang memanfaatkan perkarangan untuk tanaman obat mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				1 Persentase peningkatan rumah masyarakat yang bersih, kering dan bebas lembab mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60	2 Program Lingkungan Sehat Perumahan	1 Urusan Wajib Perumahan	1 Urusan Perumahan
				2 Persentase rumah masyarakat yang memiliki sirkulasi udara yang baik meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				3 Persentase rumah masyarakat yang memiliki sistem sanitasi yang baik meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				1 Persentase gedung/bangunan pemerintahan yang bersih, kering dan bebas lembab meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60	3 Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1 Urusan Wajib Kesehatan	1 SKPD Penanggungjawab Urusan Kesehatan
				2 Persentase bangunan pelayanan kesehatan masyarakat yang bersih, kering dan bebas lembab meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				3 Persentase gedung kantor milik swasta yang bersih, kering dan bebas lembab meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Persentase tempat usaha penjualan makanan milik masyarakat yang bersih, kering dan bebas lembab meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				5 Persentase gedung/bangunan pemerintahan yang memiliki sirkulasi udara yang baik meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				6 Persentase bangunan pelayanan kesehatan masyarakat yang memiliki sirkulasi udara yang baik meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				7 Persentase gedung kantor milik swasta yang memiliki sirkulasi udara yang baik meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				8 Persentase peningkatan jumlah kawasan wisata yang memenuhi persyaratan lingkungan sehat mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				9 Persentase gedung/ tempat usaha milik masyarakat yang memenuhi persyaratan kesehatan meningkat sebesar 70% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	70			
				1 Cakupan pengelolaan B3 dan limbah B3 mencapai 100% setiap tahunnya	Belum tersedia data	100	4 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1 Urusan Wajib Lingkungan Hidup	1 SKPD Penanggungjawab Urusan Lingkungan Hidup
				2 Persentase penurunan pencemaran akibat B3 mencapai 50%	Belum tersedia data	50			
				3 Angka pencemaran tempat wisata menurun sebesar 30% setiap tahunnya	Belum tersedia data	30			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Angka pencemaran di lingkungan pasar menurun hingga 0% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	0			
				5 Persentase penurunan jumlah pedagang yang membuang sampah ke sungai/saluran air mencapai 20% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	20			
				6 Angka pencemaran limbah medis tertangani sebesar 100% setiap tahunnya	Belum tersedia data	100			
				7 Tingkat polusi udara menurun 40% setiap tahunnya	Belum tersedia data	40			
				8 Tingkat polusi air Sungai Singkawang tertangani mencapai 100% setiap tahunnya	Belum tersedia data	40			
				9 Angka pencemaran air Sungai Singkawang oleh pedagang ataupun masyarakat menurun hingga 0% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	0			
				10 Volume sampah tertangani mencapai 100% setiap tahunnya	Belum tersedia data	100			
				11 Persentase penurunan jumlah rumah yang menutup saluran pembuangan air mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				12 Persentase peningkatan jumlah rumah yang menggunakan biopori mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				13 Persentase peningkatan jumlah kantor/bangunan milik swasta yang menggunakan biopori mencapai 90% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	90			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				14 Persentase penurunan jumlah tempat usaha/ kantor/ bangunan milik swasta yang membuang sampah ke saluran air menurun hingga 0% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	0			
				15 Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) pengaduan masyarakat terhadap pencemaran yang dilakukan oleh pemilik tempat usaha/ perusahaan/ industri ditanggapi maksimal 1 hari pada Tahun 2017	Belum tersedia data	1			
				16 Pencemaran status mutu air menurun hingga 10% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	10			
				1 Cakupan kecamatan yang menerapkan gerakan 3R ( <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> ) meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60	5 Program <i>Go Clean and Green City</i> (Kotaku Bersih dan Hijau)	1 Urusan Wajib Lingkungan Hidup	1 SKPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
				2 Persentase peningkatan jumlah sekolah yang menerapkan gerakan 3 R meningkat sebesar 90% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	90			
				3 Persentase peningkatan jumlah kantor pemerintahan yang menerapkan gerakan 3 R sebesar 90% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	90			
				4 Persentase kecamatan yang mengiatkan gerakan Kecamatan Hijau ( <i>Go Green</i> ) mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD				
				5	Persentase peningkatan jumlah sekolah yang menerapkan gerakan sekolah hijau ( <i>Green School</i> ) mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				6	Persentase peningkatan jumlah gedung kantor/SKPD yang menerapkan gerakan Kantor Hijau ( <i>Offices Go Green</i> ) mencapai 90% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	90			
				7	Persentase peningkatan jumlah tempat usaha/ bangunan/ rumah industri milik masyarakat/swasta yang menerapkan gerakan Kantor Hijau ( <i>Offices Go Green</i> ) mencapai 90% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	90			
				8	Persentase jumlah kantor/gedung pemerintahan yang hemat listrik dan air meningkat sebesar 60 % pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				9	Persentase jumlah kantor/gedung pemerintahan yang hemat listrik dan air meningkat sebesar 60 % pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				10	Persentase jumlah kantor/gedung milik swasta yang hemat listrik dan air meningkat sebesar 60 % pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				11	Persentase peningkatan jumlah rumah toko (ruko) yang menyediakan tempat sampah terpilah mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				12 Persentase peningkatan jumlah rumah toko (ruko)/ tempat usaha yang berpartisipasi menanam pohon pelindung dalam pot mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				1 Persentase penurunan angka pencemaran akibat usaha masyarakat baik berskala besar, menengah dan kecil sebesar 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60	6 Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER)	1 Urusan Wajib Lingkungan Hidup	1 SKPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
				2 Persentase dunia usaha yang terlibat aktif dalam CSR bidang lingkungan secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase jumlah tempat usaha milik masyarakat/swasta yang memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				4 Persentase peningkatan jumlah tempat usaha milik masyarakat/ swasta berskala besar termasuk tempat wisata yang memiliki standar pengelolaan lingkungan terintegrasi sebesar 90% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	90			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
			2 Penerapan teknologi tepat guna dalam menggunakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagai potensi energi alternatif	<p>1 Persentase ketersediaan dokumen kajian kelayakan implementasi teknologi tepat guna mencapai 90% pada Tahun 2017</p> <p>2 Cakupan diversifikasi teknologi tepat guna berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan (<i>Sustainable environmental friendly technology</i>) mencapai 90% pada Tahun 2017</p> <p>3 Persentase implementasi pengelolaan sampah berbasis teknologi terapan mencapai 100% pada Tahun 2017</p>	Belum tersedia data	90	7 Program Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna	1 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	1 SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan
				<p>1 Persentase rumah tangga yang menggunakan <i>biomassa</i> sebagai sumber energi untuk kebutuhan sehari-hari meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017</p> <p>2 Cakupan peningkatan penggunaan <i>solar cell panel</i> sebagai alternatif penerangan mencapai 60% pada Tahun 2017</p> <p>3 Persentase penggunaan angin sebagai alternatif pengganti listrik (<i>wind energy</i>) mencapai 60% pada Tahun 2017</p> <p>4 Cakupan jangkauan pelayanan air bersih melalui penerapan sistem distribusi hemat energi (<i>multi village system</i>) mencapai 60% pada Tahun 2017</p> <p>5 Persentase penggunaan energi listrik dari pengolahan air lindi mencapai 20% pada Tahun 2017</p>	Belum tersedia data	60	8 Program Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	1 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	1 SKPD Pengampu Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD				
					1 Persentase peningkatan produk ramah lingkungan yang digunakan masyarakat mencapai 10% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	10	9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1 Urusan Wajib Lingkungan Hidup	1 SKPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
					2 Persentase peningkatan pengelolaan sampah terpilah sebesar 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
					3 Diversifikasi produk olahan limbah mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
					4 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk mencapai 3 pada Tahun 2017	2.39	3			
2	Menciptakan Kota Singkawang bebas bencana	1 Menurunnya kemungkinan terjadinya bencana alam akibat kegagalan perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah secara tepat sasaran, terukur, terarah dan berwawasan lingkungan berkelanjutan (Sustainable environment development)	1 Meningkatkan upaya-upaya penyiapan strategi pengurangan resiko bencana yang mandiri dan berkelanjutan pada wilayah-wilayah yang memiliki karakter berdekatan dengan gejala bencana alam dan rentan terhadap perubahan iklim global	1 Pengendalian, penataan dan pemanfaatan penggunaan ruang kota serta penataan penggunaan tanah	1 Persentase ketersediaan rencana induk dan rencana detail peruntukkan ruang kota meningkat sebesar 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50	10 Program Perencanaan Tata Ruang	1 Urusan Wajib Penataan Ruang	1 SKPD Pengampu Urusan Penataan Ruang
					2 Cakupan perencanaan penggunaan ruang dan penatagunaan tanah yang sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup meningkat 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
					3 Persentase kesesuaian RDTRK, RTRK, dan RTBL terhadap pencapaian visidan misi pembangunan Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
					1 Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan mencapai 25% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	25	11 Program Pemanfaatan Ruang	1 Urusan Wajib Penataan Ruang	1 SKPD Pengampu Urusan Penataan Ruang
					2 Rasio luas wilayah industri mencapai 0.2 pada Tahun 2017	0.03	0.2			
					3 Rasio luas wilayah kekeringan menurun sebesar 10 pada Tahun 2017	Belum tersedia data	10			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Rasio luas wilayah perkotaan mencapai 12 pada Tahun 2017 5 Luas wilayah budidaya mencapai 38,100 Ha pada Tahun 2017 6 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 1.000 jumlah penduduk) mencapai 0,01 pada Tahun 2017 7 Persentase penyelesaian ijin lokasi meningkat sebesar 30% pada Tahun 2017	12.23	12			
			2 Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui peningkatan luas tutupan lahan dan sebaran RTH	1 Cakupan taman kota dalam kondisi bersih dan tertata mencapai 5 kecamatan pada Tahun 2017 2 Persentase peningkatan jumlah taman pada gedung pemerintahan yang bersih, tertata dan indah mencapai 60% pada Tahun 2017 3 Persentase volume sampah pada ruang terbuka hijau yang tertangani dengan baik mencapai 100% pada Tahun 2017 4 Persentase taman kota/ ruang terbuka hijau yang dilengkapi dengan tempat sampah terpisah meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017 5 Persentase peningkatan RTH pada kawasan permukiman mencapai 90% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	5	12 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1 Urusan Wajib Lingkungan Hidup	1 SKPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				<p>6 Persentase RTH yang tertata dan indah mencapai 90% pada Tahun 2017</p> <p>7 Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah</p> <p>8 Persentase luas pemukiman yang tertata mencapai 60% pada Tahun 2017</p>	<p>Belum tersedia data</p> <p>89.68</p> <p>Belum tersedia data</p>	<p>90</p> <p>100</p> <p>60</p>			
			3 Perbaiki sistem dan manajemen pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	<p>1 Persentase penurunan daerah kekeringan sebesar 50% pada Tahun 2017</p> <p>2 Persentase penurunan luasan kerusakan kawasan konservasi mencapai 40% pada Tahun 2017</p> <p>3 Persentase penurunan pencemaran sumber-sumber air baku mencapai 50% pada Tahun 2017</p> <p>4 Persentase penurunan eksploitasi sumberdaya alam tak terbarukan (<i>non renewable resources exploitation</i>) mencapai 50% pada Tahun 2017</p> <p>5 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>6 Persentase peningkatan jumlah usaha atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>7 Persentase jumlah usaha atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara mencapai 100% pada Tahun 2017</p>	<p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p>	<p>50</p> <p>40</p> <p>50</p> <p>50</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	13 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1 Urusan Wajib Lingkungan Hidup	SKPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab				
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD							
				8	Persentase luasan lahan atau tanah untuk produksi bio-massa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100						
				9	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60						
				10	Cakupan luasan mangrove sebagai penahan abrasi pantai mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60						
				1	Rasio luas wilayah banjir menurun hingga 6 pada Tahun 2017	8.66	6	14	Program Pengendalian Banjir	1	Urusan Wajib Pekerjaan Umum	1	SKPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum
				2	Lama waktu tergenang menurun hingga maksimal 10 hari pada Tahun 2017	Belum tersedia data	10						
				3	Persentase penurunan daerah tergenang banjir mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50						
				4	Peningkatan prasarana sarana pengendalian banjir dan peningkatan penanganan rob serta pantai kritis di muara sungai dan pantai mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80						
				1	Persentase implementasi inovasi daerah dalam manajemen pencegahan dan pengendalian banjir mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50	15	Program Inovasi Daerah Pengendalian Banjir	1	Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	1	Urusan Perencanaan Pembangunan
				2	Tingkat kesesuaian perencanaan pencegahan dan pengendalian banjir terhadap daya dukung lingkungan hidup mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100						

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
		2 Menerapkan regulasi perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	1 Penegakan hukum perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	<p>1 Persentase reformulasi kebijakan daerah (<i>policy reformulation</i>) yang memiliki keberpihakan kepada lingkungan hidup mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>2 Persentase peningkatan tempat usaha/ perusahaan/ bangunan milik swasta yang memberikan kompensasi jasa lingkungan (<i>green tax</i>) mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>3 Persentase tempat usaha/ perusahaan/ bangunan milik swasta yang melakukan rehabilitasi atas kerusakan lingkungan yang terjadi mencapai 90% pada Tahun 2017</p> <p>4 Penegakan hukum lingkungan mencapai 85% pada Tahun 2017</p> <p>5 Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti mencapai 100% setiap Tahunnya</p>	Belum tersedia data	100	16 Program Pengembangan Kompensasi Jasa Lingkungan Hidup	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
			2 Penerapan sanksi terhadap pelanggaran PERDA RTRW	<p>1 Ruang publik yang berubah peruntukannya mencapai 0% setiap tahunnya</p> <p>2 Persentase penurunan kasus pengalihan penggunaan ruang kota mencapai 20% setiap tahunnya</p> <p>3 Persentase penurunan pelanggaran penggunaan ruang publik mencapai 20% setiap tahunnya</p>	Belum tersedia data	0	17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Urusan Wajib Penataan Ruang	1 SKPD Pengampu Urusan Wajib Penataan Ruang

**Tabel 7.7.**

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Pembangunan**

Misi Keenam : Melanjutkan pemeliharaan, pembangunan dan penataan infrastruktur transportasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
1 Memperkecil disparitas antar wilayah dan sektor Kota Singkawang agar setiap wilayah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperoleh pemerataan manfaat pembangunan	1 Meningkatkan daya saing daerah demi percepatan ketangguhan dan ketahanan kota ( <i>Resilient City</i> )	1 Menerapkan sistem transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau secara berkelanjutan ( <i>Sustainable transportation development</i> )	1 Peningkatan konektivitas sistem transportasi berkualitas	1 Persentase ketersediaan gedung terminal angkutan darat yang dibangun mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	1 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1 Urusan Wajib Perhubungan	1 SKPD Pengampu Urusan Perhubungan
				2 Persentase ketersediaan gedung terminal angkutan udara yang dibangun mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase ketersediaan gedung terminal angkutan air yang dibangun meningkat sebesar 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				4 Tingkat kesesuaian pengelolaan terminal angkutan darat mencapai 100% setiap tahunnya	Belum tersedia data	100			
				5 Persentase pembangunan halte bus mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50			



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				6 Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan mencapai 100% pada Tahun 2017	45	100			
				7 Persentase halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek mencapai 100% pada Tahun 2017	50	100			
				8 Persentase terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek mencapai 70% pada Tahun 2017	26	70			
				9 Persentase jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota mencapai 100% pada Tahun 2017	30	100			
				10 Persentase jalan yang memudahkan masyarakat per individu dalam melakukan perjalanan mencapai 100% pada Tahun 2017	30	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				<p>1 Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>2 Cakupan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan yang dipahami masyarakat secara baik dan benar mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>3 Persentase ketersediaan fasilitas terminal angkutan darat yang nyaman, aman, dan bersih mencapai 100% pada Tahun 2017</p>	30	100	2 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1 Urusan Wajib Perhubungan	1 SKPD Pengampu Urusan Perhubungan
					Belum tersedia data	100			
					Belum tersedia data	100			
				1 Usia pakai prasarana dan fasilitas LLAJ mencapai 5 tahun	Belum tersedia data	5 tahun	3 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1 Urusan Wajib Perhubungan	1 SKPD Pengampu Urusan Perhubungan
				2 Usia pakai terminal mencapai 5 tahun	Belum tersedia data	5 tahun			
				3 Usia pakai pelabuhan mencapai 5 tahun	Belum tersedia data	5 tahun			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				<p>4 Usia pakai halte angkutan umum dalam trayek mencapai 5 tahun</p> <p>5 Usia pakai fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan <i>guardrail</i>) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kota Singkawang mencapai 5 tahun</p>	Belum tersedia data	5 tahun			
			2 Penerapan sistem transportasi yang nyaman dan aman bagi pengendara dan kendaraan	<p>1 Persentase jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>2 Tingkat pelanggaran lalu lintas menurun hingga 0% pada Tahun 2017</p> <p>3 Rasio ijin trayek sebesar 0.0011 pada Tahun 2017</p> <p>4 Tingkat keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas mencapai 100% pada Tahun 2017</p>	35	100	4 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1 Urusan Wajib Perhubungan	1 SKPD Pengampu Urusan Perhubungan
					80	0			
					0,0010	0.0012			
					Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				5 Persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman mencapai 100% pada Tahun 2017	35	100			
				6 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sebesar 10 pada Tahun 2017	10.96	10			
				7 Persentase peningkatan jumlah barang masuk ke terminal sebesar 20 setiap tahunnya	Belum tersedia data	20			
				1 Persentase jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan dengan kecepatan rencana mencapai 100% pada Tahun 2017	35	100	5 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1 Urusan Wajib Perhubungan	1 SKPD Pengampu Urusan Perhubungan
				2 Persentase peningkatan kecepatan rata-rata yang dapat ditempuh mencapai 60% pada Tahun 2017	10	60			
				3 Tingkat kelaikan sarana LLAJ mencapai 100% pada Tahun 2017	40	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Persentase pemasangan rambu-rambu mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				5 Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan <i>guardrail</i> ) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017	30	100			
				6 Persentase peningkatan ruas jalan yang aman bagi pejalan kaki mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				7 Persentase peningkatan ruas jalan yang aman bagi pengendara sepeda mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				8 Waktu kemacetan lalu lintas pada jam-jam sibuk menurun hingga 0% pada Tahun 2017	10 Menit	0			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				9 Persentase penurunan angka kecelakaan mencapai 30% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	30			
				1 Persentase peningkatan uji KIR mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60	6 Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1 Urusan Wajib Perhubungan	1 SKPD Pengampu Urusan Perhubungan
				2 Angkutan darat sebesar 10 pada Tahun 2017	Belum tersedia data	10			
				3 Kepemilikan KIR angkutan umum umum (KIR) mencapai 25% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	25			
				4 Persentase unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kota Singkawang yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji mencapai 100% pada Tahun 2017	30	100			
				5 Persentase penerapan standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kota Singkawang mencapai 100% setiap tahunnya	50	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
		2 Mengintegrasikan dan mengembangkan perencanaan dan pembiayaan pembangunan jaringan transportasi dengan rencana pembangunan tingkat pusat, provinsi dan kota	1 Percepatan dan peningkatan keterpaduan perencanaan dan pembiayaan pembangunan sistem transportasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kota	<p>1 Persentase pembaharuan dan pemutahiran rancangan strategi pengembangan transportasi perkotaan mencapai 100% pada Tahun 2015</p> <p>2 Persentase jaringan transportasi yang terintegrasi satu sama lain, khususnya pelabuhan, lapangan terbang, terminal dan jalan raya dalam sistem jaringan inter dan antar-moda mencapai 100% pada Tahun 2016</p> <p>3 Persentase kesesuaian perencanaan dan anggaran terhadap kebutuhan peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi mencapai 100% setiap tahunnya</p>	Belum tersedia data	100	7 Program Perencanaan Bidang Transportasi	1 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	1 SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan
					Belum tersedia data	100			
					Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				<p>4 Persentase kesesuaian alokasi DAK bidang transportasi dalam pemenuhan kebutuhan sistem jaringan transportasi daerah yang terpadu mencapai 100% setiap tahunnya</p> <p>5 Persentase rencana induk/ rencana aksi daerah pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dan arah pencapaian visi Kota Singkawang mencapai 50% pada Tahun 2017</p>	Belum tersedia data	100			
		3 Melaksanakan inovasi pengembangan pembangunan infrastruktur sistem jaringan transportasi terpadu ( <i>Integrated Transportation System</i> )	1 Penguasaan informasi dan teknologi pengembangan sistem jaringan transportasi terpadu ( <i>Integrated Transportation System</i> )	1 Persentase implementasi teknologi pembangunan dan pengembangan infrastruktur sistem jaringan transportasi perkotaan terpadu berbasis ilmu pengetahuan inovatif mencapai 30% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	30	8 Penguatan Sistem Inovasi Daerah Pengembangan Sistem Transportasi Terpadu	1 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	1 SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				2 Persentase rencana induk/ aksi daerah inovasi pengembangan sistem jaringan transportasi terpadu mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				3 Persentase sistem jaringan transportasi perkotaan yang sesuai dengan RTRW mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				1 Persentase akurasi database jaringan transportasi perkotaan mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50	9 Program Pengembangan Sistem Informasi/ Database Transportasi Terpadu	1 Urusan Wajib Perhubungan	1 SKPD Penanggungjawab Urusan Perhubungan
			2 Persentase akurasi database pelabuhan mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50				
			3 Persentase akurasi database bandar udara mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50				

**Tabel 7.8.**

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Pembangunan**

Misi Ketujuh : Menjamin ketentraman, ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kota

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
1 Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	1 Terciptanya rasa aman masyarakat dan dunia usaha	1 Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan dini masyarakat	1 Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban	1 Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat dicegah mencapai 40% tiap tahunnya	Belum tersedia data	40	1 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1 SKPD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
				2 Persentase penurunan jumlah kejadian/ masalah terkait ketahanan bangsa mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				1 Rasio pos siskamling per jumlah RT minimal mencapai 1 per RT (Rukun Tetangga) berdasarkan luas wilayah	Belum tersedia data	1:2	2 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	1 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1 SKPD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
				2 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 1.000 penduduk	4.36	6			
3 Rata-rata kejadian gangguan keamanan per tahun per 1.000 penduduk	Belum tersedia data	0							
				4 Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	Belum tersedia data	80			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
			2 Pengembangan sistem ketentraman dan ketertiban secara terpadu dan terintegrasi	1 Cakupan penegakan perlindungan ketentraman dan ketertiban mencapai 100% setiap tahunnya 2 Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 3 Persentase kejadian/ gangguan ketentraman dan ketertiban yang tuntas ditangani mencapai 100% pada Tahun 2017 4 Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencapai 100% pada Tahun 2017 5 Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) pengaduan masyarakat 6 Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban meningkat 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data Belum tersedia data Belum tersedia data Belum tersedia data Belum tersedia data Belum tersedia data	100 100 100 100 45 80	3 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1 SKPD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				7 Persentase ketersediaan mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				1 Angka kriminalitas tertangani melalui aktivitas pemberdayaan masyarakat setempat mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40	4 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	SKPD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
				2 Angka kriminalitas menurun mencapai 16.94% pada Tahun 2017	35.65	16.94			
				3 Angka kriminalitas tertangani mencapai 60% pada Tahun 2017	18.70	60			
				4 Persentase penurunan jumlah kriminalitas yang terjadi mencapai 16.94% pada Tahun 2017	35.65	16.94			
				5 Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan mencapai 70% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	70			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				1 Persentase peningkatan jumlah kasus penyakit masyarakat (Pekat) yang ditangani mencapai 80% pada Tahun 2017 2 Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat (Pekat) menurun 20% setiap tahunnya hingga mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data  Belum tersedia data	80  40	5 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	1 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 SKPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2 Meningkatkan stabilitas daerah guna menunjang aktifitas perekonomian masyarakat khususnya dunia investasi dan usaha masyarakat	1 Menciptakan forum dialogis politik dan sosial masyarakat	1 Peningkatan peranserta masyarakat dalam bidang politik dan organisasi kemasyarakatan	1 Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang berperan aktif dalam politik dan organisasi kemasyarakatan meningkat 60% pada Tahun 2017 2 Angka partisipasi perempuan dalam legislatif meningkat mencapai 30% pada Tahun 2017 1 Persentase jumlah organisasi/ lembaga masyarakat yang berperan positif dalam mendukung pencapaian visi pembangunan mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data  Belum tersedia data  Belum tersedia data	60  30  80	6 Program Pendidikan Politik Masyarakat  7 Program Pengembangan Pendidikan Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat	1 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri  1 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	SKPD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri  SKPD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				2 Persentase peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja organisasi masyarakat mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
			2 Penguatan kelembagaan dalam peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat	1 Cakupan penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban daerah mencapai 100% setiap tahunnya 2 Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mencapai 100% pada Tahun 2017 3 Persentase penurunan jumlah gugatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Singkawang mencapai 70% pada Tahun 2017	Belum tersedia data  Belum tersedia data  Belum tersedia data	100  100  70	8 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
				1 Persentase jumlah penyelesaian sengketa pertanahan meningkat mencapai 30% pada Tahun 2017 2 Persentase konflik pertanahan yang diselesaikan melalui jalur hukum menurun sebesar 5% pada Tahun 2017	Belum tersedia data  Belum tersedia data	30  5	9 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pemerintahan	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				1 Cakupan informasi pertanahan milik pemerintah meningkat 60% pada Tahun 2017  2 Persentase pendataan penduduk yang memiliki lahan bersertifikat meningkat sebesar 55% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60	10 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	1 Urusan Wajib Pertanahan	1 SKPD Pengampu Urusan Pertanahan
					Belum tersedia data	55			

**Tabel 7.9.**

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Pembangunan**

Misi Kedelapan : Memfasilitasi masyarakat dalam bidang kebudayaan, pariwisata dan olahraga serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
1 Memberikan ruang gerak bagi tumbuh kembang ekspresi dan ide kreatif budaya dan olah-raga Kota Singkawang yang heterogen agar mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional	1 Menjadikan Kota Singkawang sebagai daerah tujuan wisata yang inovatif, menarik dan tetap bermartabat	1 Meningkatkan peran serta masyarakat khususnya generasi muda dalam mengekspresikan kreatifitas dan inovasi dalam seni dan budaya	1 Pementasan gelar seni dan budaya Kota Singkawang secara berkala dan bersinergi dengan <i>event-event</i> budaya di tingkat provinsi dan nasional dengan tetap menjaga karakteristik daerah yang khas	1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 6 kali setiap tahunnya 2 Cakupan fasilitasi seni mencapai 100% pada Tahun 2017 3 Cakupan gelar seni mencapai 100% pada Tahun 2017 4 Misi kesenian mencapai 100% pada Tahun 2017 5 Persentase penyelenggaraan " <b>Singkawang Festival</b> " yang berdaya saing hingga tingkat nasional bahkan internasional meningkat sebesar 70% pada Tahun 2017 6 Persentase pagelaran seni dan budaya sekolah di pentas-pentas regional dan nasional mencapai 70% pada Tahun 2017	6  Belum tersedia data  Belum tersedia data  Belum tersedia data  Belum tersedia data	6  100  100  100  70  70	1 Program Penyelenggaraan Festival Daerah	1 Urusan Wajib Kebudayaan	1 SKPD Pengampu Urusan Kebudayaan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				7 Cakupan publikasi promosi festival seni dan budaya Kota Singkawang hingga tingkat internasional mencapai 70% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	70			
			2 Pengembangan inovasi potensi dan keragaman seni dan budaya daerah sehingga layak menjadi daya tarik kepariwisataan yang perlu dilindungi dan dilestarikan	1 Persentase penyusunan model pengembangan seni dan budaya daerah terpadu dengan <i>Pilot Project</i> berlokasi di Kecamatan Singkawang Selatan, Utara dan Timur sebagai kawasan wisata terpadu yang berwawasan lingkungan dengan tatanan kehidupan budaya Cina, Dayak dan Melayu yang bermartabat mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	2 Program Perencanaan Sosial Budaya	1 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	1 SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan
				2 Cakupan kajian seni meningkat 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase implementasi inovasi pengembangan seni dan budaya mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				4 Cakupan perencanaan pengembangan olahraga terpadu mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				1 Cakupan organisasi seni dan budaya mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	3 Program Pengembangan Nilai Budaya	1 Urusan Wajib Kebudayaan	SKPD Pengampu Urusan Kebudayaan
				2 Cakupan sumberdaya manusia kesenian mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Cakupan tempat pementasan gelar budaya mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				4 Cakupan upaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				5 Persentase peningkatan kualitas pelestarian budaya mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				6 Persentase penatagunaan naskah dan benda kuno milik Kota Singkawang mencapai 20% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	20			
				7 Persentase ketersediaan kebijakan tentang perlindungan budaya lokal daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				8 Persentase peningkatan pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				9 Persentase publikasi potensi dan promosi budaya daerah melalui media online meningkat 20% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	20			
			3 Pembelajaran seni budaya terintegrasi pendidikan karakter	1 Persentase penyusunan model pembelajaran seni budaya/ seni rupa yang inovatif dengan menerapkan pembelajaran seni budaya berbasis <i>lateral thinking</i> mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	4 Program Pelestarian Budaya Daerah	1 Urusan Wajib Kebudayaan	SKPD Pengampu Urusan Kebudayaan
				2 Persentase pembelajaran seni budaya terintegrasi pendidikan karakter mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase peningkatan jumlah sekolah yang memiliki sanggar tari sekolah pada tingkat pendidikan 12 tahun mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Persentase peningkatan jumlah sekolah yang memiliki sanggar seni dan musik yang dikelola sekolah pada tingkat pendidikan 12 tahun mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
	2 Meningkatnya prestasi olahraga Kota Singkawang yang kompetitif	1 Mendorong peran serta orangtua, masyarakat dan sektor swasta agar lebih aktif dan antusias dalam mendukung cabang olahraga unggulan Kota Singkawang	1 Peningkatan pembinaan atlet usia dini dan pengembangan cabang olahraga	<p>1 Persentase jumlah anak didik berbakat usia 5 - 12 tahun yang dipersiapkan menjadi atlet cabang olahraga mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>2 Persentase cabang olahraga daerah yang memperoleh penghargaan mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>3 Persentase peningkatan jumlah cabang olahraga berorientasi prestasi yang unggul di tingkat regional dan nasional mencapai 60% pada Tahun 2017</p> <p>4 Persentase penyelenggaraan kompetisi olahraga kompetitif hingga tingkat provinsi dan nasional mencapai 100% pada Tahun 2017</p>	Belum tersedia data	100	5 Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	1 Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga	1 SKPD Penguasaan Urusan Pemuda dan Olahraga
					Belum tersedia data	100			
					Belum tersedia data	60			
					Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				5 Persentase peningkatan kesejahteraan atlet, pelatih dan teknisi olahraga yang mengharumkan nama Kota Singkawang mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				6 Cakupan pengembangan olahraga kreasi dan olahraga khusus penyandang cacat mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				7 Persentase peningkatan kontribusi pendanaan dari pihak swasta melalui penataan manajemen CSR bidang olahraga mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				8 Persentase masyarakat yang aktif melaksanakan 1 cabang olahraga minimal 1 kali seminggu mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
			2 Pengembangan metode pemasaran masyarakatan olahraga	1 Persentase peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	6 Program Evaluasi Kinerja Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
				2 Cakupan pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi olahragawan mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				3 Cakupan pembinaan manajemen organisasi olahraga mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				4 Cakupan implementasi kebijakan nasional bidang olahraga yang ditindaklanjuti mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				5 Cakupan kerjasama kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				6 Persentase peningkatan jumlah sekolah yang memiliki klub olahraga prestasi sekolah pada tingkat pendidikan 12 tahun mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				7 Persentase peningkatan jumlah prestasi kompetisi olahraga sekolah mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				1 Persentase ketersediaan prasarana dan sarana olahraga dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60	7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1 Urusan Wajib Kebudayaan	SKPD Pengampu Urusan Kebudayaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				2 Persentase pengembangan kemitraan pembangunan sarana olahraga berbasis IPTEK mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
2 Menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Singkawang	1 Terwujudnya kesetiakawanan sosial dan memperkecil kesenjangan sosial	1 Meningkatkan harkat dan martabat masyarakat miskin dan membantu mereka mengentaskan diri dari kemiskinan dan permasalahan sosial	1 Penyantunan dan pengentasan gelandangan, pengemis, tunasusila, anak nakal dan korban narkoba terutama melalui bimbingan sosial dan motivasi	1 Persentase tingkat kemandirian anak terlantar mencapai 80% pada Tahun 2017 2 Persentase penurunan jumlah komunitas anak-anak <i>punk</i> mencapai 80% pada Tahun 2017 3 Cakupan penanganan anak terlantar tanpa identitas mencapai 80% pada Tahun 2017 4 Persentase penurunan jumlah anak-anak gelandangan pada Tahun 2017 5 Persentase anak-anak gelandangan/ jalanan/ terlantar yang melanjutkan sekolah mencapai 80% pada Tahun 2017 6 Tingkat pendidikan ditamatkan oleh anak terlantar mencapai 12% pada Tahun 2017	Belum tersedia data Belum tersedia data Belum tersedia data Belum tersedia data Belum tersedia data Belum tersedia data	80 80 80 80 80 12	8 Program Pembinaan Anak Terlantar	1 Urusan Wajib Sosial	1 SKPD Pengampu Urusan Sosial

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				7 Persentase transparansi lembaga/ yayasan dalam pengelolaan bantuan sosial penanganan anak terlantar mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				1 Persentase panti sosial skala Kota Singkawang yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial mencapai 100% pada Tahun 2017	83.3	100	9 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1 Urusan Wajib Sosial	1 SKPD Pengampu Urusan Sosial
				2 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial mencapai 100% pada Tahun 2017	7.69	100			
				3 Persentase korban bencana skala kabupaten/ kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap mencapai 100% pada Tahun 2017	26.98	100			



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Persentase PMKS skala Kota Singkawang yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar mencapai 100% pada Tahun 2017	20.03	100			
				5 Persentase korban bencana skala kabupaten/ kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat mencapai 100% pada Tahun 2017	33.16	100			
				6 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial mencapai 100% pada Tahun 2017	53.84	100			
				7 Persentase korban bencana skala kabupaten/ kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat mencapai 100% pada Tahun 2017	33.16	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				8 Persentase penyanggand cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				1 Persentase panti asuhan/ panti jompo yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	10 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	1 Urusan Wajib Sosial	1 SKPD Pengampu Urusan Sosial
				2 Persentase panti asuhan/panti jompo yang memiliki manajemen transparansi pengelolaan bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase ketersediaan prasarana dan sarana panti asuhan/panti jompo yang memenuhi persyaratan kesehatan dan sanitasi mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Persentase jumlah orang pada panti asuhan/ panti jompo yang memperoleh pelayanan pemeriksaan kesehatan dasar secara berkala mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80			
			2 Pembinaan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar memiliki kualitas dan daya saing dalam menghadapi tuntutan, kebutuhan, serta tantangan dan persaingan di era global dan memanfaatkan kesempatan kerja yang ada	1 Persentase tingkat kemandirian bekas gelandangan, pengemis, tunasusil, korban narkoba dan penyandang permasalahan sosial lainnya mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80	11 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	1 Urusan Wajib Sosial	1 SKPD Pengampu Urusan Sosial
				2 Persentase penurunan jumlah gelandangan, pengemis, tunasusila dan korban narkoba, eks narapidana, PSK dan penyakit sosial lainnya mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80			
				3 Cakupan penanganan gelandangan, pengemis, tunasusila dan korban narkoba, eks narapidana, PSK dan penyakit sosial lainnya mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Persentase mantan penghuni penampungan sosial yang telah mampu hidup mandiri mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80			
				5 Persentase penurunan jumlah mantan penghuni penampungan sosial yang kembali mengalami permasalahan sosial mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				1 Persentase (%) PMKS skala Kota Singkawang yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya mencapai 100% pada Tahun 2017	7.68	100	12 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1 Urusan Wajib Sosial	1 SKPD Pengampu Urusan Sosial
				2 Persentase menurunnya jumlah PMKS melalui program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				3 Persentase peningkatan pelatihan keterampilan bagi eks PMKS mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja ( <i>Outcome</i> )	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Persentase peningkatan jumlah eks PMKS yang memiliki sertifikasi keahlian khusus dan keterampilan bekerja mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				5 Persentase produk kreatif olahan eks PMKS mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80			
				6 Cakupan jangkauan penjualan produk kreatif olahan eks PMKS mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				7 Penerimaan pendapatan penjualan produk kreatif olahan PMKS mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				8 Persentase perusahaan/tempat usaha milik swasta yang menerima eks PMKS terlatih dan terampil mencapai 20% setiap tahunnya	Belum tersedia data	20			
				9 Persentase tempat usaha kreatif yang dikelola oleh eks PMKS terlatih dan terampil mencapai 20% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	20			

**Tabel 7.10.**

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Pembangunan**

Misi Kesembilan : Reformasi birokrasi dan tatalaksana pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
1 Membangun aparatur dan organisasi yang kredibel, akuntabel, transparan, berintegritas, berwibawa dan taat kepada hukum	1 Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan agar lebih profesional dan mengedepankan kinerja	1 Menerapkan sistem pengelolaan dan budaya kerja aparatur yang berbasis kinerja secara terpadu, terintegrasi dan transparan	1 Perencanaan dan penataan kepegawaian dengan memperhatikan rasionalitas jumlah dan kualitas aparatur	1 Reformulasi perancangan rencana pengembangan sistem penataan jumlah dan distribusi PNS mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	1 Program Penataan Jumlah dan Distribusi PNS	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
				2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang penataan dan distribusi PNS mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase ketersediaan dasar hukum mengenai pedoman, tatacara/ mekanisme dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang penataan jumlah dan distribusi PNS mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				4 Persentase kesesuaian antara jumlah pegawai yang direncanakan terhadap kebutuhan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				5 Persentase kesesuaian pendistribusian aparatur berdasarkan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				6 Angka pengunduran diri aparatur pada jabatan yang diemban mencapai 0% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	0			
				7 Angka keluhan kebijakan pendistribusian aparatur mencapai 0% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	0			
				1 Reformulasi perancangan rencana pengembangan sistem seleksi CPNS dan PNS secara terbuka mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	2 Program Sistem Seleksi CPNS dan PNS Secara Terbuka	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
				2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang sistem seleksi CPNS dan PNS secara terbuka mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase ketersediaan dasar hukum mengenai pedoman, tatacara/ mekanisme dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang penataan jumlah dan distribusi PNS mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				4 Persentase kesesuaian penerimaan PNS berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				5 Angka pengunduran diri CPNS mencapai 0% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	0			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				6 Angka keluhan kebijakan seleksi CPNS dan PNS secara terbuka mencapai 0% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	0			
				7 Persentase pengembangan sistem informasi seleksi CPNS dan PNS secara terbuka berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
			2 Penempatan pegawai secara selektif dengan memperhatikan kapasitas dan kompetensi aparatur agar memiliki pola karir - pola kerja PNS yang jelas dan terarah melalui pengaturan jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Singkawang	1 Reformulasi perancangan rencana pengusulan formasi dan sistem seleksi sumberdaya aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	3 Program Pengusulan Formasi dan Sistem Seleksi Sumberdaya Aparatur	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
				2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pengusulan formasi dan sistem seleksi sumberdaya aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase ketersediaan dasar hukum mengenai pedoman, tatacara/ mekanisme dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang pengusulan formasi dan sistem seleksi sumberdaya aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Persentase kesesuaian pengusulan formasi dan sistem seleksi sumberdaya aparatur terhadap kebutuhan SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				5 Persentase pengusulan peningkatan jabatan aparatur sesuai hasil evaluasi pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				6 Persentase pegawai yang ditempatkan pada SKPD sesuai kompetensi mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
			3 Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk menghasilkan PNS yang memiliki pola pikir-sikap-perilaku produktif dan inovatif	1 Reformulasi perancangan rencana pengembangan kinerja ( <i>performance</i> ) PNS dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	4 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
				2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pembinaan dan pengembangan aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase ketersediaan dasar hukum mengenai pedoman, tatacara/ mekanisme dan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) bagi SKPD tentang pembinaan dan pengembangan aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Persentase peningkatan jumlah aparatur yang produktif dan inovatif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80			
				5 Persentase peningkatan jumlah aparatur yang memperoleh pengangkatan jabatan berdasarkan produk dan inovasi yang dilaksanakan aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				6 Cakupan publikasi produk dan inovasi aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				1 Reformulasi perancangan rencana pendidikan kedinasan aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	5 Program Pendidikan Kedinasan	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
				2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pendidikan kedinasan aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase ketersediaan dasar hukum mengenai pedoman, tatacara/ mekanisme dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang pendidikan kedinasan aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Persentase kesesuaian pemberian pendidikan kedinasan kepada PNS yang akan ditingkatkan kompetensinya sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				5 Persentase diklat struktural yang diselenggarakan Pemerintah Kota Singkawang sesuai potensi dan rencana penjenjangan karir PNS terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				6 Persentase aparatur yang dikirim mengikuti diklat struktural menurun 20% setiap tahunnya hingga mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				7 Persentase jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan ujian kedinasan berjenjang sesuai peraturan yang berlaku dan kebutuhan penjenjangan karir PNS mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				8 Rasio jumlah PNS yang menduduki jabatan yang telah mengikuti pendidikan jabatan terhadap jumlah jabatan yang tersedia mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab			
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD						
				<p>1 Reformulasi perancangan rencana pengembangan profesionalisme PNS dan aparatur pemerintah Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan (<i>policy reformulation</i>) tentang peningkatan profesionalisme PNS mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>3 Persentase ketersediaan dasar hukum mengenai pedoman, tatacara/ mekanisme dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan profesionalisme aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>4 Persentase ketersediaan dasar hukum mengenai tatacara/ mekanisme dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang tugas belajar dan ijin belajar untuk peningkatan profesionalisme aparatur sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>5 Persentase diklat fungsional yang diselenggarakan Pemerintah Kota Singkawang untuk peningkatan kompetensi aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mencapai 100% pada Tahun 2017</p>	<p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	6	Program Profesionalisasi Aparatur	1	<p>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</p>	1	<p>SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD				
				6	Persentase aparatur yang ditempatkan sesuai dengan diklat fungsional yang ditugaskan mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				7	Persentase kesesuaian peningkatan profesionalisme PNS terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				8	Persentase penurunan ketidaksesuaian peningkatan profesionalisme PNS terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pada SKPD mencapai 0% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	0			
				9	Cakupan publikasi informasi beasiswa penjurangan pendidikan formal PNS yang didanai non APBD mencapai 100% setiap tahunnya	Belum tersedia data	100			
				10	Cakupan publikasi diklat fungsional teknis mencapai 100% setiap tahunnya	Belum tersedia data	100			
				11	Cakupan publikasi karya tulis PNS setelah mengikuti penjurangan pendidikan formal yang didanai APBD dan non APBD meningkat hingga mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				12	Cakupan publikasi karya tulis PNS setelah mengikuti diklat fungsional dan struktural yang didanai APBD dan non APBD meningkat hingga mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
			4 Pemberian penghargaan dan penjatuh-an hukuman ( <i>reward and punishment</i> ) kepada PNS	<p>1 Persentase penyesuaian kembali kebijakan (<i>policy reformulation</i>) tentang penguatan sistem disiplin dan etika profesi PNS mencapai 100%</p> <p>2 Persentase ketersediaan dasar hukum mengenai pedoman, tatacara/ mekanisme dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang penguatan sistem disiplin dan etika profesi PNS mencapai 100% pada Tahun 2015</p> <p>3 Persentase PNS berkinerja (<i>performance</i>) baik dan disiplin meningkat 40% tiap tahunnya hingga mencapai 80% pada Tahun 2017</p> <p>4 Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika PNS menurun 40% tiap tahunnya hingga Tahun 2017</p>	Belum tersedia data	100	7 Program Penguatan Sistem Disiplin dan Etika PNS	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
			5 Pengaturan tunjangan, gaji, dan kesejahteraan PNS secara adil, layak dan proporsional.	<p>1 Persentase penyesuaian kembali kebijakan (<i>policy reformulation</i>) tentang peningkatan kesejahteraan pegawai negeri mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>2 Persentase ketersediaan dasar hukum mengenai pedoman, tatacara/ mekanisme dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang penilaian pengukuran dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri PNS mencapai 100% pada Tahun 2017</p>	Belum tersedia data	100	8 Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				3 Persentase kesesuaian pengalokasian peningkatan kesejahteraan PNS secara proposional dan rasional berdasarkan beban kerja dan kinerja ( <i>performance</i> ) sesuai dengan keuangan daerah meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
	2 Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana organisasi pemerintah yang baik, benar, inovatif dan akuntabel	1 Melaksanakan penataan kelembagaan organisasi yang tepat fungsi dalam memberikan pelayanan publik prima	1 Penyesuaian Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah (SOPD) sesuai kebutuhan dan kekuatan keuangan daerah dengan tetap memperhatikan amanat UU dan peraturan yang berlaku melalui penataan hubungan urusan dan kewenangan antarSKPD, antara SKPD dan Kecamatan, antara Kecamatan dan Kelurahan termasuk hubungan kewenangan dan urusan antara SKPD dengan lembaga teknis lainnya	1 Reformulasi perancangan penataan organisasi Kota Singkawang secara efisien, efektif, dan akuntabel dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, target pelayanan publik prima dan pembagian beban kerja organisasi secara proporsional dan rasional mencapai 100% pada Tahun 2017 2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pendistribusian tugas pokok dan fungsi SKPD agar memenuhi standar dan kriteria optimal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mencapai 100% pada Tahun 2017 3 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pembagian urusan dan kewenangan organisasi agar tidak tumpang tindih mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	9 Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
					Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pedoman, mekanisme/ tata-cara dan tahapan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD terhadap pencapaian target penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar tepat sasaran mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				5 Persentase SKPD tepat fungsi dalam memenuhi kriteria standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik baik administrasi dan teknis mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				6 Persentase ketersediaan pedoman/ panduan/ juklak/ juknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD berbasis kinerja ( <i>performance</i> ) dan berorientasi <i>outcome/result</i> mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				7 Persentase jumlah SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi berbasis akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) dan berorientasi <i>outcome/result</i> mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				8 Persentase SKPD yang tepat tugas dan fungsi berdasarkan pelimpahan pelaksanaan urusan dan kewenangan pemerintahan daerah mencapai 100%	Belum tersedia data	100			



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				1 Reformulasi perancangan pengembangan kinerja ( <i>performance</i> ) organisasi agar memiliki pola kerja kreatif dan inovatif mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	10 Program Pengembangan Kinerja Organisasi	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
				2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/tatacara dan tahapan pengembangan kinerja ( <i>performance</i> ) organisasi agar kreatif dan inovatif mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				4 Persentase ketersediaan standar penilaian dan pengukuran pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) organisasi meningkat hingga mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80			
				5 Persentase jumlah SKPD yang memiliki peningkatan pencapaian variabel kinerja ( <i>performance</i> ) berdasarkan tupoksi meningkat hingga mencapai 60% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	60			
				6 Persentase SKPD yang memenuhi target pencapaian indikator variabel keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan pelimpahan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah mencapai 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				7 Cakupan publikasi penilaian pencapaian pengembangan kinerja ( <i>performance</i> ) SKPD agar efektif dan efisien dalam pelaksanaan tupoksi SKPD mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
		2 Melakukan inovasi penyerderhanaan ketatalaksanaan dan efisiensi organisasi melalui penguatan payung hukum dan penggunaan sistem informasi pelayanan pemerintahan agar lebih efektif, efisien dan optimal dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik	1 Penerapan sistem, mekanisme dan prosedur, ketatalaksanaan internal dan eksternal manajemen pemerintahan yang transparan, terpadu dan tepat sasaran fungsi	1 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang penatalaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD agar efektif, efisien dan transparan dalam pelayanan baik teknis maupun administratif mencapai 100% pada Tahun 2017 2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pedoman, mekanisme/ tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017 3 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pencapaian target-target SPM, SPP dan SP SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	11 Program Penguatan Ketatalaksanaan Organisasi	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur pengukuran/penilaian penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				5 Persentase SKPD yang memiliki juklak/ juknis/ SOP pencapaian target SPM dan SPP baik teknis dan administratif secara transparan, efisien dan efektif mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				6 Persentase SKPD yang mempublikasikan SOP pelayanan baik teknis dan administratif secara elektronik mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				7 Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan pelaksanaan pencapaian target-target SPM dan SPP hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				8 Cakupan publikasi transparansi, efektifitas dan efisiensi kinerja ( <i>performance</i> ) pelayanan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan SOP yang ditetapkan mencapai 100% hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				9 Angka keluhan pelayanan SKPD berbasis IT mencapai 0% hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	0			
			2 Peningkatan keterbukaan informasi publik berbasis IT melalui implementasi sistem informasi yang terkoneksi dan terpadu dengan sistem kearsipan daerah sebagai rekam jejak dinamika pemerintahan dan pembangunan Kota Singkawang	<p>1 Persentase penyesuaian kembali kebijakan (<i>policy reformulation</i>) tentang penatalaksanaan penerapan e-Government (e-Gov) dalam mendukung keterbukaan informasi publik (KIP) mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan (<i>policy reformulation</i>) tentang pedoman, mekanisme/ tata cara dan tahapan penerapan e-Gov SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>3 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pencapaian efisiensi dan efektifitas penerapan e-Gov SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>4 Persentase implementasi e-Government yang sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah meningkat hingga mencapai 100% hingga Tahun 2017</p>	<p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	12 Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				1 Persentase kebijakan transparansi berbasis IT bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	13 Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	1 SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan
				2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase sistem data perencanaan yang terintegrasi dengan SKPD mencapai 100%	Belum tersedia data	100			
				4 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang SOP implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				5 Persentase jumlah SKPD yang menggunakan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan secara tepat dan akurat mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				6 Persentase akurasi dan transparansi pengelolaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				<p>1 Persentase kebijakan transparansi berbasis IT perencanaan, pengendalian dan evaluasi penganggaran pembangunan mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan (<i>policy reformulation</i>) tentang mekanisme/tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi penganggaran pembangunan mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>3 Persentase penyesuaian kembali kebijakan (<i>policy reformulation</i>) tentang SOP implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi penganggaran pembangunan berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>4 Persentase jumlah SKPD yang menggunakan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi penganggaran pembangunan secara tepat dan akurat mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>5 Persentase akurasi dan transparansi pengelolaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi penganggaran pembangunan daerah berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017</p>	Belum tersedia data	100	14 Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penganggaran Pembangunan	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				6 Persentase kebijakan transparansi berbasis IT bidang pengelolaan perbendaharaan, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				7 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pemanfaatan sistem informasi pengelolaan perbendaharaan, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				8 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang SOP implementasi pengelolaan perbendaharaan, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				9 Persentase jumlah SKPD yang menggunakan sistem informasi pengelolaan perbendaharaan, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara tepat dan akurat mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				10 Persentase akurasi dan transparansi pengelolaan perbendaharaan, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				<p>1 Persentase penyesuaian kembali kebijakan (<i>policy reformulation</i>) peningkatan keterlibatan <i>stakeholders</i> dalam peningkatan pendapatan daerah berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>2 Persentase kebijakan transparansi berbasis IT bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi peningkatan pendapatan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>3 Persentase penyesuaian kembali kebijakan (<i>policy reformulation</i>) tentang mekanisme/tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi peningkatan pendapatan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>4 Persentase penyesuaian kembali kebijakan (<i>policy reformulation</i>) tentang SOP implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi peningkatan pendapatan daerah berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>5 Persentase jumlah SKPD terkait pendapatan daerah yang menggunakan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi peningkatan pendapatan daerah secara tepat dan akurat mencapai 100% pada Tahun 2017</p>	Belum tersedia data	100	15 Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				6 Persentase akurasi dan transparansi pengelolaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi peningkatan pendapatan daerah berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				7 Cakupan <i>stakeholders</i> (objek pajak dan retribusi daerah) yang terintegrasi dengan sistem informasi peningkatan pendapatan daerah secara transparan, terukur dan tepat sasaran mencapai 100% hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				1 Persentase kebijakan transparansi berbasis IT Sistem Akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) Instansi Pemerintah (SAKIP) mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	16 Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
				2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/tatacara dan tahapan penerapan SAKIP berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase sistem data pengukuran pencapaian kinerja ( <i>performance</i> ) SKPD yang terintegrasi dengan pencapaian kinerja ( <i>performance</i> ) penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Singkawang mencapai 100% hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Persentase efisiensi keterkaitan pencapaian kinerja ( <i>performance</i> ) Kepala SKPD yang terintegrasi dengan pencapaian kinerja ( <i>performance</i> ) dan pertanggungjawaban Walikota Singkawang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Singkawang mencapai 100% hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				5 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang SOP implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) Instansi Pemerintah (SAKIP) berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				6 Persentase keterkaitan pencapaian kinerja ( <i>performance</i> ) SKPD yang terintegrasi dengan pencapaian kinerja ( <i>performance</i> ) penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Singkawang mencapai 100%	Belum tersedia data	100			
				7 Persentase akurasi dan transparansi pengelolaan Sistem Akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) Instansi Pemerintah (SAKIP) berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				8 Persentase jumlah SKPD yang menggunakan sistem informasi Sistem Akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) Instansi Pemerintah (SA-KIP) secara tepat dan akurat mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				9 Angka keluhan hasil evaluasi pengukuran pencapaian kinerja ( <i>performance</i> ) SKPD berbasis IT mencapai 0% hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	0			
				1 Persentase ketersediaan dan pengelolaan arsip kartografi dan kearsitekturan mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	50	17 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	1 Urusan Wajib Kearsipan	1 SKPD Pengampu Urusan Kearsipan
				2 Persentase ketersediaan dan pelestarian arsip daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
		2 Meningkatkan sistem pengendalian internal instansi pemerintahan agar setiap lini penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berada dalam koridor yang terarah, terukur, terpadu dan akuntabel dalam menciptakan pelayanan publik prima bagi masyarakat	1 Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terintegrasi, akuntabel berbasis kinerja ( <i>accountable based performance</i> ) dan berorientasi hasil ( <i>result oriented</i> )	1 Persentase ketersediaan dasar hukum perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	18 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan
				2 Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan tingkat SKPD yang bersinergi dengan dokumen perencanaan tingkat kota mencapai 100% hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase dokumen perencanaan tahunan SKPD yang akuntabel, berbasis kinerja ( <i>performance</i> ) dan berorientasi hasil ( <i>result oriented</i> ) mencapai 100% hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Persentase dokumen perencanaan yang bersinergi dengan dokumen penganggaran tahunan SKPD mencapai 100% hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				5 Persentase program prioritas SKPD yang memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan daerah tahunan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				6 Persentase program dan kegiatan SKPD yang diakomodir dalam dokumen perencanaan kota tahunan meningkat hingga mencapai 100%	Belum tersedia data	100			
				7 Persentase peningkatan jumlah keterlibatan masyarakat dalam proses MUSRENBANG tahunan meningkat 20% hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				8 Persentase peningkatan jumlah keterlibatan anggota legislatif dalam proses MUSRENBANG meningkat 50% hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				1 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/tatacara dan tahapan pengelolaan anggaran daerah yang akuntabel berbasis kinerja ( <i>performance</i> ) ( <i>accountable based performance</i> ) dan berorientasi hasil ( <i>result oriented</i> ) mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	19 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/ tatacara dan tahapan pelaksanaan penganggaran SKPD yang bersinergi dengan penganggaran daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase ketersediaan dokumen penganggaran pembangunan tingkat kota yang disusun sesuai peraturan yang berlaku dan tepat waktu mencapai 100% hingga Tahun 2017	20	100			
				4 Persentase ketersediaan pedoman/ panduan/ juklak/ juknis pelaksanaan penganggaran ( <i>costing</i> ) program dan kegiatan SKPD agar akuntabel berbasis kinerja ( <i>performance</i> ) ( <i>accountable based performance</i> ) dan berorientasi hasil ( <i>result oriented</i> ) mencapai 100%	Belum tersedia data	100			
				5 Persentase ketersediaan SOP penganggaran program dan kegiatan SKPD yang bersinergi dengan rencana penganggaran pembangunan daerah tahunan meningkat hingga mencapai 100%	Belum tersedia data	100			
				6 Persentase ketersediaan regulasi tentang perencanaan, pengendalian dan evaluasi penganggaran daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				7 Persentase ketersediaan regulasi tentang rasionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas penganggaran pembangunan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				8 Persentase ketersediaan dokumen penganggaran pembangunan tingkat SKPD yang bersinergi dengan dokumen penganggaran tingkat kota mencapai 100% hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				9 Persentase dokumen penganggaran tahunan SKPD yang akuntabel berbasis kinerja ( <i>performance</i> ) dan berorientasi hasil ( <i>result oriented</i> ) mencapai 100% hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				10 Persentase rasionalitas dan proporsionalitas penganggaran program prioritas SKPD tahunan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				11 Persentase rasionalitas dan proporsionalitas penganggaran program dan kegiatan SKPD tahunan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				12 Persentase usulan penganggaran program dan kegiatan SKPD yang disetujui dan tertuang dalam dokumen penganggaran pembangunan daerah tahunan (APBD) meningkat hingga mencapai 100%	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				13 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/tatacara dan tahapan pengelolaan aset SKPD agar transparan, akuntabel dan tepat manfaat mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				14 Persentase ketersediaan regulasi tentang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pengadaan aset daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				15 Persentase ketersediaan dokumen aset SKPD yang sesuai dengan kepemilikan aset kota sesuai dengan peraturan yang berlaku mencapai 100% hingga Tahun 2017	20	100			
				16 Persentase ketersediaan pedoman/ panduan/ juklak/ juknis tata kelola dan pengadaan aset SKPD dengan mempertimbangkan keuangan daerah dan kemendesakan pengadaan aset mencapai 100% hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				17 Persentase ketersediaan SOP penganggaran pengadaan aset yang bersinergi dengan rencana penganggaran pengadaan aset daerah tahunan meningkat hingga mencapai 100%	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				18 Persentase ketersediaan regulasi tentang rasionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas perencanaan pengadaan aset tahunan SKPD mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				1 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/tatacara dan tahapan peningkatan dan pengembangan akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) dan keuangan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	20 Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
				2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/tatacara dan tahapan peningkatan dan pengembangan akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) dan keuangan daerah yang bersinergi dengan peningkatan dan pengembangan akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) SKPD mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase ketersediaan dokumen peningkatan dan pengembangan akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) dan keuangan daerah tingkat kota yang disusun sesuai peraturan yang berlaku dan tepat waktu mencapai 100% hingga Tahun 2017	20	100			



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Persentase ketersediaan pedoman/ panduan/ juklak/ juknis peningkatan dan pengembangan akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) dan keuangan daerah mencapai 100%	Belum tersedia data	100			
				5 Persentase ketersediaan SOP peningkatan dan pengembangan akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) dan keuangan daerah tahunan meningkat hingga mencapai 100%	Belum tersedia data	100			
				7 Persentase ketersediaan dokumen akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) dan keuangan daerah tingkat SKPD yang bersinergi dengan dokumen akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) dan keuangan tingkat kota mencapai 100% hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				8 Persentase dokumen akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) dan keuangan tahunan SKPD yang sesuai dengan standar penilaian yang berlaku mencapai 100% hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab				
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD							
				1	Persentase pelaporan pengelolaan kinerja ( <i>performance</i> ) SKPD berdasarkan tugas pokok dan fungsi dengan predikat B meningkat 20% setiap tahunnya hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	21	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
				2	Persentase pelaporan pengelolaan keuangan SKPD dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat 20% setiap tahunnya hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100						
				3	Persentase pelaporan pengelolaan aset SKPD dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat 20% setiap tahunnya hingga 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100						
				4	Persentase pelaporan pengelolaan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pencapaian tugas pokok dan fungsi SKPD dengan predikat B meningkat 20% setiap tahunnya hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100						
				5	Persentase peningkatan jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Wajar bebas dari Korupsi (WBK) meningkat 20% hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100						

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				6 Persentase pelaporan pengelolaan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pencapaian tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersinergi dengan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pemerintahan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				7 Persentase jumlah SKPD yang melaksanakan perencanaan, pengukuran dan penilaian kinerja ( <i>performance</i> ) mandiri meningkat 20% setiap tahunnya hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				8 Cakupan publikasi capaian akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) dan keuangan SKPD mencapai 100% hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				1 Pencapaian predikat Baik (A) pada penyelenggaraan akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) instansi pemerintahan pada Tahun 2017	CC	A	22 Program Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih ( <i>Good Governance</i> )	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
				2 Pencapaian predikat Wajar tanpa Pengecualian (WTP) pada pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Tahun 2017	WDP	WTP			
				3 Pencapaian predikat Tinggi pada penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan (LPPD dan LKPJ) pada Tahun 2017	Sedang	Tinggi			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Pencapaian predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Tahun 2017	Belum tersedia data	WBBM			
2 Meningkatkan kepercayaan masyarakat ( <i>public trust</i> ) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	1 Terciptanya peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar dan pelayanan pendukung	1 Melakukan restrukturisasi mekanisme pelayanan publik berorientasi <i>outcome</i> dengan mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan manfaat lingkungan hidup	1 Peningkatan kualitas layanan masyarakat dengan memperpendek jalur birokrasi agar lebih mempermudah masyarakat memperoleh akses baik pelayanan dasar maupun pelayanan pendukung secara transparan, tepat manfaat, murah ( <i>zero cost</i> ) dan memiliki kepastian hukum	1 Reformulasi perancangan pengembangan peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan mencapai 100% pada Tahun 2017 2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/tatacara dan tahapan pengintegrasian peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan mencapai 100% pada Tahun 2017 3 Persentase pengintegrasian pencapaian target SPM dan realisasi peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017 4 Persentase ketersediaan SOP pencapaian target SPM bidang pendidikan mencapai 100% pada Tahun 2017 5 Persentase pencapaian target SPM bidang pendidikan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017 6 Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan bidang pendidikan hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data  Belum tersedia data  Belum tersedia data  Belum tersedia data  Belum tersedia data	100  100  100  100	23 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan	1 Urusan Wajib Pendidikan	1 SKPD Pengampu Urusan Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				7 Cakupan sekolah/ <i>stakeholders</i> terkait yang berintegrasi dalam pencapaian target-target SPM, SPP dan SP bidang pendidikan mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				8 Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja ( <i>performance</i> ) pelayanan masyarakat bidang pendidikan menurun 50% hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				1 Persentase penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Belum tersedia data	20	24 Program Pendidikan Anak Usia Dini	1 Urusan Wajib Pendidikan	1 SKPD Pengampu Urusan Pendidikan
				1 Persentase peningkatan jumlah guru/tenaga pendidik yang kompeten dalam menumbuhkembangkan minat dan bakat siswa pendidikan dasar meningkat 20% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	20	25 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Urusan Wajib Pendidikan	1 SKPD Pengampu Urusan Pendidikan
				2 Persentase peningkatan jumlah guru/tenaga pendidik yang kompeten dalam menumbuhkembangkan minat dan bakat siswa pendidikan menengah mencapai 20% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	20			
				3 Persentase peningkatan jumlah guru/tenaga pendidik yang inovatif dalam mengembangkan metode pengajaran interaktif meningkat 20% tiap tahunnya	Belum tersedia data	20			
				4 Persentase peningkatan KKG berprestasi hingga ke tingkat nasional meningkat 20% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	20			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				5 Persentase peningkatan kompetensi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan meningkat 20% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	20			
				6 Persentase peningkatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG) berprestasi hingga ke tingkat nasional meningkat 20% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	20			
				1 Persentase peningkatan kinerja komite 20% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	20	26 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1 Urusan Wajib Pendidikan	1 SKPD Pengampu Urusan Pendidikan
				2 Persentase peningkatan permasalahan pendidikan yang berhasil ditangani oleh dewan pendidikan mencapai 20% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	20			
				1 Persentase peningkatan jumlah siswa pendidikan dasar berprestasi dalam mata pelajaran/ <i>sains</i> dan seni hingga tingkat nasional meningkat 50% hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	50	27 Program Pengembangan Karakter Siswa Pendidikan Dasar	1 Urusan Wajib Pendidikan	1 SKPD Pengampu Urusan Pendidikan
				2 Persentase peningkatan jumlah sekolah pendidikan dasar berprestasi hingga tingkat nasional meningkat 50% hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				1 Persentase peningkatan jumlah siswa pendidikan menengah berprestasi dalam mata pelajaran/ <i>sains</i> dan seni hingga tingkat nasional meningkat 50% hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	50	28 Program Pengembangan Karakter Siswa Pendidikan Menengah	1 Urusan Wajib Pendidikan	1 SKPD Pengampu Urusan Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				<p>2 Persentase peningkatan jumlah sekolah pendidikan menengah berprestasi hingga tingkat nasional meningkat 50% hingga Tahun 2017</p> <p>3 Persentase peningkatan jumlah siswa pendidikan menengah kejuruan berprestasi dalam mata pelajaran/<i>sains</i> dan seni hingga tingkat nasional meningkat 50% hingga Tahun 2017</p> <p>4 Persentase peningkatan jumlah sekolah pendidikan menengah kejuruan berprestasi hingga tingkat nasional meningkat 50% hingga Tahun 2017</p>	Belum tersedia data	50			
				<p>1 Persentase kebijakan, pedoman dan tatacara/juklak penerapan pendidikan berbasis karakter pada sekolah baik pendidikan dasar, menengah maupun kejuruan mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>2 Persentase peningkatan jumlah sekolah pendidikan dasar yang mengembangkan muatan lokal berbasis karakter sesuai potensi unggulan daerah Kota Singkawang mencapai 40% pada Tahun 2017</p>	Belum tersedia data	100	29 Program Pendampingan Penerapan Pendidikan Karakter	1 Urusan Wajib Pendidikan	1 SKPD Pengampu Urusan Pendidikan
					Belum tersedia data	40			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				3 Persentase peningkatan jumlah sekolah pendidikan menengah termasuk kejuruan yang mengembangkan muatan lokal berbasis karakter sesuai potensi unggulan daerah Kota Singkawang mencapai 40% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	40			
				1 Persentase peningkatan jumlah sekolah pendidikan dasar dengan angka kelulusan 100% setiap tahunnya meningkat 50% dari tahun sebelumnya hingga 2017	Belum tersedia data	50	30 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar	1 Urusan Wajib Pendidikan	1 SKPD Pengampu Urusan Pendidikan
				2 Persentase penurunan angka putus sekolah anak usia sekolah pendidikan dasar mencapai 100% hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				1 Persentase peningkatan jumlah sekolah pendidikan menengah termasuk sekolah kejuruan dengan angka kelulusan 100% setiap tahunnya meningkat 50% dari tahun sebelumnya hingga 2017	Belum tersedia data	50	31 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah	1 Urusan Wajib Pendidikan	1 SKPD Pengampu Urusan Pendidikan
				2 Persentase peningkatan jumlah sekolah pendidikan menengah kejuruan dengan angka kelulusan 100% setiap tahunnya meningkat 50% dari tahun sebelumnya hingga 2017	Belum tersedia data	50			
				3 Persentase penurunan angka putus sekolah anak usia sekolah pendidikan menengah mencapai 100% hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	100			



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				1 Persentase angka kelulusan kejar Paket A tanpa mengulang mencapai 100% hingga Tahun 2017 2 Persentase angka kelulusan kejar Paket B tanpa mengulang mencapai 100% hingga Tahun 2017 3 Persentase angka kelulusan kejar Paket C tanpa mengulang mencapai 100% hingga Tahun 2017	Belum tersedia data  Belum tersedia data  Belum tersedia data	100  100  100	32 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal	1 Urusan Wajib Pendidikan	1 SKPD Pengampu Urusan Pendidikan
				1 Persentase peningkatan Jumlah pengunjung dan jumlah perpustakaan di masyarakat mencapai 80% pada Tahun 2017 2 Persentase peningkatan wawasan siswa dan masyarakat melalui prestasi di Tk. Propinsi pada lomba karya tulis ilmiah, lomba bedah buku mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data  Belum tersedia data	80  50	33 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1 Urusan Wajib Perpustakaan	SKPD Pengampu Urusan Perpustakaan
				1 Persentase pemanfaatan dan penerapan IT pada perpustakaan daerah dan sekolah di Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017 2 Persentase penerapan perpustakaan hibrida (gabungan perpustakaan konvensional dan digital) di Kota Singkawang terutama pada perpustakaan daerah dan perpustakaan sekolah mencapai 50% pada Tahun 2017	Belum tersedia data  Belum tersedia data	100  50	34 Program Pengembangan Inovasi Daerah Dalam Pelayanan Perpustakaan	1 Urusan Wajib Perpustakaan	1 SKPD Pengampu Urusan Perpustakaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD				
				<p>1 Reformulasi perancangan pengembangan peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan (<i>policy reformulation</i>) tentang pedoman, mekanisme/ tata-cara dan tahapan peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan melalui pendekatan pencegahan dan penyembuhan (<i>preventif dan curatif</i>) mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>3 Persentase pengintegrasian pencapaian target SPM dan realisasi peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>4 Persentase ketersediaan SOP pencapaian target SPM bidang kesehatan mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>5 Persentase pencapaian target SPM bidang kesehatan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>6 Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan hingga mencapai 100% pada Tahun 2017</p>	<p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	35	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan	1 Urusan Wajib Kesehatan	SKPD Pengampu Urusan Wajib Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				7 Cakupan puskesmas/ pus-tu/ <i>stakeholders</i> terkait yang berintegrasi dalam pencapaian target-target SPM, SPP dan SP bidang kesehatan mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				8 Persentase penurunan ke-luhan publik terhadap ki-nerja ( <i>performance</i> ) pelaya-nan masyarakat bidang kesehatan menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				1 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pe-layanan rumahsakit daerah yang akuntabel, berbasis kinerja ( <i>performance</i> ) dan pro rakyat mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	36 Program Pe-ningkatan Kinerja Pe-layanan Ru-mah sakit Daerah	1 Urusan Wajib Kesehatan	1 SKPD Pengam-pu Urusan Kesehatan
				2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang me-kanisme/tatacara dan ta-hapan penerapan tatalak-sana pelayanan rumahsakit daerah yang akuntabel, berbasis kinerja ( <i>perfor-mance</i> ) dan pro rakyat baik teknis maupun administra-tif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				3 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur pelayanan rumah sakit daerah yang akuntabel, berbasis kinerja ( <i>performance</i> ) dan pro rakyat meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				4 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan rumah sakit daerah meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				5 Persentase ketersediaan juklak/juknis/SOP pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) dan akuntabilitas pelayanan rumah sakit daerah baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				6 Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan rumah sakit daerah hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				7 Cakupan publikasi pelayanan rumah sakit daerah berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				8 Angka keluhan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit daerah mencapai 0% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	0			
				1 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pelayanan publik bidang pekerjaan umum mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	37 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pekerjaan Umum	1 Urusan Wajib Pekerjaan Umum	1 SKPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum
				2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/ tatacara dan tahapan penerapan tata-laksana pelayanan publik bidang pekerjaan umum baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang pekerjaan umum meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				4 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang pekerjaan umum meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				<p>5 Persentase ketersediaan juklak/juknis/SOP pencapaian target kinerja (<i>performance</i>) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang pekerjaan umum baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>6 Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang pekerjaan umum hingga mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>7 Cakupan publikasi pelayanan publik bidang pekerjaan umum berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>8 Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja (<i>performance</i>) pelayanan publik bidang pekerjaan umum menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017</p>	<p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>50</p>			
				<p>1 Persentase penyesuaian kembali kebijakan (<i>policy reformulation</i>) tentang pelayanan publik bidang perumahan rakyat mencapai 100% pada Tahun 2017</p>	<p>Belum tersedia data</p>	<p>100</p>	<p>38 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perumahan Rakyat</p>	<p>1 Urusan Wajib Perumahan</p>	<p>1 SKPD Pengampu Urusan Perumahan</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang perumahan rakyat baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang perumahan rakyat meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				4 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang perumahan rakyat meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				5 Persentase ketersediaan juklak/juknis/SOP pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang perumahan rakyat baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				<p>6 Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang perumahan rakyat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>7 Cakupan publikasi pelayanan publik bidang perumahan rakyat berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>8 Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja (<i>performance</i>) pelayanan masyarakat bidang perumahan rakyat menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017</p>	<p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>50</p>			
				<p>1 Persentase penyesuaian kembali kebijakan (<i>policy reformulation</i>) tentang pelayanan publik bidang lingkungan hidup mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan (<i>policy reformulation</i>) tentang mekanisme/tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang lingkungan hidup baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017</p>	<p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p>	<p>100</p> <p>100</p>	<p>39 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup</p>	<p>1 Urusan Wajib Lingkungan Hidup</p>	<p>1 SKPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup</p>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				3 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang lingkungan hidup meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				4 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang lingkungan hidup meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				5 Persentase ketersediaan juklak/juknis/SOP pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang lingkungan hidup baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	90			
				6 Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang lingkungan hidup hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				7 Cakupan publikasi pelayanan publik bidang lingkungan hidup berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				8 Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja ( <i>performance</i> ) pelayanan masyarakat bidang lingkungan hidup menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				1 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pelayanan publik bidang kependudukan mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	40 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan	1 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil	SKPD Pengampu Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
				2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang kependudukan baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang kependudukan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				4 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang kependudukan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				5 Persentase ketersediaan juklak/juknis/SOP pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang kependudukan baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	90			
				6 Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				7 Cakupan publikasi pelayanan publik bidang kependudukan berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				8 Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja ( <i>performance</i> ) pelayanan masyarakat bidang pemerintahan dalam negeri menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				1 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pelayanan publik bidang perhubungan mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	41 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perhubungan	1 Urusan Wajib Perhubungan	SKPD Pengampu Urusan Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang perhubungan baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang perhubungan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				4 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang perhubungan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				5 Persentase ketersediaan juklak/juknis/SOP pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang perhubungan baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				6 Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang perhubungan hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				7 Cakupan publikasi pelayanan publik bidang perhubungan berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				8 Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja ( <i>performance</i> ) pelayanan masyarakat bidang perhubungan menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				1 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pelayanan publik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	42 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 SKPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				3 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				4 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				5 Persentase ketersediaan juklak/juknis/SOP pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				6 Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				<p>7 Cakupan publikasi pelayanan publik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>8 Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja (<i>performance</i>) pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017</p>	Belum tersedia data	100			
				<p>1 Persentase penyesuaian kembali kebijakan (<i>policy reformulation</i>) tentang pelayanan publik bidang sosial mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan (<i>policy reformulation</i>) tentang mekanisme/tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang sosial baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>3 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang sosial meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017</p>	Belum tersedia data	100	43 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Sosial	1 Urusan Wajib Sosial	1 SKPD Pengampu Urusan Sosial
					Belum tersedia data	100			
					Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang sosial meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				5 Persentase ketersediaan juklak/juknis/SOP pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang sosial baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				6 Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang sosial hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				7 Cakupan publikasi pelayanan publik bidang sosial berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				8 Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja ( <i>performance</i> ) pelayanan masyarakat bidang sosial menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	50			



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				<p>1 Persentase penyesuaian kembali kebijakan (<i>policy reformulation</i>) tentang pelayanan publik bidang keluarga berencana mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan (<i>policy reformulation</i>) tentang mekanisme/tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang keluarga berencana baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>3 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang keluarga berencana meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>4 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang keluarga berencana meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017</p>	Belum tersedia data	100	44 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1 SKPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				5 Persentase ketersediaan juklak/juknis/SOP pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang keluarga berencana baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				6 Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang keluarga berencana hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				7 Cakupan publikasi pelayanan publik bidang keluarga berencana berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				8 Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja ( <i>performance</i> ) pelayanan bidang keluarga berencana menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				1 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pelayanan publik bidang ketahanan pangan mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	45 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Ketahanan Pangan	1 Urusan Wajib Ketahanan Pangan	1 SKPD Pengampu Urusan Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang ketahanan pangan baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang ketahanan pangan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				4 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang ketahanan pangan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				5 Persentase ketersediaan juklak/juknis/SOP pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang ketahanan pangan baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				<p>6 Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang ketahanan pangan hingga mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>7 Cakupan publikasi pelayanan publik bidang ketahanan pangan berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>8 Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja (<i>performance</i>) pelayanan bidang ketahanan pangan menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017</p>	<p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>50</p>			
				<p>1 Persentase penyesuaian kembali kebijakan (<i>policy reformulation</i>) tentang pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan (<i>policy reformulation</i>) tentang mekanisme/tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017</p>	<p>Belum tersedia data</p> <p>Belum tersedia data</p>	<p>100</p> <p>100</p>	46 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Komunikasi dan Informatika	1 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika	SKPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				3	Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100		
				4	Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100		
				5	Persentase ketersediaan juklak/juknis/SOP pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100		
				6	Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100		
				7	Cakupan publikasi pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				8 Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja ( <i>performance</i> ) pelayanan bidang komunikasi dan informatika menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				1 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pelayanan publik bidang ketenagakerjaan mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	47 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Ketenagakerjaan	1 Urusan Wajib Ketenagakerjaan	1 SKPD Pengampu Urusan Ketenagakerjaan
			2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang ketenagakerjaan baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100				
			3 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang ketenagakerjaan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100				
			4 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang ketenagakerjaan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				5 Persentase ketersediaan juklak/juknis/SOP pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang ketenagakerjaan baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				6 Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang ketenagakerjaan hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				7 Cakupan publikasi pelayanan publik bidang ketenagakerjaan berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				8 Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja ( <i>performance</i> ) pelayanan bidang ketenagakerjaan menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				1 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pelayanan publik bidang kesenian mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	48 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kesenian	1 Urusan Wajib Kebudayaan	1 SKPD Pengampu Urusan Kebudayaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang kesenian baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang kesenian meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				4 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang kesenianmeningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				5 Persentase ketersediaan juklak/juknis/SOP pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang kesenian baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				6 Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang kesenian hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				7 Cakupan publikasi pelayanan publik bidang kesenian berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				8 Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja ( <i>performance</i> ) pelayanan bidang kesenian menurun 50% setiap tahunnya	Belum tersedia data	50			
				1 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pelayanan publik bidang penanaman modal mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100	49 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	1 Urusan Wajib Penanaman Modal	SKPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
				2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang penanaman modal baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang penanaman modal meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				4 Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang penanaman modal meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				5 Persentase ketersediaan juklak/juknis/SOP pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang penanaman modal baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				6 Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang penanaman modal hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				7 Cakupan publikasi pelayanan publik bidang penanaman modal berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				8 Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja ( <i>performance</i> ) pelayanan bidang penanaman modal menurun 50% setiap tahunnya	Belum tersedia data	50			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
			2 Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pencapaian visi Kota Singkawang lintas urusan dan kewenangan	<p>1 Persentase peningkatan jumlah masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah mencapai 80% pada Tahun 2017</p> <p>2 Persentase program-program pembangunan Kota Singkawang yang ditindaklanjuti oleh kecamatan mencapai 100% hingga Tahun 2017</p> <p>3 Persentase program-program pembangunan Kota Singkawang yang ditindaklanjuti oleh kelurahan mencapai 100% hingga Tahun 2017</p> <p>4 Persentase angka keluhan kelurahan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan mencapai 20% hingga 2017</p>	Belum tersedia data	80	50 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	SKPD Pengampu urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
3 Meningkatkan implementasi fungsi peraturan perundang-undangan demi perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat	1 Terwujudnya peraturan daerah dan peraturan pelaksana yang memenuhi azas hukum yang berlaku	1 Meningkatkan implementasi pelaksanaan fungsi perundang-undangan baik dari sisi legislatif maupun eksekutif demi pencapaian kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah yang <i>pro poor, pro growth, dan pro environment</i>	1 Reformulasi perancangan strategi komunikasi yang efektif antara eksekutif dan legislatif dalam memproduksi produk hukum daerah	<p>1 Persentase penyesuaian kembali kebijakan (<i>policy reformulation</i>) tentang mekanisme/tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana perencanaan, pengendalian dan evaluasi produk hukum daerah mencapai 100% pada Tahun 2017</p> <p>2 Persentase penyesuaian kembali kebijakan (<i>policy reformulation</i>) tentang SOP perancangan produk hukum daerah mencapai 100% pada Tahun 2017</p>	Belum tersedia data	100	51 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Produk Hukum Daerah	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				3 Persentase penurunan kasus/tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mencapai 50% hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	50			
				4 Cakupan publikasi produk hukum daerah mencapai 100% hingga Tahun 2017	50	100			
		2 Peningkatan penyusunan dan penetapan produk hukum daerah yang <i>pro poor, pro growth, dan pro environment</i>		1 Persentase RANPERDA inisiatif dari Eksekutif yang <i>pro poor, pro growth, dan pro environment</i> meningkat 20% tiap tahunnya hingga 80% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80	52 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
				2 Persentase PERWAKO dan KEPWAKO yang implementatif dan memiliki keterkaitan terhadap pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah mencapai 100%	Belum tersedia data	100			
				3 Persentase kajian, naskah akademis, dan draft RAPERDA sesuai standar peraturan perundang-undangan mencapai 100% hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	100			
				4 Persentase penurunan jumlah regulasi daerah yang dibatalkan mencapai 100% hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	100			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD			
				1 Persentase RANPERDA inisiatif dari legislatif yang <i>pro poor, pro growth, dan pro environment</i> meningkat 20% tiap tahunnya hingga 80% pada Tahun 2017  2 Persentase penurunan jumlah regulasi daerah yang dibatalkan mencapai 100% hingga Tahun 2017	Belum tersedia data	80	53 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
			3 Supremasi hukum secara terpadu demi perlindungan kepada kepentingan rakyat secara adil dan merata	1 Persentase kepastian perlindungan hukum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan dan anak serta masyarakat kurang beruntung mencapai 100% pada Tahun 2017  2 Persentase kepastian perlindungan hukum bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat mencapai 100% pada Tahun 2017  3 Persentase kepastian perlindungan hukum bagi keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup bagi kesejahteraan masyarakat mencapai 100% pada Tahun 2017	Belum tersedia data	80	54 Program Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Daerah	1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

## **BAB VIII**

### **INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN**

Kerangka pendanaan pembangunan untuk pencapaian visi **Kota Singkawang yang Aman, Nyaman, Maju dan Sejahtera berbasis Jasa, Perdagangan dan Agroindustri** disusun secara proporsional dan rasional dengan memperhatikan historis pengelolaan keuangan daerah Tahun 2008 - 2012 dan upaya pemecahan permasalahan penyelenggaraan dan pembangunan yang dihadapi selama ini. Perkiraan alokasi dana pelaksanaan program-program pembangunan termasuk prioritas daerah hingga Tahun 2017 mencapai Rp 2.036.147.125.199,63 dengan mempertimbangkan perhitungan pendanaan sebagaimana diuraikan pada Bab III dokumen ini.

Pendapatan daerah diharapkan mencapai target pertumbuhan 30% dengan asumsi target pajak daerah optimis meningkat 60% dan retribusi daerah mencapai 100%. Belanja daerah, dilain sisi diupayakan memiliki rerata pertumbuhan sebesar 32,92% dengan pembagian pengeluaran pada APBD tahunan untuk belanja tidak langsung sebesar 45% dan belanja langsung sebesar 55%. Rerata pertumbuhan pembiayaan netto ditargetkan mencapai 56,32%.

Belanja tidak langsung pada *item* belanja tambahan penghasilan diperkirakan meningkat 34,38% dengan maksud untuk meningkatkan motivasi dan etos kerja aparatur agar lebih berkinerja positif sebagai motor penggerak pemerintahan dan pembangunan Kota Singkawang. Kebijakan tambahan penghasilan aparatur diimbangi dengan pengurangan secara bertahap belanja pegawai pada pengeluaran belanja langsung pelaksanaan program-program pembangunan. Hal ini diberlakukan dengan harapan alokasi APBD dapat secara optimal merealisasikan target *outcome* yang telah ditetapkan agar terukur pencapaian dan pendanaannya tanpa mengenyampingkan kesejahteraan aparatur.

Pada prinsipnya, asumsi proporsi pengeluaran ini bersifat fleksibel dan dinamis dengan melihat realisasi pencapaian target pendapatan daerah tahun sebelumnya agar dalam proses pembiayaan pelaksanaan program pada RAPBD tahun berikutnya dapat secara proporsional dan rasional pula direncanakan.

Adapun indikasi rencana program dan kerangka pendanaan termasuk 6 (enam) prioritas utama pembangunan Kota Singkawang terlihat pada tabel berikut :

### 8.1. Indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Kesatu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1			<b>URUSAN WAJIB</b>																
1	12		<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>																
1	12	26	Program Pengembangan Kebijakan Daerah Perlindungan Keluarga dan Anak	Persentase penurunan angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak dibawah usia 17 Tahun mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	500	20	500	40	500	80	1.500	SKPD Pengampu Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
				Persentase peningkatan angka prestasi anak berdasarkan golongan usia mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	20	300	20	300	20	300	20	300	80	1.200	
				Persentase anak usia sekolah yang mengenyam pendidikan 12 Tahun mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	90	0	100	0	100	0	100	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase peningkatan aktivitas keagamaan pemuda mencapai 70% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	15	300	20	300	25	300	70	900			
1	19	<b>Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>																	
1	19	18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase peningkatan jumlah forum komunikasi antar agama aktif mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	300	10	100	10	100	10	100	20	100	60	700	SKPD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
			Persentase peningkatan jumlah forum komunikasi antar etnis aktif mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	300	10	100	10	100	10	100	20	100	60	700		
			Persentase konflik antar agama yang ditangani mencapai 100% setiap Tahunnya hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase penurunan jumlah tempat wisata malam yang beroperasi pada bulan ramadhan mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	20	300	20	0	20	0	20	0	80	800			
		Persentase konflik antaretnis yang ditangani mencapai 100% setiap Tahunnya	Persen	Belum tersedia data	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0			
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>																	
1	20	30	Program Pembinaan dan Pengembangan Imtaq Aparatur	Persentase penurunan permasalahan pernikahan aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	500	100	200	100	0	100	0	100	0	100	700	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, -

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase penurunan kasus tindakan kriminal yang dilakukan aparaturnya mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	500	100	300	100	300	100	300	100	300	100	1.700	Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

## 8.2. Indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Kedua

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1		<b>URUSAN WAJIB</b>																	
1	01	<b>Pendidikan</b>																	
1	01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase gedung sekolah SD/ MI dalam kondisi baik mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	5.000	20	4.000	20	1.000	20	1.000	20	1.000	100	12.000	SKPD Pengampu Urusan Pendidikan
			Persentase gedung sekolah SMP/ Mts dalam kondisi baik mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	5.000	20	5.000	20	1.000	20	1.000	20	1.000	100	13.000		
			Persentase ruang belajar dan kelas gedung sekolah SD/ MI dalam kondisi baik mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	1.000	20	1.000	20	500	20	500	20	0	100	3.000		
			Persentase ruang belajar dan kelas gedung sekolah SMP/ Mts dalam kondisi baik mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	1.000	20	1.000	20	500	20	500	20	0	100	3.000		
			Rasio jumlah gedung sekolah SD/ MI terhadap jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun mencapai 9 pada Tahun 2017	Persen	4,09	5	0	6	0	7	0	8	0	9	0	9	0		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Rasio jumlah gedung sekolah SMP/ MTs terhadap jumlah penduduk usia 12 - 15 tahun mencapai 8 pada Tahun 2017	Persen	3,63	4	0	5	0	6	0	7	0	8	0	8	0	
		Rasio jumlah gedung sekolah tingkat SD/ MI berjarak 5 Km dalam 1 kecamatan mencapai 5 pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	2	10.000	3	15.000	5	0	5	25.000	
		Rasio jumlah gedung sekolah tingkat SMP/ MTs berjarak 5 Km dalam 1 kecamatan mencapai 2 pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	1	1.000	1	5.000	-	0	2	6.000	
		APK SD/ MI/ Paket A mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	113,29	113,29	0	110	0	107	0	103	0	100	0	100	0	
		APK SMP/MI/Paket B mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	91,09	91,08	0	94	0	97	0	100	0	100	0	100	0	
		APM SD/ MI/ Paket A mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	91,76	94,51	0	97	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		APM SMP/ MTs/ Paket B mencapai 67,34 pada Tahun 2017	Persen	58,09	59,83	0	62,00	0	63,00	0	65,00	0	67,34	0	67,34	0	
1	01	17	Program Pendidikan Menengah	Persentase gedung sekolah SMA/ MA/ SMK dalam kondisi baik mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	5.500	10	6.000	20	5.000	20	5.000	80	26.500	SKPD Pengampu Urusan Pendidikan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Rasio jumlah gedung sekolah SMA/MA/SMK terhadap jumlah penduduk usia 15 - 18 tahun mencapai 8 pada Tahun 2017	Persen	2,98	4	0	5	0	6	0	7	0	8	0	8	0			
		Rasio jumlah gedung sekolah tingkat SMA/MA berjarak 12 Km dalam 1 kecamatan mencapai nilai 2 pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	1	5.000	1	5.000	2	30.000	2	40.000			
		APK SMA/ SMK/ MA/ Paket C mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	79,77	84	0	88	0	92	0	96	0	100	0	100	0			
		APM SMA/ SMK/ MA/ Paket C mencapai 69% pada Tahun 2017	Persen	59,52	61	0	63	0	65	0	67	0	69	0	69	0			
1	01	19	Program Pendidikan Luar Biasa	Persentase gedung sekolah TKLB/ SDLB/ SMPLB/ SMALB dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	100	20	100	20	100	60	300	SKPD Pengampu Urusan Pendidikan
				Rasio ketersediaan jumlah gedung sekolah TKLB terhadap jumlah penduduk usia 4 - 5 tahun mencapai 0.11 pada Tahun 2017	Persen	0,13	-	0	-	0	0,12	0	0,11	0	0,11	0	0,11	0	
				Rasio ketersediaan jumlah gedung sekolah SDLB terhadap jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun mencapai 0.46 pada Tahun 2017	Persen	0,56	-	0	-	0	0,49	0	0,47	0	0,46	0	0,46	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	01	29	Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur Pendidikan <b>(Prioritas keempat)</b>	Persentase kelengkapan sarana penunjang gedung PAUD dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	500	10	500	10	800	20	800	10	500	60	3.100	SKPD Pengampu Urusan Pendidikan
				Persentase kelengkapan sarana penunjang gedung TK dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	1.000	10	1.000	10	500	20	200	10	200	60	2.900	
				Persentase kelengkapan sarana penunjang gedung SMP/ MTs dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	2.000	10	1.000	10	1.000	20	500	10	500	60	5.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase kelengkapan sarana penunjang gedung SMA/ MA/ SMK dalam kondisi baik mencapai 70% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	1.490	10	1.765	10	1.000	20	500	20	500	70	5.255	
		Persentase kelengkapan sarana penunjang gedung SLB/ SDLB/ SMP LB/ SMALB dalam kondisi baik mencapai 30% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	50	10	50	10	50	30	150	
		Usia pakai kelengkapan sarana penunjang gedung PAUD menjadi 5 tahun	Tahun	Belum tersedia data	-	0	-	0	5	0	5	0	5	0	5	0	
		Usia pakai kelengkapan sarana penunjang gedung TK menjadi 5 tahun	Tahun	Belum tersedia data	-	0	-	0	5	0	5	0	5	0	5	0	
		Usia pakai kelengkapan sarana penunjang gedung SD/ MI menjadi 5 tahun	Tahun	Belum tersedia data	-	0	-	0	5	0	5	0	5	0	5	0	
		Usia pakai kelengkapan sarana penunjang gedung SMP/ MTs menjadi 5 tahun	Tahun	Belum tersedia data	-	0	-	0	5	0	5	0	5	0	5	0	
		Usia pakai kelengkapan sarana penunjang gedung SMA/ SMK/ MA menjadi 5 tahun	Tahun	Belum tersedia data	-	0	-	0	5	0	5	0	5	0	5	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Usia pakai kelengkapan sarana penunjang gedung SLB/ SDLB/ SMPLB/ SMALB menjadi 5 tahun	Tahun	Belum tersedia data	-	0	-	0	5	0	5	0	5	0	5	0			
1	02	<b>Kesehatan</b>																	
1	02	25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya dalam kondisi baik mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	1.000	10	1.000	20	800	20	600	0	0	80	3.400	SKPD Pengampu Urusan Kesehatan
			Usia pakai prasarana dan sarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya menjadi 5 tahun	Tahun	Belum tersedia data	5	500	5	300	5	0	5	0	5	0	5	1.000		
			Persentase kelengkapan prasarana dan sarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	1.000	20	890	20	500	10	300	10	100	80	2.790		
1	02	36	Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kesehatan <b>(Prioritas keempat)</b>	Persentase jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih, air limbah dan limbah medis rumah sakit dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	1.000	10	1.000	10	200	10	200	20	200	60	2.600	SKPD Pengampu Urusan Kesehatan





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase kelengkapan prasarana dan sarana rumah sakit dalam kondisi baik mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	700	100	700	100	700	100	700	100	1.000	100	3.800			
1	03	<b>Pekerjaan Umum</b>																	
1	03	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan Kota Singkawang dalam kondisi baik mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	45	4.000	50	6.000	70	3.000	100	2.000	-	0	100	16.000	SKPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum
			Rasio panjang jalan dilalui roda 4 (jalan nasional, provinsi dan kota) mencapai 1 pada Tahun 2017	Persen	0,21	0,3	0	0,5	0	0,7	0	0,9	0	1	0	1	0		
			Persentase pembangunan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (minimal dilalui roda 4) mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	23	30	2.000	50	200	70	1.000	90	1.000	-	0	100	4.200		
			Persentase panjang jalan Kota Singkawang dalam kondisi baik ( > 40 Km/ Jam ) mencapai 65% pada Tahun 2017	Persen	44,23	48	1.500	52	2.000	56	0	60	0	-	0	65	3.500		
			Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 M) mencapai 25% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	5	2.000	10	2.000	20	0	25	0	-	0	25	4.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	03	18	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Usia pakai jalan dan jembatan mencapai 5 tahun	Tahun	Belum tersedia data	5	2.000	5	2.000	5	500	5	500	5	500	5	5.500	SKPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum
				Usia pakai jalan di lingkungan kecamatan 5 tahun	Tahun	Belum tersedia data	5	2.000	5	2.000	5	500	5	500	5	500	5	5.500	
				Usia pakai jembatan di lingkungan kecamatan 5 tahun	Tahun	Belum tersedia data	5	2.000	5	2.000	5	500	5	500	5	500	5	5.500	
1	03	20	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar menurun hingga mencapai 30% pada Tahun 2017	Persen	50	50	2.000	45	2.000	40	600	35	1.000	30	1.000	30	6.600	SKPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum
				Persentase penerangan jalan umum dalam kondisi baik mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	4.000	100	3.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	10.000	
				Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	40,88	40	1.000	48	1.000	52	0	56	0	60	0	60	2.000	
				Proporsi jembatan dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	40,88	40	1.000	48	1.000	52	0	56	0	60	0	60	2.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab			
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)				
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	03	23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Usia pakai prasarana dan sarana kebinamargaan mencapai 5 tahun	Tahun	Belum tersedia data	5	1.000	5	1.000	5	500	5	500	5	500	5	3.500	SKPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum	
			Usia pakai alat-alat kebinamargaan mencapai 5 tahun	Tahun	Belum tersedia data	5	1.000	5	1.000	5	500	5	500	5	500	5	500	5		3.500
1	03	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dalam kondisi baik mencapai 100 % pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	45	500	50	800	70	800	90	800	100	800	100	3.700	SKPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum	
			Usia pakai jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya mencapai 5 tahun	Tahun	Belum tersedia data	5	1.000	5	1.000	5	0	5	0	5	0	5	0	5		2.000
			Rasio jaringan Irigasi menjadi 1 pada Tahun 2017	Persen	0,12	-	0	-	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1		0
			Luas irigasi Kota Singkawang dalam kondisi baik mencapai 25% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	5	4.000	10	4.000	15	0	20	0	25	0	25	0	25		8.000
			Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat mencapai 95% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	55	4.000	65	5.000	75	0	85	0	95	0	95	0	95		9.000
			Persentase air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	20	50	500	70	500	80	200	90	200	100	200	100	200	100		1.600

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	03	25	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku <b>(Prioritas kesatu)</b>	Persentase peningkatan cakupan pelayanan penyediaan air bersih mencapai 70% pada Tahun 2017	Persen	33	40	1.000	50	1.000	60	5.000	65	10.000	70	1.250	70	18.250	SKPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum
			Persentase air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	1.000	40	2.000	60	0	80	0	100	0	100	3.000		
			Persentase rumah tangga pengguna air bersih dalam satu kecamatan mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	1.000	20	1.500	20	0	20	0	-	0	80	2.500		
			Persentase rumah tangga pengguna air bersih mencapai 90% pada Tahun 2017	Persen	26,04	50	1.000	60	1.000	70	-	80	0	90	0	90	2.000		
			Persentase peningkatan cakupan rumah tangga berpenghasilan rendah yang memperoleh akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	20	1.000	30	0	30	0	-	0	80	1.000		
1	03	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air limbah <b>(Prioritas kesatu)</b>	Persentase penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	30	45	3.000	50	5.000	70	500	90	500	100	500	100	9.500	SKPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase penyediaan prasarana dan sarana air limbah perkotaan mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	30	0	50	0	50	0			
		Persentase pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	30	4.000	50	0	50	4.000			
		Persentase pengembangan teknik distribusi air minum mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	30	1.500	50	0	50	1.500			
1	03	31	Program Pembangunan Infrastruktur Bangunan Pemerintahan	Persentase prasarana dan sarana bangunan pemerintahan dalam kondisi baik mencapai 95% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	95	6.000	95	8.000	95	2.000	95	1.000	95	1.000	95	18.000	SKPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum
			Usia pakai prasarana dan sarana bangunan pemerintahan menjadi 5 tahun	Tahun	Belum tersedia data	5	2.000	5	2.000	5	0	5	0	5	0	5	4.000		
			Persentase kelengkapan prasarana dan sarana penunjang bangunan pemerintahan dalam kondisi baik mencapai 80% setiap tahunnya hingga 2017	Persen	Belum tersedia data	80	2.000	80	4.000	80	1.490	80	2.000	80	2.000	80	11.490		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab	
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	03	32	Program Revitalisasi Penyediaan Air Bersih <b>(Prioritas kesatu)</b>	Angka pencemaran fisik, kimiawi, bakteriologis dan radioaktif mencapai 0 atau bebas pencemaran ( <i>Zero pollutant</i> ) pada Tahun 2017	Pollutant	Belum tersedia data	Zero Pollutant	500	Zero Pollutant	500	Zero Pollutant	500	Zero Pollutant	800	Zero Pollutant	2.800	SKPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum	
				Debit air bersih yang disalurkan kepada masyarakat mencapai 150 liter/ org/ hari selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu pada Tahun 2017	Liter/ Org/ Hari	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50.000	120	75.000	150	125.000	150	250.000
				Rasio kontinuitas air bersih yang disalurkan kepada masyarakat mencapai 24 jam per hari selama 7 hari perminggu pada Tahun 2017	Jam/ Hari	Belum tersedia data	3/7	0	3/7	0	16/ 7	0	18/ 7	0	24/ 7	0	24/ 7	0

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	03	33	Program Pengembangan Sistem Informasi/ Database Infrastruktur Daerah <b>(Prioritas keenam)</b>	Persentase akurasi database jalan dan jembatan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	600	100	800	100	0	100	0	100	1.400	SKPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum
			Tingkat akurasi pengambilan kebijakan pembangunan jalan dan jembatan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	0	100	0	-	0	100	0	100	0	100	0		
			Persentase akurasi database drainase dan irigasi mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	600	100	500	100	0	100	0	100	1.100		
			Tingkat akurasi pengambilan kebijakan pembangunan utilitas/ fasilitas umum daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	0	100	0	-	0	100	0	100	0	100	0		
1	04		<b>Perumahan</b>																
1	04	21	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman <b>(Prioritas keempat)</b>	Persentase prasarana dan sarana permukiman dalam kondisi baik mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	2.000	10	2.000	10	1.000	10	1.000	-	0	40	6.000	SKPD Pengampu Urusan Perumahan
			Usia pakai prasarana dan sarana permukiman menjadi 10 tahun	Tahun	Belum tersedia data	-	0	-	0	10	0	10	0	10	0	10	0		
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni mencapai 70% pada Tahun 2017	Persen	61,49	-	0	-	0	67	0	69	0	70	0	70	0		
			Rasio rumah layak huni mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	20,28	30	5.000	35	5.000	40	0	45	0	50	0	50	10.000		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Rasio permukiman layak huni mencapai 25% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	5	1.000	10	1.000	15	0	20	0	25	0	25	2.000			
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	75,27	84,48	5.000	88,18	5.000	92,65	0	98,45	0	100	0	100	10.000			
		Persentase rumah tangga pengguna listrik mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	97,31	-	0	-	0	92,65	0	98,45	0	100	0	100	0			
		Lingkungan permukiman kumuh menurun mencapai 5% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	25	5.000	20	4.000	15	500	10	500	5	500	5	10.500			
		Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) mencapai 70% pada Tahun 2017	Persen	57,69	-	0	-	0	64	0	67	0	70	0	70	0			
1	04	17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase rumah tinggal bersanitasi mencapai 85 % pada Tahun 2017	Kecamatan	77,994	80	6.000	81,5	4.000	83	300	84	300	85	300	85	10.900	SKPD Pengampu Urusan Perumahan
				Persentase luas lingkungan permukiman kumuh menurun mencapai 10% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	16	0	15	0	10	0	10	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	04	22	Program Pengembangan Sistem Informasi/ Database Permukiman	Persentase akurasi database permukiman perkotaan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	600	100	600	100	0	100	0	100	1.200	SKPD Pengampu Urusan Perumahan
			<b>(Prioritas keenam)</b>	Tingkat akurasi pengambilan kebijakan pembangunan permukiman mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
1	04	24	Program Pengelolaan Limbah Perkotaan	Cakupan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada sistem <i>on site</i> di kecamatan untuk perbaikan kesehatan masyarakat setempat mencapai 5 kecamatan pada Tahun 2017	Kecamatan	Belum tersedia data	-	0	-	0	2	1.000	3	1.500	-	0	5	2.500	SKPD Pengampu Urusan Perumahan
				Cakupan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada sistem <i>off site</i> di perkotaan untuk perbaikan kualitas pengelolaan air limbah masyarakat mencapai 40% dari luas wilayah perkotaan pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	1.500	20	2.000	-	0	40	3.500	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab			
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)				
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	05		<b>Penataan Ruang</b>																	
1	05	18	Program Pengembangan Sistem Informasi/ Database Penataan Ruang <b>(Prioritas keenam)</b>	Persentase implementasi integrasi informasi geo spasial dan infrastruktur/ utilitas perkotaan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	800	100	600	100	0	100	0	100	1.400	SKPD Pengampu Urusan Penataan Ruang	
				Persentase akurasi sistem informasi peruntukan dan pengendalian pemanfaatan ruang mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
1	06		<b>Perencanaan Pembangunan</b>																	
1	06	26	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Pendidikan	Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan mencapai 100% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	150	100	150	100	0	100	300	SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan	
				Usia pakai prasarana dan sarana pendidikan mencapai 5 tahun	Tahun	Belum tersedia data	-	0	-	0	5	0	5	0	5	0	5	0		
1	06	27	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan <b>(Prioritas ketiga)</b>	Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan mencapai 100% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	100	300	100	300	100	0	100	50	100	50	100	700	SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase kesesuaian alokasi DAK Bidang Pendidikan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan mencapai 100% setiap tahunnya	Tahun	Belum tersedia data	100	300	100	300	100	0	100	0	100	0	100	600	
		Persentase rencana induk/ aksi/ penelitian/ kajian/ inovasi daerah bidang infrastruktur pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan arah pencapaian visi Kota Singkawang mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	600	-	0	-	0	50	600	
		Rata-rata persentase anggaran pendidikan dalam APBD Kota Singkawang mencapai minimal 25% setiap tahunnya	Persen	25	-	0	-	0	25	0	25	0	-	0	25	0	
		Persentase alokasi anggaran bidang infrastruktur pendidikan Pemerintah Kota Singkawang per kapita per tahun mencapai 20%	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	20	0	-	0	20	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	06	28	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Kesehatan <b>(Prioritas keempat)</b>	Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan mencapai 100% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	100	300	100	300	100	100	100	100	100	100	900	SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan	
			Usia pakai prasarana dan sarana kesehatan menjadi 5 tahun	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	5	0	5	0	5	0	5	0		
1	06	29	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan <b>(Prioritas ketiga)</b>	Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan mencapai 100% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	100	300	100	300	100	0	100	50	100	50	100	700	SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan
			Persentase kesesuaian alokasi DAK Bidang kesehatan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur kesehatan mencapai 100% setiap tahunnya	Tahun	Belum tersedia data	100	300	100	300	100	0	100	0	100	0	100	600		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase rencana induk/ aksi daerah/ penelitian/ kajian/ inovasi daerah bidang infrastruktur kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan arah pencapaian visi Kota Singkawang mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	30	400	30	500	-	0	-	0	60	900			
		Persentase alokasi anggaran bidang kesehatan Pemerintah Kota Singkawang per kapita per tahun mencapai 20%	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	20	0	20	0	20	0			
		Rasio rumah sakit daerah per 1000 penduduk mencapai 0.020 pada Tahun 2017	Persen	0,004	-	0	-	0	0,003	0	0,003	0	0,003	0	0,003	-			
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk mencapai 0.16 pada Tahun 2017	Persen	0,18	-	0	-	0	0,17	0	0,16	0	0,16	0	0,16	-			
1	06	31	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perdagangan ( <b>Prioritas keenam</b> )	Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur perdagangan mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	30	300	30	300	-	0	60	600	SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab	
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Persentase kesesuaian alokasi DAK Bidang perdagangan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur perdagangan mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	100	10	100	10	150	20	300	10	150	60	800		
		Persentase rencana induk/ aksi daerah/ penelitian/ kajian/ inovasi daerah bidang infrastruktur perdagangan yang sesuai dengan kebutuhan dan arah pencapaian visi Kota Singkawang mencapai 20% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	800	-	0	20	600	20	1.400		
1	06	32	Penguatan Sistem Inovasi Daerah Penyediaan Air Bersih <b>(Prioritas keenam)</b>	Persentase peningkatan cakupan pelayanan air bersih siap minum mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	40	20.000	-	0	40	20.000	SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan
			Persentase sekolah yang memperoleh akses air bersih siap minum mencapai 20% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	-	0	20	1.000	20	1.000	
			Persentase puskesmas yang memperoleh akses air bersih siap minum mencapai 20% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	-	0	20	500	20	500	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab	
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	06	33	Program Perencanaan Percepatan Penyediaan Air Bersih <b>(Prioritas kesatu)</b>	Persentase tempat/ taman kota yang memperoleh akses air bersih siap minum mencapai 20% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	20	1.000	20	1.000		
				Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur penyediaan air bersih mencapai 100% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	200	100	200	100	200	100	600
				Persentase kesesuaian alokasi DAK Bidang penyediaan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur revitalisasi penyediaan air bersih mencapai 100% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase rencana induk/ aksi daerah/ penelitian/ kajian/ inovasi daerah bidang infrastruktur penyediaan air bersih yang sesuai dengan kebutuhan dan arah pencapaian visi Kota Singkawang mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	40	1.000	-	0	-	0	-	0	40	1.000



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab			
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)				
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	06	34	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jalan dan Jembatan <b>(Prioritas keempat)</b>	Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan mencapai 100 % setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	100	800	100	1.000	100	300	100	300	100	300	100	2.700	SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan	
			Persentase panjang jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan mencapai 100 % pada Tahun 2017	Persen	23	35	2.000	60	0	75	0	90	0	100	0	100	2.000			
			Persentase jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat mencapai 100 % setiap tahunnya	Persen	100	35	0	60	0	75	0	90	0	100	0	100	0			
			Persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman mencapai 100 % setiap tahunnya	Persen	100	35	0	60	0	75	0	90	0	100	0	100	0			
			Persentase jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan dengan kecepatan yang aman mencapai 100 % setiap tahunnya	Persen	100	35	0	60	0	75	0	90	0	100	0	100	0			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab			
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)				
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	06	43	Program Perencanaan Bidang Pekerjaan Umum <b>(Prioritas keempat)</b>	Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan kebutuhan ruang sosial publik mencapai 100% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	100	800	100	300	100	600	100	600	100	300	100	2.600	SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan	
			Persentase kesesuaian alokasi DAK Bidang pekerjaan umum dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah mencapai 100% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	150	100	150	100	150	100	150	100		450
			Persentase rencana induk/ aksi daerah/ penelitian/ kajian/ inovasi daerah pembangunan infrastruktur daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan arah pencapaian visi Kota Singkawang mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	40	600	-	0	-	0	40	600	40		600
1	06	30	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Perdagangan	Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur perdagangan mencapai 100% setiap tahunnya	persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	150	100	150	100	0	100	300	SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Usia pakai prasarana dan sarana perdagangan mencapai 5 tahun	Tahun	Belum tersedia data	-	0	-	0	5	-	5	0	5	0	5	-			
1	20	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>																	
1	20	31	Program Pengembangan Kemitraan Bidang Pendidikan ( <b>Prioritas keenam</b> )	Persentase peningkatan jumlah bangunan lembaga pendidikan berbasis potensi Kota Singkawang mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	20	300	20	300	20	300	-	0	60	900	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
			Persentase peningkatan kerjasama pembangunan infrastruktur pendidikan oleh lembaga swasta mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	60	300	-	0	60	300		
1	20	32	Program Pengembangan Kemitraan Bidang Kesehatan ( <b>Prioritas keenam</b> )	Persentase peningkatan jumlah bangunan lembaga kesehatan berbasis potensi Kota Singkawang mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	20	300	-	0	40	300	-	0	40	600	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
			Persentase peningkatan kerjasama pembangunan infrastruktur kesehatan oleh lembaga swasta mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	20	400	20	0	40	400		
			Rasio rumah sakit swasta/ Non Pemerintah per 1000 penduduk mencapai 0.020 pada Tahun 2017	Persen	0,021	0,024	-	0,023	-	0,022	-	0,021	-	0,020		0,020	0		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	20	33	Program Pengembangan Kemitraan Bidang Perdagangan <b>(Prioritas keenam)</b>	Persentase peningkatan kerjasama pembangunan infrastruktur perdagangan oleh lembaga swasta mencapai 40%	Persen	Belum tersedia data	-	0	40	300	0	0	-	0	-	0	40	300	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawain dan Persandian
1	20	34	Program Peningkatan Kinerja Kemitraan Penyediaan Air Bersih <b>(Prioritas kesatu)</b>	Persentase peningkatan kerjasama revitalisasi pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	500	20	500	40	500	80	1.500	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawain dan Persandian
			Konsumsi Air Rata – rata mencapai 22 m3/ bulan pada Tahun 2017	M <sup>3</sup>	17	-	0	-	0	20	0	21	0	22	0	22	0		
			Tingkat kebocoran air menurun hingga mencapai 28% pada Tahun 2017	Persen	37	-	0	-	0	32	0	30	0	28	0	28	0		
			Pegawai per 1000 Pelanggan mencapai 7 pada Tahun 2017	Pegawai per 1000 pelanggan	11,24	-	0	-	0	10	0	9	0	7	0	7	0		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	20	35	Program Evaluasi Kinerja Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum <b>(Prioritas kedua)</b>	Persentase perumusan kembali kebijakan ( <i>reformulation</i> ) peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah untuk memenuhi kebutuhan ruang sosial publik mencapai 100%	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	-	0	-	0	-	0	100	300	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
			Persentase penyesuaian kebijakan ( <i>policy adjustment</i> ) pembangunan infrastruktur daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	0	100	20	100	0	100	0	100	20		
			Persentase kesesuaian kebijakan bidang pekerjaan umum dengan aspirasi masyarakat mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	100	0		
			Cakupan penataan peraturan daerah bidang pekerjaan umum yang sesuai dengan pencapaian visi pembangunan Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	100	0		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2		<b>URUSAN PILIHAN</b>																	
2	06	<b>Perdagangan</b>																	
2	06	20	Program Revitalisasi Pasar Tradisional <b>(Prioritas keempat)</b>	Persentase prasarana dan sarana bangunan pasar tradisional dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	20	10	300	20	15.000	20	2.000	-	0	-	0	60	17.300	SKPD Pengampu Urusan Perdagangan
				Usia pakai prasarana dan sarana pasar tradisional menjadi 5 tahun	Tahun	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	-	0	5	300	5	300	
				Persentase kelengkapan prasarana dan sarana pasar tradisional dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	20	2.000	20	500	20	500	20	800	60	3.800	
2	06	21	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan <b>(Prioritas keempat)</b>	Persentase kelengkapan sarana penunjang pasar tradisional dalam kondisi baik mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	20	2.000	30	500	50	500	100	1.000	100	4.000	SKPD Pengampu Urusan Perdagangan
				Usia pakai kelengkapan sarana penunjang pasar tradisional dalam kondisi baik menjadi 5 tahun	Tahun	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	5	0	-	0	5	0	

### 8.3. Indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Ketiga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1			<b>URUSAN WAJIB</b>																
1	06		<b>Perencanaan Pembangunan</b>																
1	06	36	Program Pengembangan Agribisnis Daerah <b>(Prioritas keenam)</b>	Reformulasi perancangan rencana pengembangan koperasi agribisnis mencapai 100% pada Tahun 2017	Perwako	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	100	-	0	-	0	100	100	SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan
			Tingkat keterpaduan dan sinkronisasi program pengembangan agribisnis daerah lintas SKPD mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	500	100	200	100	200	-	0	100	900		
			Tingkat percepatan penumbuhkembangan KUR dengan peningkatan pendapatan masyarakat agribisnis mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	100	500	-	0	100	500		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Tingkat percepatan inovasi pengembangan agribisnis bagi peningkatan pendapatan masyarakat agribisnis mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	-	0	100	500	100	500			
1	15	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>																	
1	15	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase peningkatan jumlah koperasi mandiri mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	10	10	10	10	20	10	25	-	0	40	65	SKPD Pengampu Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Persentase peningkatan jumlah diversifikasi usaha koperasi mandiri mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	10	10	10	20	30	300	-	0	50	330		
			Persentase jumlah koperasi binaan pemerintah yang memiliki manajemen (neraca) keuangan yang transparan dan akuntabel meningkat 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	10	10	10	20	20	20	30	-	0	60	70		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase jumlah koperasi yang mengembalikan peminjaman secara tepat waktu meningkat 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	0	0	20	0	40	0	-	0	60	0	
		Persentase peningkatan jumlah koperasi yang melakukan penurunan suku bunga peminjaman dana kepada anggota dan atau masyarakat mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	200	30	200	-	0	60	300	-	0	60	700	
		Persentase peningkatan jumlah koperasi yang menerapkan sistem informasi teknologi dalam mendukung manajemen dan pengembangan usaha koperasi mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	10	20	10	20	30	600	-	0	50	640	
		Persentase jumlah koperasi yang memperoleh <i>reward</i> atas kinerja pengelolaan keuangan dan diversifikasi usaha mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	100	30	500	-	0	50	600	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase penurunan jumlah koperasi yang didiskualifikasi dalam penerimaan peminjaman modal mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	0	50	0	-	0	50	0	
1	15	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah ( <b>Prioritas keenam</b> )														
		Persentase keanggotaan kelompok tani/ nelayan mandiri mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	40	0	40	0	-	0	80	0	SKPD Pengampu Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Persentase peningkatan diversifikasi usaha koperasi agribisnis mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	50	50	50	-	0	100	100	
		Persentase MoU usaha patungan kelompok tani binaan Pemerintah Kota Singkawang dengan pengusaha swasta/ BUMD mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	50	50	-	0	50	200	-	0	100	250	
		Persentase kemudahan aksesibilitas permodalan koperasi agribisnis mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab	
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Persentase diversifikasi usaha koperasi agribisnis mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	40	25	40	30	-	0	80	55		
1	15	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Perwako	Belum tersedia data	-	0	100	200	-	0	100	400	-	0	100	600	SKPD Pengampu Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana klusterisasi UKM dan UMKM wirausaha muda binaan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	600	50	600	100	1.000	100	2.200		
		Persentase pembangunan pusat oleh-oleh Kota Singkawang terpadu mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	100	1.000	100	500	100	1.500		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Cakupan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan muda mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	30	100	50	500	80	100	80	700	
		Persentase peningkatan omzet industri rumah tangga meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	30	0	30	0	60	0	60	0	
		Persentase peningkatan insentif untuk inovasi produk unggulan kreatif melalui peningkatan akses informasi dan pelayanan perbankan dan keuangan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	200	100	1.000	100	100	100	1.300	
		Persentase kerjasama bilateral (Mou) pemasaran produk UKM/ UMKM di pasar regional dan nasional mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	20	300	-	0	30	500	-	0	50	800	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	18	<b>Pemuda dan OlahRaga</b>																	
1	18	17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase pelatihan kewirausahaan bagi pemuda mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	40	600	40	200	80	800	SKPD Pengampu Urusan Pemuda dan Olahraga
				Persentase pelatihan keterampilan bagi pemuda wirausaha mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	40	600	40	100	80	700	
				Persentase peningkatan jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan ditempatkan bekerja mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	40	0	60	0	60	0	
				Persentase jumlah wirausaha yang dikelola secara mandiri oleh peserta pelatihan kewirausahaan mencapai 90% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	30	0	60	0	90	0	90	0	
				Persentase jumlah bantuan modal bagi usaha mandiri menurun hingga 20% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	60	500	40	400	20	260	20	1.160	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	20	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>																	
1	20	36	Program Evaluasi Kinerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah <b>(Prioritas kedua)</b>	Persentase perumusan kembali kebijakan ( <i>reformulation</i> ) revitalisasi kredit usaha rakyat (KUR) yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	100	300	-	0	100	300	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
			Persentase perumusan kembali kebijakan ( <i>reformulation</i> ) pemberian subsidi pemerintah untuk peningkatan kinerja dan pemberdayaan koperasi mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	100	100	100	100	100	100	0	100	0	100	300		
			Persentase penyesuaian kebijakan ( <i>policy adjustment</i> ) mekanisme, prosedur dan penilaian koperasi dalam penyaluran modal dan kemudahan akses ke lembaga perbankan dan keuangan bagi koperasi mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	100	200	-	0	100	200		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Cakupan penataan peraturan perundang-undangan penumbuhkembangan kinerja dan transparansi manajemen koperasi mencapai 50%	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	50	0	-	0	50	0	

#### 8.4. Indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Keempat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab	
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1		<b>URUSAN WAJIB</b>																
1	01	<b>Pendidikan</b>																
1	01	30	Program Peningkatan Layanan Pendidikan Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persen	Belum tersedia data	-	0	20	500	40	600	80	800	100	800	100	2.700	SKPD Pengampu Urusan Pendidikan
			Jangkauan peningkatan kinerja layanan pendidikan pada daerah pinggiran meningkat 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	40	0	80	0	100	0	100	0	
			APK pada daerah pinggiran, perbatasan, terdepan, dan daerah terluar meningkat 20% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	20	0	20	0	20	0	
			Angka kelulusan pendidikan dasar 9 tahun pada daerah pinggiran, perbatasan, terdepan, dan daerah terluar meningkat 20% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	02	<b>Kesehatan</b>																	
1	02	37	Program Peningkatan Layanan Kesehatan Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik pada daerah pinggiran, perbatasan, terdepan, dan daerah terluar mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	40	200	80	600	100	0	100	800	SKPD Pengampu Urusan Kesehatan
			Jangkauan peningkatan kinerja layanan kesehatan pada daerah pinggiran mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	40	0	80	0	100	0	100	0		
			Usia Harapan Hidup (UHH) pada daerah pinggiran, perbatasan, terdepan, dan daerah terluar meningkat 20% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	20	200	20	200	20	200	20	600	-	0	20	1.200		
			Angka penderita penyakit menular pada daerah pinggiran, perbatasan, terdepan, dan daerah terluar menurun 20% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	200	20	200	20	200	20	600	-	0	20	1.200		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	03		<b>Pekerjaan Umum</b>																
1	03	34	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase ketersediaan prasarana dan sarana pada daerah pinggiran kota mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	30	500	60	500	100	500	100	1.500	SKPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum
			Persentase prasarana dan sarana pada daerah pinggiran kota dalam kondisi baik mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	30	300	60	300	100	300	100	900		
			Persentase aksesibilitas masyarakat ke daerah pinggiran, perbatasan, terdepan, dan daerah terluar mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	40	0	60	0	60	0	60	
1	06		<b>Perencanaan Pembangunan</b>																
1	06	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase pembaruan dan pemutahiran rancangan strategi pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi wilayah mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	30	400	60	400	60	800	SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap kebutuhan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi wilayah mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase rencana induk/ rencana aksi daerah pengembangan dan pembangunan wilayah ekonomi terpadu mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	700	100	800	-	0	100	1.500	
		Persentase penurunan ketimpangan PDRB per kapita berdasarkan wilayah kecamatan mencapai 30% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	
		Persentase peningkatan pendapatan masyarakat per wilayah kecamatan meningkat 20% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	20	200	20	200	20	200	20	600	-	0	20	1.200	
		Persentase penurunan ketimpangan pendapatan per kapita berdasarkan wilayah kecamatan mencapai 30% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	30	0	30	0	30	0	30	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase penurunan angka pengangguran berdasarkan wilayah kecamatan mencapai 60 % pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	60	600	-	0	60	600			
		Persentase kesesuaian perencanaan peningkatan pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka pengangguran perkotaan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	200	20	200	100	400	100	600	100	0	100	1.400			
		Persentase kesesuaian perencanaan peningkatan pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan perkotaan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	200	20	200	100	400	100	0	100	0	100	800			
1	06	18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pada pintu-pintu masuk Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	300	100	300	100	300	100	900	SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan
				Persentase klusterisasi wilayah strategis dan cepat tumbuh mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	50	800	100	600	100	1.400	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase perencanaan pengembangan wilayah strategis pinggiran yang menghubungkan wilayah pesisir dan perbatasan dengan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	1.000	-	0	-	0	100	1.000	
		Persentase pengembangan wilayah berbasis sumberdaya mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	0	20	0	20	0	20	600	-	0	80	600	
		Persentase pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	0	20	0	20	0	20	0	-	500	80	500	
		Persentase pengembangan wilayah berbasis efisiensi unggulan mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	0	20	0	20	0	20	0	-	500	80	500	
		Persentase pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	0	20	0	20	0	20	0	-	500	80	500	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	06	37	Program Perencanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Persentase pembaharuan dan pemutahiran rancangan strategi pengembangan produk unggulan daerah yang kompetitif, kreatif, inovatif dan khas mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	600	40	400	-	400	40	1.400	SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan
			Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran terhadap pengembangan produk unggulan daerah yang kompetitif, kreatif, inovatif dan khas berbasis potensi wilayah mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
			Persentase rencana induk/ rencana aksi daerah pengembangan produk unggulan daerah yang kompetitif, kreatif dan khas mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	300	100	600	-	0	100	900		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	07	<b>Perhubungan</b>																	
1	07	22	Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Transportasi Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh	Cakupan moda transportasi terpadu pada daerah pinggiran, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar mencapai 50% pada Tahun 2017	3 Pintu Masuk	Belum tersedia data	-	0	-	0	10	600	20	1.000	20	1.500	50	3.100	SKPD Pengampu Urusan Perhubungan
			Persentase penurunan angka rawan kecelakaan pada daerah pinggiran, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	50	400	-	0	50	400		
1	14	<b>Tenaga Kerja</b>																	
1	14	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio tenaga kerja terampil dibandingkan dengan tenaga kerja tidak terampil mencapai 75% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	15	300	30	300	50	0	60	0	75	0	75	600	SKPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
			Persentase peningkatan tenaga kerja bersertifikat sesuai kahliannya mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	30	300	40	50	80	50	100	50	100	450		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab	
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Diversifikasi sertifikasi tenaga kerja siap pakai mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	30	300	50	0	50	0	100	0	100	300		
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	300	40	800	60	200	75	300	80	300	80	1.900		
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat mencapai 70% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	15	100	30	100	45	100	60	100	70	100	70	500		
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja sebelum bekerja sesuai kompetensi mencapai 70% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	15	100	30	100	45	100	60	100	70	100	70	500		
		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	400	40	400	60	0	70	0	80	0	80	800		
1	14	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rasio daya serap tenaga kerja mencapai 25% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	5	0	10	0	15	0	20	0	25	0	SKPD Peningkatan Kesempatan Kerja	
				Cakupan informasi bursa kerja tersedia yang dimutakhirkan secara berkala mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	30	50	0	60	0	70	0	100	0	-	0	100	0



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Cakupan lembaga penyalur tenaga kerja yang taat peraturan ketenagakerjaan mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	300	50	200	50	100	50	600			
		Persentase tenaga kerja terampil bersertifikat yang memperoleh kepastian pekerjaan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0			
		Tingkat pengangguran intelektual menurun 20% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	60	0	40	0	20	0	20	0			
		Tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 67,79 % pada Tahun 2017	Persen	65,3	66,2	25	66,62	25	67,02	25	67,41	25	67,7	40	67,79	140			
		Tingkat pengangguran terbuka menurun 3,50% pada Tahun 2017	Persen	3,7	3,7	0	3,65	0	3,60	0	3,55	0	3,50	0	3,50	0			
1	20	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>																	
1	20	25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan kesepakatan MoU pembangunan wilayah pinggiran mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	40	0	60	150	60	0	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah,- Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan-
			Persentase penanganan permasalahan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi terutama di daerah pinggiran mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab	
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	50	20	50	150	100	170	Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1	20	37	Program Evaluasi Kinerja Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
			Persentase penyusunan kembali kebijakan ( <i>reformulation</i> ) peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi wilayah mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	
			Persentase penurunan angka pelanggaran peraturan percepatan pembangunan daerah pinggiran, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar hingga mencapai 0% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	0	25	0	25	0	25	0	75	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab	
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Cakupan penataan peraturan perundang-undangan penumbuhan-kembangan pembangunan daerah pinggiran, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	50	0	100	0	100	0		
1	20	38	Program Evaluasi Kinerja Pengentasan Pengangguran dan Kemiskinan	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	200	-	0	-	0	-	0	100	200	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
			Persentase penyesuaian kebijakan ( <i>policy adjustment</i> ) pengentasan pengangguran, pemerataan kesempatan berusaha dan pengentasan kemiskinan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	100	300	-	0	100	300	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab	
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Persentase peningkatan angka serapan tenaga kerja lokal yang bekerja di industri milik pengusaha di Kota Singkawang mencapai 100% pada tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	200	50	200	100	65	100	465		
		Persentase penurunan angkatan kerja dari luar Singkawang yang bekerja pada perusahaan/ industri milik swasta mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	200	20	200	-	0	40	400		
		Cakupan penataan peraturan perundang-undangan pengentasan pengangguran, pemerataan kesempatan berusaha dan pengentasan kemiskinan mencapai 100 % pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	100	0	100	0	100	-		
1	20	40	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase ketersediaan jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah meningkat 20% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	20	1.000	20	1.000	20	0	20	0	20	0	2.000	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
				Cakupan penataan regulasi peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah meningkat 20% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	20	0	20	0		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan peraturan daerah/ walikota/ juklak/ juknis yang mendukung iklim usaha mencapai 20% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	20	0	20	0	20	0	Daerah, Kepegawaian dan Persandian
		Persentase ketersediaan peraturan daerah/ walikota/ juklak/ juknis tentang peningkatan PAD mencapai 20% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	20	0	20	0	20	0	
		Persentase peningkatan investasi daerah melalui kemudahan sistem dan prosedur perizinan dan investasi mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	23,5	300	35	200	43,6	100	60	600	
		Persentase pencapaian target jumlah pengusaha sadar pajak dan retribusi daerah meningkat 20% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	20	1.000	20	500	20	300	20	300	20	300	20	2.400	
		Persentase pertumbuhan penerimaan pajak daerah mencapai 60% setiap tahunnya	Persen	49,48	60	0	60	0	60	0	60	0	60	0	60	0	
		Persentase pertumbuhan penerimaan retribusi daerah mencapai 100 % pada Tahun 2017	Persen	9,74	-	0	-	0	30	0	60	0	100	0	100	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab	
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Persentase pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 100 % setiap tahunnya	Persen	53,28	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
		Persentase pertumbuhan penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mencapai 100 % setiap tahunnya	Persen	83,41	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
		Persentase pertumbuhan rasio kemandirian mencapai 6.89% pada Tahun 2017	Persen	4,44	-	0	-	0	5,30	0	6,10	0	6,89	0	6,89	0		
		Persentase pertumbuhan rasio efektifitas mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	0,85	-	0	-	0	60	0	80	0	100	0	100	0		
		Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total belanja APBD mencapai 0.430 % pada Tahun 2017	Persen	0,075	-	0	-	0	0,150	0	0,300	0	0,430	0	0,430	0		
		Persentase pertumbuhan PAD mencapai 88.15% pada Tahun 2017	Persen	15,93	-	0	-	0	30,25	0	62,50	0	88,15	0	88,15	0		
1	20	61	Program Perlindungan Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan	Persentase penurunan jumlah kasus penganiayaan tenaga kerja mencapai 50% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	0	50	0	50	0	450	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah-



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase keselamatan dan perlindungan kerja mencapai 85% pada Tahun 2017	Persen	5	-	0	-	0	50	0	65	0	85	0	85	0	
		Besaran peningkatan kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	10	-	0	-	0	40	50	50	50	60	50	60	150	
		Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta Jamsostek mencapai 90% pada Tahun 2017	Persen	10	20	50	30	50	40	0	50	0	90	0	90	100	
		Besaran pemeriksaan perusahaan mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	10	20	50	30	50	40	0	50	0	60	0	60	100	
		Besaran pengujian peralatan di perusahaan mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	10	-	0	-	0	40	0	50	0	60	0	60	0	
		Persentase penurunan jumlah tenaga kerja dibawah umur mencapai 10% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	0	18	0	16	0	13	0	10	0	10	0	
		Partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat sebesar 39% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	35	0	36	0	37	0	38	0	39	0	39	0	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	20	62	Program Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 6,46% pada Tahun 2017	Persen	6,16	6	600	6,08	300	6,2	200	6,33	200	6,46	200	6,46	1.500	SKPD Penguampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
				Laju inflasi menurun sebesar 2,54% pada Tahun 2017	Persen	4,21	4,06	600	3,68	300	3,3	200	2,92	200	2,54	200	2,54	1.500	
				PDRB per kapita (rupiah) meningkat sebesar Rp. 23.928.339,33 pada Tahun 2017	Rupiah	16.042.172,53	16.894.982,05	600	18.378.953,01	300	20.030.416,56	200	21.872.066,90	200	23.928.339,33	200	23.928.339,33	1.500	
				Angka kemiskinan menurun sebesar 4,33% pada Tahun 2017	Digit	5,32	5,09	600	4,88	300	4,68	200	4,5	200	4,33	200	4,33	1.500	
				Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat sebesar 74,44 pada Tahun 2017	Digit	69,77	71,31	600	71,95	300	72,77	200	73,60	200	74,44	200	74,44	1.500	
				Persentase pencapaian stabilitas harga komoditas barang/ jasa meningkat 20% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	600	20	300	20	200	20	200	20	200	20	200	
1	22		<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>																
1	22	20	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	Persentase peningkatan perkembangan aktivitas sektor-sektor ekonomi yang dikelola masyarakat mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	100	20	200	20	500	40	500	60	500	60	1.800	SKPD Penguampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	100	20	200	20	200	40	500	60	500	60	1.500			
		Persentase peningkatan produk kreatif khas per wilayah mencapai 90% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	100	20	200	30	200	40	500	60	500	90	1.500			
		Persentase peningkatan pemasaran produk kreatif khas per wilayah mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	200	40	500	60	500	60	1.200			
1	25	<b>Komunikasi dan Informatika</b>																	
1	25	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi pada daerah perbatasan pesisir dan pedalaman meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	60	600	-	0	60	0	SKPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Persentase peningkatan aksesibilitas informasi terutama bagi masyarakat pada daerah pinggiran, perbatasan, terdepan, dan daerah terluar mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	200	10	200	40	400	60	600	60	1.400		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase peningkatan aksesibilitas masyarakat ke daerah pinggiran, perbatasan, terdepan, dan daerah terluar mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	60	0			
2		<b>URUSAN PILIHAN</b>																	
2	01	<b>Pertanian</b>																	
2	01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	500	10	800	10	200	10	100	-	0	40	1.600	SKPD Pengampu Urusan Pertanian
				Persentase peningkatan pendapatan petani per kapita mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	300	10	200	10	100	10	100	-	0	40	700	
2	01	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Persentase cakupan kebijakan bidang pertanian/ perkebunan yang berpihak kepada peningkatan produktivitas, standarisasi mutu produk pertanian/ perkebunan dan jejaring pemasaran mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	-	0	-	0	100	50	SKPD Pengampu Urusan Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase peningkatan konsumsi masyarakat terhadap produk pertanian/ perkebunan lokal mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	100	20	100	20	100	80	300	
		Persentase peningkatan produk pertanian/ perkebunan yang beredar di pasaran domestik mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	20	20	20	20	50	20	50	30	50	100	190	
		Persentase peningkatan inovasi dan diversifikasi produk pertanian/ perkebunan yang beredar di pasaran domestik mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	100	10	100	20	100	-	0	-	0	40	300	
		Persentase produk hasil pertanian tanaman pangan organik atau bebas gluten ( <i>gluten free</i> ) terjual mencapai 20% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	20	50	-	0	20	50	
		Persentase peningkatan jumlah produk pertanian/ perkebunan unggulan lokal yang mendominasi pasaran domestik mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	30	0	50	0	100	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Persentase peningkatan produk pertanian/ perkebunan yang beredar di pasaran luar provinsi mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	30	0	50	0	50	0	
				Persentase peningkatan produksi produk-produk unggulan pertanian/ perkebunan mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	300	10	300	10	50	10	50	-	0	40	700	SKPD Pengampu Urusan Pertanian
				Persentase peningkatan produktivitas potensi unggulan pertanian/ perkebunan mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	300	10	300	10	50	10	50	-	0	40	700	
				Persentase peningkatan pengembangan model distribusi pangan yang efisien mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	300	10	300	10	50	10	50	10	50	50	750	
				Persentase pengembangan perbenihan/ perbibitan tanaman pertanian/ perkebunan unggulan mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	500	10	300	10	50	10	50	-	0	40	900	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab	
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	30	20	30	-	0	40	60	
				Persen	Belum tersedia data	10	500	10	300	10	100	10	100	-	0	40	1.000	
				Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	50	50	-	0	50	50	
2	01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persen	Belum tersedia data	10	500	-	0	10	300	10	100	10	100	40	1.000	SKPD Pengampu Urusan Pertanian
				Persen	Belum tersedia data	10	300	10	300	10	50	10	50	-	0	40	700	
				Persen	Belum tersedia data	10	500	10	400	10	50	10	50	10	50	50	1.050	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase pengembangan perbenihan/perbibitan ternak unggulan daerah mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0			
		Persentase peningkatan cakupan standarisasi produk olahan peternakan mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	50	200	-	0	50	200			
		Persentase kelompok masyarakat pengolah hasil ternak mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	50	100	-	0	50	100			
2	01	23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Persentase cakupan kebijakan sektor peternakan yang berpihak kepada peningkatan produktivitas, standarisasi mutu produk hasil peternakan dan olahannya serta kepastian jejaring pemasaran mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	100	-	0	-	0	100	100	SKPD Pengampu Urusan Pertanian
				Persentase peningkatan konsumsi masyarakat terhadap produk peternakan lokal mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	100	20	100	40	100	80	300	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase peningkatan produk peternakan yang beredar di pasaran domestik mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	20	20	20	20	50	20	50	30	50	100	190	
		Persentase inovasi dan diversifikasi produk olahan hasil peternakan yang beredar di pasaran domestik mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	500	10	300	-	0	10	100	10	100	40	1.000	
		Persentase peningkatan jumlah produk olahan hasil peternakan unggulan lokal yang mendominasi pasaran domestik mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	20	20	20	20	50	20	50	30	50	100	190	
		Persentase peningkatan produk olahan hasil peternakan yang beredar di pasaran luar provinsi mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	30	0	50	0	50	0	
		Persentase peningkatan jumlah industri pengolah hasil ternak bersertifikasi halal mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	20	100	20	100	40	200	20	100	100	500	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	01	25	Program Pengembangan Industri Agribisnis	Persentase industri pembibitan/ perbenihan meningkat sebesar 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	20	200	20	200	40	400	SKPD Pengampu Urusan Pertanian
				Persentase industri agro-kimia meningkat sebesar 20% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	10	100	-	0	10	100	-	0	20	200	
				Persentase industri-industri yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan meningkat sebesar 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	100	-	0	10	100	10	100	10	100	40	400	
				Persentase peningkatan produk olahan pertanian primer yang diperdagangkan mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	30	0	50	0	50	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase industri-industri yang mengolah hasil peternakan primer menjadi produk olahan meningkat sebesar 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	40	60	-	0	40	60			
		Persentase produk olahan peternakan primer yang diperdagangkan mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	30	0	-	0	50	0			
		Persentase industri-industri yang mengolah hasil peternakan primer menjadi produk olahan meningkat 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	0	0	40	0	-	0	40	0			
		Persentase produk olahan peternakan primer yang diperdagangkan mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	30	0	-	0	50	0			
2	05	<b>Kelautan dan Perikanan</b>																	
2	05	15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Persentase peningkatan kelompok ekonomi masyarakat pesisir mandiri mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	600	10	400	20	50	10	100	10	100	60	1.250	SKPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
			Persentase peningkatan pendapatan masyarakat pesisir mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	600	10	100	20	50	10	50	10	50	60	850		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase peningkatan kualitas sumber daya manusia pada daerah pesisir yang mampu mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	600	10	100	20	50	10	50	10	50	60	850			
		Persentase peningkatan penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat pesisir yang mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	0	10	0	10	0	10	0	20	0	60	0			
2	05	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase peningkatan produksi produk unggulan budidaya perikanan mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	600	10	400	-	0	10	200	10	200	40	1.400	SKPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
			Persentase peningkatan produktivitas potensi unggulan budidaya perikanan mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	400	10	400	-	0	10	0	10	0	40	800		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase pengembangan model distribusi sektor budidaya perikanan yang efisien mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	600	10	400	-	0	10	80	20	40	50	1.120	
		Persentase pengembangan perbenihan/ perbibitan budidaya perikanan unggulan mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	600	10	400	-	0	10	300	10	300	40	1.600	
		Persentase diversifikasi produk hasil budidaya perikanan pasca panen meningkat sebesar 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	10	400	10	100	10	100	10	100	40	700	
2	05	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi produk-produk unggulan perikanan tangkap sebesar 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	600	20	400	-	0	-	0	40	1.000	SKPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
			Persentase peningkatan produktivitas potensi unggulan perikanan tangkap sebesar 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	600	20	400	-	0	-	0	40	1.000		
			Persentase pengembangan perbenihan/ perbibitan perikanan tangkap unggulan mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	600	10	400	10	100	10	100	40	1.300		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	05	23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Persentase cakupan kebijakan sektor perikanan yang berpihak kepada peningkatan produktivitas, standarisasi mutu produk perikanan dan olahannya serta kepastian jejaring pemasaran mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	100	-	0	-	0	-	0	100	100	SKPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
			Persentase peningkatan konsumsi masyarakat terhadap produk perikanan dan olahannya mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	40	0	40	0	-	0	80	0		
			Persentase peningkatan produk perikanan dan olahannya yang beredar di pasaran domestik mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	50	50	50	-	0	100	100		
			Persentase peningkatan inovasi dan diversifikasi produk olahan perikanan yang beredar di pasaran domestik mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	400	-	0	20	600	40	1.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase peningkatan jumlah produk olahan perikanan unggulan lokal yang mendominasi pasaran domestik mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	0	50	0	-	0	100	0			
		Persentase peningkatan produk olahan perikanan yang beredar di pasaran luar provinsi mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	50	200	-	0	50	200			
		Persentase peningkatan jumlah industri pengolah hasil perikanan bersertifikasi halal mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	100	50	50	-	0	100	150			
		Persentase penurunan produksi hasil olahan perikanan tidak layak konsumsi mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	30	50	30	-	0	100	60			
2	06	<b>Perdagangan</b>																	
2	06	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase cakupan kebijakan perlindungan hak cipta dan kreasi produk unggulan daerah berkualitas ekspor mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	150	-	0	-	0	-	0	100	150	SKPD Pengampu Urusan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase peningkatan kerjasama standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral dan regional mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	50	60	-	0	50	60			
		Persentase peningkatan aktifitas perdagangan produk unggulan daerah pada event promosi/ expo sebesar 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	600	10	600	20	600	20	600	20	600	80	3.000			
		Persentase peningkatan penerimaan omzet perdagangan produk unggulan daerah sebesar 90% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	30	300	60	300	-	0	90	600			
		Cakupan cluster perdagangan produk daerah berkualitas ekspor mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	50	600	-	0	50	600			
2	06	22	Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perdagangan Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh	Cakupan revitalisasi pasar tradisional pada daerah pinggiran, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	50	300	-	0	50	300	SKPD Pengampu Urusan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Cakupan ketersediaan terminal logistik perdagangan pada daerah pinggiran, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, dan kawasan terluar mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	500	-	0	-	0	50	500			
2	07	<b>Perindustrian</b>																	
2	07	15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Cakupan ketersediaan kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	100	0	0	-	0	100	100	SKPD Pengampu Urusan Industri
			Cakupan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana klaster industri sebesar 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	40	40	80	60	-	0	80	100		
			Cakupan keterkaitan produksi industri hulu ke hilir mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	100	100	-	0	100	100		
			Cakupan publikasi dan promosi produk industri hulu ke hilir mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	100	100	-	0	100	100		
			Cakupan pengembangan modal ventura dan inkubator sistem produksi meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	30	50	30	50	60	100		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Cakupan pengembangan sistem inovasi teknologi industri yang diterapkan mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	40	600	-	0	40	600			
		Cakupan penguatan kemampuan industri berbasis teknologi meningkat sebesar 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	-	0	100	400	100	400			
2	07	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan industri kecil dan menengah kreatif yang mampu berkembang secara mandiri mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	40	100	-	0	40	100	SKPD Pengampu Urusan Industri		
				Persentase kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	200	40	300	60	500			
				Angka penyerapan tenaga kerja pada usaha-usaha kreatif masyarakat meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	40	0	60	0			
				Persentase peningkatan omzet yang diterima industri kecil dan menengah yang dibina pemerintah mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	100	20	200	40	400	-	0	-	0	40	700	SKPD Pengampu Urusan Industri

### 8.5. Indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Kelima

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1			<b>URUSAN WAJIB</b>																
1	02		<b>Kesehatan</b>																
1	02	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase gedung/ bangunan pemerintahan yang bersih, kering dan bebas lembab meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	40	0	60	0	60	0	SKPD Pengampu Urusan Kesehatan
			Persentase bangunan pelayanan kesehatan masyarakat yang bersih, kering dan bebas lembab meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	40	0	60	0	60	0		
			Persentase gedung kantor milik swasta yang bersih, kering dan bebas lembab meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	10	50	20	50	40	100	60	110	60	310		
			Persentase tempat usaha penjualan makanan milik masyarakat yang bersih, kering dan bebas lembab meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	20	40	25	60	30	60	75		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase gedung/ bangunan pemerintahan yang memiliki sirkulasi udara yang baik meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	10	0	20	0	40	0	60	0	60	0	
		Persentase bangunan pelayanan kesehatan masyarakat yang memiliki sirkulasi udara yang baik meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	40	0	60	0	60	0	
		Persentase gedung kantor milik swasta yang memiliki sirkulasi udara yang baik meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	40	0	60	0	60	0	
		Persentase peningkatan jumlah kawasan wisata yang memenuhi persyaratan lingkungan sehat mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	200	40	300	60	130	60	630	
		Persentase gedung/ tempat usaha milik masyarakat yang memenuhi persyaratan kesehatan meningkat sebesar 70% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	300	60	600	70	0	70	900	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	03		<b>Pekerjaan Umum</b>																
1	03	28	Program Pengendalian Banjir ( <b>Prioritas kelima</b> )	Rasio luas wilayah banjir menurun hingga 6 pada Tahun 2017	Persen	8,66	8	0	8	0	7	0	7	0	6	0	6	0	SKPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum
				Lama waktu tergenang menurun hingga maksimal 10 hari pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	15	0	10	0	10	0	
				Persentase penurunan daerah tergenang banjir mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	10	0	10	0	20	0	50	0	50	0	
				Peningkatan prasarana sarana pengendalian banjir dan peningkatan penanganan rob serta pantai kritis di muara sungai dan pantai mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	40	2.000	50	2.000	60	1.000	70	1.000	80	1.000	80	7.000	
1	04		<b>Perumahan</b>																
1	04	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase peningkatan rumah masyarakat yang bersih, kering dan bebas lembab mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	600	20	600	20	500	-	0	-	0	60	1.700	SKPD Pengampu Urusan Perumahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase rumah masyarakat yang memiliki sirkulasi udara yang baik meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	40	0	60	0	60	0			
		Persentase rumah masyarakat yang memiliki sistem sanitasi yang baik meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	40	1.000	20	500	60	1.500			
1	05	<b>Penataan Ruang</b>																	
1	05	15	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketersediaan rencana induk dan rencana detil peruntukkan ruang kota meningkat sebesar 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	500	20	500	30	0	40	1.000	50	700	50	2.700	SKPD Pengampu Urusan Penataan Ruang
			Cakupan perencanaan penggunaan ruang dan penatagunaan tanah yang sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup meningkat 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	40	0	60	0	60	0		
			Persentase kesesuaian RDTRK, RTRK, dan RTBL terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	05	16	Program Pemanfaatan Ruang <b>(Prioritas kelima)</b>	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan mencapai 25% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	5	200	10	200	15	100	20	100	25	100	25	700	SKPD Pengampu Urusan Penataan Ruang
			Rasio luas wilayah industri mencapai 0,2 pada Tahun 2017	Persen	0,03	0,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Rasio luas wilayah kekeringan menurun sebesar 10 pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	0	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0		
			Rasio luas wilayah perkotaan mencapai 12 pada Tahun 2017	Persen	12,23	12,2	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0		
			Luas wilayah budidaya mencapai 38,100 Ha pada Tahun 2017	Ha	38100	38.100	0	38.100	0	38.100	0	38.100	0	38.100	0	38.100	0		
			Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 1.000 jumlah penduduk) mencapai 0,004 pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	0	0	0,004	0	0,004	0	0,004	0		
			Persentase penyelesaian ijin lokasi meningkat sebesar 30% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	05	17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang <b>(Prioritas kelima)</b>	Ruang publik yang berubah peruntukannya mencapai 0% setiap tahunnya		Belum tersedia data	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	40	SKPD Pengampu Urusan Penataan Ruang	
			Persentase penurunan kasus pengalihan penggunaan ruang kota mencapai 20% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	40	20	40	20	40	20	120		
			Persentase penurunan pelanggaran penggunaan ruang publik mencapai 20% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	30	20	30	20	30	20	90		
1	06		<b>Perencanaan Pembangunan</b>																
1	06	38	Program Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Persentase ketersediaan dokumen kajian kelayakan implementasi teknologi tepat guna mencapai 90% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	30	800	60	600	-	0	90	1.400	SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan
			Cakupan diversifikasi teknologi tepat guna berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan ( <i>Sustainable environmental friendly technology</i> ) mencapai 90% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	30	0	60	0	-	0	90	0		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase implementasi pengelolaan sampah berbasis teknologi terapan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	-	0	100	500	100	500			
1	06	39	Program Inovasi Daerah Pengendalian Banjir ( <b>Prioritas keenam</b> )	Persentase implementasi inovasi daerah dalam manajemen pencegahan dan pengendalian banjir mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	30	800	-	0	20	600	-	0	50	1.400	SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan
			Tingkat kesesuaian perencanaan pencegahan dan pengendalian banjir terhadap daya dukung lingkungan hidup mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	-	100	-	100	-	100	0		
1	08		<b>Lingkungan Hidup</b>																
1	08	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ( <b>Prioritas kelima</b> )	Persentase peningkatan produk ramah lingkungan yang digunakan masyarakat mencapai 10% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	10	0	10	0	-	0	10	0	SKPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Angka pencemaran limbah medis tertangani sebesar 100% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	600	100	600	100	0	100	1.200	
		Tingkat polusi udara menurun 40% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	40	-	40	-	40	0	40	0	
		Tingkat polusi air Sungai Singkawang tertangani mencapai 100% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	40	-	40	-	20	0	40	0	
		Angka pencemaran air Sungai Singkawang oleh pedagang ataupun masyarakat menurun hingga 0% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	0	0	0	0	0	400	0	200	0	200	0	800	
		Volume sampah tertangani mencapai 100% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	100	1.000	100	1.000	100	500	100	500	100	500	100	3.500	
		Persentase penurunan jumlah rumah yang menutup saluran pembuangan air mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	40	0	50	0	60	0	60	0	
		Persentase peningkatan jumlah rumah yang menggunakan biopori mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	200	20	300	30	400	40	500	50	400	50	1.800	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase peningkatan jumlah kantor/ bangunan milik swasta yang menggunakan biopori mencapai 90% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	0	20	0	30	0	60	0	90	0	90	0	
		Persentase penurunan jumlah tempat usaha/ kantor/ bangunan milik swasta yang membuang sampah ke saluran air menurun hingga 0% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) pengaduan masyarakat terhadap pencemaran yang dilakukan oleh pemilik tempat usaha/ perusahaan/ industri ditanggapi maksimal 1 hari pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	4	0	2	0	1	0	1	0	
		Pencemaran status mutu air menurun hingga 10% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	50	300	40	300	30	20	20	20	10	20	10	660	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab			
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)				
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	08	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase penurunan daerah kekeringan sebesar 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	400	10	300	10	200	10	250	10	250	50	1.400	SKPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup	
				Persentase penurunan luasan kerusakan kawasan konservasi mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	0	300	10	200	20	0	30	0	40	0	40	500		
				Persentase penurunan pencemaran sumber-sumber air baku mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	50	300	50	300	50	20	50	20	50	20	50	660		
				Persentase penurunan eksploitasi sumberdaya alam tak terbarukan ( <i>non renewable resources exploitation</i> ) mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	50	300	50	200	50	0	50	0	50	0	50	500		
				Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	30	0	50	0	70	0	90	0	100	0	100	0		
				Persentase peningkatan jumlah usaha atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	20	50	0	80	0	100	0	100	0	100	0	100	0		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase jumlah usaha atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	50	0	80	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase luasan lahan atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	50	0	80	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	600	30	400	40	200	50	200	60	200	60	1.600	
		Cakupan luasan mangrove sebagai penahan abrasi pantai mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	600	30	400	40	100	50	150	60	200	60	1.450	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 08 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) <b>(Prioritas kelima)</b>	Cakupan taman kota dalam kondisi bersih dan tertata mencapai 5 kecamatan pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	5	500	5	500	5	500	5	1.500	SKPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
		Persentase peningkatan jumlah taman pada gedung pemerintahan yang bersih, tertata dan indah mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	40	0	60	0	60	0	
		Persentase volume sampah pada ruang terbuka hijau yang tertangani dengan baik mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase taman kota/ ruang terbuka hijau yang dilengkapi dengan tempat sampah terpilah meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	250	10	250	10	50	10	50	20	50	60	650	
		Persentase peningkatan RTH pada kawasan permukiman mencapai 90% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	30	200	60	200	90	200	90	600	
		Persentase RTH yang tertata dan indah mencapai 90% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	30	50	60	50	90	50	90	150	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah	Persen	89,68	90,5	0	93	0	95	0	98	0	100	0	100	0			
		Persentase luas pemukiman yang tertata mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	0	30	0	40	0	50	0	60	0	60	0			
1	08	25	Program <i>Go Clean and Green City</i> (Kotaku Bersih dan Hijau) ( <b>Prioritas kelima</b> )	Cakupan kecamatan yang menerapkan gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	300	10	300	10	1.000	10	1.000	20	1.000	60	3.600	SKPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
			Persentase peningkatan jumlah sekolah yang menerapkan gerakan 3R meningkat sebesar 90% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	0	20	0	30	0	60	0	90	0	90	0		
			Persentase peningkatan jumlah kantor pemerintahan yang menerapkan gerakan 3R sebesar 90% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	0	20	0	30	0	60	0	90	0	90	0		
			Persentase kecamatan yang mengiatkan gerakan Kecamatan Hijau ( <i>Go Green</i> ) mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	50	500	-	0	-	0	-	0	-	0	50	500		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase peningkatan jumlah sekolah yang menerapkan gerakan sekolah hijau ( <i>Green School</i> ) mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	30	0	30	0	-	0	60	0	
		Persentase peningkatan jumlah gedung kantor/ SKPD yang menerapkan gerakan Kantor Hijau ( <i>Offices Go Green</i> ) mencapai 90% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	30	0	60	0	90	0	90	0	
		Persentase peningkatan jumlah tempat usaha/ bangunan/ rumah industri milik masyarakat/ swasta yang menerapkan gerakan Kantor Hijau ( <i>Offices Go Green</i> ) mencapai 90% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	30	0	60	0	90	0	90	0	
		Persentase jumlah kantor/ gedung pemerintahan yang hemat listrik dan air meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	30	0	45	0	60	0	60	0	
		Persentase jumlah kantor/ gedung milik swasta yang hemat listrik dan air meningkat sebesar 60%	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	30	0	45	0	60	0	60	0	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	08	26	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) <b>(Prioritas kelima)</b>	Persentase penurunan angka pencemaran akibat usaha masyarakat baik berskala besar, menengah dan kecil sebesar 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	0	10	200	10	20	10	20	20	0	60	240	SKPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
				Persentase dunia usaha yang terlibat aktif dalam CSR bidang lingkungan secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase jumlah tempat usaha milik masyarakat/ swasta yang memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	200	50	20	100	20	100	20	100	260			
		Persentase peningkatan jumlah tempat usaha milik masyarakat/ swasta berskala besar termasuk tempat wisata yang memiliki standar pengelolaan lingkungan terintegrasi sebesar 90% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	600	30	0	60	0	90	0	90	600			
1	20	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>																	
1	20	63	Program Pengembangan Kompensasi Jasa Lingkungan Hidup ( <b>Prioritas kelima</b> )	Persentase reformulasi kebijakan daerah ( <i>policy reformulation</i> ) yang memiliki keberpihakan kepada lingkungan hidup mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	100	-	0	-	0	-	0	100	100	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	22	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>																	
1	22	21	Program Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang aktif dalam aktifitas bernuansa lingkungan hidup yang diselenggarakan kecamatan dan tingkat kota mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	40	1.000	60	150	80	150	100	150	100	1.950	SKPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase peningkatan luasan perkarangan rumah masyarakat di lingkungan kelurahan yang ditanami pohon terutama pohon buah-buahan sebesar 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	0	20	0	40	0	60	0	80	0	80	0		
			Persentase peningkatan jumlah rumah tangga di lingkungan kelurahan yang melakukan pemisahan sampah sebesar 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	500	20	500	30	100	40	100	60	100	60	1.300		
			Persentase peningkatan jumlah kelurahan hijau mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	0	20	0	30	500	40	500	60	500	60	1.500		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase peningkatan jumlah kelurahan bersih mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	0	20	0	30	150	40	150	60	150	60	450			
		Persentase jumlah rumah tangga di lingkungan kelurahan yang memproduksi pupuk kompos mencapai 20% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	500	20	500	20	50	20	50	20	50	20	1.150			
		Persentase peningkatan jumlah rumah tangga di lingkungan kelurahan yang memanfaatkan perkarangan untuk tanaman obat mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	500	20	500	30	50	40	50	60	50	60	1.150			
2		<b>URUSAN PILIHAN</b>																	
2	03	<b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>																	
2	03	18	Program Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	Persentase rumah tangga yang menggunakan biomassa sebagai sumber energi untuk kebutuhan sehari-hari meningkat sebesar 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	200	30	400	40	50	50	200	60	200	60	1.050	SKPD Pengampu Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Cakupan peningkatan penggunaan <i>solar cell panel</i> sebagai alternatif penerangan mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	30	0	30	0	60	0	
		Persentase penggunaan angin sebagai alternatif pengganti listrik ( <i>wind energy</i> ) mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	30	1.000	30	1.500	60	2.500	
		Cakupan jangkauan pelayanan air bersih melalui penerapan sistem distribusi hemat energy ( <i>multi village system</i> ) mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	30	500	30	500	60	1.000	
		Persentase penggunaan energy listrik dari pengolahan air lindi mencapai 20% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	10	200	10	300	20	500	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase kesesuaian alokasi DAK bidang transportasi dalam pemenuhan kebutuhan sistem jaringan transportasi daerah yang terpadu mencapai 100% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0			
		Persentase rencana induk/ rencana aksi daerah pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dan arah pencapaian visi Kota Singkawang mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	50	500	50	600	-	0	-	0	50	1.100			
1	06	41	Penguatan Sistem Inovasi Daerah Pengembangan Sistem Transportasi Terpadu <b>(Prioritas keenam)</b>	Persentase implementasi teknologi pembangunan dan pengembangan infrastruktur sistem jaringan transportasi perkotaan terpadu berbasis ilmu pengetahuan inovatif mencapai 30% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0		0	-	0	30	2.000	30	2.000	SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase ketersediaan fasilitas terminal angkutan darat yang nyaman, aman, dan bersih mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	500	100	400	100	500	100	600	100	700	100	2.700			
1	07	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Usia pakai prasarana dan fasilitas LLAJ mencapai 5 tahun	Tahun	Belum tersedia data	5	600	5	500	5	300	5	200	5	100	5	1.700	SKPD Pengampu Urusan Perhubungan
			Usia pakai terminal mencapai 5 tahun	Tahun	Belum tersedia data	-	0	5	500	5	0	5	15	5	20	5	535		
			Usia pakai pelabuhan mencapai 5 tahun	Tahun	Belum tersedia data	-	0	5	0	5	0	5	20	5	30	5	50		
			Usia pakai halte angkutan umum dalam trayek mencapai 5 tahun	Tahun	Belum tersedia data	-	0	5	0	5	10	5	15	5	20	5	45		
			Usia pakai fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kota Singkawang mencapai 5 tahun	Tahun	Belum tersedia data	5	4.000	5	4.000	5	600	5	600	5	600	5	9.800		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	07	17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	35	45	0	55	0	70	0	80	0	50	0	100	-	SKPD Pengampu Urusan Perhubungan
			Tingkat pelanggaran lalu lintas menurun hingga 0% pada Tahun 2017	Persen	80	70	500	50	600	0	100	0	50	0	50	0	1.300		
			Rasio ijin trayek sebesar 0.0011 pada Tahun 2017	Persen	0,0010	0,0009	0	0,0010	0	0,0010	0	0,0011	0	0,0011	0	0,0011	0		
			Tingkat keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	40	0	60	0	80	0	90	0	100	0	100	0		
			Persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	35	45	0	55	0	70	0	80	0	100	0	100	0		
			Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sebesar 10 pada Tahun 2017	Persen	10,96	10,8	0	10,6	0	10,4	0	10,2	0	10	0	10	0		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase peningkatan jumlah barang masuk ke terminal sebesar 20% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0			
1	07	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase ketersediaan gedung terminal angkutan darat yang dibangun mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	50	500	50	2.000	50	300	50	300	100	300	100	3.400	SKPD Pengampu Urusan Perhubungan
			Persentase ketersediaan gedung terminal angkutan udara yang dibangun mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	10	20.000	20	196.655	50	237.531	100	386.514	100	840.700		
			Persentase ketersediaan gedung terminal angkutan air yang dibangun meningkat sebesar 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	-	0	50	100	50	100		
			Tingkat kesesuaian pengelolaan terminal angkutan darat mencapai 100% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
			Persentase pembangunan halte bus mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	50	500	-	0	50	50	50	50	50	600		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	07	19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan dengan kecepatan rencana mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	35	40	0	60	0	70	0	80	0	100	0	100	0	SKPD Pengampu Urusan Perhubungan
			Persentase peningkatan kecepatan rata-rata yang dapat ditempuh mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	10	20	0	20	0	40	0	50	0	60	0	60	0		
			Tingkat kelaikan sarana LLAJ mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	40	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
			Persentase pemasangan ram-bu-rambu mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	30	600	-	0	-	0	-	0	50	1.100		
			Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	30	10	600	20	800	75	100	90	0	100	0	100	1.500		
			Persentase peningkatan ruas jalan yang aman bagi pejalan kaki mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	0	30	0	40	0	50	0	60	0	60	0		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab	
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Persentase peningkatan ruas jalan yang aman bagi pengendara sepeda mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	0	30	0	40	-	50	-	60	-	60	0		
		Waktu kemacetan lalu lintas pada jam-jam sibuk menurun hingga 0 menit pada Tahun 2017	Menit	10	15	0	10	300	5	20	5	20	0	20	0	360		
		Persentase penurunan angka kecelakaan mencapai 30% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	70	0	60	0	50	0	40	0	30	0	30	0		
1	07	20	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase peningkatan uji KIR mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	200	30	200	40	15	50	20	60	25	460	SKPD Pengampu Urusan Perhubungan
			Angkutan darat sebesar 10 pada Tahun 2017	Unit	Belum tersedia data	-	0	-	0	6	0	8	0	10	0	10	0	
			Kepemilikan KIR angkutan umum umum (KIR) mencapai 25% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	5	0	10	0	15	0	20	0	25	0	25	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kota Singkawang yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	30	50	0	65	0	75	0	90	0	100	0	100	0			
		Persentase penerapan standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kota Singkawang mencapai 100% setiap tahunnya	Persen	50	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0			
1	07	22	Program Pengembangan Sistem Informasi/ Database Transportasi Terpadu ( <b>Prioritas keenam</b> )	Persentase akurasi database jaringan transportasi perkotaan mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	50	200	50	200	-	0	-	0	50	400	SKPD Pengampu Urusan Perhubungan
			Persentase akurasi database pelabuhan mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	50	200	-	0	50	200		
			Persentase akurasi database bandar udara mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	-	0	50	200	50	200		



### 8.7. Indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Ketujuh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1		<b>URUSAN WAJIB</b>																	
1	09	<b>Pertanahan</b>																	
1	09	18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan ( <b>Prioritas keenam</b> )	Cakupan informasi pertanahan milik pemerintah meningkat 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	20	0	20	0	60	0	SKPD Pengampu Urusan Pertanahan
				Persentase pendataan penduduk yang memiliki lahan bersertifikat meningkat sebesar 55% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	200	50	600	55	100	-	0	-	0	55	900	
1	19	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>																	
1	19	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan penegakan perlindungan ketentraman dan ketertiban mencapai 100% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SKPD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
				Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persen	Belum tersedia data	80	1.000	85	0	90	0	95	0	100	0	100	1.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase kejadian/ gangguan ketentraman dan ketertiban yang tuntas ditangani mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	80	0	85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) pengaduan masyarakat	Persen	Belum tersedia data	-	0	120	0	90	80	60	90	45	100	45	270	
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban meningkat 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	75	0	75	60	80	50	80	40	80	150	
		Persentase ketersediaan mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	-	0	100	0	100	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	19	16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Angka kriminalitas tertangani melalui aktivitas pemberdayaan masyarakat setempat mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	0	110	40	120	40	130	40	130	40	130	40	620	SKPD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
			Angka kriminalitas tertangani mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	18,7	25	0	30	0	40	0	50	0	60	0	60	0		
			Persentase penurunan jumlah kriminalitas yang terjadi mencapai 16,94% pada Tahun 2017	Persen	35,65	31,66	0	28,48	0	25,55	0	22,84	0	16,94	0	16,94	0		
			Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan mencapai 70% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	50	0	55	0	60	0	65	0	70	0	70	0		
1	19	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat dicegah mencapai 40% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	-	70	40	70	40	70	40	70	40	70	40	350	SKPD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					-	0	20	0	20	0	20	0	-	0	60	0			
1	19	20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Rasio pos siskamling per jumlah RT minimal mencapai 1 per RT (Rukun Tetangga) berdasarkan luas wilayah	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	1:1	0	1:2	0	1:1	0	1:2	0	SKPD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 1.000 penduduk	Persen	4,36	-	0	-	0	5,3	0	5,6	0	6	0	6	0		
			Rata-rata kejadian gangguan keamanan per tahun per 1.000 penduduk	Persen	Belum tersedia data	-	70	-	70	1	70	1	70	0	70	0	350		
			Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	60	0	70	0	80	0	80	0		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab	
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	19	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang berperan aktif dalam politik dan organisasi kemasyarakatan meningkat 20% tiap tahunnya hingga mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	20	20	20	20	20	20	60	20	60	100	SKPD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
			Angka partisipasi perempuan dalam legislatif meningkat mencapai 30% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	100	
1	19	24	Program Pengembangan Pendidikan Organisasi/ Lembaga Swadaya Masyarakat	Persentase jumlah organisasi/ lembaga masyarakat yang berperan positif dalam mendukung pencapaian visi pembangunan mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	20	20	20	20	20	20	20	20	80	100	SKPD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
			Persentase peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja organisasi masyarakat mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	40	0	40	0	20	0	100	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab	
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	20	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>																
1	20	41	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum	Cakupan penyelesaian permasalahan ketertarikan dan ketertiban daerah mencapai 100% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	90	0	95	0	100	0	100	0
				Persentase penurunan jumlah gugatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Singkawang mencapai 70% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	30	1.000	40	600	50	300	60	200	70	100	70	2.200
1	20	42	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pemerintahan	Persentase jumlah penyelesaian sengketa pertanahan meningkat mencapai 30% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	1.000	15	600	20	100	25	75	30	50	30	1.825
				Persentase konflik pertanahn yang diselesaikan melalui jalur hukum menurun sebesar 5% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	15	0	10	0	5	0	5	0

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	22	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>																	
1	22	22	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase peningkatan jumlah kasus penyakit masyarakat (Pekat) yang ditangani mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	40	500	50	0	60	0	70	0	80	0	80	500	SKPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat (Pekat) menurun 20% setiap tahunnya hingga mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	0	80	0	60	0	40	0	40	0	

**8.8. Indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Kedelapan**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1		<b>URUSAN WAJIB</b>																	
1	06	<b>Perencanaan Pembangunan</b>																	
1	06	23	Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase penyusunan model pengembangan seni dan budaya daerah terpadu dengan Pilot Project berlokasi di Kecamatan Singkawang Selatan, Utara dan Timur sebagai kawasan wisata terpadu yang berwawasan lingkungan dengan tatanan kehidupan budaya Cina, Dayak dan Melayu yang bermartabat mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	500	-	0	-	0	-	0	100	500	SKPD Pengampu Urusan Perencanaan Pembangunan
			Cakupan kajian seni meningkat 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	150	-	0	-	0	-	0	100	150		
			Persentase implementasi inovasi pengembangan seni dan budaya mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	30	300	-	0	-	0	30	300	60	600		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Cakupan perencanaan pengembangan olahraga terpadu mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	600	-	0	-	0	-	0	100	600			
1	13	<b>Sosial</b>																	
1	13	17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase tingkat kemandirian anak terlantar mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	500	20	500	40	300	60	300	80	300	80	1.900	SKPD Pengampu Urusan Sosial
			Persentase penurunan jumlah komunitas anak-anak punk mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	500	20	500	40	300	60	300	80	300	80	1.900		
			Cakupan penanganan anak terlantar tanpa identitas mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	500	20	500	40	100	60	100	80	100	80	1.300		
			Persentase penurunan jumlah anak-anak gelandangan pada Tahun 2017 mencapai 80%	Persen	Belum tersedia data	10	500	20	500	40	200	60	200	80	200	80	1.600		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab	
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Persentase anak-anak gelandangan/ jalanan/ terlantar yang melanjutkan sekolah mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	500	20	500	40	100	60	100	80	100	80	1.300		
		Tingkat pendidikan ditamatkan oleh anak terlantar mencapai 12 % pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	6	0	9	0	12	0	12	0		
		Persentase transparansi lembaga/ yayasan dalam pengelolaan bantuan sosial penanganan anak terlantar mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	400	100	400	100	100	100	100	100	100	100	1.100		
1	13	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase panti sosial skala Kota Singkawang yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	83,3	100	400	100	400	100	0	100	0	100	0	800	SKPD Pengampu Urusan Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	7,69	40	1.000	60	400	80	0	90	0	100	0	100	1.400	
		Persentase korban bencana skala kabupaten/ kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	26,98	40	1.000	60	400	80	0	90	0	100	0	100	1.400	
		Persentase PMKS skala Kota Singkawang yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	20,03	40	1.100	60	400	80	0	90	0	100	0	100	1.500	
		Persentase korban bencana skala kabupaten/ kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	33,16	40	0	60	0	80	0	90	0	100	0	100	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	53,84	100	600	100	400	100	0	100	0	100	0	100	1.000			
		Persentase korban bencana skala kabupaten/ kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	33,16	40	500	60	500	80	500	90	500	100	500	100	2.500			
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	40	500	60	500	80	500	100	500	100	2.500			
1	13	19	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Persentase panti asuhan/ panti jompo yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	1.000	40	500	60	10	80	10	100	10	100	1.530	SKPD Pengampu Urusan Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase panti asuhan/ panti jompo yang memiliki manajemen transparansi pengelolaan bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	40	500	100	10	100	10	100	10	100	1.030	
		Persentase ketersediaan prasarana dan sarana panti asuhan/ panti jompo yang memenuhi persyaratan kesehatan dan sanitasi mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	40	500	40	10	60	10	80	10	80	1.030	
		Persentase jumlah orang pada panti asuhan/ panti jompo yang memperoleh pelayanan pemeriksaan kesehatan dasar secara berkala mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	40	500	40	15	60	20	80	25	80	1.060	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	13	20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase tingkat kemandirian bekas gelandangan, pengemis, tunasusila, korban narkoba dan penyandang permasalahan sosial lainnya mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	500	20	500	40	15	60	20	80	25	80	1.060	SKPD Pengampu Urusan Sosial
			Persentase penurunan jumlah gelandangan, pengemis, tunasusila dan korban narkoba, eks narapidana, PSK dan penyakit sosial lainnya mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	500	20	500	40	0	60	0	80	0	80	1.000		
			Cakupan penanganan gelandangan, pengemis, tunasusila dan korban narkoba, eks narapidana, PSK dan penyakit sosial lainnya mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	500	20	500	40	15	60	20	80	25	80	1.060		
			Persentase mantan penghuni penampungan sosial yang telah mampu hidup mandiri mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	500	20	500	40	15	60	20	80	25	80	1.060		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase penurunan jumlah mantan penghuni penampungan sosial yang kembali mengalami permasalahan sosial mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	20	500	20	0	20	0	40	0	40	1.000			
1	13	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS skala Kota Singkawang yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	7,68	40	500	60	500	80	0	90	0	100	0	100	1.000	SKPD Pengampu Urusan Sosial
		Persentase menurunnya jumlah PMKS melalui program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	20	500	20	0	20	0	40	0	40	1.000			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase peningkatan pelatihan keterampilan bagi eks PMKS mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	20	500	20	35	20	40	40	50	40	1.125	
		Persentase peningkatan jumlah eks PMKS yang memiliki sertifikasi keahlian khusus dan keterampilan bekerja mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	500	10	500	20	0	40	0	60	0	60	1.000	
		Persentase produk kreatif olahan eks PMKS mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	20	500	40	20	60	25	80	30	80	1.075	
		Cakupan jangkauan penjualan produk kreatif olahan eks PMKS mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	20	500	20	20	40	25	60	30	60	1.075	
		Penerimaan pendapatan penjualan produk kreatif olahan PMKS mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	0	500	0	500	20	0	40	0	60	0	60	1.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase perusahaan/ tempat usaha milik swasta yang menerima eks PMKS terlatih dan terampil mencapai 20% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	0	500	0	500	20	0	20	0	20	0	20	1.000			
		Persentase tempat usaha kreatif yang dikelola oleh eks PMKS terlatih dan terampil mencapai 20% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	0	500	0	500	20	50	20	50	20	50	20	1.150			
1	17	<b>Kebudayaan</b>																	
1	17	19	Program Penyelenggaraan Festival Daerah	Penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 6 kali setiap tahunnya	Kegiatan	6	6	500	6	300	6	600	6	600	6	600	6	2.600	SKPD Pengampu Urusan Kebudayaan
			Cakupan fasilitasi seni mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	40	50	60	50	80	100	100	150	100	850		
			Cakupan gelar seni mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	0	40	0	60	0	80	0	100	0	100	0		
			Misi kesenian mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	0	40	0	60	0	80	0	100	0	100	0		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase penyelenggaraan " <b>Sing-kawang Festival</b> " yang berdaya saing hingga tingkat nasional bahkan internasional meningkat sebesar 70% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	800	60	1.000	70	1.500	70	3.300			
		Persentase pagelaran seni dan budaya sekolah di pentas-pentas regional dan nasional mencapai 70% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	30	2.000	40	500	50	500	60	500	70	500	70	4.000			
		Cakupan publikasi promosi festival seni dan budaya Kota Singkawang hingga tingkat internasional mencapai 70% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	30	2.000	40	0	50	0	60	0	70	0	70	2.000			
1	17	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan organisasi seni dan budaya mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	40	300	60	30	80	30	100	30	100	890	SKPD Pengampu Urusan Kebudayaan
				Cakupan sumberdaya manusia kesenian mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	40	500	60	0	80	0	100	0	100	1.000	
				Cakupan tempat pementasan gelar budaya mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	40	1.000	60	0	80	0	100	0	100	1.500	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Cakupan upaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	50	500	50	300	50	0	50	0	50	0	50	800	
		Persentase peningkatan kualitas pelestarian budaya mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	50	500	50	0	50	0	50	0	50	0	50	500	
		Persentase penatagunaan naskah dan benda kuno milik Kota Singkawang mencapai 20% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	20	600	20	0	20	0	20	0	20	1.100	
		Persentase ketersediaan kebijakan tentang perlindungan budaya lokal daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	500	100	50	-	0	-	0	-	100	100	550	
		Persentase peningkatan pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	2.000	40	500	60	200	80	300	100	400	100	3.400	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase publikasi potensi dan promosi budaya daerah melalui media online meningkat 20% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	20	1.000	20	0	20	0	20	0	20	1.000			
1	17	20	Program Pelestarian Budaya Daerah	Persentase penyusunan model pembelajaran seni budaya/ seni rupa yang inovatif dengan menerapkan pembelajaran seni budaya berbasis <i>lateral thinking</i> mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	100	0	100	0	100	0	100	300	SKPD Pengampu Urusan Kebudayaan
		Persentase pembelajaran seni budaya terintegrasi pendidikan karakter mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	40	50	60	30	80	60	100	80	100	720			
		Persentase peningkatan jumlah sekolah yang memiliki sanggar tari sekolah pada tingkat pendidikan 12 tahun mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	40	1.100	60	50	80	50	100	50	100	1.750			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase peningkatan jumlah sekolah yang memiliki sanggar seni dan musik yang dikelola sekolah pada tingkat pendidikan 12 tahun mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	40	400	60	80	80	100	100	100	100	1.180			
1	18	<b>Pemuda dan Olah Raga</b>																	
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase jumlah anak didik berbakat usia 5 - 12 tahun yang dipersiapkan menjadi atlet cabang olahraga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	40	300	60	60	80	80	100	100	100	1.040	SKPD Pengampu Urusan Pemuda dan Olahraga
			Persentase cabang olahraga daerah yang memperoleh penghargaan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	40	0	60	0	80	0	100	0	100	500		
			Persentase peningkatan jumlah cabang olahraga berorientasi prestasi yang unggul di tingkat regional dan nasional mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	500	10	0	20	0	40	0	60	0	60	500		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase penyelenggaraan kompetisi olahraga kompetitif hingga tingkat provinsi dan nasional mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	1.000	40	200	60	200	80	200	100	200	100	1.800	
		Persentase peningkatan kesejahteraan atlet, pelatih dan teknisi olahraga yang mengharumkan nama Kota Singkawang mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	10	300	20	300	40	300	40	900	
		Cakupan pengembangan olahraga kreasi dan olahraga khusus penyandang cacat mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	10	0	20	0	40	0	40	0	
		Persentase peningkatan kontribusi pendanaan dari pihak swasta melalui penataan manajemen CSR bidang olahraga mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase masyarakat yang aktif melaksanakan 1 cabang olahraga minimal 1 kali seminggu mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	40	500	40	200	40	0	40	0	40	0	40	700			
1	18	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase ketersediaan prasarana dan sarana olahraga dalam kondisi baik mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	60	300	60	100	60	120	60	150	60	670	SKPD Pengampu Urusan Pemuda dan Olahraga
			Persentase pengembangan kemitraan pembangunan sarana olahraga berbasis IPTEK mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	0	0	0	0	50	200	50	300	50	500		
1	20		<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>																
1	20	64	Program Evaluasi Kinerja Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	40	300	60	0	80	0	100	0	100	800	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian-
			Cakupan pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi olahragawan mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	10	500	20	100	40	150	60	200	60	950		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Cakupan pembinaan manajemen organisasi olahraga mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	40	0	60	0	60	0	dan Persandian
		Cakupan implementasi kebijakan nasional bidang olahraga yang ditindaklanjuti mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	40	0	60	0	60	0	
		Cakupan kerjasama kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	40	0	60	0	60	0	
		Persentase peningkatan jumlah sekolah yang memiliki klub olahraga prestasi sekolah pada tingkat pendidikan 12 tahun mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	40	500	60	20	80	50	100	80	100	1.150	
		Persentase peningkatan jumlah prestasi kompetisi olahraga sekolah mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	60	0	80	0	100	0	100	0	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase peningkatan KKG berprestasi hingga ke tingkat nasional meningkat 20% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	300	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	
		Persentase peningkatan kompetensi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan meningkat 20% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	300	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	
		Persentase peningkatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG) berprestasi hingga ke tingkat nasional meningkat 20% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	300	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	
1	01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase peningkatan kinerja komite 20% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	20	0	20	0	20	0	20	500	SKPD Pengampu Urusan Pendidikan
				Persentase peningkatan permasalahan pendidikan yang berhasil ditangani oleh dewan pendidikan mencapai 20% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	20	0	20	0	20	0	20	500	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab	
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	01	25	Program Pendampingan Penerapan Pendidikan Karakter	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	-	0	-	0	-	0	100	300	SKPD Pengampu Urusan Pendidikan
			Persentase kebijakan, pedoman dan tata-cara/ juklak penerapan pendidikan berbasis karakter pada sekolah baik pendidikan dasar, menengah maupun kejuruan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	40	0	40	0	40	0	40	0	
			Persentase peningkatan jumlah siswa pendidikan menengah kejuruan berprestasi dalam mata pelajaran/ sains dan seni hingga tingkat nasional meningkat 50% hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	50	600	50	300	50	400	50	400	50	400	50	2.100	
			Persentase peningkatan jumlah sekolah pendidikan menengah kejuruan berprestasi hingga tingkat nasional meningkat 50% hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	600	50	0	50	0	50	0	50	0	50	600	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab	
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						-	0	-	0	40	0	40	0	40	0	40	0	
1	01	26	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar <b>(Prioritas ketiga)</b>	Persen	Belum tersedia data	50	400	50	400	50	0	50	0	50	0	50	800	SKPD Pengampu Urusan Pendidikan
			Persentase penurunan angka putus sekolah anak usia sekolah pendidikan dasar mencapai 100% hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	600	100	600	100	400	100	400	100	400	100	2.400	
1	01	27	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah <b>(Prioritas ketiga)</b>	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	0	50	0	50	0	50	-	SKPD Pengampu Urusan Pendidikan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					-	0	-	0	50	0	50	0	50	0	50	0			
					-	0	-	0	-	800	100	800	100	800	100	2.400			
1	01	28	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal <b>(Prioritas ketiga)</b>	Persentase angka kelulusan kejar Paket A tanpa mengulang mencapai 100% hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	500	SKPD Pengampu Urusan Pendidikan	
				Persentase angka kelulusan kejar Paket B tanpa mengulang mencapai 100% hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	500		
				Persentase angka kelulusan kejar Paket C tanpa mengulang mencapai 100% hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	500		
1	01	31	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan <b>(Prioritas Kedua)</b>	Reformulasi perancangan pengembangan peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	100	-	0	-	0	-	0	100	100	SKPD Pengampu Urusan Pendidikan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/ tatacara dan tahapan pengintegrasian peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	30	-	0	-	0	-	0	100	30	
		Persentase pengintegrasian pencapaian target SPM dan realisasi peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150	
		Persentase ketersediaan SOP pencapaian target SPM bidang pendidikan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase pencapaian target SPM bidang pendidikan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan bidang pendidikan hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	-	0	-	0	-	0	100	300			
		Cakupan sekolah/ stakeholders terkait yang berintegrasi dalam pencapaian target-target SPM, SPP dan SP bidang pendidikan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	20	100	40	200	20	100	20	100	100	500			
		Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja ( <i>performance</i> ) pelayanan masyarakat bidang pendidikan menurun 50% hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	0	50	0	50	0	50	0			
1	02	<b>Kesehatan</b>																	
1	02	38	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan ( <b>Prioritas Kedua</b> )	Reformulasi perancangan pengembangan peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	100	-	0	-	0	-	0	100	100	SKPD Pengampu Urusan Kesehatan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pedoman, mekanisme/ tatacara dan tahapan peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan melalui pendekatan pencegahan dan penyembuhan ( <i>preventif dan curatif</i> ) mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	30	-	0	-	0	-	0	100	30	
		Persentase pengintegrasian pencapaian target SPM dan realisasi peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150	
		Persentase ketersediaan SOP pencapaian target SPM bidang kesehatan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase pencapaian target SPM bidang kesehatan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	-	0	-	0	-	0	100	300	
		Cakupan puskesmas/ pustu/ stakeholders terkait yang berintegrasi dalam pencapaian target-target SPM, SPP dan SP bidang kesehatan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	20	100	40	200	20	100	20	100	100	500	
		Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja ( <i>performance</i> ) pelayanan masyarakat bidang kesehatan menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	0	50	0	50	0	50	-	
1	02	39	Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Daerah <b>(Prioritas Kedua)</b>	Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pelayanan rumah sakit daerah yang akuntabel, berbasis kinerja ( <i>performance</i> ) dan pro rakyat mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	100	-	0	-	0	100	100	SKPD Pengampu Urusan Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/ tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan rumah sakit daerah yang akuntabel, berbasis kinerja ( <i>performance</i> ) dan pro rakyat baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	30	-	0	-	0	-	0	100	30	
		Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan rumah sakit daerah yang akuntabel, berbasis kinerja ( <i>performance</i> ) dan pro rakyat meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	300	100	300	100	300	100	900	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan rumah sakit daerah meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	200	-	0	-	0	100	200	
		Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) dan akuntabilitas pelayanan rumah sakit daerah baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan rumah sakit daerah hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	-	0	-	0	-	0	100	300	
		Cakupan publikasi pelayanan rumah sakit daerah berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	200	100	200	100	200	100	600	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Angka keluhan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit daerah mencapai 0% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	03	<b>Pekerjaan Umum</b>																	
1	03	35	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pekerjaan Umum <b>(Prioritas Kedua)</b>	Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pelayanan publik bidang pekerjaan umum mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	100	-	0	-	0	-	0	100	100	SKPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum
			Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/ tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang pekerjaan umum baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	30	-	0	-	0	-	0	100	30		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang pekerjaan umum meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150	
		Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang pekerjaan umum meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang pekerjaan umum baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang pekerjaan umum hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	-	0	-	0	-	0	100	300			
		Cakupan publikasi pelayanan publik bidang pekerjaan umum berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	20	100	40	200	20	100	20	100	100	500			
		Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja ( <i>performance</i> ) pelayanan publik bidang pekerjaan umum menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	0	50	0	50	0	50	0			
1	04	<b>Perumahan</b>																	
1	04	23	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perumahan Rakyat ( <b>Prioritas Kedua</b> )	Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pelayanan publik bidang perumahan rakyat mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	100	-	0	-	0	-	0	100	100	SKPD Pengampu Urusan Perumahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/ tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang perumahan rakyat baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	30	-	0	-	0	-	0	100	30	
		Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang perumahan rakyat meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150	
		Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang perumahan rakyat meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang perumahan rakyat baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150	
		Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang perumahan rakyat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	-	0	-	0	-	0	100	300	
		Cakupan publikasi pelayanan publik bidang perumahan rakyat berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	20	100	40	200	20	100	20	100	100	500	
		Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja ( <i>performance</i> ) pelayanan masyarakat bidang perumahan rakyat menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	0	50	0	50	0	50	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	06	<b>Perencanaan Pembangunan</b>																	
1	06	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah <b>(Prioritas keenam)</b>	Persentase ketersediaan dasar hukum perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	450	100	300	-	0	-	0	-	0	100	750	SKPD Pengampu Urusan Perencanaan
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan tingkat SKPD yang bersinergi dengan dokumen perencanaan tingkat kota mencapai 100% hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
			Persentase dokumen perencanaan tahunan SKPD yang akuntabel, berbasis kinerja ( <i>performance</i> ) dan berorientasi hasil ( <i>result oriented</i> ) mencapai 100% hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
			Persentase dokumen perencanaan yang bersinergi dengan dokumen penganggaran tahunan SKPD mencapai 100% hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	500	100	500	100	500	100	1.500		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase program prioritas SKPD yang memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan daerah tahunan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase program dan kegiatan SKPD yang diakomodir dalam dokumen perencanaan kota tahunan meningkat hingga mencapai 100%	Persen	Belum tersedia data	100	400	100	300	100	300	100	300	100	300	100	1.600	
		Persentase peningkatan jumlah keterlibatan masyarakat dalam proses MUSRENBANG tahunan meningkat 20% hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	60	-	60	40	500	60	500	80	500	100	1.620	
		Persentase peningkatan jumlah keterlibatan anggota legislatif dalam proses MUSRENBANG meningkat 50% hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	0	100	0	100	0	100	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	06	42	Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan <b>(Prioritas Keenam)</b>	Persentase kebijakan transparansi berbasis IT bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	-	0	-	0	-	0	100	300	SKPD Pengampu Urusan Perencanaan
			Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/ tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	100	-	0	-	0	100	100		
			Persentase sistem data perencanaan yang terintegrasi dengan SKPD mencapai 100%	Persen	Belum tersedia data	20	300	40	500	100	1.000	100	0	100	0	100	1.800		
			Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang SOP implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	300	-	0	-	0	100	300		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase jumlah SKPD yang menggunakan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan secara tepat dan akurat mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	200	30	200	50	200	100	600			
		Persentase akurasi dan transparansi pengelolaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0			
1	07	<b>Perhubungan</b>																	
1	07	23	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perhubungan ( <b>Prioritas kedua</b> )	Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pelayanan publik bidang perhubungan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	100	-	0	-	0	-	0	100	100	SKPD Pengampu Urusan Perhubungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/ tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang perhubungan baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	30	-	0	-	0	-	0	100	30	
		Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang perhubungan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150	
		Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang perhubungan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang perhubungan baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	90	150	
		Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang perhubungan hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	-	0	-	0	-	0	100	300	
		Cakupan publikasi pelayanan publik bidang perhubungan berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	20	100	40	200	20	100	20	100	100	500	
		Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja ( <i>performance</i> ) pelayanan masyarakat bidang perhubungan menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	0	50	0	50	0	50	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	08	<b>Lingkungan Hidup</b>																	
1	08	28	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup <b>(Prioritas kedua)</b>	Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pelayanan publik bidang lingkungan hidup mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	100	-	0	-	0	-	0	100	100	SKPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
			Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/ tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang lingkungan hidup baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	30	-	0	-	0	-	0	100	30		
			Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang lingkungan hidup meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang lingkungan hidup meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang lingkungan hidup baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	90	150	
		Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang lingkungan hidup hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	-	0	-	0	-	0	100	300	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Cakupan publikasi pelayanan publik bidang lingkungan hidup berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	20	100	40	200	20	100	20	100	100	500			
		Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja ( <i>performance</i> ) pelayanan masyarakat bidang lingkungan hidup menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	0	50	0	50	0	50	0			
1	10	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>																	
1	10	16	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan ( <b>Prioritas kedua</b> )	Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pelayanan publik bidang kependudukan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	100	-	0	-	0	-	0	100	100	SKPD Pengampu Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
			Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/ tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang kependudukan baik teknis maupun -	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	30	-	0	-	0	-	0	100	30		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab	
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017																
		Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang kependudukan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150		
		Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang kependudukan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
		Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang kependudukan baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	-	0	-	0	-	0	100	300	
		Cakupan publikasi pelayanan publik bidang kependudukan berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	20	100	40	200	20	100	20	100	100	500	
		Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja ( <i>performance</i> ) pelayanan masyarakat bidang pemerintahan dalam negeri menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	0	50	0	50	0	50	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	11	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Anak</b>																	
1	11	20	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak <b>(Prioritas kedua)</b>	Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pelayanan publik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	100	-	0	-	0	-	0	100	100	SKPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
				Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/ tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	30	-	0	-	0	-	0	100	30	
				Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150	
		Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	-	0	-	0	-	0	100	300	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Cakupan publikasi pelayanan publik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	20	100	40	200	20	100	20	100	100	500			
		Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja ( <i>performance</i> ) pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	0	50	0	50	0	50	0			
1	12	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>																	
1	12	27	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ( <b>Prioritas kedua</b> )	Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pelayanan publik bidang keluarga berencana mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	100	-	0	-	0	-	0	100	100	SKPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/ tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang keluarga berencana baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	30	-	0	-	0	-	0	100	30	
		Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang keluarga berencana meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150	
		Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang keluarga berencana meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang keluarga berencana baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150	
		Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang keluarga berencana hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	-	0	-	0	-	0	100	300	
		Cakupan publikasi pelayanan publik bidang keluarga berencana berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	20	100	40	200	20	100	20	100	100	500	
		Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja ( <i>performance</i> ) pelayanan publik bidang keluarga berencana menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	0	50	0	50	0	50	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	13	<b>Sosial</b>																	
1	13	22	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Sosial <b>(Prioritas kedua)</b>	Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pelayanan publik bidang sosial mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	100	-	0	-	0	-	0	100	100	SKPD Pengampu Urusan Sosial
			Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/ tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang sosial baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	30	-	0	-	0	-	0	100	30		
			Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang sosial meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang sosial meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang sosial baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150	
		Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang sosial hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	-	0	-	0	-	0	100	300	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Cakupan publikasi pelayanan publik bidang sosial berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	20	100	40	200	20	100	20	100	100	500			
		Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja ( <i>performance</i> ) pelayanan masyarakat bidang sosial menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	0	50	0	50	0	50	0			
1	14	<b>Tenaga Kerja</b>																	
1	14	21	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Ketenagakerjaan ( <b>Prioritas kedua</b> )	Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pelayanan publik bidang ketenagakerjaan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	100	-	0	-	0	-	0	100	100	SKPD Pengampu Urusan Ketenagakerjaan
			Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/ tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang ketenagakerjaan baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Th. 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	30	-	0	-	0	-	0	100	30		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang ketenagakerjaan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150	
		Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang ketenagakerjaan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang ketenagakerjaan baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang ketenagakerjaan hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	-	0	-	0	-	0	100	300			
		Cakupan publikasi pelayanan publik bidang ketenagakerjaan berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	20	100	40	200	20	100	20	100	100	500			
		Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja ( <i>performance</i> ) pelayanan bidang ketenagakerjaan menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017	Persen	-	-	0	-	0	50	0	50	0	50	0	50	0			
1	16	<b>Penanaman Modal</b>																	
1	16	18	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal ( <b>Prioritas kedua</b> )	Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pelayanan publik bidang penanaman modal mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	100	-	0	-	0	-	0	100	100	SKPD Pengampu Urusan Penanaman Modal

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/ tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang penanaman modal baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	30	-	0	-	0	-	0	100	30	
		Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang penanaman modal meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150	
		Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang penanaman modal meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang penanaman modal baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	90	150	
		Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang penanaman modal hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	-	0	-	0	-	0	100	300	
		Cakupan publikasi pelayanan publik bidang penanaman modal berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	20	100	40	200	20	100	20	100	100	500	
		Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja ( <i>performance</i> ) pelayanan bidang penanaman modal menurun 50% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	0	50	0	50	0	50	0	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	17	<b>Kebudayaan</b>																	
1	17	21	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kesenian <b>(Prioritas kedua)</b>	Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pelayanan publik bidang kesenian mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	100	-	0	-	0	-	0	100	100	SKPD Pengampu Urusan Kebudayaan
			Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/ tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang kesenian baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	30	-	0	-	0	-	0	100	30		
			Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang kesenian meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang kesenian meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang kesenian baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150	
		Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang kesenian hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	-	0	-	0	-	0	100	300	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	20	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/ tatacara dan tahapan pengelolaan anggaran daerah yang akuntabel berbasis kinerja ( <i>performance</i> )/ ( <i>accountable based performance</i> ) dan berorientasi hasil ( <i>result oriented</i> ) mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	-	0	-	0	-	0	100	300	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
			Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/ tatacara dan tahapan pelaksanaan penganggaran SKPD yang bersinergi dengan penganggaran daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	30	-	0	-	0	-	0	100	30		
			Persentase ketersediaan dokumen penganggaran pembangunan tingkat kota yang disusun sesuai peraturan yang berlaku dan tepat waktu mencapai 100% hingga Tahun 2017	Persen	20	100	2.800	100	1.000	100	800	100	800	100	800	100	6.200		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan pedoman/ panduan/ juklak/ juknis pelaksanaan penganggaran ( <i>costing</i> ) program dan kegiatan SKPD agar akuntabel berbasis kinerja ( <i>performance</i> ) / ( <i>accountable based performance</i> ) dan berorientasi hasil ( <i>result oriented</i> ) mencapai 100%	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	100	300	100	300	100	300	100	1.200	
		Persentase ketersediaan SOP penganggaran program dan kegiatan SKPD yang bersinergi dengan rencana penganggaran pembangunan daerah tahunan meningkat hingga mencapai 100%	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150	
		Persentase ketersediaan regulasi tentang perencanaan, pengendalian dan evaluasi penganggaran daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase ketersediaan regulasi tentang rasionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas penganggaran pembangunan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	100	300	100	300	100	300	100	1.200	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan dokumen penganggaran pembangunan tingkat SKPD yang bersinergi dengan dokumen penganggaran tingkat kota mencapai 100% hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase dokumen penganggaran tahunan SKPD yang akuntabel berbasis kinerja ( <i>performance</i> ) dan berorientasi hasil ( <i>result oriented</i> ) mencapai 100% hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase rasionalitas dan proporsionalitas penganggaran program prioritas SKPD tahunan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	0	100	200	100	200	100	200	100	600	
		Persentase usulan penganggaran program dan kegiatan SKPD yang disetujui dan tertuang dalam dokumen penganggaran pembangunan daerah tahunan (APBD) meningkat hingga mencapai 100%	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	20	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH <b>(Prioritas kedua)</b>	Persentase pelaporan pengelolaan kinerja ( <i>performance</i> ) SKPD berdasarkan tugas pokok dan fungsi dengan predikat B meningkat 20% setiap tahunnya hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	400	30	300	40	200	60	200	100	200	100	1.300	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
			Persentase pelaporan pengelolaan keuangan SKPD dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat 20% setiap tahunnya hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	0	30	300	40	300	60	300	100	300	100	1.200		
			Persentase pelaporan pengelolaan aset SKPD dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat 20% setiap tahunnya hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	0	30	300	40	300	60	300	100	300	100	1.200		
			Persentase pelaporan pengelolaan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pencapaian tugas pokok dan fungsi SKPD dengan predikat B meningkat 20% setiap tahunnya hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	20	300	40	300	60	300	100	300	100	1.700		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase peningkatan jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Wajar bebas dari Korupsi (WBK) meningkat 20% hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	30	300	40	300	60	300	100	300	100	1.700	
		Persentase pelaporan pengelolaan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pencapaian tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersinergi dengan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pemerintahan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	500	30	60	40	0	60	0	100	0	100	560	
		Persentase jumlah SKPD yang melaksanakan perencanaan, pengukuran dan penilaian kinerja ( <i>performance</i> ) mandiri meningkat 20% setiap tahunnya hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	40	0	60	0	100	0	100	0	
		Cakupan publikasi capaian akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) dan keuangan SKPD mencapai 100% hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	20	28	Program Profesionalisasi Aparatur ( <b>Prioritas kedua</b> )	Reformulasi perancangan rencana pengembangan profesionalisme PNS dan aparatur pemerintah Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	500	-	0	-	0	-	0	100	500	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
			Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang peningkatan profesionalisme PNS mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	30	-	0	-	0	-	0	100	30		
			Persentase ketersediaan dasar hukum mengenai pedoman, tatacara/ mekanisme dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan profesionalisme aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	300	-	0	-	0	100	300		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan dasar hukum mengenai tatacara/ mekanisme dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang tugas belajar dan ijin belajar untuk peningkatan profesionalisme aparatur sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	-	0	-	0	100	300	100	600	
		Persentase diklat fungsional yang diselenggarakan Pemerintah Kota Singkawang untuk peningkatan kompetensi aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	1.000	100	600	100	600	100	600	100	600	100	3.400	
		Persentase aparatur yang ditempatkan sesuai dengan diklat fungsional yang ditugaskan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	0	20	0	40	0	60	0	100	0	100	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase kesesuaian peningkatan profesionalisme PNS terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	10	667	20	834	40	1.001	60	1.201	100	1.441	100	5.144	
		Persentase penurunan ketidaksesuaian peningkatan profesionalisme PNS terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pada SKPD mencapai 0% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Cakupan publikasi informasi beasiswa penjenjangan pendidikan formal PNS yang didanai non APBD mencapai 100% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Cakupan publikasi diklat fungsional teknis mencapai 100% setiap tahunnya	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase program-program pembangunan Kota Singkawang yang ditindaklanjuti oleh kelurahan mencapai 100% hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0			
		Persentase angka keluhan kelurahan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan mencapai 20% hingga 2017	Persen	Belum tersedia data	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0			
1	20	43	Program Penataan Jumlah dan Distribusi PNS	Reformulasi perencanaan rencana pengembangan sistem penataan jumlah dan distribusi PNS mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	100	100	300	-	0	-	0	-	0	100	400	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
			Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang penataan dan distribusi PNS mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	30	-	0	-	0	-	0	100	30		
			Persentase ketersediaan dasar hukum mengenai pedoman, tatacara/ mekanisme dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang penataan jumlah dan distribusi PNS mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	-	0	-	0	100	50		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase kesesuaian antara jumlah pegawai yang direncanakan terhadap kebutuhan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	50	100	200	100	0	100	0	100	0	100	250			
		Persentase kesesuaian pendistribusian aparatur berdasarkan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	0	100	200	100	0	100	0	100	0	100	200			
		Angka pengunduran diri aparatur pada jabatan yang diemban mencapai 0% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0			
		Angka keluhan kebijakan pendistribusian aparatur mencapai 0% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0			
1	20	44	Program Sistem Seleksi CPNS dan PNS Secara Terbuka	Reformulasi perencanaan rencana pengembangan sistem seleksi CPNS dan PNS secara terbuka mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	-	0	-	0	-	0	100	300	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah an Umum, Administrasi Keuangan Daerah,-

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang sistem seleksi CPNS dan PNS secara terbuka mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	100	30	-	0	100	30	Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
		Persentase ketersediaan dasar hukum mengenai pedoman, tatacara/ mekanisme dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang penataan jumlah dan distribusi PNS mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	-	0	-	0	100	50	
		Persentase kesesuaian penerimaan PNS berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	100	0	-	0	100	0	
		Angka pengunduran diri CPNS mencapai 0% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Angka keluhan kebijakan seleksi CPNS dan PNS secara terbuka mencapai 0% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab	
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Persentase pengembangan sistem informasi seleksi CPNS dan PNS secara terbuka berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	800	-	0	-	0	100	800		
1	20	45	Program Pengusulan Formasi dan Sistem Seleksi Sumberdaya Aparatur <b>(Prioritas kedua)</b>	Reformulasi perancangan rencana pengusulan formasi dan sistem seleksi sumberdaya aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	500	-	0	-	0	100	500	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
			Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pengusulan formasi dan sistem seleksi sumberdaya aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	100	30	-	0	100		30
			Persentase ketersediaan dasar hukum mengenai pedoman, tatacara/ mekanisme dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang pengusulan formasi dan sistem seleksi sumberdaya aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	-	0	-	0	100		50

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase kesesuaian pengusulan formasi dan sistem seleksi sumberdaya aparatur terhadap kebutuhan SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	50	100	200	-	0	100	300	-	0	100	550			
		Persentase pengusulan peningkatan jabatan aparatur sesuai hasil evaluasi pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) pelaksanaan tugaspokok dan fungsi aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0			
		Persentase pegawai yang ditempatkan pada SKPD sesuai kompetensi mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	100			
1	20	46	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur ( <b>Prioritas kedua</b> )	Reformulasi perancangan rencana pengembangan kinerja ( <i>performance</i> ) PNS dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	-	0	-	0	-	0	100	300	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan -

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pembinaan dan pengembangan aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	100	30	-	0	100	30	Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
		Persentase ketersediaan dasar hukum mengenai pedoman, tatacara/ mekanisme dan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) bagi SKPD tentang pembinaan dan pengembangan aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	-	0	-	0	100	50	
		Persentase peningkatan jumlah aparatur yang produktif dan inovatif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	50	100	100	-	0	100	100	-	0	100	250	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase peningkatan jumlah aparatur yang memperoleh pengangkatan jabatan berdasarkan produk dan inovasi yang dilaksanakan aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Cakupan publikasi produk dan inovasi aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	100	
1	20	47	Program Pendidikan Kedinasan	Reformulasi perancangan rencana pendidikan kedinasan aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	0	100	0	100	0	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
			Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pendidikan kedinasan aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	80	-	0	-	0	100	80		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan dasar hukum mengenai pedoman, tatacara/ mekanisme dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang pendidikan kedinasan aparatur mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	30	-	0	-	0	-	0	100	30	
		Persentase kesesuaian pemberian pendidikan kedinasan kepada PNS yang akan ditingkatkan kompetensinya sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase diklat struktural yang diselenggarakan Pemerintah Kota Singkawang sesuai potensi dan rencana penjenjangan karir PNS terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	0	100	0	100	600	100	600	100	600	100	1.800	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase aparatur yang dikirim mengikuti diklat struktural menurun 20% setiap tahunnya hingga mencapai 40% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	50	500	80	300	20	300	20	300	-	0	40	1.400	
		Persentase jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan ujian kedinasan berjenjang sesuai peraturan yang berlaku dan kebutuhan penjenjangan karir PNS mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Rasio jumlah PNS yang menduduki jabatan yang telah mengikuti pendidikan jabatan terhadap jumlah jabatan yang tersedia mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
1	20	49	Program Penguatan Sistem Disiplin dan Etika PNS (Prioritas kedua)	Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang penguatan sistem disiplin dan etika profesi PNS mencapai 100%	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	100	-	0	-	0	100	100	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan dasar hukum mengenai pedoman, tatacara/ mekanisme dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang penguatan sistem disiplin dan etika profesi PNS mencapai 100% pada Tahun 2015	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	30	-	0	-	0	100	100	100	130	Daerah, Kepegawaian dan Persandian
		Persentase PNS berkinerja ( <i>performance</i> ) baik dan disiplin meningkat 40% tiap tahunnya hingga mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	40	0	40	1.000	60	300	70	200	80	200	80	1.700	
		Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika PNS menurun 40% tiap tahunnya hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	
1	20	50	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur ( <b>Prioritas kedua</b> )	Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang peningkatan kesejahteraan pegawai negeri mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	-	0	-	0	100	300	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat –

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan dasar hukum mengenai pedoman, tatacara/ mekanisme dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang penilaian pengukuran dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri PNS mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	30	-	0	-	0	-	0	100	30	Daerah, Kepegawaian dan Persandian
		Persentase kesesuaian pengalokasian peningkatan kesejahteraan PNS secara proposional dan rasional berdasarkan beban kerja dan kinerja ( <i>performance</i> ) sesuai dengan keuangan daerah meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	20	51	Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi <b>(Prioritas kedua)</b>	Reformulasi perancangan penataan organisasi Kota Singkawang secara efisien, efektif, dan akuntabel dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, target pelayanan publik prima dan pembagian beban kerja -organisasi secara proporsional dan rasional mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	100	100	0	-	0	-	0	-	0	100	100	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
			Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pendistribusian tugas pokok dan fungsi SKPD agar memenuhi standar dan kriteria optimal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	500	-	0	-	0	-	0	100	500		
			Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pembagian urusan dan kewenangan organisasi agar tidak tumpang tindih mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	0	-	0	-	0	-	0	100	0		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pedoman, mekanisme/ tatacara dan tahapan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD terhadap pencapaian target penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar tepat sasaran mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase SKPD tepat fungsi dalam memenuhi kriteria standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik baik administrasi dan teknis mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase ketersediaan pedoman/ panduan/ juklak/ juknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD berbasis kinerja ( <i>performance</i> ) dan berorientasi outcome/ result mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase jumlah SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi berbasis akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) dan berorientasi <i>outcome/ result</i> mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0			
		Persentase SKPD yang tepat tugas dan fungsi berdasarkan pelimpahan pelaksanaan urusan dan kewenangan pemerintahan daerah mencapai 100%	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0			
1	20	52	Program Pengembangan Kinerja Organisasi ( <b>Prioritas kedua</b> )	Reformulasi perancangan pengembangan kinerja ( <i>performance</i> ) organisasi agar memiliki pola kerja kreatif dan inovatif mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	500	-	0	-	0	100	100	100	600	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
				Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/ tatacara dan tahapan pengembangan kinerja ( <i>performance</i> ) organisasi agar kreatif dn inovatif mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	300	-	0	-	0	-	0	-	-	100	300	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan standar penilaian dan pengukuran pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) organisasi meningkat hingga mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	40	200	-	0	40	100	-	-	80	300	
		Persentase jumlah SKPD yang memiliki peningkatan pencapaian variabel kinerja ( <i>performance</i> ) berdasarkan tupoksi meningkat hingga mencapai 60% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	30	0	40	0	50	0	60	0	60	0	
		Persentase SKPD yang memenuhi target pencapaian indikator variabel keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan pelimpahan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	40	200	60	200	80	200	80	600	
		Cakupan publikasi penilaian pencapaian pengembangan kinerja ( <i>performance</i> ) SKPD agar efektif dan efisien dalam pelaksanaan tupoksi SKPD mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	20	53	Program Penguatan Ketatalaksanaan Organisasi ( <b>Prioritas kedua</b> )	Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang penatalaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD agar efektif, efisien dan transparan dalam pelayanan baik teknis maupun administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	-	0	-	0	-	0	100	300	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
			Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pedoman, mekanisme/ tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	200	-	0	-	0	-	0	100	200		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pencapaian target-target SPM, SPP dan SP SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	200	-	0	-	0	-	0	100	200	
		Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pengukuran/ penilaian penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	200	
		Persentase SKPD yang memiliki juklak/ juknis/ SOP pencapaian target SPM dan SPP baik teknis dan administratif secara transparan, efisien dan efektif mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	20	54	Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penganggaran Pembangunan <b>(Prioritas keenam)</b>	Persentase kebijakan transparansi berbasis IT perencanaan, pengendalian dan evaluasi penganggaran pembangunan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	-	0	-	0	-	0	100	300	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat - Daerah, Kepegawaian dan Persandian
			Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/ tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi penganggaran pembangunan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	30	-	0	-	0	100	30		
			Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang SOP implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi penganggaran pembangunan berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	30	100	30	100	30	100	90		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase jumlah SKPD yang menggunakan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi penganggaran pembangunan secara tepat dan akurat mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase akurasi dan transparansi pengelolaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi penganggaran pembangunan daerah berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase kebijakan transparansi berbasis IT bidang pengelolaan perbendaharaan, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	100	-	0	-	0	-	0	100	100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/ tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pemanfaatan sistem informasi pengelolaan perbendaharaan, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang SOP implementasi pengelolaan perbendaharaan, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan daerah berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150	
		Persentase jumlah SKPD yang menggunakan sistem informasi pengelolaan perbendaharaan, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan daerah secara tepat dan akurat mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/ tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi peningkatan pendapatan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	200	100	0	100	0	100	200	
		Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang SOP implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi peningkatan pendapatan daerah berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150	
		Persentase jumlah SKPD terkait pendapatan daerah yang menggunakan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi peningkatan pendapatan daerah secara tepat dan akurat mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	30	0	50	0	100	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase akurasi dan transparansi pengelolaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi peningkatan pendapatan daerah berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	1.000	100	0	100	0	100	50	100	1.050	
		Cakupan <i>stakeholders</i> (objek pajak dan retribusi daerah) yang terintegrasi dengan sistem informasi peningkatan pendapatan daerah secara transparan, terukur dan tepat sasaran mencapai 100% hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	50	500	50	500	50	500	50	500	100	2.000	
1	20	56	Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ( <b>Prioritas keenam</b> )	Persentase kebijakan transparansi berbasis IT - Sistem Akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) Instansi Pemerintah (SAKIP) mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	100	-	0	-	0	100	100	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
			Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/ tatacara dan tahapan penerapan SAKIP berbasis IT mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase sistem data pengukuran pencapaian kinerja ( <i>performance</i> ) SKPD yang terintegrasi dengan pencapaian kinerja ( <i>performance</i> ) penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Singkawang mencapai 100% hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	200	100	0	100	0	100	200	
		Persentase efisiensi keterkaitan pencapaian kinerja ( <i>performance</i> ) Kepala SKPD yang terintegrasi dengan pencapaian kinerja ( <i>performance</i> ) dan pertanggung jawaban Walikota Singkawang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Singkawang mencapai 100% hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang SOP implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) Instansi Pemerintah (SAKIP) berbasis IT mencapai 100% Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	20	57	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah <b>(Prioritas kedua)</b>	Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/ tatacara dan tahapan peningkatan dan pengembangan akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) dan keuangan daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	200	-	0	60	0	100	0	100	200	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, - Kepegawaian dan Persandian
			Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/ tatacara dan tahapan peningkatan dan pengembangan akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) dan keuangan daerah yang bersinergi dengan peningkatan dan pengembangan akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) SKPD mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	0	100	0	100	50		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan dokumen peningkatan dan pengembangan akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) dan keuangan daerah tingkat kota yang disusun sesuai peraturan yang berlaku dan tepat waktu mencapai 100% hingga Tahun 2017	Persen	100	100	1.000	100	500	100	500	100	500	100	500	100	2.600	
		Persentase ketersediaan pedoman/ panduan/ juklak/ juknis peningkatan dan pengembangan akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) dan keuangan daerah mencapai 100%	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	50	100	0	100	0	100	0	100	50	
		Persentase ketersediaan SOP peningkatan dan pengembangan akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) dan keuangan daerah tahunan meningkat hingga mencapai 100%	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	20	100	20	100	20	100	60	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase ketersediaan dokumen akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) dan keuangan daerah tingkat SKPD yang bersinergi dengan dokumen akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) dan keuangan tingkat kota mencapai 100% hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0			
		Persentase dokumen akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) dan keuangan tahunan SKPD yang sesuai dengan standar penilaian yang berlaku mencapai 100% hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0			
1	20	59	Program Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih ( <i>Good Governance</i> ) ( <b>Prioritas kedua</b> )	Pencapaian predikat Baik (A) pada penyelenggaraan akuntabilitas kinerja ( <i>performance</i> ) instansi pemerintahan pada Tahun 2017	Persen	CC	-	0	B	200	B	90	A	100	A	50	A	440	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kependidikan dan Kepegawaian
			Pencapaian predikat Wajar tanpa Pengecualian (WTP) pada pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Tahun 2017	Persen	WDP	-	0	WDP	200	WDP	90	WTP	100	WTP	50	WTP	440		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab	
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Pencapaian predikat Tinggi pada penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan (LPPD dan LKPJ) pada Tahun 2017	Persen	Sedang	-	0	Sedang	200	Sedang	90	Tinggi	100	Tinggi	50	Tinggi	440	dan Persandian	
		Pencapaian predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	WBBM	200	WBBM	90	WBBM	100	WBBM	50	WBBM	440		
1	20	65	Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov ( <b>Prioritas keenam</b> )	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	200	-	0	-	0	-	0	100	200	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
			Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pedoman, mekanisme/ tatacara dan tahapan penerapan e-Gov SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	30	-	0	-	0	100	30	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab	
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pencapaian efisiensi dan efektifitas penerapan e-Gov SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	50	100	0	100	0	100	0	100	50		
		Persentase implementasi e-Government yang sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah meningkat hingga mencapai 100% hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	20	0	30	0	40	0	90	0		
1	20	60	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Produk Hukum Daerah <b>(Prioritas kedua)</b>	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	100	0	100	0	100	0	100	300	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang SOP perancangan produk hukum daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	30	-	0	-	0	100	30	dan Persandian
		Persentase penurunan kasus/tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mencapai 50% hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	100	2.428	100	1.500	100	500	100	300	100	200	50	4.928	
		Cakupan publikasi produk hukum daerah mencapai 100% hingga Tahun 2017	Persen	50	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
1	20	66	Program Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Daerah	Persentase kepastian perlindungan hukum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan dan anak serta masyarakat kurang beruntung mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	0	100	100	100	100	100	300	SKPD Pengampu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase kepastian perlindungan hukum bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	0	100	100	100	100	100	100	100	300	dan Persandian		
		Persentase kepastian perlindungan hukum bagi keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup bagi kesejahteraan masyarakat mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	0	100	100	100	100	100	100	100	300			
1	21	<b>Ketahanan Pangan</b>																	
1	21	17	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Ketahanan Pangan <b>(Prioritas kedua)</b>	Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pelayanan publik bidang ketahanan pangan mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	100	-	0	-	0	-	0	100	100	SKPD Pengampu Urusan Ketahanan Pangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/ tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang ketahanan pangan baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	30	-	0	-	0	-	0	100	30	
		Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang ketahanan pangan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150	
		Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang ketahanan pangan meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang ketahanan pangan baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150	
		Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang ketahanan pangan hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	-	0	-	0	-	0	100	300	
		Cakupan publikasi pelayanan publik bidang ketahanan pangan berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	20	100	40	200	20	100	20	100	100	500	
		Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja ( <i>performance</i> ) pelayanan bidang ketahanan pangan menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	0	50	0	50	0	50	-	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	24	<b>Kearsipan</b>																	
1	24	16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Persentase ketersediaan dan pengelolaan arsip kartografi dan kearsitekturan mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	10	150	20	100	20	100	50	350	SKPD Pengampu Urusan Kearsipan
				Persentase ketersediaan dan pelestarian arsip daerah mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	40	300	60	200	80	100	100	600	
1	25	<b>Komunikasi dan Informatika</b>																	
1	25	22	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Komunikasi dan Informatika <b>(Prioritas kedua)</b>	Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	100	-	0	-	0	-	0	100	100	SKPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase penyesuaian kembali kebijakan ( <i>policy reformulation</i> ) tentang mekanisme/ tatacara dan tahapan penerapan tatalaksana pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika baik teknis maupun administratif agar memenuhi standar pencapaian SPM, SPP dan SP mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	30	-	0	-	0	-	0	100	30	
		Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150	
		Persentase ketersediaan kebijakan (pedoman umum/ panduan) yang mengatur penatalaksanaan pelayanan teknis dan administratif pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan juklak/ juknis/ SOP pencapaian target kinerja ( <i>performance</i> ) dan akuntabilitas pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika baik teknis dan administratif mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	100	50	100	50	100	50	100	150	
		Persentase ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	300	-	0	-	0	-	0	100	300	
		Cakupan publikasi pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	20	100	40	200	20	100	20	100	100	500	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab		
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja ( <i>performance</i> ) pelayanan bidang komunikasi dan informatika menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	50	0	50	0	50	0	50	0			
1	26	<b>Perpustakaan</b>																	
1	26	15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah pengunjung dan jumlah perpustakaan dimasyarakat mencapai 80% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	20	800	20	800	20	800	20	800	20	800	80	4.000	SKPD Pengampu Urusan Perpustakaan
			Persentase peningkatan wawasan siswa dan masyarakat melalui prestasi di Tk. Propinsi pada lomba karya tulis ilmiah, lomba bedah buku mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	-	300	20	300	30	300	50	900		
1	26	16	Program Pengembangan Inovasi Daerah Dalam Pelayanan Perpustakaan ( <b>Prioritas keenam</b> )	Persentase pemanfaatan dan penerapan IT pada perpustakaan daerah dan sekolah di Kota Singkawang mencapai 100% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	100	800	-	200	100	200	100	200	100	1.400	SKPD Pengampu Urusan Perpustakaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase penerapan perpustakaan hibrida (gabungan perpustakaan konvensional dan digital) di Kota Singkawang terutama pada perpustakaan daerah dan perpustakaan sekolah mencapai 50% pada Tahun 2017	Persen	Belum tersedia data	-	0	-	0	10	500	10	300	30	100	50	900	

## **BAB IX**

### **PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

#### **9.1. Pentahapan Pembangunan Kota**

Visi pembangunan Kota Singkawang Tahun 2013-2017 direncanakan tercapai melalui lima pentahapan. Pentahapan dimaksud menjadi dasar penentuan tema dan fokus pembangunan setiap tahunnya. Tahapannya adalah sebagai berikut :

##### **9.1.1. Tahap Membangun Komitmen : Rekonsolidasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Tahun 2013**

Tahap awal pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah pada Tahun 2013 menjadi momentum penting untuk mensinkronisasikan, mengintegrasikan dan menginventarisasi kembali capaian RPJMD Kota Singkawang Tahun 2008-2012. Tahap ini bertujuan untuk menegaskan kembali komitmen Pemerintah Kota Singkawang dalam membangun Kota Singkawang dengan melakukan reorganisasi dan revitalisasi organisasi dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tahap pembangunan dimaksud terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut :

- a. Optimalisasi motivasi, etos kerja dan kesejahteraan aparatur melalui penambahan penghasilan, penegakan disiplin PNS, dan peningkatan kompetensi aparatur;
- b. Reorganisasi dan revitalisasi mekanisme perencanaan penganggaran dan pembiayaan pemerintah Kota Singkawang dengan melakukan asistensi penganggaran, penajaman perumusan perencanaan pembangunan jangka menengah serta penguatan kualitas produk hukum daerah;
- c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan memperluas akses pelayanan pendidikan yang berbasis lingkungan terutama untuk mencegah adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah;
- d. Mengoptimalkan cakupan pelayanan kesehatan berikut pemenuhan alat-alat kesehatan serta pelayanan kesehatan dasar untuk menciptakan kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik;
- e. Meningkatkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban Kota Singkawang dengan melakukan rehabilitasi prasarana jalan dan drainase, fasilitas umum, serta pelayanan umum lainnya dengan tetap memperhatikan kesesuaian penataan ruang kota dan pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan;
- f. Memperkuat iman dan taqwa masyarakat Kota Singkawang melalui perlindungan aktivitas beribadah dan beragama sesuai kepercayaan masing-masing;
- g. Mendorong pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan gotong-royong dan bersih lingkungan baik di lingkungan kecamatan, kelurahan hingga RT.

### **9.1.2. Tahap Implementasi : Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Sarana Pelayanan Dasar Masyarakat Tahun 2014**

Tahap pembangunan Tahun 2014 merupakan tahapan untuk memperkuat landasan pembangunan menuju Kota Singkawang Aman, Nyaman, Maju, dan Sejahtera Berbasis Jasa, Perdagangan dan Agroindustri yang berdaya saing dengan ditopang oleh ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur perkotaan dan sarana pelayanan dasar masyarakat yang terintegrasi, terkoneksi, dan tepat manfaat. Pada tahap ini, pembangunan lebih mengutamakan percepatan ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta. Tahap pembangunan Tahun 2014 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut :

- a. Memfokuskan penyediaan air bersih bagi masyarakat secara bertahap terutama bagi wilayah yang rawan air bersih termasuk optimalisasi kinerja pelayanan air bersih bagi masyarakat;
- b. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan kuantitas jaringan prasarana dan sarana perkotaan termasuk fasilitas transportasi seperti bandara dan pelabuhan yang akan membuka akses keluar masuk barang, jasa dan orang dari dan ke Singkawang;
- c. Meningkatkan tertib lalu lintas dan memantapkan jaringan transportasi, air bersih dan sanitasi permukiman yang berkualitas;
- d. Merevitalisasi pasar-pasar tradisional agar lebih nyaman, aman dan representatif sebagai media aktivitas transaksi perdagangan masyarakat terutama pada upaya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL);
- e. Mengembangkan kawasan kota baru sebagai cikal bakal *Central Business District (CBD)* Kota Singkawang pada wilayah Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Tengah;
- f. Mendorong pengembangan kawasan pemerintahan dan permukiman baru pada wilayah yang masih berpenduduk jarang untuk mengantisipasi ambang jenuh kepadatan pada pusat kota;
- g. Membangun ciri kota (*landmark*) yang sesuai dengan budaya, sejarah dan karakteristik kota dengan tetap mengedepankan upaya pelestarian budaya, sejarah dan karakteristik kota melalui *event-event* budaya yang *go-internasional*;
- h. Mengefektifkan pemberdayaan masyarakat dalam menggali kreatifitas dan potensi inovasi masyarakat untuk menciptakan *icon* Kota Singkawang yang spesifik dan membangun masyarakat yang lebih mandiri serta sejahtera melalui forum-forum pelatihan keterampilan kerja dan promosi produk unggulan daerah yang berdaya saing;
- i. Diversifikasi produk-produk unggulan dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan melalui aktifitas rekayasa teknologi terapan dan

- genetik dengan tetap memperhatikan keberpihakan bagi peningkatan perekonomian rakyat dari sektor-sektor tersebut;
- j. Memberdayakan dan menguatkan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi terutama dari akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran;
  - k. Membangun kemitraan dan membuka kemudahan investasi swasta, termasuk investasi dari luar Kota Singkawang bagi tumbuh kembang, kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **9.1.3. Tahap Konservasi : Penataan Lingkungan Perkotaan Berkelanjutan Tahun 2015**

Tahap pembangunan pada Tahun 2015 merupakan tahap untuk penataan lingkungan perkotaan secara berkelanjutan untuk memantapkan kualitas lingkungan perkotaan guna mendukung terwujudnya Kota Singkawang yang nyaman karena memiliki ruang terbuka hijau, sumberdaya alam yang terpelihara secara berkelanjutan dan pemanfaatan ruang kota yang sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup. Tahap pembangunan pada tahun ini mengutamakan penataan lingkungan perkotaan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur dan utilitas perkotaan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran swasta dalam mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota yang nyaman untuk dihuni. Tahap pembangunan ini terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut :

- a. Mengoptimalkan konservasi sumberdaya alam berbasis lingkungan hidup berkelanjutan demi terciptanya Kota Singkawang yang nyaman;
- b. Meningkatkan penataan lingkungan perkotaan terutama rehabilitasi kawasan hutan dan kawasan terbuka hijau yang mengalami degradasi dan berpotensi menimbulkan bencana alam agar mitigasi lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara tepat;
- c. Meningkatkan penataan lingkungan pemukiman terutama rehabilitasi kawasan hutan dan kawasan kumuh baik pada pusat kota maupun daerah terpencil;
- d. Meningkatkan pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan budaya yang terpadu dengan sistem tata kota berbasis lingkungan bagi tumbuh kembangnya pelestarian sumberdaya yang ada;
- e. Membangun dan mengembangkan fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk hutan/taman kota sebagai media komunikasi dan interaksi masyarakat dari berbagai lapisan usia;

### **9.1.4. Tahap Akselerasi : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2016**

Tahap pembangunan kota Tahun 2016 merupakan tahapan untuk meningkatkan daya saing Kota Singkawang yang kompetitif sebagai daerah tujuan



pembandingan daerah lain. Tahap pembangunan ini mengutamakan aktivitas eksibisi potensi jasa, perdagangan dan agroindustri yang ada di Kota Singkawang. Percepatan pertumbuhan pusat-pusat pelayanan yang strategis di Kota Singkawang dikedepankan untuk menunjang Kota Singkawang sebagai pusat jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pemerintahan, jasa pariwisata, jasa keuangan, perdagangan, dan agroindustri. Tahap pembangunan terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut :

- a. Meningkatkan promosi Kota Singkawang sebagai tujuan (*meeting, incentive, convention and exhibition (MICE)*);
- b. Mengintegrasikan sistem pengembangan perdagangan dan jasa secara terpadu pada tingkat SKPD maupun lintas SKPD;
- c. Mempercepat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang secara merata dan berkelanjutan;
- d. Mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif kerakyatan yang melibatkan UMKM dan koperasi dengan mengutamakan potensi sektor pertanian, perkebunan;
- e. Mengembangkan pusat wisata kuliner, wisata belanja dan wisata peristirahatan;
- f. Memfasilitasi kemudahan investasi jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pemerintahan, jasa pariwisata, jasa keuangan, perdagangan, dan agroindustri;
- g. Membangun kerjasama dan kemitraan regional, nasional dan global untuk mempercepat akselerasi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.

#### **9.1.5. Tahap Perwujudan : Kota Singkawang Aman, Nyaman, Maju dan Sejahtera Berbasis Jasa, Perdagangan dan Agroindustri**

Tahap pembangunan kota Tahun 2017 merupakan tahapan perwujudan Kota Singkawang sebagai kota pusat jasa, perdagangan dan agroindustri yang aman, nyaman, maju dan sejahtera. Pada tahap ini, pembangunan terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut :

- a. Kota Singkawang sebagai pusat jasa, perdagangan dan agroindustri yang maju, kompetitif dan berdaya saing;
- b. Kota Singkawang menjadi pusat budaya multi etnis (*City heritage*) serta kepariwisataan yang paling berkembang di Provinsi Kalimantan Barat.

## 9.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja pembangunan merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengetahui capaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013–2017 dengan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program pembangunan seluruh SKPD Kota Singkawang. Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Singkawang yang juga merefleksikan kemampuan manajerial dan kepemimpinan (*management and leadership*) Walikota dan Wakil Walikota Singkawang pada akhir Tahun 2017 nanti.

### 9.2.1 Indikator Makro Daerah

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Adapun indikator makro pembangunan Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

**Tabel 9.1**  
**INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN**  
**KOTA SINGKAWANG**

No	Indikator	Realisasi	Target
		Tahun 2012	Tahun 2017
1	Laju pertumbuhan ekonomi	6,16	6,46
2	Laju inflasi	4,21	2,54
3	Rasio PAD terhadap total belanja APBD	0,075	0,430
4	Rasio penerimaan terhadap PDRB	0,006	0,023
5	Rasio pajak terhadap PDRB	0,005	0,031
6	Proporsi pengeluaran terhadap PDRB	0,02	0,02
7	Rasio belanja langsung terhadap belanja tidak langsung	0,80	1,22
8	Belanja langsung : - Belanja pegawai - Belanja barang dan jasa - Belanja modal	12,75 36,36 50,89	0 45,37 54,63
9	Laju pertumbuhan penduduk	3,92	4,00
10	Tenaga kerja - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) - Tingkat pengangguran terbuka	65,34 3,75	67,79 3,50

No	Indikator	Realisasi	Target
		Tahun 2012	Tahun 2017
11	Kesehatan : - Angka Kematian Bayi - Angka Harapan Hidup - Angka Melahirkan Hidup	3,81 67,46 89,69	0,40 68,17 93,87
12	Pendidikan : - Angka Partisipasi Sekolah • Usia 7 – 12 tahun • Usia 13 – 15 tahun • Usia 16 – 18 tahun  - Angka Partisipasi Murni • SD • SMP • SMA  - Angka Partisipasi Kasar • SD • SMP • SMA	103,92 91,90 63,69  91,76 58,09 59,52  113,29 91,09 79,77	104,11 93,81 68  100 67,34 69  100 100 100

Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2013

Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama yang sangat penting dalam menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi yang berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah kemiskinan.

Peranan pemerintah ditunjukkan melalui pengaturan dan pengelolaan pengeluaran pemerintah yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pembangunan. Pengeluaran-pengeluaran tersebutlah yang digunakan untuk memberdayakan berbagai sumber ekonomi dalam mendorong pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Gambaran target indikator ekonomi makro Kota Singkawang hingga Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 9.2**  
**TARGET INDIKATOR EKONOMI MAKRO KOTA SINGKAWANG TAHUN 2013–2017**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2012	Target Capaian Indikator Ekonomi Makro				
				2013	2014	2015	2016	2017
1	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	%	<b>6,16</b>	<b>6,00</b>	<b>6,08</b>	<b>6,20</b>	<b>6,33</b>	<b>6,46</b>
	Pertanian	%	4,17	4,06	4,11	4,19	4,28	4,37
	Pertambangan & Penggalian	%	9,20	8,96	9,08	9,26	9,46	9,65
	Industri Pengolahan	%	6,96	6,77	6,87	7,00	7,15	7,29
	Listrik , Gas & Air Bersih	%	5,59	5,45	5,52	5,63	5,75	5,87
	Bangunan	%	9,95	9,69	9,82	10,01	10,22	10,43
	Perdagangan, Hotel & Restoran	%	6,07	5,92	6,00	6,11	6,24	6,37
	Pengangkutan & Komunikasi	%	5,30	5,17	5,24	5,34	5,45	5,56
	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	%	4,82	4,69	4,75	4,85	4,95	5,05
	Jasa-jasa	%	6,49	6,32	6,40	6,53	6,66	6,80

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2012	Target Capaian Indikator Ekonomi Makro				
				2013	2014	2015	2016	2017
2	<b>PDRB Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha</b>		<b>3.126.651,51</b>	<b>3.349.774,85</b>	<b>3.714.939,35</b>	<b>4.126.060,93</b>	<b>4.589.841,36</b>	<b>5.113.704,89</b>
	Pertanian	Juta Rp	371.840,29	381.636,53	414.151,35	449.944,80	489.430,11	533.031,38
	Pertambangan dan Penggalian	Juta Rp	53.999,85	53.378,89	57.303,82	61.586,93	66.190,19	71.137,51
	Industri Pengolahan	Juta Rp	221.394,16	262.371,09	295.300,97	332.739,81	375.384,18	424.011,67
	Listrik, Gas dan Air Bersih	Juta Rp	44.650,34	40.614,34	43.514,53	46.674,56	50.125,34	53.897,08
	Bangunan	Juta Rp	314.058,68	287.738,53	306.759,20	327.407,16	349.872,70	374.336,84
	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Juta Rp	1.252.970,06	1.435.834,22	1.619.090,31	1.827.800,77	2.065.941,09	2.337.963,14
	Pengangkutan dan Komunikasi	Juta Rp	188.957,34	199.927,58	220.990,67	244.549,16	270.950,35	300.568,79
	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	Juta Rp	200.210,34	217.861,03	240.351,26	265.463,16	293.557,66	325.022,35
	Jasa-jasa	Juta Rp	467.587,47	470.412,64	517.477,24	569.894,58	628.389,75	693.736,13

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2012	Target Capaian Indikator Ekonomi Makro				
				2013	2014	2015	2016	2017
3	<b>Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Harga Berlaku</b>							
	Pertanian	%	11,89	11,39	11,15	10,90	10,66	10,42
	Pertambangan dan Penggalian	%	1,73	1,59	1,54	1,49	1,44	1,39
	Industri Pengolahan	%	7,08	7,83	7,95	8,06	8,18	8,29
	Listrik, Gas dan Air Bersih	%	1,43	1,21	1,17	1,13	1,09	1,05
	Bangunan	%	10,04	8,59	8,26	7,94	7,62	7,32
	Perdagangan, Hotel dan Restoran	%	40,07	42,86	43,58	44,30	45,01	45,72
	Pengangkutan dan Komunikasi	%	6,04	5,97	5,95	5,93	5,90	5,88
	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	%	6,4	6,50	6,47	6,43	6,40	6,36
	Jasa-jasa	%	15,31	14,04	13,93	13,81	13,69	13,57
4	<b>PDRB Atas Dasar Harga Konstan</b>	Juta Rp	1.390.546,88	1.473.979,69	1.563.597,66	1.660.540,71	1.765.652,94	1.879.714,12
	Pertanian	Juta Rp	183.196,39	194.188,17	205.994,81	218.766,49	232.614,41	247.641,30

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2012	Target Capaian Indikator Ekonomi Makro				
				2013	2014	2015	2016	2017
	Pertambangan dan Penggalian	Juta Rp	22.882,51	24.261,50	25.736,60	27.332,27	29.026,87	30.826,54
	Industri Pengolahan	Juta Rp	108.963,93	115.501,77	122.524,27	130.120,78	138.357,42	147.295,31
	Listrik, Gas dan Air Bersih	Juta Rp	18.043,68	19.126,30	20.289,18	21.547,11	22.911,04	24.391,09
	Bangunan	Juta Rp	123.994,46	131.434,13	139.425,32	148.069,69	157.442,50	167.613,29
	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Juta Rp	519.619,85	550.797,04	584.285,50	620.511,20	659.789,56	702.411,97
	Pengangkutan dan Komunikasi	Juta Rp	97.238,36	103.072,66	109.339,48	116.118,53	123.468,83	131.444,92
	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	Juta Rp	97.508,60	103.359,12	109.643,35	116.441,24	123.811,97	131.810,22
	Jasa-jasa	Juta Rp	219.099,09	232.245,04	246.365,53	261.640,20	278.202,02	296.173,87
5	<b>Pendapatan perkapita</b>	Rp	16.042.172,53	16.894.982,05	18.378.953,01	20.030.416,56	21.872.066,90	23.928.339,33
6	<b>Inflasi</b>	%	4,21	4,06	3,68	3,3	2,92	2,54
7	<b>Keuangan Daerah</b>							
	Pendapatan Asli Daerah	Rp	38.826.568.142,84	71.564.651.613,28	133.387.727.750,72	251.188.934.740,10	477.439.436.262,04	914.977.379.375,04

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2012	Target Capaian Indikator Ekonomi Makro				
				2013	2014	2015	2016	2017
	Dana Perimbangan	Rp	436.385.253.668,00	533.312.505.815,58	646.761.459.646,43	750.664.129.139,60	802.302.028.659,01	708.911.963.373,45
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	68.391.218.417,44	101.806.794.867,90	138.539.950.588,65	192.442.815.501,83	272.843.178.274,94	394.470.693.406,30
	TOTAL Pendapatan	Rp	543.603.040.228,28	706.683.952.296,76	918.689.137.985,79	1.194.295.879.381,53	1.552.584.643.195,99	2.018.360.036.154,79
8	<b>Investasi</b>							
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	1.047	1.152	1.256	1.361	1.466	1.675
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Juta Rp	3.481.619	3.829.781	4.177.943	4.526.105	4.874.267	5.570.590
9	<b>Sosial Budaya</b>							
	Penduduk Miskin	%	5,32	5,09	4,88	4,68	4,5	4,33
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,75	3,70	3,65	3,60	3,55	3,50



No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2012	Target Capaian Indikator Ekonomi Makro				
				2013	2014	2015	2016	2017
10	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	%	<b>69,77</b>	<b>71,31</b>	<b>71,95</b>	<b>72,77</b>	<b>73,60</b>	<b>74,44</b>
	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,46	67,62	67,76	67,89	68,03	68,17
	Angka Melek Huruf	%	89,69	91,44	92,04	92,65	93,26	93,87
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,59	8,15	8,23	8,31	8,48	8,62
	Paritas Daya Beli	Ribu	626,14	636,22	641,84	647,51	653,23	659

Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2013

### **9.2.2 Target Capaian Kinerja**

Target capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dirumuskan dengan merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang ditinjau dari tiga kelompok aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Perumusan rencana target capaian kinerja berdasarkan tiga aspek tersebut juga memperhatikan upaya Pemerintah Kota Singkawang dalam pelaksanaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), *Millennium Development Goals* (MDG's), Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD), dan implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Target-target kinerja dalam dokumen ini indikator yang harus dicapai oleh SKPD dalam pelaksanaan urusan dan kewenangannya sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan sebagaimana peraturan yang berlaku. Pencapaian indikator outcome SKPD diharapkan dapat menjadi alat ukur dan evaluasi keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Singkawang sekaligus mampu mencerminkan akuntabilitas kinerja manajemen masing-masing Kepala SKPD.

Target capaian kinerja ditetapkan agar pembangunan Kota Singkawang tidak hanya dilihat dari sisi normatif penyelenggaraan pemerintahan yang otonom namun mampu menunjukkan perubahan pola pikir masyarakat termasuk aparatur Pemerintah Kota Singkawang baik legislatif dan eksekutif untuk perubahan kondisi eksisting perkotaan, dinamika dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Adapun target-target capaian kinerja daerah sebagaimana ditampilkan pada Tabel 9.3 berikut diformula dengan memperhatikan faktor-faktor yang sangat signifikan dapat secara proporsional dan rasional dicapai pada Tahun 2017 nanti melalui pendekatan analisis data kuantitatif yang tersedia.

**Tabel 9.3.**  
**TARGET CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**TAHUN 2013 – 2017**

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2017	REFERENSI
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								
<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>								
<b>1.</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>							
1.1.	Pertumbuhan PDRB	6,16	6	6,08	6,2	6,33	6,46	SIPD
1.2.	Laju inflasi	4,21	4,06	3,68	3,3	2,92	2,54	SIPD
1.3.	PDRB per kapita	16.042.172,53	16.894.982,05	18.378.953,01	20.030.416,56	21.872.066,90	23.928.339,33	SIPD
1.4.	Angka kemiskinan	5,32	5,09	4,88	4,68	4,5	4,33	SIPD
1.5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,77	71,31	71,95	72,77	73,60	74,44	EKPOD
<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>								
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>							
1.1.	Angka melek huruf	89,69	91,44	92,04	92,65	93,26	93,87	SIPD
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	7,59	8,15	8,23	8,31	8,48	8,62	SIPD
1.3.	Angka Partisipasi Kasar (APK)							
1.3.1.	APK SD/MI	113,29	113,19	109,79	106,5	103,3	100	SIPD
1.3.2.	APK SMP/MTs	91,09	91,08	93,81	96,63	99,53	100	SIPD
1.3.3.	APK SMA/SMK/MA	79,77	84	88	92	96	100	SIPD

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR RPJMD	REFERENSI
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.	Angka Pendidikan yang diTamatkan (APT)							
1.4.1.	< SD	17,06	16,62	16,17	15,73	15,29	14,85	EKPOD
1.4.2.	SD / Sederajat	28,58	28,17	27,75	27,33	26,92	26,50	EKPOD
1.4.3.	SLTP / Sederajat	14,09	13,68	13,28	12,87	12,46	12,05	EKPOD
1.4.4.	SLTA / Sederajat	17,89	18,77	19,66	20,54	21,43	22,32	EKPOD
1.4.5.	D1 /D2 / D3	1,35	1,70	2,06	2,41	2,76	3,11	EKPOD
1.4.6.	≥ S1	2,44	2,89	3,33	3,78	4,22	4,67	EKPOD
1.5.	Angka Partisipasi Murni							
1.5.1.	APM SD/MI	91,76	94,51	97,35	100	100	100	SIPD
1.5.2.	APM SMP/MTs	58,09	59,83	61,63	63,48	65,38	67,34	SIPD
1.5.3.	APM SMA/SMK/MA	59,52	61,31	63,14	65,04	66,99	69	SIPD
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>							
2.1.	Angka kematian bayi	3,81	3,10	2,27	1,74	1,04	0,40	MDG's
2.2.	Angka usia harapan hidup	67,46	67,62	67,76	67,89	68,03	68,17	SIPD
2.3.	Persentase balita gizi buruk	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	MDG's
2.4.	Proporsi balita kurang gizi	2,88	2,38	1,86	1,36	0,89	0,43	MDG's
2.5.	Angka Kematian Ibu (AKI)	1,78	1,19	0,68	0,22	0,00	0,00	MDG's
<b>3.</b>	<b>Pertanahan</b>							
3.1.	Persentase penduduk yang memiliki lahan bersertifikat	Bukan wewenang Pemda	5	10	15	20	25	SIPD

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR RPJMD	REFERENSI
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>4.</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>							
4.1.	Rasio penduduk yang bekerja	94,25	94,88	95,06	95,24	95,42	95,57	EKPOD
<b>Fokus Seni Budaya dan Olahraga</b>								
<b>1.</b>	<b>Kebudayaan</b>							
1.1.	Jumlah gedung kesenian per 10000 penduduk	1	1	1	2	2	2	SIPD
1.2.	Jumlah gedung kesenian	0	0	0	1	1	1	SIPD
<b>Fokus Seni Budaya dan Olahraga</b>								
<b>2.</b>	<b>Pemuda dan Olahraga</b>							
2.1.	Jumlah klub olahraga per 10000 penduduk	5	6	6	6	6	7	SIPD
2.2.	Jumlah gedung olahraga per 10000 penduduk	0	0	0	1	1	1	SIPD
2.3.	Jumlah gelanggang remaja	0	0	0	1	0	1	SIPD
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib</b>								
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>							
1.1.	Angka partisipasi sekolah							
1.1.1.	SD/MI	103,92	103,93	103,98	104,02	104,07	104,11	SIPD
1.1.2.	SMP/MTs	91,9	92,69	92,85	93,17	93,49	93,81	SIPD
1.1.3.	SMA/MA	63,59	64	65	66	67	68	SIPD

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR RPJMD	REFERENSI
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah							
1.2.1.	SD/MI	4,09	5	6	7	8	9	SIPD
1.2.2.	SMP/MTs	3,63	4	5	6	7	8	SIPD
1.2.3.	SMA/MA	2,98	4	5	6	7	8	SIPD
1.3.	Rasio guru terhadap murid							
1.3.1.	SD/MI	18	18	17	16	16	15	SIPD
1.3.2.	SMP/MTs	14	14	15	15	15	15	SIPD
1.3.3.	SMA/MA	11	11	12	13	14	15	SIPD
1.4.	Rasio murid per kelas rata-rata							
1.4.1.	SD/MI	26	27	28	29	30	32	SIPD
1.4.2.	SMP/MTs	24	25	26	28	30	32	SIPD
1.4.3.	SMA/MA	28	28	29	30	31	32	SIPD
1.5.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	100	100	100	100	100	100	SIPD
1.6.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):							
1.6.1.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	13,8	14,52	15,38	16,24	17,1	17,96	SIPD
1.7.	Angka Putus Sekolah (APTs)							
1.7.1.	SD/MI	0,56	0,4	0,3	0,2	0,1	0	SIPD
1.7.2.	SMP/MTs	1,02	0,8	0,6	0,4	0,2	0	SIPD
1.7.3.	SMA/MA	1,19	0,8	0,6	0,4	0,2	0	SIPD

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR RPJMD	REFERENSI
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.8.	Angka Kelulusan (AL):							
1.8.1.	SD/MI	99,79	99,85	99,95	100	100	100	SIPD
1.8.2.	SMP/MTs	96,74	97	98	99	100	100	SIPD
1.8.3.	SMA/SMK/MA	99,53	99,75	99,95	100	100	100	SIPD
1.9.	Angka Melanjutkan							
1.9.1.	SMP/MTs	98,35	100,32	102,32	104,37	106,46	108,59	SIPD
1.9.2.	SMA/SMK/MA	96,93	98,87	100,85	102,86	104,92	107,02	SIPD
1.10.	Kualitas Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV							
1.10.1.	SD/MI	30,22	35,00	40,11	44,84	49,56	54,29	SIPD
1.10.2.	SMP/MTs	59,33	65,00	69,66	74,21	78,76	83,31	SIPD
1.10.3.	SMA/MA/SMK	80,30	83,00	88,15	92,21	96,26	100,00	SIPD
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>							
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	6,55	7,37	8,86	9,85	11,34	12,50	SIPD
2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk	0,19	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	SIPD
2.3.	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk	0,025	0,024	0,023	0,022	0,021	0,020	SIPD
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	96	101	105	110	114	118	SIPD
2.5.	Rasio paramedis per satuan penduduk	3,07	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	SIPD
2.6.	Cakupan kunjungan ibu hamil K4,	86,72	88	90	92	94	95	SPM

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR RPJMD	REFERENSI
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.	Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani,	50,3	60	70	80	90	100	SPM
2.8.	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan,	82,83	85	86	90	95	100	SPM
2.9.	Cakupan pelayanan ibu nifas	74,89	80	85	90	95	100	SPM
2.10.	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	22,21	30	50	70	90	100	SPM
2.11.	Cakupan kunjungan bayi,	80,65	85	86	90	95	100	SPM
2.12.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI),	69,23	75	82	90	95	100	SPM
2.13.	Cakupan pelayanan anak balita,	53,67	60	70	80	90	100	SPM
2.14.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin,	0	20	40	60	80	100	SPM
2.15.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	SPM
2.16.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	89,99	93	96	100	100	100	SPM
2.17.	Cakupan peserta KB Aktif	71,11	75	80	85	90	100	SPM
2.18.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	5,81	5,5	5	4,5	4	3,5	SPM
2.19.	Penemuan penderita pneumonia balita	5,81	10	15	20	25	30	SPM
2.20.	Penemuan pasien baru TB BTA positif	66,43	51	55	60	70	75	SPM
2.21.	Penderita DBD yang ditangani	85	100	100	100	100	100	SPM
2.22.	Penemuan penderita diare	99,24	100	100	100	100	100	SPM



NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR RPJMD	REFERENSI
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.23.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	123,35	100	100	100	100	100	SPM
2.24.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin,	6,04	10	20	30	40	50	SPM
2.25.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota,	100	100	100	100	100	100	SPM
2.26.	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	0	20	40	60	80	100	SPM
2.27.	Cakupan kelurahan siaga aktif	2	5	10	15	20	26	SPM
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>							
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	40,88	44	48	52	56	60	SIPD
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	0,12	0,20	0,40	0,60	0,80	1	SIPD
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,30	0,45	0,6	0,75	0,9	1	SIPD
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	77,99	80	81,5	83	84	85	SIPD
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 1,000 jumlah penduduk)	Belum tersedia data	-	-	-	0,004	0,004	SIPD
3.6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	2,39	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	SIPD
3.7.	Rasio rumah layak huni	20,28	30	35	40	45	50	SIPD

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR RPJMD	REFERENSI
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.8.	Rasio permukiman layak huni	Belum tersedia data	5	10	15	20	25	SIPD
3.9.	Panjang jalan dilalui roda 4 (Jalan Nasional, Provinsi dan kota)	0,21	0,30	0,5	0,7	0,9	1	SIPD
3.10.	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	Belum tersedia data	5	10	15	20	25	SIPD
3.11.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	44,23	48	52	56	60	65	SIPD
3.12.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Belum tersedia data	5	10	15	20	25	SIPD
3.13.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Belum tersedia data	50	45	40	35	30	SIPD
3.15.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Belum tersedia data	55	65	75	85	95	SIPD
3.16.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Belum tersedia data	5	10	15	20	25	SIPD
3.17.	Persentase air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	2	20	40	60	80	100	SPM
3.18.	Persentase air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	20	50	70	80	90	100	SPM
3.19.	Persentase jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	23	30	50	70	90	100	SPM

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR RPJMD	REFERENSI
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.20.	Persentase jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	23	30	50	70	90	100	SPM
3.21.	Persentase jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	15	35	60	75	90	100	SPM
3.22.	Persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	15	35	60	75	90	100	SPM
3.23.	Persentase jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan dengan kecepatan rencana	18	35	60	75	90	100	SPM
<b>4.</b>	<b>Perumahan</b>							
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	26,04	50	60	70	80	90	SIPD
4.2.	Rumah tangga pengguna listrik	97,31	98	98,5	99	99,5	100	SIPD
4.3.	Rumah tangga bersanitasi	85,89	87	89	91	93	95	SIPD
4.4.	Lingkungan pemukiman kumuh	Belum tersedia data	25	20	15	10	5	SIPD
4.5.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	61,49	63,04	65	67	69	70	SPM
4.6.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	75,27	84,48	88,18	92,65	98,45	100	SPM
4.7.	Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	57,69	57,69	61,54	64,23	66,92	70	SPM

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR RPJMD	REFERENSI
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5.</b>	<b>Penataan Ruang</b>							
5.1.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	89,68	90,5	93	95	98	100	SIPD
5.2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Belum tersedia data	5	10	15	20	25	SIPD
5.3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	Belum tersedia data	25	20	15	10	5	SIPD
<b>6.</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>							
6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SIPD
6.2.	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SIPD
6.3.	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SIPD
6.4.	Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SIPD
<b>7.</b>	<b>Perhubungan</b>							
7.1.	Rasio ijin trayek	0,0010	0,0010	0,0010	0,0011	0,0012	0,0012	SIPD
7.2.	Jumlah uji kir angkutan umum	4.207	4.300	4.500	4.700	4.800	5.000	SIPD
7.3.	Angkutan darat	Belum tersedia data	2	4	6	8	10	SIPD
7.4.	Kepemilikan KIR angkutan umum umum (KIR)	Belum tersedia data	5	10	15	20	25	SIPD

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR RPJMD	REFERENSI
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5.	Pemasangan rambu-rambu	Belum tersedia data	10	20	30	40	50	SIPD
7.6.	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	45	60	75	80	90	100	SPM
7.7.	Persentase halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek,	50	80	100	100	100	100	SPM
7.8.	Persentase terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek,	26	33	40	50	60	70	SPM
7.9.	Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota,	30	45	60	75	90	100	SPM
7.10.	Persentase unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji,	30	45	60	75	90	100	SPM
7.11.	Standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota,	50	80	100	100	100	100	SPM

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR RPJMD	REFERENSI
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>							
8.1.	Persentase penanganan sampah	90,91	91	92	93	94	95	SIPD
8.2.	Persentase luas pemukiman yang tertata	Belum tersedia data	20	30	40	50	60	SIPD
8.3.	Pencemaran status mutu air	Belum tersedia data	50	40	30	20	10	SIPD
8.4.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	Belum tersedia data	20	30	40	50	60	SIPD
8.5.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal,	Belum tersedia data	30	50	70	90	100	SIPD
8.6.	Penegakan hukum lingkungan	2,39	5	25	45	65	85	SIPD
8.7.	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	20	50	80	100	100	100	SPM
8.8.	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	0	50	80	100	100	100	SPM
8.9.	Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	0	50	80	100	100	100	SPM
8.10.	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	SPM

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR RPJMD	REFERENSI
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>9.</b>	<b>Pertanahan</b>							
9.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	9,73	10	15	20	25	30	SIPD
9.2.	Jumlah penyelesaian sengketa pertanahan	Belum tersedia data	10	15	20	25	30	SIPD
9.3.	Persentase penyelesaian ijin lokasi	Belum tersedia data	10	15	20	25	30	SIPD
<b>10.</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>							
10.1.	Kepemilikan KTP	60,5	65	75	85	95	100	SIPD
10.2.	Kepemilikan KK	83,8	85	88	92	96	100	SIPD
10.3.	Cakupan penerbitan KTP elektronik	21,19	50	75	100	100	100	SPM
10.4.	Cakupan penerbitan KK elektronik	23,39	50	75	100	100	100	SPM
10.5.	Rasio bayi berakte kelahiran	53,1	65	72	80	87	95	SPM
10.6.	Rasio kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	96,01	97	98	99	100	100	SIPD
10.7.	Cakupan penerbitan akta kematian	0	5	10	15	20	25	SIPD
<b>11.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
11.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Belum tersedia data	35	40	45	50	55	SIPD
11.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Belum tersedia data	20	25	30	35	40	SIPD
11.3.	Ratio KDRT	Belum tersedia data	1	0,8	0,7	0,6	0,5	SIPD

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR RPJMD	REFERENSI
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Belum tersedia data	20	18	16	13	10	SIPD
11.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Belum tersedia data	35	36	37	38	39	SIPD
11.6.	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Belum tersedia data	50	55	60	65	70	SIPD
<b>12.</b>	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>							
12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3	3	3	3	2	2	SIPD
12.2.	Rasio akseptor KB	74,43	75	78	80	85	90	SIPD
12.3.	Cakupan peserta KB aktif	72,02	80	82	86	88	90	SPM
12.4.	Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	27,83	27,50	27,20	27,00	26,80	26,5	SIPD
12.5.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap Tahun	38,46	50	80	100	100	100	SPM
<b>13.</b>	<b>Sosial</b>							
13.1.	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar,	20,03	40	60	80	90	100	SIPD
13.2.	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya,	7,68	40	60	80	90	100	SPM



NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR RPJMD	REFERENSI
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.3.	Presentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial,	83,3	40	60	80	90	100	SPM
13.4.	Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial,	7,69	40	60	80	90	100	SPM
13.5.	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	33,16	40	60	80	90	100	SPM
13.6.	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	26,98	40	60	80	90	100	SPM
13.7.	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	53,84	40	60	80	90	100	SPM
<b>14.</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>							
14.1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	65,34	66,20	66,62	67,02	67,41	67,79	SIPD
14.2.	Tingkat pengangguran terbuka	3,75	3,70	3,65	3,60	3,55	3,50	SIPD
14.3.	Keselamatan dan perlindungan kerja	Belum tersedia data	5	10	15	20	25,0	SIPD

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR RPJMD	REFERENSI
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.4.	Rasio daya serap tenaga kerja	Belum tersedia data	5	10	15	20	25,0	EKPOD
14.5.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Belum tersedia data	20	40	60	75	80	SPM
14.6.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Belum tersedia data	15	30	45	60	70	SPM
14.7.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Belum tersedia data	15	30	45	60	70	SPM
14.8.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Belum tersedia data	20	40	60	70	80	SPM
14.9.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Belum tersedia data	10	25	40	50	60	SPM
14.10.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek	Belum tersedia data	10	25	40	50	60	SPM
14.11.	Besaran pemeriksaan perusahaan	Belum tersedia data	10	20	30	45	60	SPM
14.12.	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	Belum tersedia data	10	25	40	50	60	SPM
<b>15.</b>	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>							
15.1.	Persentase koperasi aktif	40,79	45	50	55	60	65	SIPD
15.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	3.721	3.750	3.780	3.800	3.830	3.850	SIPD
15.3.	Jumlah BPR/LKM	8	8	8	9	9		SIPD
15.4.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	4.382	4.500	4.700	4.900	5.200	5.500	SIPD

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR RPJMD	REFERENSI
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>16.</b>	<b>Penanaman Modal</b>							
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1.047	1.152	1.256	1.361	1.466	1.675	SIPD
16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	3.481.619	3.829.781	4.177.943	4.526.105	4.874.267	5.570.590	SIPD
<b>17.</b>	<b>Kebudayaan</b>							
17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	6	6	6	6	6	30	SIPD
17.2.	Cakupan kajian seni	Belum tersedia data	20	40	60	80	100	SPM
17.3.	Cakupan fasilitasi seni	Belum tersedia data	20	40	60	80	100	SPM
17.4.	Cakupan gelar seni	Belum tersedia data	20	40	60	80	100	SPM
17.5.	Misi kesenian	Belum tersedia data	20	40	60	80	100	SPM
17.6.	Cakupan sumberdaya manusia kesenian	Belum tersedia data	20	40	60	80	100	SPM
17.7.	Cakupan tempat	Belum tersedia data	20	40	60	80	100	SPM
17.8.	Cakupan organisasi	Belum tersedia data	20	40	60	80	100	SPM

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR RPJMD	REFERENSI
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>18.</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>							
18.1.	Jumlah organisasi pemuda	Belum tersedia data	1	2	3	4	5	SIPD
18.2.	Jumlah kegiatan kepemudaan	Belum tersedia data	1	1	1	1	5	SIPD
18.3.	Gelanggang / balai remaja per 1000 penduduk	0	0	0	0	1	1	SIPD
18.4.	Lapangan olahraga per 1000 penduduk	0	0	1	1	2	2	SIPD
<b>19.</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>							
19.1.	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	Belum tersedia data	80	85	90	95	100	SPM
19.2.	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Belum tersedia data	80	85	90	95	100	SPM
19.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota	Belum tersedia data	80	85	90	95	100	SPM
19.4.	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)	Belum tersedia data	80	85	90	95	100	SPM
19.5.	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	Belum tersedia data	80	85	90	95	100	SPM
19.6.	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK ( Wilayah Manajemen Kebakaran)	Belum tersedia data	80	85	90	95	100	SPM



NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR RPJMD	REFERENSI
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>24.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>							
24.1.	Rasio wartel/warnet per 1000 penduduk	1	1	1	2	2	2	SIPD
24.2.	Web site milikpemerintah daerah pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SIPD
<b>25.</b>	<b>Perpustakaan</b>							
25.1.	Jumlah perpustakaan	19	19	20	20	21	21	SIPD
25.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	19.939	20.000	20.050	20.100	20.150	20.200	SIPD
<b>Fokus Layanan Urusan Pilihan</b>								
<b>1.</b>	<b>Pertanian</b>							
1.1.	Produktivitas padi	33,2	33,5	33,7	34	34,5	35	SIPD
1.2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	11,89	11,39	11,15	10,92	10,70	10,49	SIPD
1.3.	Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB	2,69	2,58	2,80	3,04	3,31	3,60	SIPD
1.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	2,23	2,14	2,32	2,52	2,74	2,99	SIPD
<b>2.</b>	<b>Kehutanan</b>							
2.1.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	1,12	1,07	1,17	1,27	1,38	1,50	SIPD

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR RPJMD	REFERENSI
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3.</b>	<b>Pariwisata</b>							
3.1.	Kunjungan wisata	445.709	490.280	539.308	593.239	652.563	717.819	SIPD
3.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,71	0,72	0,90	1,00	1,20	1,25	SIPD
<b>4.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>							
4.1.	Produksi perikanan	1.601,54	1.717,11	1.846,91	1.976,71	2.106,51	2.236,31	SIPD
4.2.	Cakupan bina kelompok nelayan	4	5	6	7	8	9	SIPD
4.3.	Produksi perikanan kelompok nelayan	1.024,4	1.069,15	1.109,29	1.149,43	1.189,57	1.200	SIPD
<b>5.</b>	<b>Perdagangan</b>							
5.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	38,46	41,14	41,83	42,52	43,19	44,52	SIPD
<b>DAYA SAING DAERAH</b>								
<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>								
1.	Produktivitas total daerah	38,56	40	45	50	55	60	SIPD
<b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur</b>								
<b>1.</b>	<b>Perhubungan</b>							
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	10,96	10,80	10,60	10,40	10,20	10,00	SIPD
1.2.	Jumlah barang melalui dermaga per tahun	10.158	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	SIPD

NO.	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR RPJMD	REFERENSI
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.</b>	<b>Penataan Ruang</b>							
2.1.	Rasio luas wilayah industri	0,03	0,005	0,007	0,01	0,15	0,2	SIPD
2.2.	Rasio luas wilayah banjir	8,66	8	7,5	7	6,5	6	SIPD
2.3.	Rasio luas wilayah kekeringan	Belum tersedia data	Belum tersedia data	10	10	10	10	SIPD
2.4.	Rasio luas wilayah perkotaan	12,23	12,2	12	12	12	12	SIPD
2.5.	Luas wilayah budidaya	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	SIPD
<b>3.</b>	<b>Fasilitas bank dan non bank</b>							
3.1.	Jumlah bank dan cabang	23	23	23	23	23	23	SIPD
3.2.	Jumlah perusahaan asuransi dan cabang	7	7	7	7	7	7	SIPD
3.3.	Jumlah penginapan/ hotel	24	24	24	24	24	24	SIPD
<b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>								
1.	Angka kriminalitas	35,65	31,66	28,48	25,55	22,84	16,94	SIPD
2.	Angka kriminalitas tertangani	18,70	25	30	40	50	60	SIPD
3.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	21	21	21	21	21	21	SIPD
4.	Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha	0	1	1	1	1	5	SIPD
<b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>								
1.	Rasio ketergantungan	43,54	40	37	32	28	25	SIPD





## **BAB X**

### **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rencana yang disusun dalam mencapai tujuan pembangunan selama lima tahun yaitu Tahun 2013 – 2017. Dalam penerapan dokumen RPJMD ini diperlukan persamaan pemahaman agar apa yang diamanatkan dapat terlaksana dengan baik, terarah, terukur dan akuntabel. Dokumen RPJMD menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama lima tahun menuju Kota Singkawang yang **“AMAN, NYAMAN, MAJU, SEJAHTERA BERBASIS JASA, PERDAGANGAN DAN AGROINDUSTRI”**

Seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara muatan yang terdapat dalam RPJMD beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Sesuai dengan perannya, seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun yang tertuang dalam dokumen RPJMD ini.

#### **10.1. Pedoman Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2018, dan selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Singkawang Tahun 2018.

Mengingat keterbatasan waktu bagi Walikota Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2017 yang akan datang, maka dalam pelaksanaan tahap ketiga RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005 – 2025, tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2018 - 2022 dan RKPD Tahun 2018, maka Pemerintah Kota Singkawang akan melaksanakan penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2018 sesuai dengan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan terselesaikan sampai dengan Tahun 2017 serta masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2018.

## **10.2. Kaidah Pelaksanaan**

RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017 ini dijadikan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan RENSTRA SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dengan mewujudkan program-program melalui penajaman pada kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam rangka memperjelas pelaksanaan RPJMD Kota Singkawang, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013 – 2017 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Walikota dan Wakil Walikota;
2. Walikota dan Wakil Walikota dibantu oleh BAPPEDA dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan kota;
3. Seluruh pemangku kepentingan mempunyai beban dan tanggungjawab dan diharapkan berperan serta dengan Pemerintah Daerah Kota Singkawang dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun;
4. Penjabaran RPJMD yang diawali dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD oleh Kepala Bappeda, yang diikuti secara bersamaan penyusunan Renja SKPD yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD;
5. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013 – 2017 untuk setiap tahunnya harus dilaksanakan melalui penyusunan RKPD Kota Singkawang;
6. RKPD Kota Singkawang disusun melalui mekanisme Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kota;
7. Proses partisipatif pada pelaksanaan Forum Konsultasi Publik untuk mendapatkan masukan terhadap Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kelurahan, kecamatan, forum SKPD, forum gabungan SKPD, Musrenbangkota serta penjangkaran aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) oleh DPRD sesuai pembagian daerah pemilihan;
8. RKPD Kota Singkawang hasil Musrenbang dijadikan acuan bagi SKPD dalam menyusun RENJA SKPD dengan pendekatan berbasis kinerja dan mencerminkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan SKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKA SKPD;

9. Setiap SKPD dan pemerintah kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013 -2017;
10. Bagi SKPD yang baru terbentuk setelah dilakukan pembahasan dan ditetapkannya Peraturan Daerah RPJMD ini, akan dilakukan penyesuaian dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;
11. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kota Singkawang merupakan dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan KUA PPAS;
12. Dalam hubungannya dengan penyelenggaraan akuntabilitas dan transparansi publik, RKPD dan RAPBD Kota Singkawang harus terukur, tepat sasaran dan mudah diakses;
13. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Singkawang dilaksanakan oleh masing-masing Kepala SKPD;
14. Kepala BAPPEDA Kota Singkawang menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya untuk kemudian dijadikan bahan evaluasi pencapaian perencanaan pembangunan;
15. Berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dalam RPJMD Kota Singkawang dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kota Singkawang untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya;

Untuk menjalankan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013 - 2017, maka dalam periode tahunan dilakukan tahapan sebagai berikut:

1. Rancangan Akhir RKPD disempurnakan setelah dilaksanakan Musrenbang Provinsi dengan mengacu pada hasil dari forum SKPD;
2. Dokumen RPJMD dan RKPD merupakan dokumen yang dijadikan bahan penyusunan RAPBD, terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD Kota Singkawang. Apabila terdapat program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, termasuk pendanaannya, maka akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Perubahan APBD;
3. Dokumen RPJMD merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD. Oleh karena itu, SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD, dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013 - 2017, perlu dilaksanakan evaluasi yang dimulai pada tahun ke 2 (dua) sampai tahun ke 5 (lima) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka menganalisa terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD ini. Untuk melihat konsistensi pelaksanaan perencanaan dalam dokumen RPJMD ini, sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, maka Bappeda Kota Singkawang, berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dimaksud.

## **BAB XI**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 – 2017 merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Singkawang, agar terpadu dan searah dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan pembangunan nasional selama lima tahun mendatang. RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013 – 2017 akan menjadi pendorong dalam membangun gerakan komitmen bersama untuk mewujudkan Kota Singkawang sebagaimana visi RPJPD Kota Singkawang yaitu Singkawang Maju, Sejahtera Berbasis Jasa, Perdagangan, dan Agroindustri.

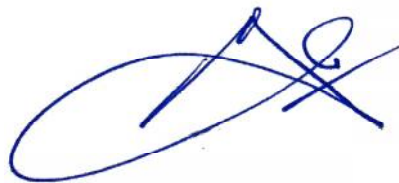
Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan yang utuh dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, komitmen dan dukungan DPRD Kota Singkawang, kerjasama dengan perguruan tinggi dan pihak swasta serta masyarakat Kota Singkawang.

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



YASMALIZAR, S.H.

Pembina

Nip. 19681016 199803 1 004